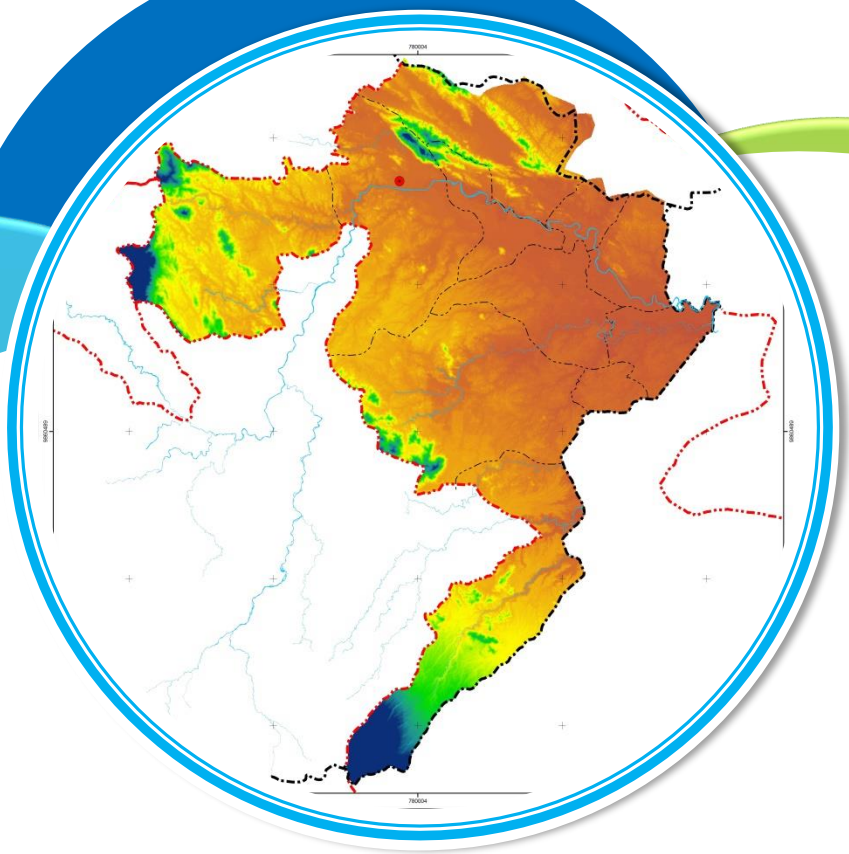
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA



RKPD 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

PULAU PUNJUNG 2022

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai pedoman :

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;

b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan

c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI : Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. Bab VII : Penutup;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Perangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berkenaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ARLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

DAFTAR ISI

Daftar Isi v

Daftar Tabel vii

Daftar Gambar xiv

BAB 1.. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 4
1.4. Maksud dan Tujuan 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 5

BAB 2.. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 8

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 8
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 8
2.1.2. Kondisi Demografi 31
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 34
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 48
2.1.5. Aspek Pelayanan Umum 48
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 113
2.2.1. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 113
2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 114
2.2.3. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2021 116
2.2.4. Evaluasi pelaksanaan SPM sampai tahun 2021 126
2.2.5. Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Per Urusan Tahun 2021 133
2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 137
2.3.1. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 137

BAB 3.. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 143

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 143
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Nasional Tahun 2023 143
3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 150
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 153
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 154
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 155
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 160
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 165

BAB 4.. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 172

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 173

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 173
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 177
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 181
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 183
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 183
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 188
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 197
4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 199
4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 199
4.2.6. Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 201
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 202
4.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 202
4.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 204
4.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 206
4.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 207
4.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 207
4.3.6. Unsur Pemerintahan Umum 207

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 208

5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 208

BAB 6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 209

6.1. Indikator Kinerja Utama 209
6.2. Indikator Kinerja Daerah 212

BAB 7. PENUTUP 231

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong 9
Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya 11
Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai 14
Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya 15
Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah 16
Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya 20
Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 24
Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan 25
Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan 25
Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan 26
Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya 27
Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan 29
Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya 30
Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2017-2021 31
Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 32
Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 33
Tabel 2-17 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 35
Tabel 2-18 Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2021 39
Tabel 2-19 Indeks SPBE Kabupateb/Kota di Sumatera Barat 45
Tabel 2-20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 47
Tabel 2-21 Persentase peningkatan zakat 47
Tabel 2-22 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif 47
Tabel 2-23 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 48
Tabel 2-24 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat 49
Tabel 2-25 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat 50
Tabel 2-26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi 51
Tabel 2-27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts 51

Tabel 2-28 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 52
Tabel 2-29 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 52
Tabel 2-30 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional 53
Tabel 2-31 Angka kematian bayi (AKB) 53
Tabel 2-32 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) 54
Tabel 2-33 Prevalensi Stunting 55
Tabel 2-34 Prevalensi Malnutrisi 55
Tabel 2-35 Persentase Rumah Tangga PHBS 55
Tabel 2-36 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 56
Tabel 2-37 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam 57
Tabel 2-38 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 57
Tabel 2-39 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular 58
Tabel 2-40 Visite Rate 59
Tabel 2-41 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama 60
Tabel 2-42 Persentase UPT RSUD Terakreditasi 60
Tabel 2-43 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 61
Tabel 2-44 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik 63
Tabel 2-45 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 64
Tabel 2-46 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik 65
Tabel 2-47 Cakupan permukiman layak huni 65
Tabel 2-48 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 66
Tabel 2-49 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah 67
Tabel 2-50 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani 67
Tabel 2-51 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU 68
Tabel 2-52 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 68
Tabel 2-53 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum 69
Tabel 2-54 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 69
Tabel 2-55 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran 70
Tabel 2-56 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan 70
Tabel 2-57 Persentase PPKS yang tertangani 71
Tabel 2-58 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 71

Tabel 2-59 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota 72
Tabel 2-60Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 72
Tabel 2-61 Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan 73
Tabel 2-62 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 73
Tabel 2-63 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan 74
Tabel 2-64 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah 74
Tabel 2-65 Tingkat kategori capaian APE 75
Tabel 2-66 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 75
Tabel 2-67 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani 75
Tabel 2-68 Rasio kekerasan dalam rumah tangga 76
Tabel 2-69 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah 76
Tabel 2-70 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari 76
Tabel 2-71 Skor Pola Pangan Harapan 77
Tabel 2-72 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat 78
Tabel 2-73 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah 78
Tabel 2-74 Indeks Kualitas Air 78
Tabel 2-75 Indeks Kualitas Udara 79
Tabel 2-76 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 80
Tabel 2-77 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi 80
Tabel 2-78 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis 81
Tabel 2-79 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali) 81
Tabel 2-80 Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota) 82
Tabel 2-81 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 82
Tabel 2-82 Persentase kepemilikan KTP-elektronik 82
Tabel 2-83 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 83
Tabel 2-84 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun 83
Tabel 2-85 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan 83
Tabel 2-86 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 83
Tabel 2-87 Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan 84

Tabel 2-88 Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan 84
Tabel 2-89 Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM 84
Tabel 2-90 Persentase APB nagari berbasis IDM 84
Tabel 2-91 Persentase nagari memiliki bumnag berkembang 85
Tabel 2-92 Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan 85
Tabel 2-93 Jumlah Bumnag Bersama 86
Tabel 2-94 Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga 86
Tabel 2-95 Angka kelahiran total 87
Tabel 2-96 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) 87
Tabel 2-97 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) 88
Tabel 2-98 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif 88
Tabel 2-99 persentase kelompok tribina yang aktif 88
Tabel 2-100 Jumlah penambahan trayek angkutan umum 88
Tabel 2-101 Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR 89
ATabel 2-102 kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) 89
Tabel 2-103 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi 90
Tabel 2-104 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik 90
Tabel 2-105 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 91
Tabel 2-106 Jumlah Koperasi Sehat 91
Tabel 2-107 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas 92
Tabel 2-108 Nilai realisasi Investasi 92
Tabel 2-109 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal 92
Tabel 2-110 Jumlah cabang olahraga yang aktif 93
Tabel 2-111 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi 93
Tabel 2-112 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional 93
Tabel 2-113 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 93
Tabel 2-114 Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi 94
Tabel 2-115 Jumlah organisasi pramuka yang aktif 94
Tabel 2-116 Jumlah pelatih bersertifikat 94
Tabel 2-117 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral 95

Tabel 2-118 Jumlah Nagari Statistik 95
Tabel 2-119 Jumlah Kecamatan Statistik 95
Tabel 2-120 Aplikasi yang dilakukan asesment 96
Tabel 2-121Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital 96
Tabel 2-122 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan 96
Tabel 2-123 Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan 97
Tabel 2-124 Persentase lembaga adat yang aktif 97
Tabel 2-125 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 97
Tabel 2-126 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 97
Tabel 2-127 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan 98
Tabel 2-128 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan 98
Tabel 2-129 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 98
Tabel 2-130 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku 99
Tabel 2-131 Produksi Perikanan 99
Tabel 2-132 Jumlah kunjungan wisatawan 99
Tabel 2-133Tingkat hunian akomodasi 100
Tabel 2-134 Jumlah pelaku ekonomi kreatif 100
Tabel 2-135 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina 100
Tabel 2-136 Produksi Sektor Pertanian 101
Tabel 2-137 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi 101
Tabel 2-138 Alat UTTP yang Beratanda tera sah 102
Tabel 2-139 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet 102
Tabel 2-140 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar 102
Tabel 2-141 Nilai LPPD 103
Tabel 2-142 Nilai SAKIP 104
Tabel 2-143 Nilai Reformasi Birokrasi 105
Tabel 2-144 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi 106
Tabel 2-145 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 106
Tabel 2-146 Rata-rata ketergantungan dana transfer 106
Tabel 2-147Persentase SILPA terhadap APBD 107
Tabel 2-148 Indeks Profesionalitas ASN 107
Tabel 2-149 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu 108
Tabel 2-150 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi 108
Tabel 2-151 Persentase kasus ASN yang tertangani 109

Tabel 2-152 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 109
Tabel 2-153 Indeks inovasi daerah 109
Tabel 2-154 Tingkat Kapabilitas APIP 110
Tabel 2-155 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah..... 110
Tabel 2-156 Persentase Pembinaan Partai Politik 111
Tabel 2-157 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan..... 111
Tabel 2-158 Persentase Pembinaan LSM 111
Tabel 2-159 Jumlah Konflik Sosial..... 111
Tabel 2-160 Jumlah Penyakit Masyarakat..... 112
Tabel 2-161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 114
Tabel 2-162 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2021 116
Tabel 2-163 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang kesehatan..... 127
Tabel 2-164 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang kesehatan..... 128
Tabel 2-165 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang..... 130
Tabel 2-166 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 130
Tabel 2-167 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban umum 131
Tabel 2-168 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Sub Bidang Kebakaran..... 131
Tabel 2-169 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Sub Bidang bencana 131
Tabel 2-170 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Bidang Sosial 132
Tabel 2-171 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Per Urusan Tahun 2021..... 133
Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023 145
Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023..... 153
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023 154
Tabel 3-4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Rp) 156
Tabel 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2024 163
Tabel 3-6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 –2024 164

Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 166
Tabel 3-8 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 167
Tabel 3-9 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah 170
Tabel 3-10 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2023 170
Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 178
Tabel 4-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023 180
Tabel 4-3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 182
Tabel 4-4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 198
Tabel 4-5 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023 199
Tabel 4-6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 200
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 210
Tabel 6-2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah Berdasarkan Urusan Tahun 2023 213
Tabel 6-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya 223
Tabel 6-4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya 224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 5
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya 9
Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya 10
Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya 10
Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya 11
Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya 12
Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya 13
Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya 19
Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya 21
Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya 23
Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 24
Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya 26
Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya 28
Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya 29
Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan 32
Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan 33
Gambar 2-16 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 34
Gambar 2-17 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 36
Gambar 2-18 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 37
Gambar 2-19 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 37
Gambar 2-20 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 38
Gambar 2-21Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional 40
Gambar 2-22 PDB/ PDRB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (rupiah) 41
Gambar 2-23 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (indeks) 42

Gambar 2-24 Tingkat Kemiskinan (persen) 42
Gambar 2-25 Gini rasio (indeks) 43
Gambar 2-26 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 44
Gambar 2-27 Rasio Net Ekspor terhadap PDB/PDRB (persen) 48
Gambar 2-28 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat 49
Gambar 2-29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat 50
Gambar 2-30Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 61
Gambar 3-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2023 144
Gambar 4-1 Trend Kasus Konfirmasi Covid-19 Kabupaten Dharmasraya per 27 mai 2021 201

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18 dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana pelaksanaan otonomi ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan satu dari dari tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren, Urusan ini dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan dua urusan lainnya yaitu urusan pemeintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintah umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan maksud dari Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, maka agar pembangunan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, tahapan tersebut diawali dengan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah dengan melibatkan stakeholder pembangunan, dan adanya pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah untuk menjamin ketercapaian target-target pembangunan daerah serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun. Diharapkan dengan berjalannya pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, maka akan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya daya saing daerah secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun arah kebijakan pembangunan serta target pembangunan sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan, diantaranya perencanaan jangka panjang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, kemudian Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana saat ini merupakan periode kepemimpinan kedua dari Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE sebagai Bupati Dharmasraya, sedangkan untuk rencana pembangunan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun pada setiap tahunnya. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati untuk periode kepeminpinan tahun 2021-2026.

Proses penyusunan RKPD menggunakan pendekatan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, pendekatan ini didasarkan pada data yang akurat, tinjauan lapangan serta analisa yang komprehensif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Terakhir adalah pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang

diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. pendekatan ini adalah dilaksanakanya Musrenbang RKPD baik dari Musrenbang nagari yang diusulkan melalui Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP) nagari yang dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan, serta Musrenbang RKPD di Kabupaten, Musrenbang Provinsi maupun Musrenbang Nasional.

Sedangkan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tahapan tersebut terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu :

1. Tahapan persiapan Penyusunan RKPD (minggu I Januari)

   Persiapan penyusunan RKPD diawali pada minggu I bulan Februari dengan ditetapkannya Tim Penyusun RKPD Tahun 2023 melalui keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/18/KPTS-BUP/2022 tentang pembentukan tim penyusun RKPD tahun 2023, dan dilanjutkan dengan orientasi dan rapat pembahasan, serta pengumpulan data indikator kinerja sesuai dengan RPJMD maupun Renstra PD Tahun 2021-2026

2. Tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD (Minggu II Januari s.d. Minggu III Maret), tahapan ini terdiri dari :

   - Tahapan ini diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD, dan
   - Konsultasi publik Rancangan awal RKPD tahun 2023 tanggal 03 februari 2022
   - Musrenbang RKPD di kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 22 Februari 2022
   - Forum Perangkat daerah yang telah dilaksanakan tanggal 1 s.d. 18 Maret 2022

3. Tahapan penyusunan Rancangan RKPD (Minggu III s.d IV Maret)

   Tahapan ini dilakukan setelah OPD menyampaikan Rancangan Renja yang telah diforumkan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Bapppeda terhadap muatan Rancangan renja yang disampaikan, selain mempertimbangkan prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinski Sumatera Barat

4. Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten tanggal 23 Maret 2022

   Musrenbang RKPD di Kabuaten dihadiri oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, selain dihadiri oleh perangkat daerah, juga dihadiri oleh instansi vertikal, utusan Musrenbang kecamatan

5. Tahapan perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten serta penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan antara Bapppeda Kabupaten Dharmasraya dengan Tim Fasilitasi RKPD Provinsi Sumatera Barat. Adapun fokus utama fasilitasi ini adalah untuk menyepakati target pembangunan, serta sinkronisasi arah kebiakan pusat, provinsi Sumatera Barat dengan target pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya

6. Tahapan penetapan RKPD (7 Juli 2022)

   Sesuai peraturan perundang-undangan, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2022 atau 7 Hari setelah ditetapkannya RKPD Provinsi, RKPD Kabupaten Dharmasraya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2023;

18. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka pe Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

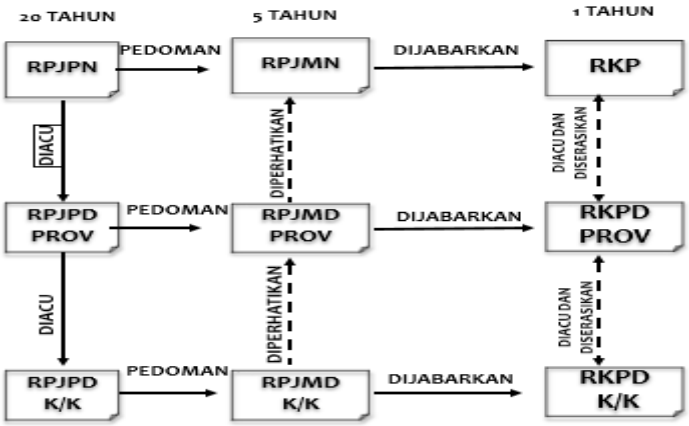
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanan tahunan dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- Mempedomani dokumen : Rancangan perda RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan lima tahun keempat (2020-2025)
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan penjaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, serta mengacu dan diserasikan pada RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, serta dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Kabupaten Dharmasray Tahun 2021-2026, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2021, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2022 sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Sub bab ini memuat beberapa bahasan yaitu:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek ini menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terdiri dari fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

memuat permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2020 dan 2021 dan proyeksi tahun 2022 dan tahun 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 201 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kondisi umum kondisi daerah disajikan menggunakan gambar peta, grafik dan tabel untuk data 5 (lima) tahun terakhir, yaitu data tahun 2017 hingga tahun 2021, serta didukung penjelasan dan narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kondisi daerah serta beberapa indikator makro disandingkan capaian indikator nasional dan Proviinsi Sumatera Barat, sebagai perbandingan capaian pembangunan dengan daerah yang lebih luas.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Pulau Punjung dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00º48’25,367”- 1º41’40,269” LS dan 101º8’32,52”-101º53’30,166” BT merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 301.645 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

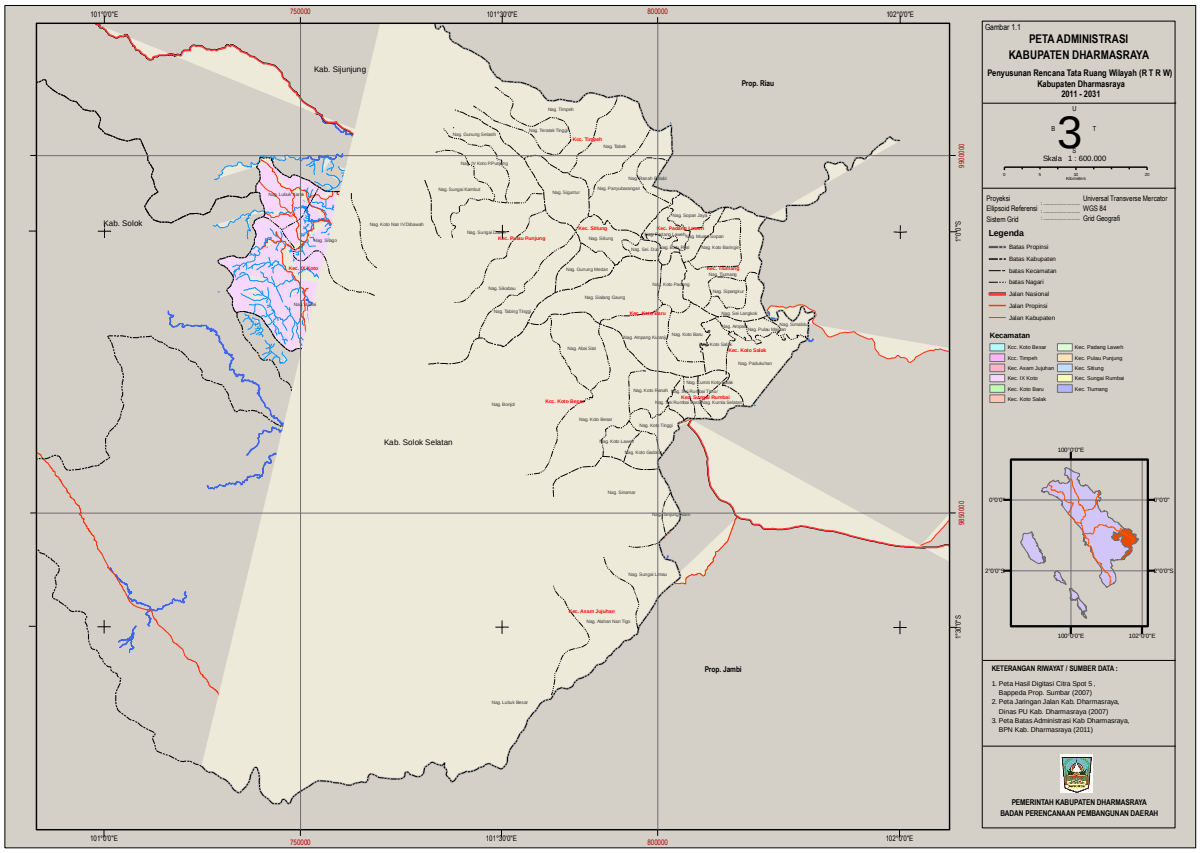
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana sebagaimana terlihat pada Gambar 2-1, Gambar 2-2 dan Gambar 2-3.

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari	Jorong
1	Sungai Rumbai	5.109	4	43
2	Koto Besar	57.310	7	43
3	Asam Jujuhan	46.372	5	22
4	Koto Baru	21.747	4	73
5	Koto Salak	12.440	5	44
6	Tiumang	13.543	4	30
7	Padang Laweh	6.100	4	17
8	Sitiung	13.018	4	52
9	Timpeh	32.730	5	40
10	Pulau Punjung	44.750	6	62
11	Sembilan Koto	48.522	4	35
Kab. Dharmasraya		**301.645**	**52**	**461**

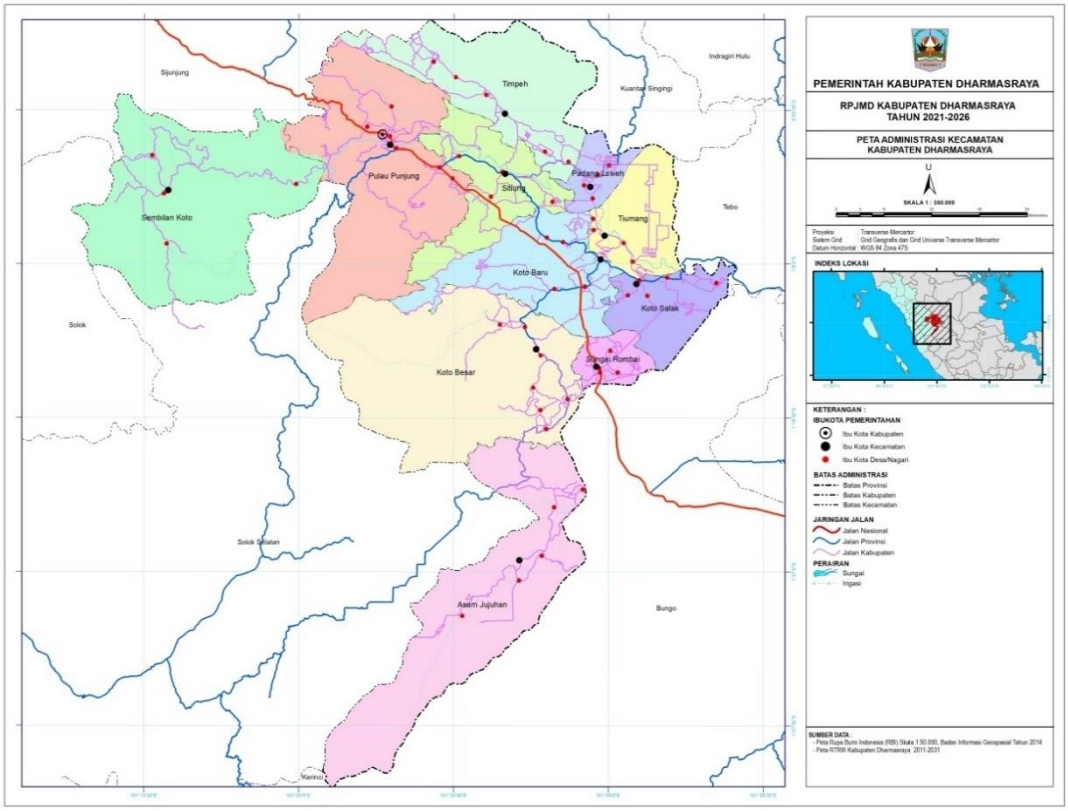
Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



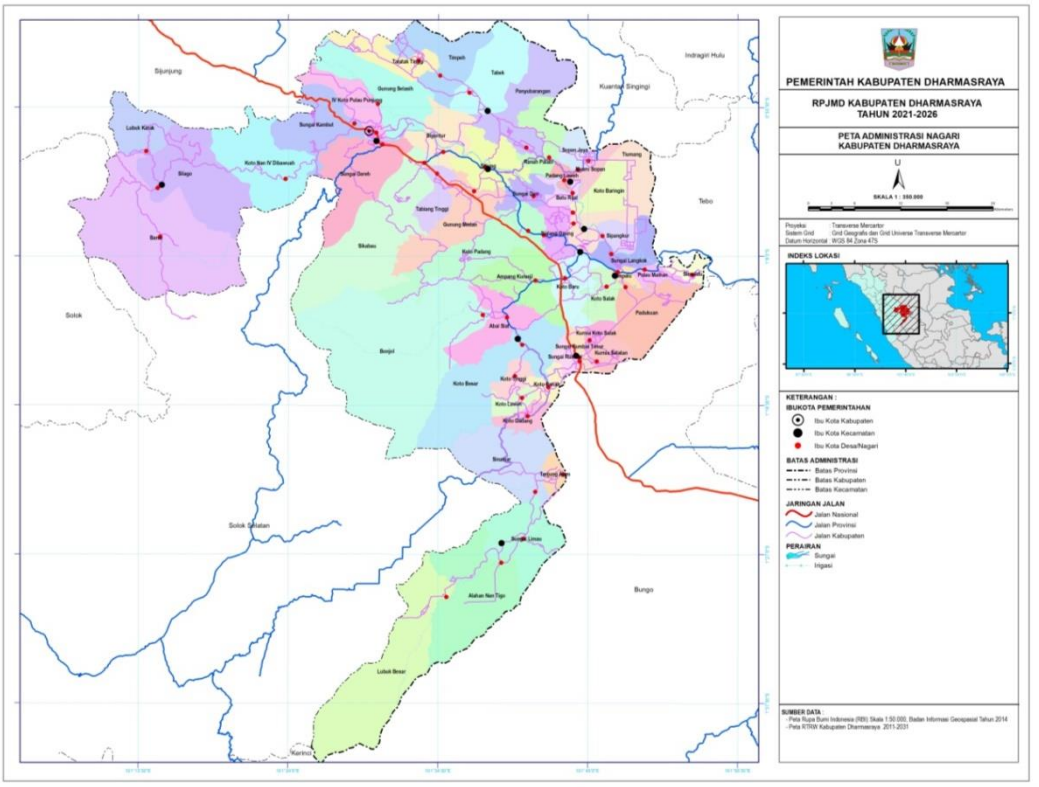
Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.2. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

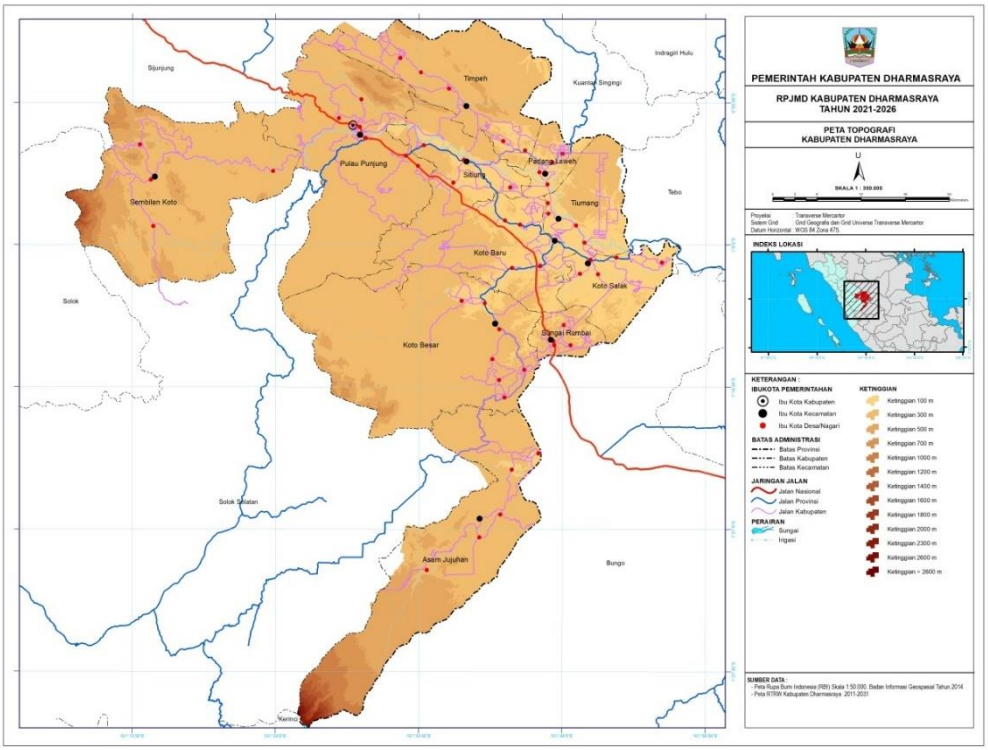
Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan seperti disajikan pada Tabel 2.2, Gambar 2.4 dan Gambar 2.5.

Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	60.383	20
Agak Landai	3-8	150.994	50
Landai	8-15	39.434	13
Agak Curam	15-25	35.189	11,6
Curam	25-40	14.391	4,7
Sangat Curam	40-60	1.251	0,7
Jumlah	**Luas**	**301.645**	**100**

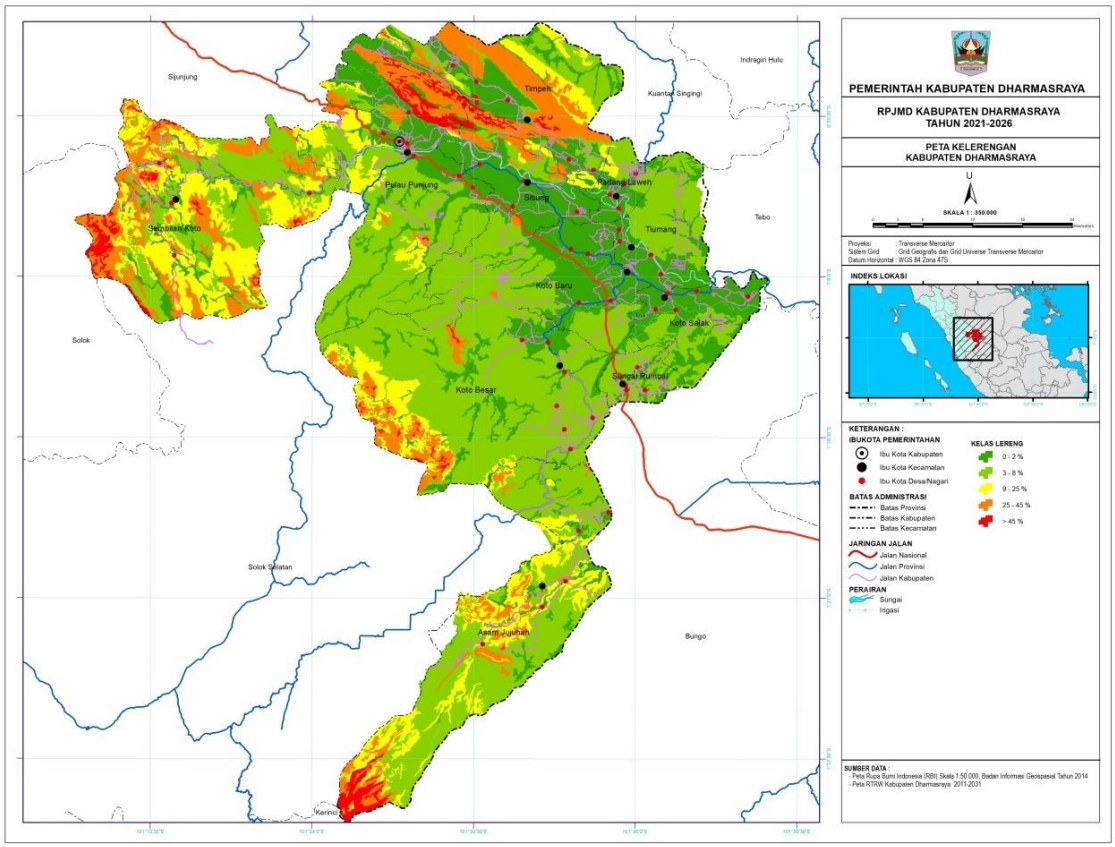
Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.3. Geomorfologi

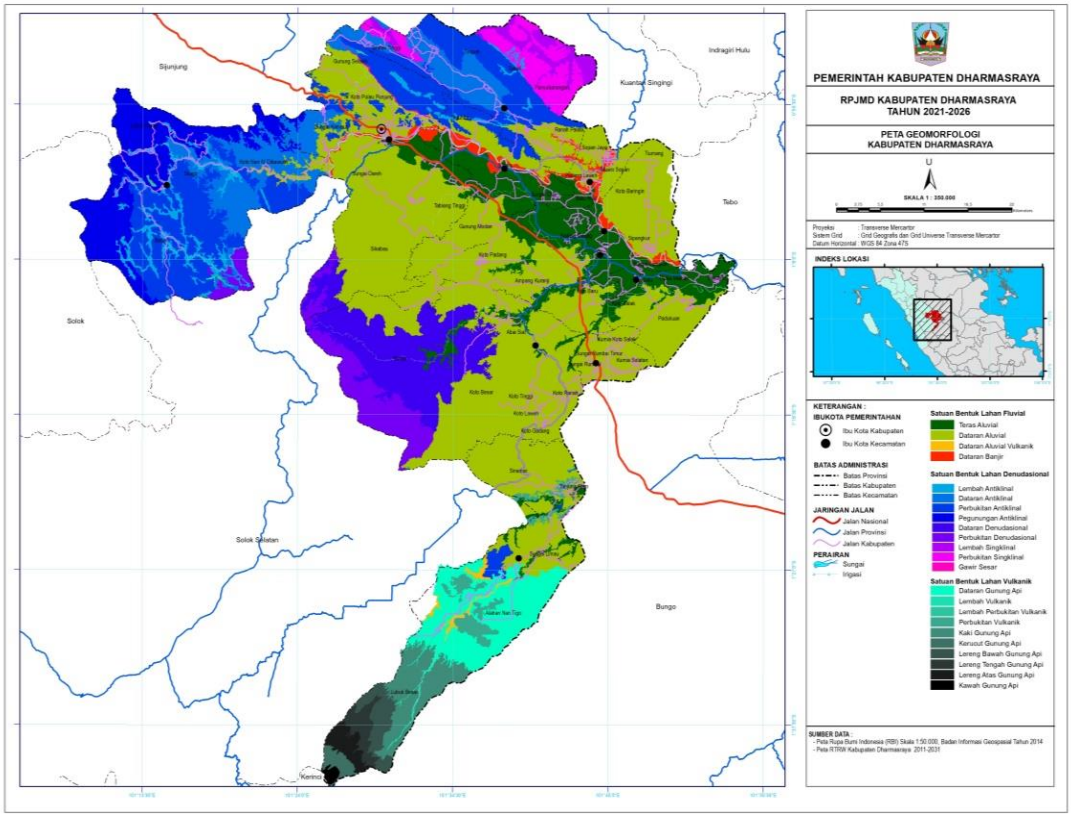
Terdapat 5 satuan morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Satuan aluvial
    - Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Satuan dataran
    - Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
    - Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Satuan perbukitan
    - Perbukitan terpisah;
    - Perbukitan bergelombang;
    - Perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
    - Perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
    - Perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
    - Perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
    - Perbukitan karst paralel tertoreh

4. Satuan Pergunungan
    - Pergunungan sangat tertoreh
5. Satuan vulkan
    - Lereng atas volkan dengan topografi sangat curam
    - Lereng tengah volkan dengan topografi curam
    - Lereng bawah volkan dengan topografi agak curam
    - Dataran volkan bergelombang dengan topografi landai

Untuk lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	IX Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	IX Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	IX Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	IX Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	IX Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	IX Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	IX Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	IX Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	IX Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	IX Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	IX Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	IX Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udang	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2.1.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	22.993	7,60
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	10.574	3,49
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	8.313	2,75
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	135.847	44,89
5	Latosol	Haplorthoxs	Feralsols	18.134	5,99
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.423	0,80
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	98.048	32,40
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	6.267	2,07
Total				**302.599**	**100,00**

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983) dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22.993	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2.671	0,88
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah Volkan Tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi.	42	4.527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi.	41	3.375	1,12
5	Gleisol	3-8	Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8.313	2,75
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	10	20.063	6,63
7	Kambisol	3-8	Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10.087	3,33
8	Kambisol	3-8	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	11	4.227	1,40
9	Kambisol	3-8	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	35	1.528	0,50
10	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	17	8.009	2,65
11	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10.069	3,33
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18,19	10.755	3,55
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3.668	1,21
14	Kambisol	15-25	Dataran Volkan (Bergelombang)	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit.	44	35.922	11,87
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5.791	1,91
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2.871	0,95
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1.248	0,41
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4.522	1,49
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	30	612	0,20
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4.034	1,33
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate)dan granit.	15	2.170	0,72
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4.661	1,54
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37,38	5.610	1,85
24	Latosol	3-8	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	13	13.778	4,55

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	14	4.355	1,44
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2.422	0,80
27	Nitosol	3-8	Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	12	7.759	2,56
28	Nitosol	8-15	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	23.360	7,72
29	Nitosol	8-15	Dataran Bergelombang	Tufa Masam	7,8	13.503	4,46
30	Nitosol	8-15	Dataran Perbukitan (*Hillock*)	Batuan Granit	9	2.687	0,89
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16.492	5,45
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	5.490	1,81
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10.974	3,63
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	4.879	1,61
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2.843	0,94
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6.360	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1.238	0,41
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	40	2.462	0,81
39	Padsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45,46	2.384	0,79
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf (kwarsit, slate)	34	3.883	1,28
Luas Lahan						**302.599**	**100,00**

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984.

Dari data tabel di atas terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus.

Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organic rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organic. Pemberian bahan organik akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara simultan, pengaruhnya adalah memperbaiki aerase

tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber unsur hara mikro dan sumber energi bagi mikro organisme tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman pangan (tanaman semusim) terutama pada lahan dengan slope yang datar sampai bergelombang dengan tingkat kemiringan 0-15% seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau. Kecuali padi sawah semua tanaman pangan tersebut memerlukan pemupukan yang intensif untuk mengimbangi rendahnya kandungan hara makro alami pada tanah tersebut, pengapuran untuk meningkatkan pH tanah, pemberian bahan organic untuk meningkatkan Kapasitas Tukar Kation dan membantu menetralkan pH tanah serta sebagai sumber hara mikro dan memperbaiki aerasi dan drainase tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dataran rendah, kacang panjang, oyong, pare, mentimun, pisang, kangkung darat, bayam, semangka, dll. Agar tanaman memberikan produksi optimal perlu dilakukan pemupukan NPK dan pupuk kandang/organic. Untuk tanaman buah-buahan terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% cukup cocok untuk pengembangan tanaman rambutan, duku, durian, jeruk dan salak.

Jenis tanah lainnya dengan luasan yang cukup signifikan ditemui adalah dari jenis tanah Aluvial (22.993 Ha/7,60%) dan Andosol (10.574 Ha/3,49%) Tanah Aluvial dan Andosol ini merupakan tanah yang belum berkembang dan baru berkembang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar aliran sungai, river flood plain (daerah dataran banjir), rawa-rawa, lembah-lembah,maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini merupakan tanah yang belum berkembang lebih lanjut, belum terbentuk horizon, dan umumnya bertekstur lempung berpasir dengan struktur lepas (remah) sehingga mudah diolah.

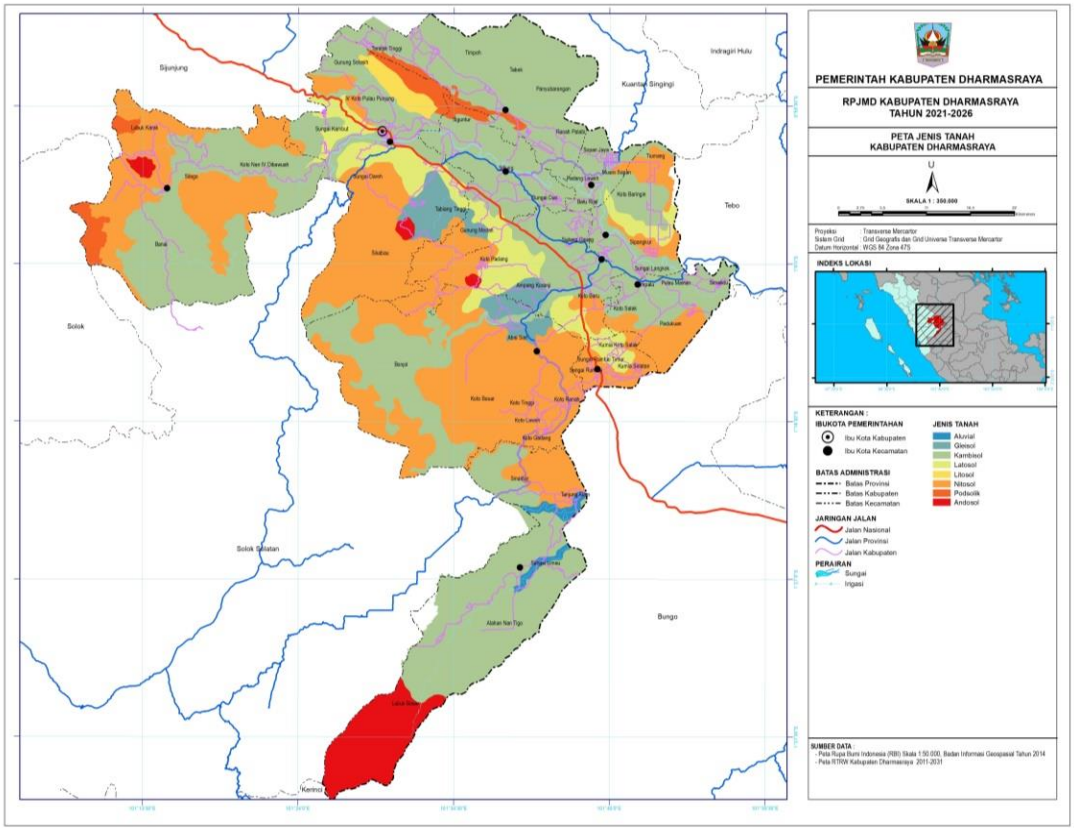
Di Kabupaten Dharmasraya tanah ini relatif cukup subur dengan kandungan bahan organic yang cukup tinggi (3-5%), Kapasitas Tukar Kation (KTK) cukup tinggi dan pH yang netral. Kandungan hara sedang hingga tinggi tergantung bahan induk, cukup baik dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) tanaman semusim dan tahunan. Jenis tanah ini tersebar pada dataran banjir disepanjang aliran Batang Hari dan daerah cekungan akibat akumulasi endapan akibat erosi dengan luasan 22.993 Ha (7,60%).

Tanah jenis ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi sawah, padi lading, palawija, hortikultura dan dapat diusahakan secara intensif.

Sedangkan tanah Andosol adalah salah satu jenis tanah berwarna hitam terutama pada horizon A yang berwarna hitam karena tingginya kandungan C-Organik pada lapisan humus, dengan struktur remah dan gembur sehingga mudah diolah. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang bahan induknya berasal dari gunung berapi berupa tufa vulkanis, batuan apung dan andesit yang mengalami pelapukan. Tanah andosol memiliki sifat memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan tanah andosol menjadi tanah yang subur dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran.

Tanah jenis Gleisol dan Litosol merupakan tanah yang kurang produktif karena berbagai keterbatasan sepert solum yang dangkal dengan lereng yang curam pada jenis tanah Litosol dan adanya genangan (drainase yang jelek) pada tanah jenis tanah Gleisol. Untuk tanah Litosol (2.422 Ha/0,80%) direkomendasikan untuk jadi padang pengembalaan dengan ditanami rumput, sekaligus bisa mengurangi erosi karena lereng yang curam. Sedangkan untuk tanah jenis Gleisol (8.313 Ha/2,75%) yang umumnya terdapat pada daerah cekungan dengan factor penghambat drainase yang jelek dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan air tawar.

Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.7. Geologi

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Endapan Undak
3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan
4. Lava
5. Formasi Kasai
6. Formasi Rantaukil
7. Formasi Telisa, Anggota bawah
8. Formasi Gumai
9. Formasi Talang Akar
10. Formasi Sinamar
11. Granit
12. Porfir Kuarsa
13. Granodiorit
14. Formasi Barisan, Anggota batugamping
15. Formasi Barisan
16. Formasi Pelepat
17. Diabas, Basal
18. Formasi Silungkang
19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah
20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih
21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping

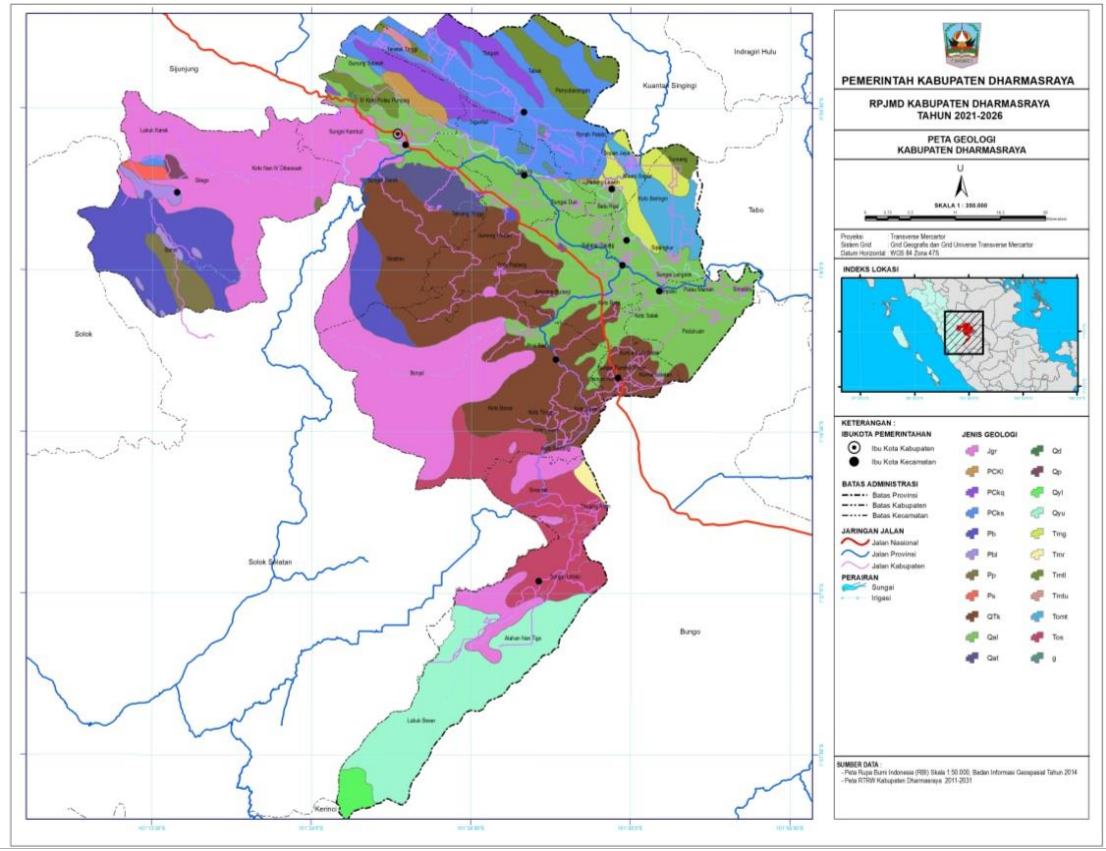
Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.6.

Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

No	Simbol	Umur	Formasi	Litologi
1	Qal	Holosen	Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil
2	Qat	Holosen	Endapan Undak	Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai
3	Qyu / Qvkb	Kuarter	Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan	Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan baslt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh
4	Qvl	Kuarter	Lava	Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh
5	Qtk	Plio-Plistosen	Formasi Kasai	Tuf batuapung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa diketemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m.
6	Tmr	Miosen	Formasi Rantaukil	Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugampung.
7	Tmtl	Miosen	Formasi Telisa, Anggota bawah	Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit
8	Tmg	Miosen	Formasi Gumai	Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, tenitama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m.
9	Tomt	Oligo-Miosen	Formasi Talang Akar	Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glokonitan; tebal maksimum 1.500 m.
10	Tos	Oligosen	Formasi Sinamar	Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral.
11	Jgr	Yura Awal	Granit	Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda.
12	g	Trias	Granit	Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umurnya 112;24 juta tahun.
13	qp	Trias	Porfir Kuarsa	Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik.
14	gd	Trias	Granodiorit	Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligloklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan.
15	Pbl	Perem	Formasi Barisan, Anggota batugamping	Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal.
16	Pb	Perem	Formasi Barisan	Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta.
17	Pp	Perem	Formasi Pelepat	Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitic; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan.
18	d	Permo-Karbon	Diabas, Basal	Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit.
19	Ps	Permo-Karbon	Formasi Silungkang	Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasiran, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt
20	PCkq	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Bawah	Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkersikkan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat.
21	PCka	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih	Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan, sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi.
22	PCkl	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Batugamping	Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisispan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkersitkan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut

Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.8. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir *(Aquifers in which flow is intergranular)*

- Akifer produktif dengan penyebaran luas *(extensive, productive aquifers)*

  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas *(extansive, moderately productive aquifers)*

  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang *(locally,moderately producive aquifers)*

  Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (aquifers in which flow is both through fissures and interstices)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas *(extensive, productive aquifers)*

  Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.

- Akifer produtifitas sedang, dengan sebaran luas *(extensive, moderately productive)*

  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktifitas sedang *(locally, moderately productive aquifers)*

  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels)

- Akiter produktif inggi sampai sedang *(highly to moderately productive aquifers)*

  Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater)

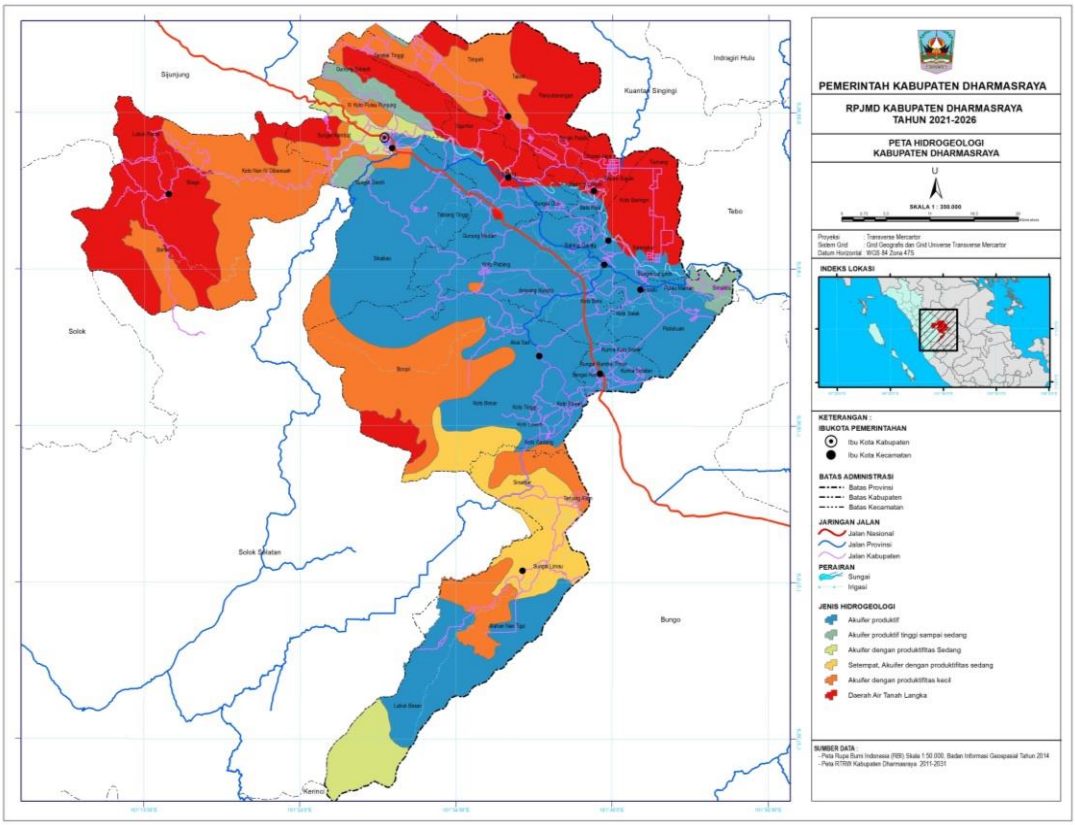
- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat *(poorly productive aquifers of local importance)*

  Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka *(regions without axploitable groundwater)*

  Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.
  Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021

2.1.1.9. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 maka diperoleh hasil bahwa perubahan luas daerah dari 302.599 Ha menjadi 301.645 ha sebagai konsekuensi penataan batas daerah sebagaimana permendagri yang dikeluarkan pasca penyusuna RTRW, dimana tutupan lahan yang ada seperti berikut ini.

A. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha.

Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%).

B. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah).

C. Permukiman

Luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%).

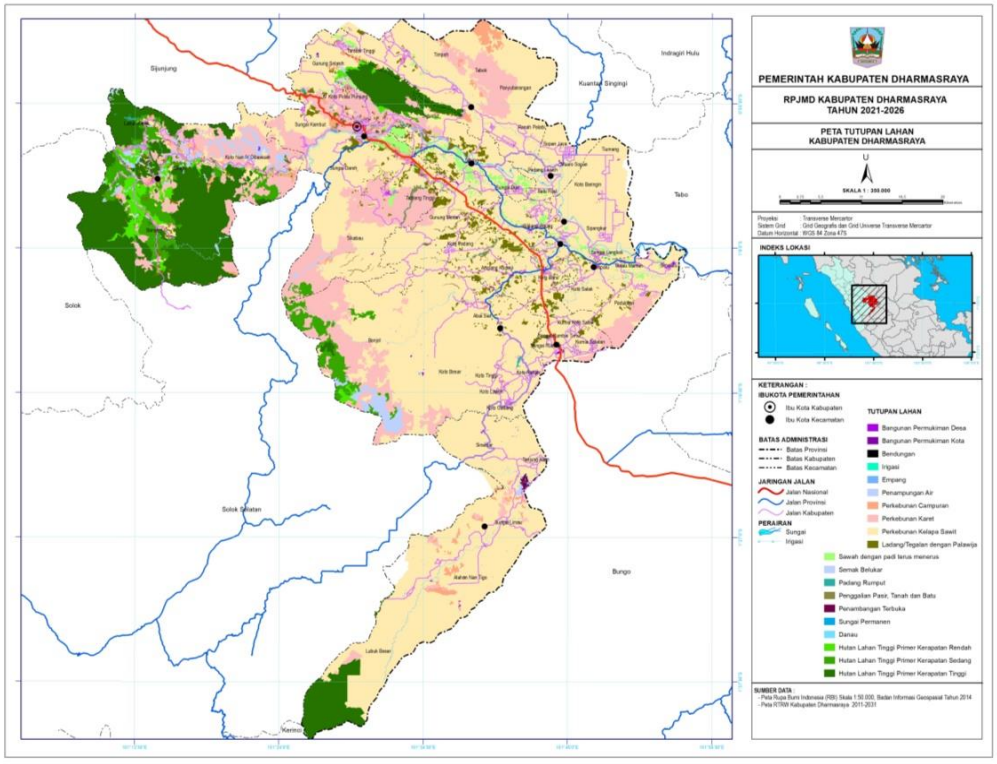
Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.10.

Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Permukiman Desa	1.845	0,61
2	Bangunan Permukiman Kota	622	0,21
3	Danau	36	0,01
4	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Rendah	2.061	0,68
5	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	6.643	2,19
6	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	44.876	14,78
7	Irigasi	148	0,05
8	Ladang/Tegalan dengan Palawija	11.628	3,83
9	Padang Rumput	357	0,12
10	Penambangan Terbuka	137	0,05
11	Penampungan Air	2,3	0,00
12	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	816	0,27
13	Perkebunan Campuran	6.013	1,98
14	Perkebunan Karet	29.946	9,86
15	Perkebunan Kelapa Sawit	188.951	62,23
16	Sawah dengan padi terus menerus	4.296	1,41
17	Semak Belukar	2.996	0,99
18	Sungai Permanen	2.260	0,74
Jumlah		**301.645**	**100,00**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021

2.1.1.10. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

1. Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.767 Ha (47,66%)
2. Kawasan hutan seluas 90.212 Ha (29,9%) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013.
3. Perkebunan besar seluas 49.219 Ha (16,32%)
4. Kawasan pertambangan berdasarkan IUP seluas 3.573.62 Ha dimana di Kab. Dharmasraya terdapat 12 IUP (11 IUP OP dan 1 IUP Eksplorasi).
5. Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 157.878 Ha (52,34%).

Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan hutan	90.212	29,91%
- Hutan Lindung (HL)	11.406	3,78%
- Hutan Produksi (HP)	27.237	9,03%
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	17.901	5,93%
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.296	9,38%
- Kaw. Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA)	5.372	1,78%
Perkebunan Besar	49.219	16,32%
Kawasan Cadangan Pertanian	903	0,30%
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	3.573.62	1,18%
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan	**143.767**	**47,66%**
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	**157.878**	**52,34%**
Total Luas Kabupaten	**301.645**	**100,00%**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

No	Rincian	Luas (Ha)
1	WPR	1,420.00
2	WPN	6,698.00
3	WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	198,300.00
4	WUP Mineral Logam	44,520.00
5	WUP Batubara	44,950.00
6	WUP Radioaktiv	49.60
Total Luas Wilayah Pertambangan		295,937.60
Luas Wilayah Administrasi		301,645.00

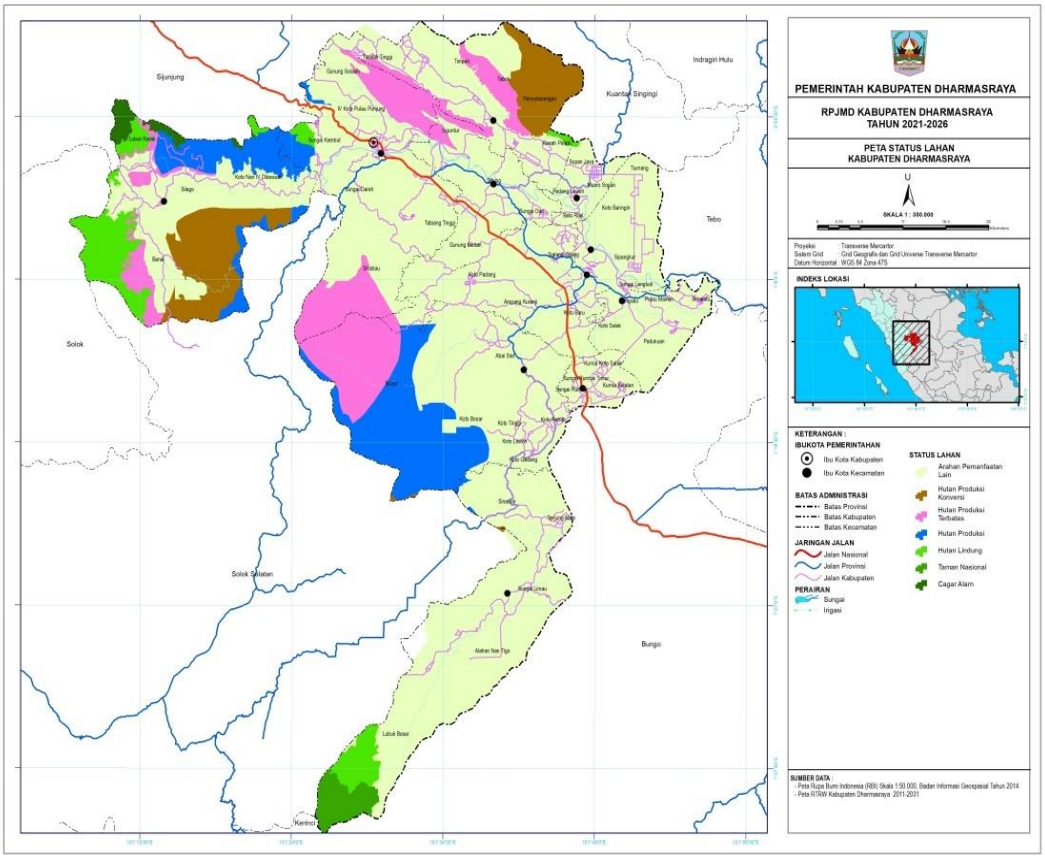
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (Kepmen ESDM No. 3669K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera)

Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

Kategori	Luas (Ha)	Proporsi dari luas kabupaten (%)
IUP Pertambangan	**3.573.62**	**1,18%**
IUP Operasi Produksi Pertambangan	3.530,34	1,17
IUP Eksplorasi pertambangan	43,28	0,01

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021

2.1.1.11. Kerawanan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang terindentifikasikan di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

A. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsoran gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

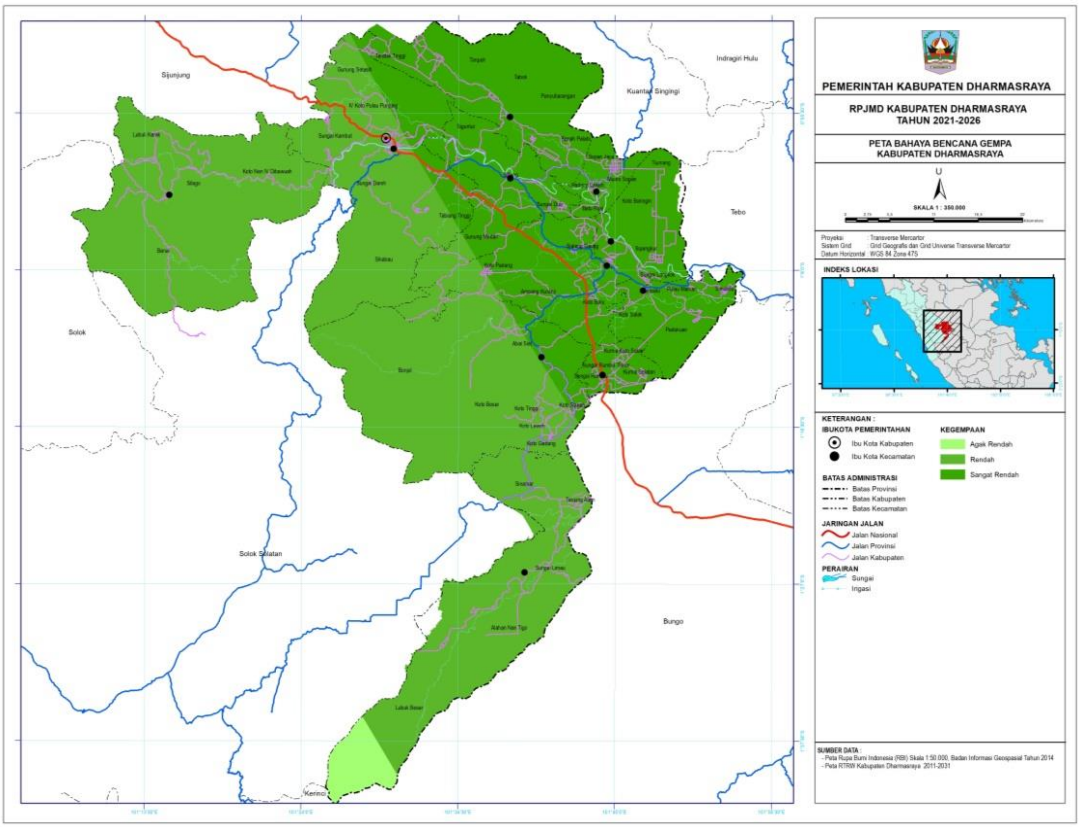
Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhan ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Alivium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulknik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021

Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya



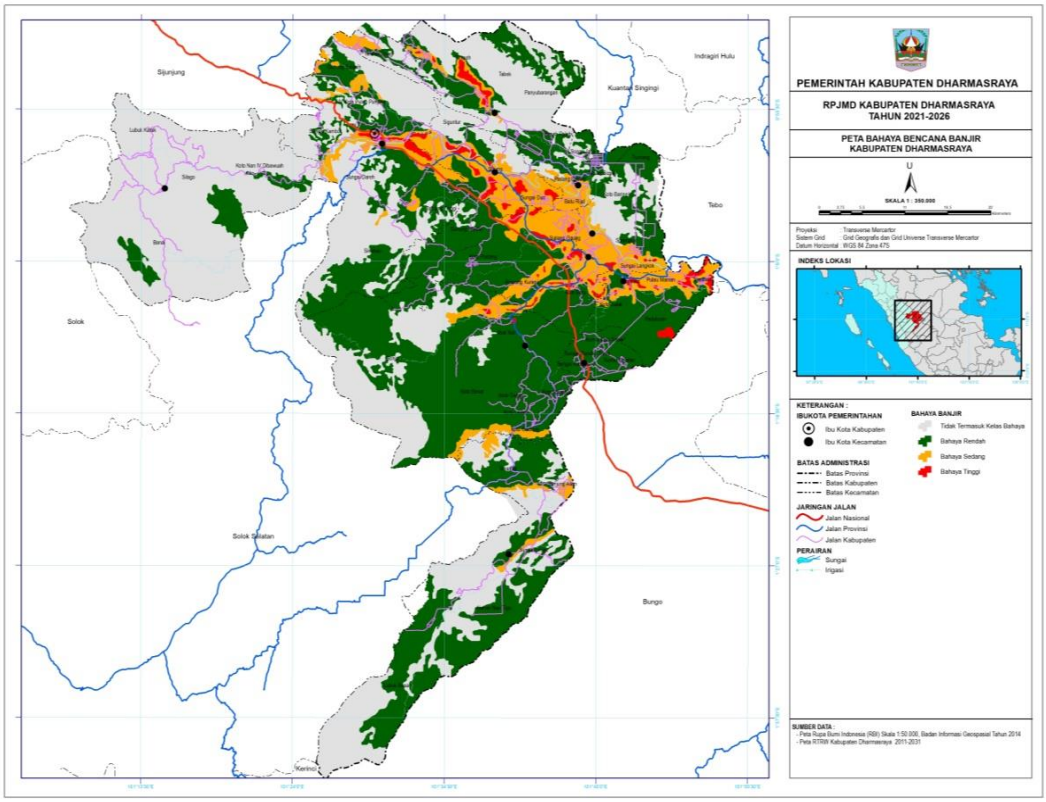
Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021

B. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dhamasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021

C. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Rawan	-	-
2	Kerawanan Rendah	73.143	24,17
3	Kerawanan Sedang	182.638	60,36
4	Kerawanan TInggi	96.818	15,47
	Luas Lahan	**301.645**	**100,00**

Sumber : Hasil analisis RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

A. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu siginifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	**FISIKA**																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	**421**	8	520	19	**305**	9	20	12	16	51	25
2	**KIMIA ORGANIK**																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	**2,4**	2,0	1,6	2,0	**3,2**	**3,5**	**2,8**	**3,4**	1,56	1,92	**2,44**	**2,86**	**3,1**	**4,5**	**2,8**
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	**7,2**	**7,3**	**6,9**	**7,1**	**7,1**	**6,1**	**6,7**	**7,2**	4,0	4,7	5,9	5,3	**6,8**	**7,0**	**6,3**
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	**2,152**	**1,574**	**3,617**	**11,92**	**0,882**	**12,14**	**0,4**					**1,229**	**4,869**	**1,551**
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	**0,00138**	**0,00166**	**0,00299**	TTD	0,00069	0,00054	**0,00172**	**0,00172**	**0,00163**	**0,02099**	**0,01392**	**0,00205**	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	**5,440**	**5,821**	**0,377**	**0,299**	**0,297**	**0,114**	**0,334**	**0,135**					**3,947**	**0,648**	**0,074**
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I

1 = Sungai Batang Momongan Hulu
2 = Sungai Batang Mimpi
3 = Sungai Batang Siat Abai
4 = Sungai Betung
5 = Sungai Koto Balai & S. Batih
6 = Sungai Pangian Hulu
7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo
8 = Sungai Kuranji&Btng Siat
9 = Sungai Batang Siat Hilir
10 = Sungai Batang Timpeh
11 = Sungai Muaro batang Momongan
12 = Sungai Muaro Pangian
13 = Sungai Batanghari (Hulu)
14 = Sungai Batanghari (Tengah)
15 = Sungai Batanghari (Hilir)

2.1.2. Kondisi Demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha. Atau sekitar 76 jiwa/km. Untuk lebih jelasnya jumlah, distribusi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sungai Rumbai	20.352	20.022	20.487	21.650	22.591
2	Koto Besar	23.568	24.254	24.404	26.373	27.387
3	Asam Jujuhan	6.750	7.092	9.285	7.787	8.295
4	Koto Baru	28.424	28.637	29.331	30.269	32.208
5	Koto Salak	18.543	16.669	16.747	17.217	17.729
6	Tiumang	10.546	10.597	11.217	12.813	13.193
7	Padang Laweh	7.893	8.124	8.207	6.003	6.335
8	Sitiung	25.527	26.038	26.511	27.107	28.139
9	Timpeh	14.726	14.532	15.359	16.293	17.252
10	Pulau Punjung	35.674	39.909	39.167	41.953	43.993
11	Sembilan Koto	14.282	12.807	13.577	8.737	9.143
	Jumlah	**206.285**	**208.681**	**214.292**	**216.202**	**226.265**
	Pertumbuhan	**0,00**	**1,16**	**2,69**	**0,89**	**4,65**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanayak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

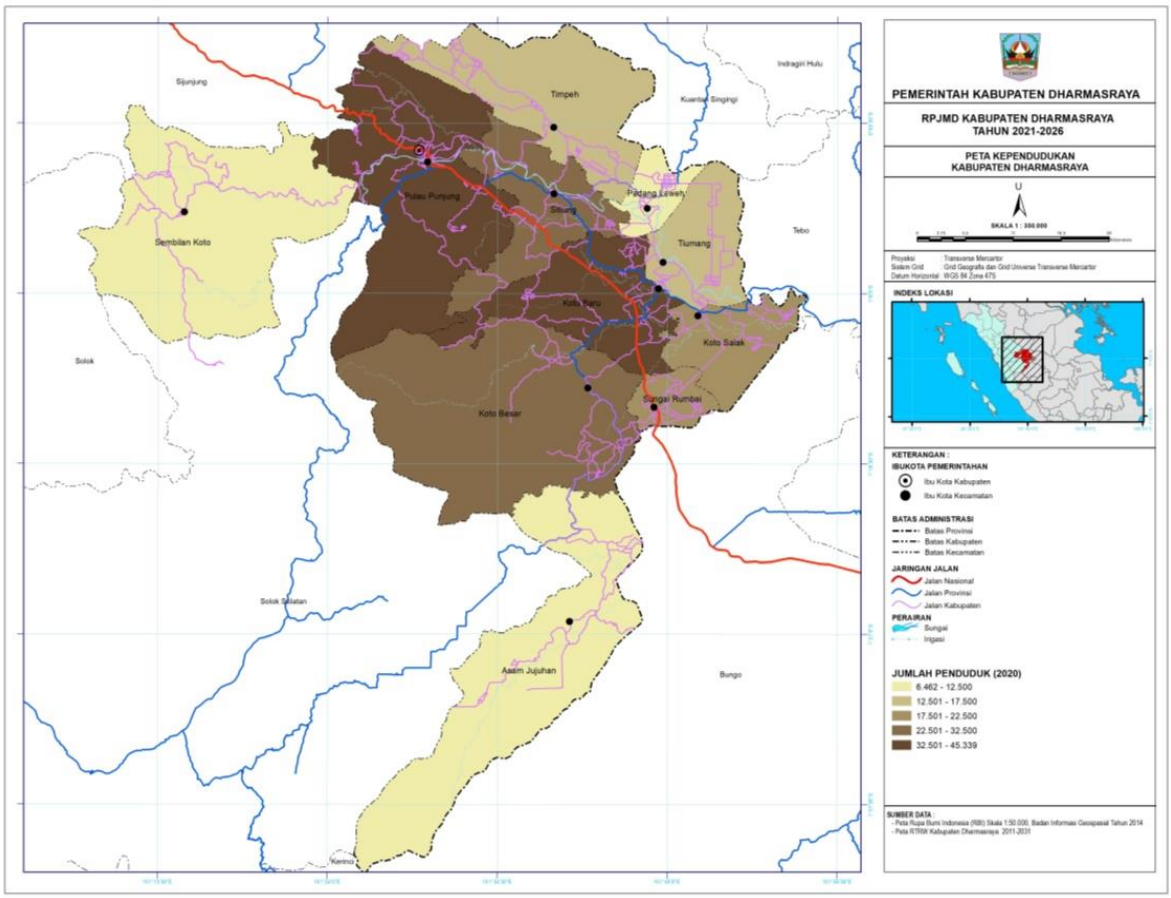
Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 - 2020 mencapai 1,73%/tahun.

Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.109	22.591	0,23
2	Koto Besar	57.310	27.387	2,09
3	Asam Jujuhan	46.372	8.295	5,59
4	Koto Baru	21.747	32.208	0,68
5	Koto Salak	12.440	17.729	0,70
6	Tiumang	13.543	13.193	1,03
7	Padang Laweh	6.100	6.335	0,96
8	Sitiung	13.018	28.139	0,46
9	Timpeh	32.730	17.252	1,90
10	Pulau Punjung	44.750	43.993	1,02
11	Sembilan Koto	48.522	9.143	5,31
	Jumlah	**301.645**	**226.265**	**1,33**

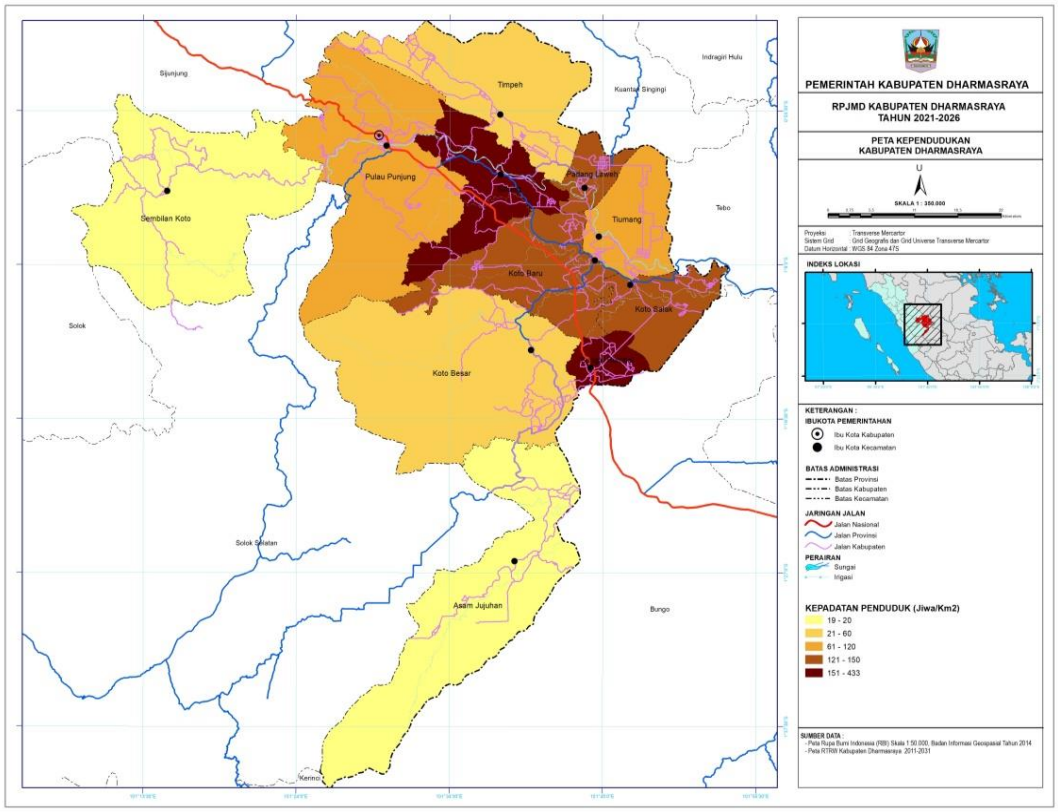
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis

Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2022

Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2022

Apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,96, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun.

Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
		Pria	Wanita		
1	00-03	6.719	6.257	12.976	107,38
2	04-06	6.553	6.205	12.758	105,61
3	07-12	13.811	13.060	26.871	105,75
4	13-15	7.002	6.459	13.461	108,41
5	16-18	4.481	4.588	9.069	97,67
6	19-24	11.758	11.493	23.251	102,31
7	25-29	8.816	8.911	17.727	98,93
8	30-34	8.351	8.746	17.097	95,48
9	35-39	9.680	9.958	19.638	97,21
10	40-44	9.203	8.693	17.896	105,87
11	45-49	7.856	7.510	15.366	104,61
12	50-54	6.193	5.767	11.960	107,39
13	55-59	5.043	4.639	9.682	108,71
14	60-64	3.776	3.592	7.368	105,12
15	65-69	2.619	2.591	5.210	101,08
16	70-74	1.474	1.532	3.006	96,21
17	>75	1.688	2.029	3.717	83,19
Jumlah		**115.023**	**112.030**	**227.053**	**102,67**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis, Tahun 2021

Dan apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlah penduduknya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 7-12 dan 19-24 tahun masing-masing sebesar 22.355 orang dan 21.871 orang.

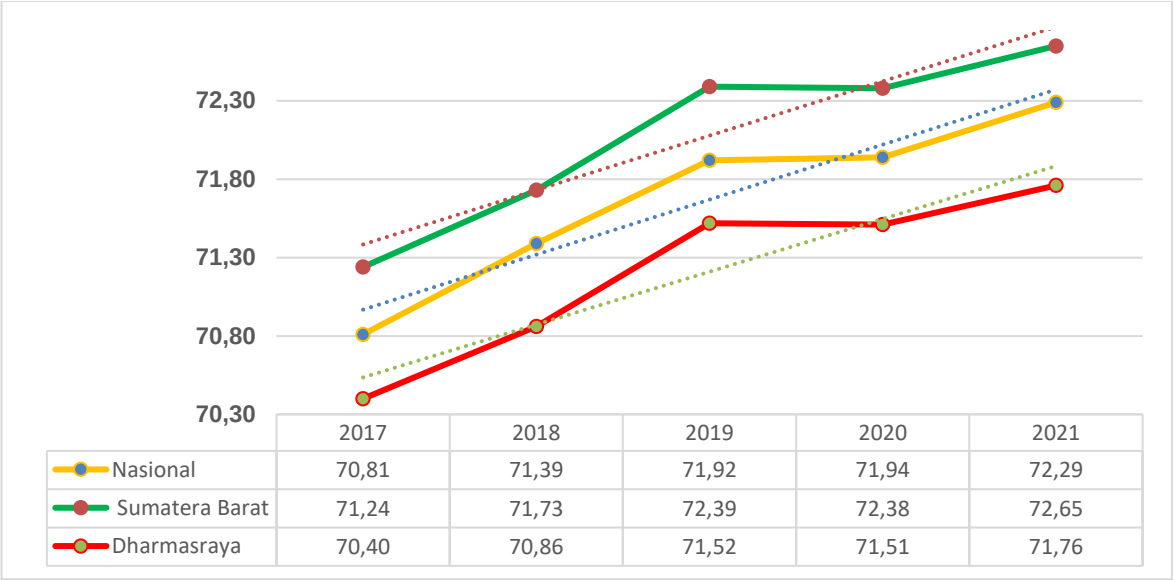
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wiayah lainnya. Secara nasional IPM merupakan data strategis ukuran kinerja Pemerintah serta digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, sert aKabuoaten Dharmasraya dari Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Gambar 2-16 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65
Dharmasraya	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76

Sumber BPS, tahun 2022

dilihat dari perkembangan nilai IPM, maka setiap tahun terjadi peningkatan IPM, kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun IPM nasional masih mengalami sedikit kenaikan, namun IPM provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan penurunan. Hal ini akibat dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Sejak semakin meluasnya kasus covid-19 selama tahun 2020, maka Pemerintah terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya di tahun 2021, sejalan dengan penurunan kasus covid-19 serta diikuti oleh pemulihan ekonomi, maka IPM nasional, provinsi, maupun Kabupaten Dharmasraya kembali menunjukkan peningkatan. Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian herd immunity. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023.

Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2-17 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rangking
Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35	19
Pesisir Selatan	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03	12
Kab.Solok	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24	14
Sijunjung	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86	17
Tanah Datar	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46	9
Padang Pariaman	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76	11
Agam	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57	8
Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68	13
Pasaman	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77	18
Solok Selatan	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23	15
Dharmasraya	**70,40**	**70,86**	**71,52**	**71,51**	**71,76**	**10**
Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76	16
Padang	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90	1
Kota Solok	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41	4
Sawahlunto	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88	7
Padang Panjang	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97	5
Bukittinggi	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70	2
Payakumbuh	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08	3
Pariaman	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07	6

Sumber BPS, tahun 2022

Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Agam dan tanah Datar.

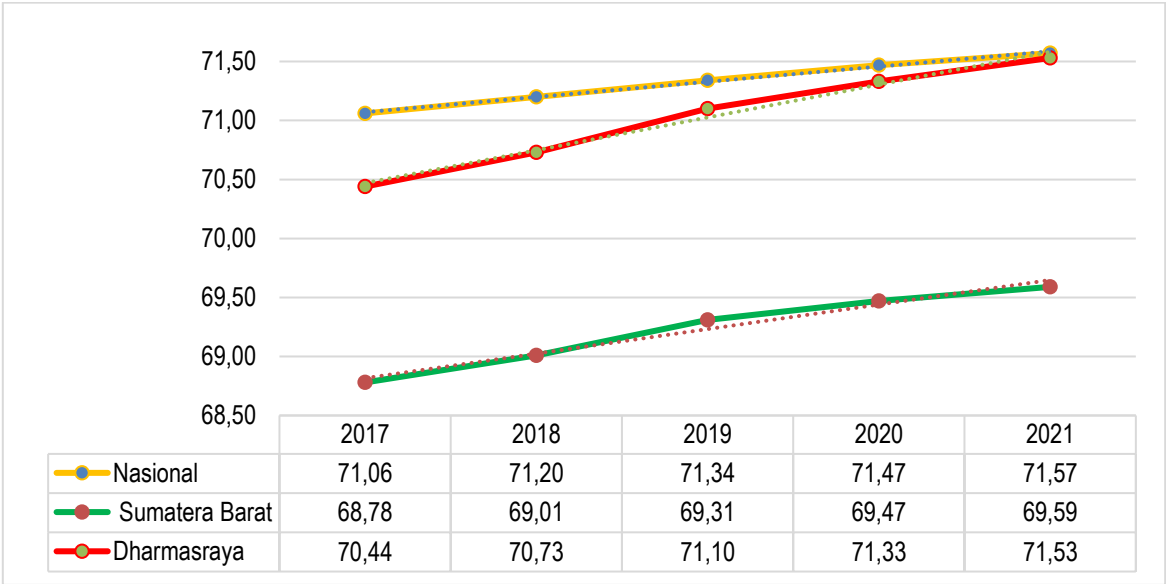
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 2-17 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57
Sumatera Barat	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59
Dharmasraya	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

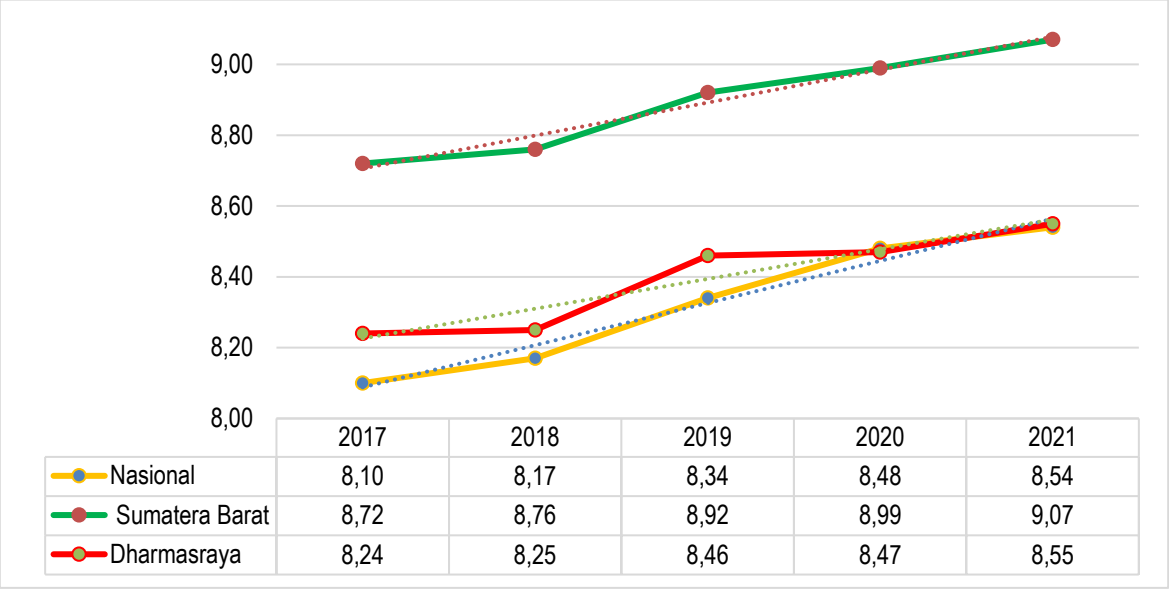
Dilihat dari AHH, maka capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Barat dan hampir menyamai capaianan nasional

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama

sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Gambar 2-18 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54
Sumatera Barat	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
Dharmasraya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55

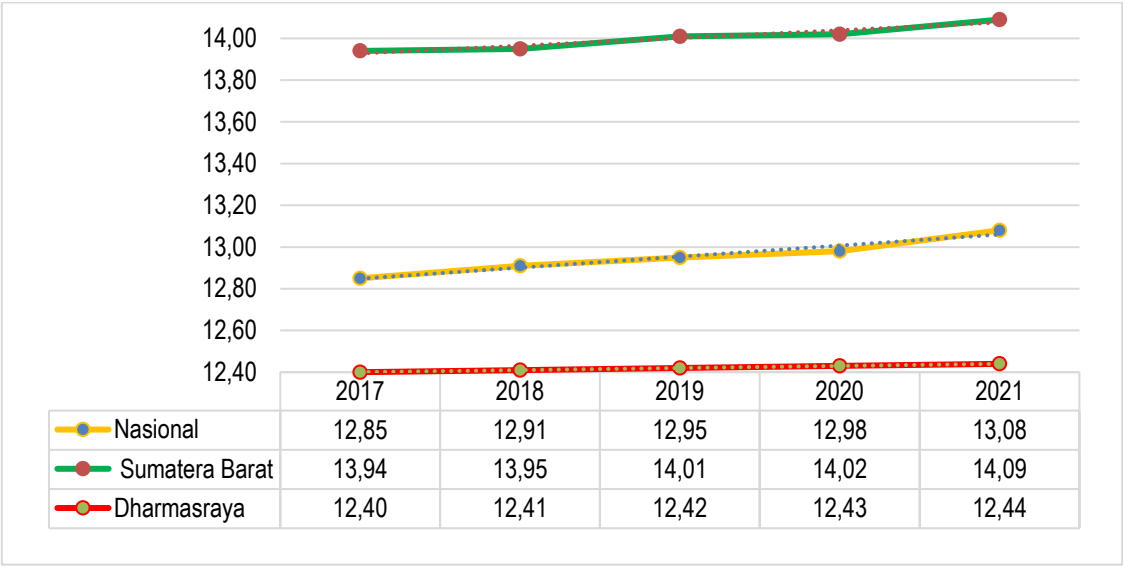
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Dilihat dari tabel di atas, maka terlihat bahwa RLS Dharmasraya masih di bawah capaian nasional, maupun Sumatera Barat

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Gambar 2-19 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08
Sumatera Barat	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
Dharmasraya	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

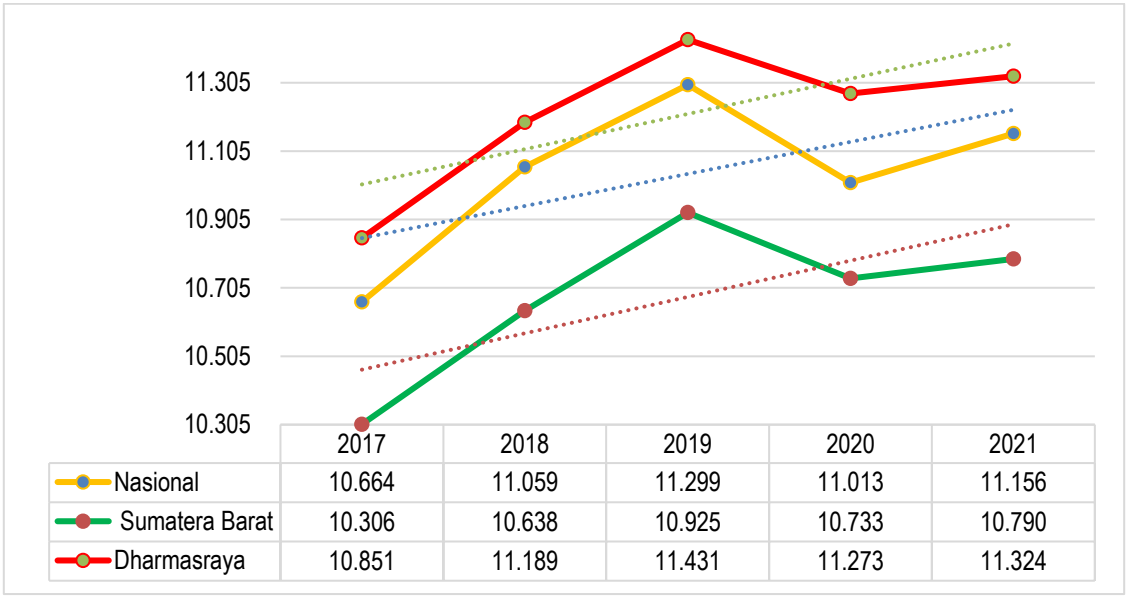
dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka HLS sekolah Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah, jika secara nasional dsri tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan perubahan sebesar 0,23 tahun, provinsi 0, 15 tahun, sedangkan Dharmasraya hanya bertambah sebesar 0,04 tahun.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM pada dimensi pendidkan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pertanian. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Gambar 2-20 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156
Sumatera Barat	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790
Dharmasraya	10.851	11.189	11.431	11.273	11.324

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

2. PDRB

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan perhitungannya maka PDRB ini dibagi menjadi 3 (tiga)PDRB terdiri dari PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

a. Perkembangan Nilai PDRB ADHB ADHK

Tabel 2-18 Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2021

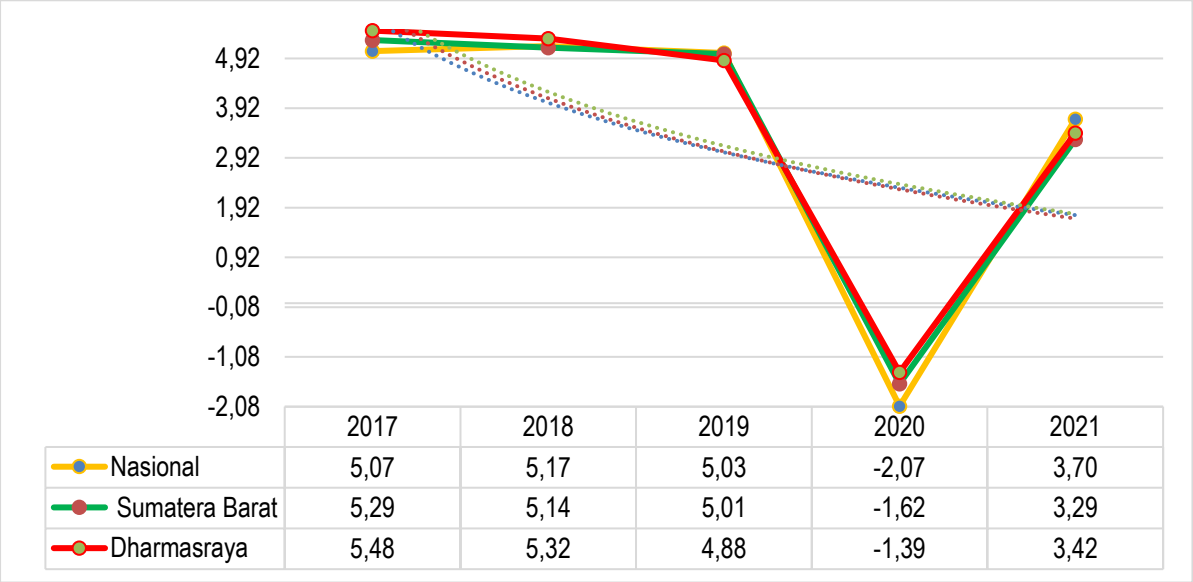
No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (ooo Rp)		Kontribusi (persen)	
		2020	2021	2020	2021
	ADHB				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,788,471.75	2,957,554.44	27.19	27.50
B	Pertambangan dan Penggalian	690,128.35	666,873.43	6.74	6.20
C	Industri Pengolahan	512,063.92	576,755.37	5.00	5.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,232.75	2,303.55	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,347.51	1,357.37	0.01	0.01
F	Konstruksi	1,518,921.00	1,591,651.46	14.83	14.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.526.575,49	1,560,824,47	14,90	14.51
H	Transportasi dan Pergudangan	610.900,94	656,819,19	5,96	6.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	93.709,18	103,850,46	0,91	0.97
J	Informasi dan Komunikasi	687.553,31	740,759,13	6,71	6.89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	234.242,96	254,986,50	2,29	2.37
L	Real Estat	237.121,72	245,527,50	2,32	2.28
M,N	Jasa Perusahaan	2.094,33	2,113,24	0,02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	711.018,92	740,943,31	6,94	6.89
P	Jasa Pendidikan	339.322,07	346,047,45	3,31	3.22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.681,63	219,601,77	2,02	2.04
R, S, T, U	Jasa lainnya	83.388,43	88,696,30	0,81	0.82
T O T A L		**10.245.774,26**	**10.756.664,94**	**100**	**100**
	ADHK 2010				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.139.968,87	2,254,377,08	28,71	29.24
B	Pertambangan dan Penggalian	564.963,60	464,576,14	7,58	6.03
C	Industri Pengolahan	406.789,72	436,466,00	5,46	5.66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.207,79	1,244,73	0,02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	979,54	959,52	0,01	0.01
F	Konstruksi	980.206,59	1,021,065,72	13,15	13.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.054.774,38	1,103,408,27	14,15	14.31
H	Transportasi dan Pergudangan	437.325,65	469,078,90	5,87	6.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.564,80	59,069,44	0,73	0.77
J	Informasi dan Komunikasi	648.765,21	695,212,06	8,70	9.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152.699,53	163,242,36	2,05	2.12
L	Real Estat	159.413,89	162,797,38	2,14	2.11
M,N	Jasa Perusahaan	1.402,09	1,406,73	0,02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.647,30	463,697,45	6,06	6.01
P	Jasa Pendidikan	207.286,28	210,988,18	2,78	2.74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.664,08	144,906,35	1,86	1.88
R, S, T, U	Jasa lainnya	54.308,35	57,204,03	0,73	0.74
T O T A L		**7.454.967,67**	**7.709.700,34**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

b. **Pertumbuhan PDRB**

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 2-21Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	5,07	5,17	5,03	-2,07	3,70
Sumatera Barat	5,29	5,14	5,01	-1,62	3,29
Dharmasraya	5,48	5,32	4,88	-1,39	3,42

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

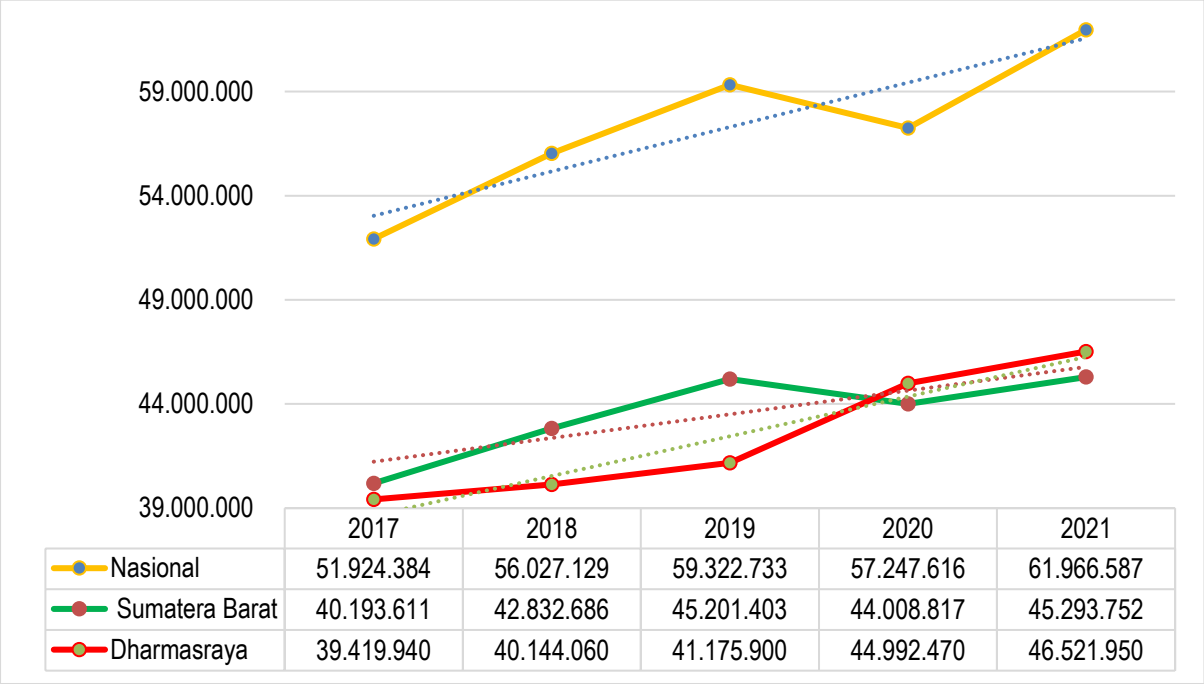
Pertumbuhan PDB/PDRB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahub sebelumnya, jika di tahun 2017 pertumbuhan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, namun di ytahun 2019 menjadi lebih rendah. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi untuk ketiga wilayah, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19yangmenahan aktivitas ekonomi. kontraksi tertinggi terjadi di tingkat nasional sebesar -2,07%, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar -1,62% dan dampak terendah ada Dharmasraya sebesar -1,39%. Dilihat dari lapangan usaha penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 untuk nasinal terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-21,77%), sektor pertambangan (-13,60%), dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan (-10,46%). Untuk Sumatera barat tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-18,42%), sektor akomodasi dan makan minum (-14,68%), dan sektor jasa lainnya (-7,76%). Untuk Dharmasraya penyebab kontarksi ada di sektor akomodasi dan makan minum (-15,19%), diikuti sektor transportasi dan pergudangan(-13,18%) dan sektor jasa lainnya (-9,4%) dan sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB juga ikut terkontraksi sebesar minus 0,76%.

Secara keseluruhan di tahun 2021, perekonomian PDRB kembali tumbuh positif, meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021

c. **PDRB perkapita**

PDRB perkapita merupakan jumlah PDRB ADHB seluruhnya dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Gambar 2-22 PDB/ PDRB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (rupiah)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	51.924.384	56.027.129	59.322.733	57.247.616	61.966.587
Sumatera Barat	40.193.611	42.832.686	45.201.403	44.008.817	45.293.752
Dharmasraya	39.419.940	40.144.060	41.175.900	44.992.470	46.521.950

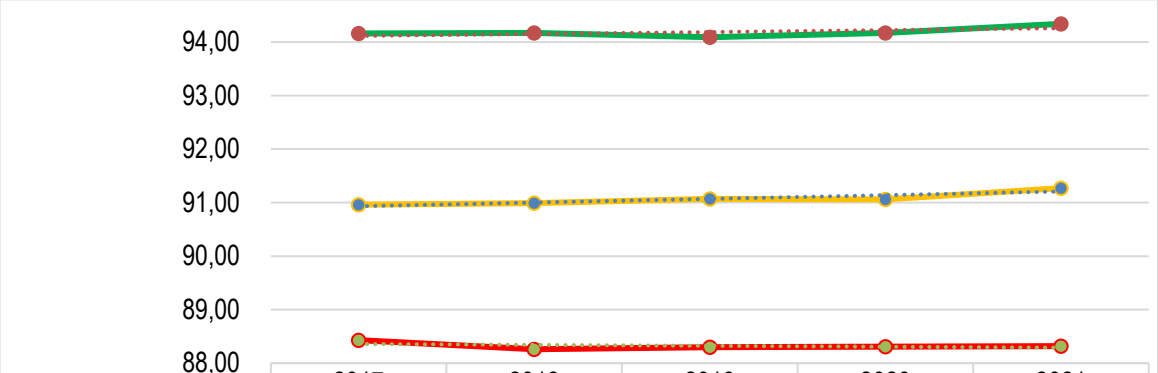
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Perkembangan nilai PDRB per kapita dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terlihat adanya peningkatan, baik secara nasional, provinsi maupun Dharmasraya. Salah satu perbedaan terjadi di tahun 2020, dimana dampak dari adanya pandemi covid-19 dimana PDRB perkapita nasional dan Provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan Kabupaten Dharmasraya masih menunjukkan peningkatan, karena dilihat dari struktur PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang tidak berdampak besar oleh covid-19. Selanjutnya di tahun 2021 PDRB perkapita Dharmasraya sudah berada di atas Provinsi Sumatera Barat, namun masih di bawah angka nasional.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Dimana jika IPG semakin mendekati angka 100, artinya peran perempuan dalam pembangunan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya.

Gambar 2-23 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (indeks)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27
Sumatera Barat	94,16	94,17	94,09	94,17	94,34
Dharmasraya	88,43	88,26	88,30	88,31	88,32

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

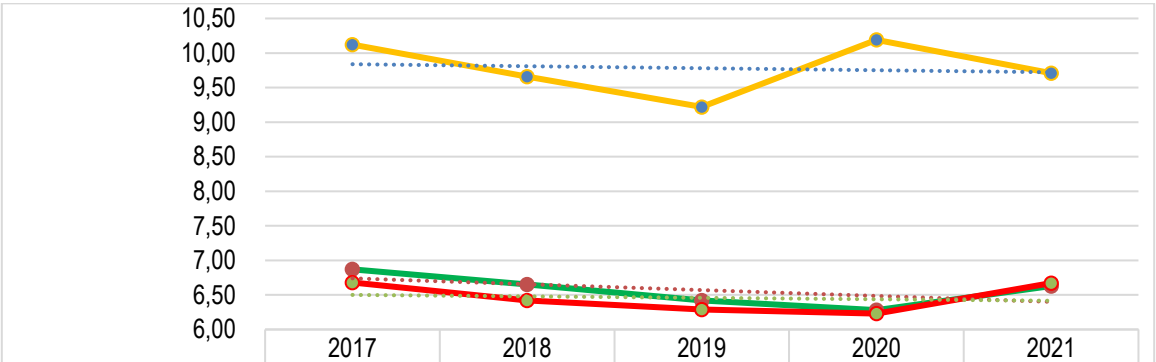
Setelah memperhatikan perkembangan IPG tahun 2017 hingga tahun 2021. Maka perkembangan IPG Dharmasraya masih jauh di bawah capaian nasional dan provinsi, begitu juga kecenderungan perkembangannya sedikit menunjukkan penurunan.

2.1.3.2. Fokus kesejahteraan sosial

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikakategorikan penduduk miskin.

Gambar 2-24 Tingkat Kemiskinan (persen)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
Sumatera Barat	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63
Dharmasraya	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67

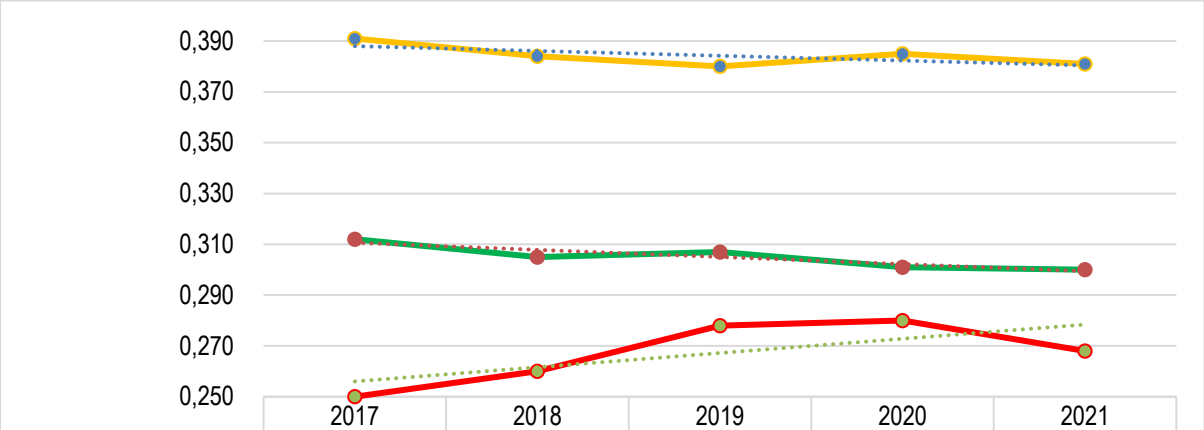
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Tingkat kemiskinan Provinsi hampir sama dengan Dharmasraya serta sudah jauh berada di bawah tingkayt kemiskinan nasional. Dengan relatif rendahnya tingkat kemiskinan provinsi provinsi dan kabupaten maka adanya kecenderungan penurunan dari tahun 2017, maka diharapkan ke depan angka kemiskinan akan semakin kecil seiring dengan meningkatnya tingkay kesejahteraan penduduk.

2. Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 2-25 Gini rasio (indeks)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381
Sumatera Barat	0,312	0,305	0,307	0,301	0,300
Dharmasraya	0,250	0,260	0,278	0,280	0,268

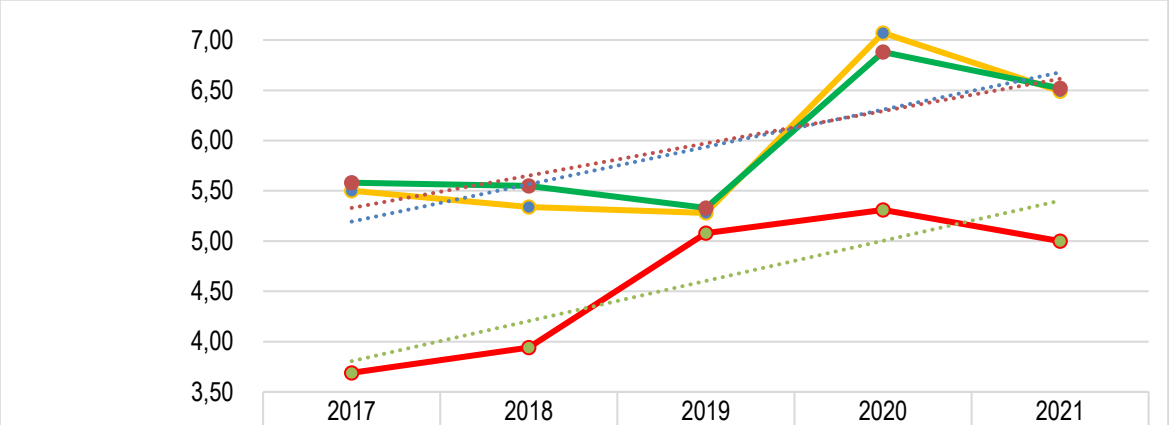
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi, aetinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional dan provinsi.

3. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2-26 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	5,50	5,34	5,28	7,07	6,49
Sumatera Barat	5,58	5,55	5,33	6,88	6,52
Dharmasraya	3,69	3,94	5,08	5,31	5,00

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Capaian TPT Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu berada di bawah nasional dan provinsi. Salah satu faktor penyebab dari rendahnya tingkat pengangguran adalah masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti setkor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah.

2.1.3.3. Fokus Pencapaian RPJMD

1. Indeks perilaku antikorupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi digunakan untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat. Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena perilaku korupsi punya dampak buruk di dalam segala lini kehidupan. Berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption)masyarakat Indonesia tergambarkan secara komprehensif. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Tabel 2.1. Indeks perilaku antikorupsi

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional*	3,59	3,71	3,66	3,70	3,88

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022
Keterangan * = publikasi BPS, indeks perilaku antikorupsi tahun 2021, tahun 2022

Dengan belum tersedianya data indeks perilaku anti korupsi, maka indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku korupsi yang akan digunakan adalah Indeks Persepsi anti korupsi atau disebut dengan (Corruption Perception Index/CPI) yang dikeluarkan oleh KPK. CPI adalah CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Survey CPI dilakukan dengan mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang

memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Di mana skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara/daerah maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup yaitu sebesar 78,93,

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan berbasis elektronik secara terpadu dan efisien. Untuk menilai pelaksanaan SPBE digunakan Indeks SPBE, indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Adapun pengaturan pelaksanaan SPBE telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara nasional indeks SPBE ini sudah dihitung sejak tahun 2018, adapun hasil penilaian indeks SBPE berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis eloktronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, maka hasil penilaian indeks SPBE tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-19 Indeks SPBE Kabupateb/Kota di Sumatera Barat

Wilayah	Indeks SPBE	Predikat	Rangking
Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-
Kabupaten Pesisir Selatan	3,34	baik	1
Kabupaten Solok	2,82	baik	2
Kabupaten Sijunjung	1,88	cukup	15
Kabupaten Tanah Datar	2,18	cukup	10
Kabupaten Padang Pariaman	2,6	baik	4
Kabupaten Agam	2,31	cukup	8
Kabupaten Lima Puluh Kota	2,68	baik	3
Kabupaten Pasaman	1,36	kurang	16
Kabupaten Solok Selatan	1,21	kurang	17
Kabupaten Dharmasraya	**1,09**	**kurang**	**18**
Kabupaten Pasaman Barat	2,18	cukup	10
Kota Padang	2,09	baik	12
Kota Solok	2,34	cukup	7
Kota Sawahlunto	2,07	cukup	14
Kota Padang Panjang	2,09	cukup	12
Kota Bukittinggi	2,26	cukup	9
Kota Payakumbuh	2,42	cukup	5
Kota Pariaman	2,42	cukup	5
SUMATERA BARAT	**2,69**	**baik**	
Nasional	**2,43**	**baik**	

Sumber : Keputusan MenpanRB Nomor 1503 Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas, maka Kabupaten Dharmasraya menduduki peringkat 18 dari 18 daerah yang dilakukan penilaian. maka untuk percepatan perkembangan indeks tersebut, langkah awal yang sedang dilakukan adalah melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar dalam pengembangan pelaksanaan SPBE ke depan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat / *Publik service indeks*

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat juga acuan bagi kementerian/ lembaga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan public.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	n/a	n/a	80,109	80,058	81,831

Sumber : Sekretariat daerah, Tahun 2022

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pertama kali dilakukan pada tahun 2019, dari survey tersebut, dapat dilihat, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kabupaten Dharamsraya sudah tinggi dengan nilai indeks di tahun 2019 sebesar 80,109 (skala indeks 0-100), namun di tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini berkaitan erat dengan pandemic global Covid-19, di tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali meningkat dengan nilai 81,831

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Pada kurun waktu 2016 hingga 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai 58≤IKLH≤ 66. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 64,98 pada tahun 2016 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai 66 ≤ IKLH ≤ 74.

Tabel 2-20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,41	60,20	61,81	67,94	63,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Pada kurun waktu 2017 hingga 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai 58≤IKLH≤ 66. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 61,81 pada tahun 2019 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai 66 ≤ IKLH ≤ 74.Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualiatas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang.

5. Persentase peningkatan zakat

Bertumpu pada pengertian zakat, bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan penerima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan zakat yang dikelola oleh Baznas setidaknya dapat menggambarkan perkembangan perekonomian masyarakat.

Tabel 2-21 Persentase peningkatan zakat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase peningkatan zakat	persen	-3,44	-1,51	5,04	1,46	-0,60
jumlah zakat tahun n	Juta rupiah	4.459	4.392	4.613	4.680	4.652
jumalah zakat tahun n-1	Juta rupiah	4.618	4.459	4.392	4.613	4.680

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2022

Salah satu manfaat dari zakat di saat pandemi 2 tahun terakhir adalah semakin besarnya kesempatan dan daya manfaat pada para muzaki (pemberi zakat) untuk membantu mustahik (penerima zakat) dalam mengatasi dampak krisis akibat pandemi covid-19.

6. Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

Tabel 2-22 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

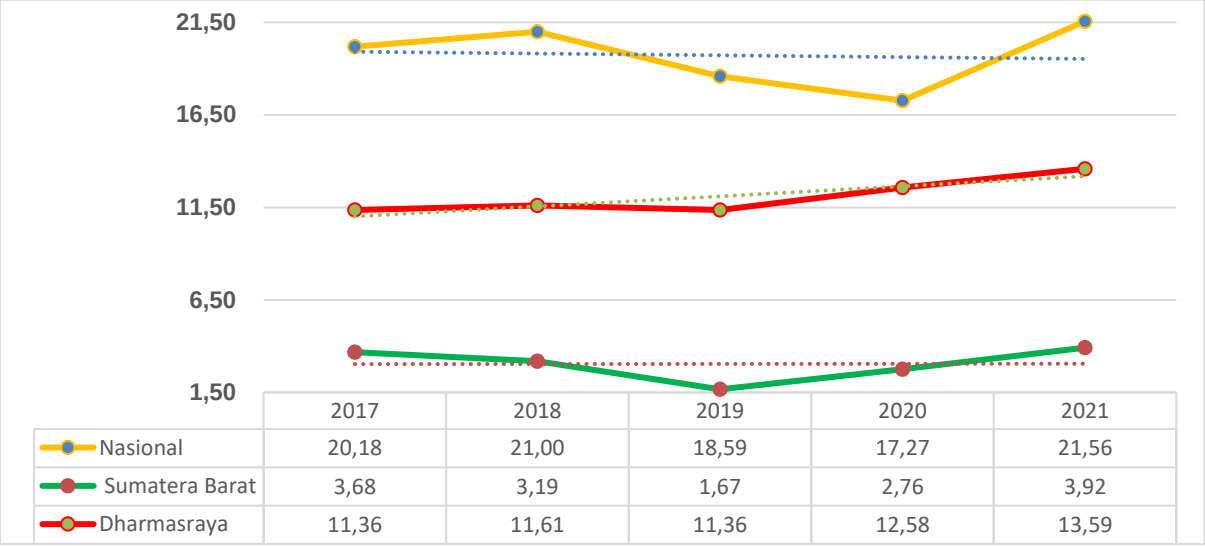
Indikator	Satuan	2020	2021
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	100
jumlah MDA / TPA/TPSA yang aktif	unit	378	378
jumalah MDA / TPA/TPSA seluruhnya	unit	378	378

Sumber : Sekretariat Daerah, tahun 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Rasio Net Ekspor terhadap PDB/PDRB

Gambar 2-27 Rasio Net Ekspor terhadap PDB/PDRB (persen)



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	20,18	21,00	18,59	17,27	21,56
Sumatera Barat	3,68	3,19	1,67	2,76	3,92
Dharmasraya	11,36	11,61	11,36	12,58	13,59

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

2.1.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
   a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi kasar merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Kegunaan indikator APK untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta tntuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK yang menjadi kewenangan kab/kota terdiri dari APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs.

Tabel 2-23 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	65,56	62,98	65,23	68,62	67,99
Jumlah murid PAUD	Orang	3.881	5.320	6.466	7.614	7595
Jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun	orang	5.920	8.447	9.912	11.096	11.170

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Perkembangan APK PAUD Tahun 2017 hingga 2021 terlihat adanya perningkatan, adanya penambahan jumlah penduduk usia PAUD dapat di diimbangi oleh jumlah jumlah murid PAUD. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana PAUD yang ada, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh pemerintahan nagari maupun masyarakat. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19. Secara garis besar dapat dilihat bahwa penambahan jumlah penduduk usia PAUD dapat diimbangi oleh jumlah jumlah murid PAUD.

Meskipun terjadi peningjkatan dari tahun ke tahun, namun capaian APK PAUD masih tergolong rendah dibandingkan kondisi idealnya di angka 100 persen

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

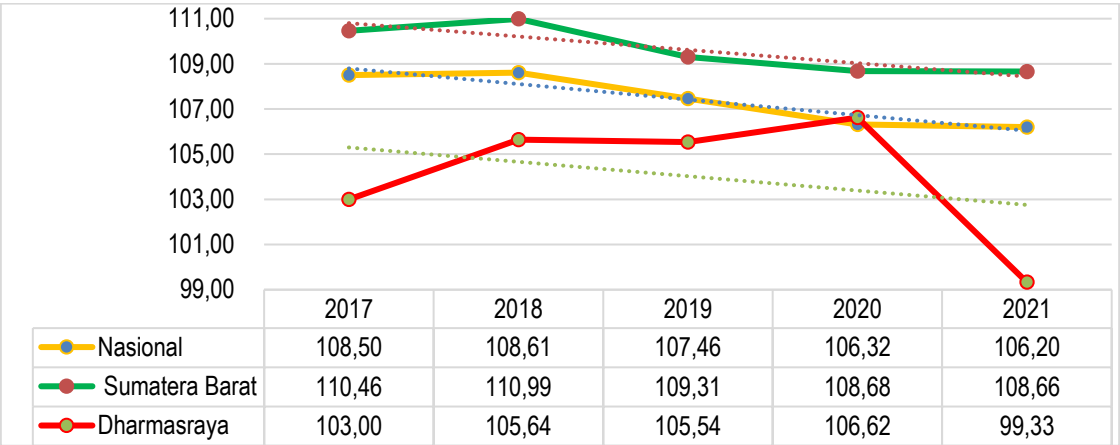
Tabel 2-24 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat	persen	103,00	105,64	105,54	106,62	99,33
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	Orang	27.788	27.815	27.937	27.586	26.691
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	26.978	26.330	26.470	25.874	26.871

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Untuk nilai APK SD setiap tahunnya selalu berada di atas 100, hal ini mengindikasikan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau adanya siswa yang bersekolah di dharmasraya dari daerah tetangga yang bersekolah di Dharmasraya.

Gambar 2-28 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	108,50	108,61	107,46	106,32	106,20
Sumatera Barat	110,46	110,99	109,31	108,68	108,66
Dharmasraya	103,00	105,64	105,54	106,62	99,33

Apabila dibandingkan dengan APK SD Nasional dan Provinsi, maka capaian Dharmasraya di tahun 2021 hampir sama dengan Naisonal, dan berada dibawah provinsi.

Meskipun demikian, kondisi ideal yang harus dicapai oleh nasional provinsi dan Dharmasraya bukanlah APK yang semakin tinggi, namun lebih kepada nilai APK yang semakin mendekati angka 100. Kebijakan yang bisa diambil salah satunya yaitu menerima siswa sesuai dengan usia sekolah.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

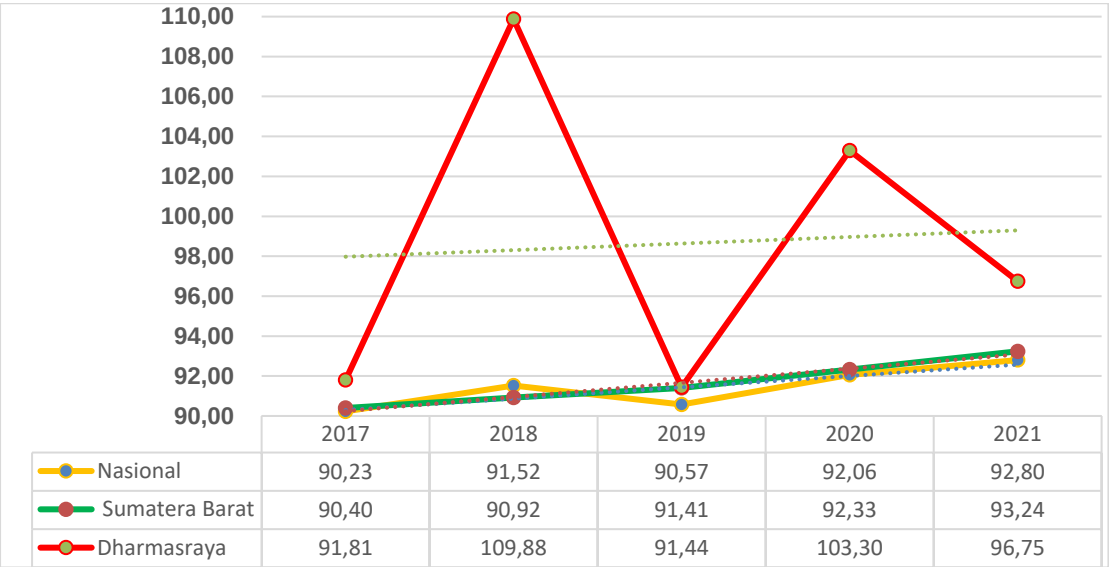
Tabel 2-25 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Persen	91,81	109,88	91,44	103,30	96,75
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	10.118	12.566	12.845	11.220	12.567
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	11.020	11.436	14.048	10.862	13.024

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Untuk APK SMP/MTs, cukup fluktuatif, di tahun 2018 dan tahun 2020 menunjukkan angka di atas 100, namun di tahun lainnya menunjukkan angka di bawah 100. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian APK tahun 2021 lebih mendekati 100 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum kebijakan bidang kependidikan untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sudah semakin membaik. Meskipun terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun dapat diikuti oleh daya tampung sekolah yang ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Gambar 2-29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat



	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	90,23	91,52	90,57	92,06	92,80
Sumatera Barat	90,40	90,92	91,41	92,33	93,24
Dharmasraya	91,81	109,88	91,44	103,30	96,75

Rata-rata realisasi APK SMP untuk Dharmasraya sudah berada di atas nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan sudah semakin mendekati angka 100.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi

Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Adapun APM yang dihitung sesuai dengan kewenangan kab/kota adalah APM SD/MI, dan APM SMP/MTs.

Tabel 2-26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	persen	116,00	99,68	94,59	99,31	98,40
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	orang	31.294	26.246	25.038	25.696	26.441
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	26.978	26.330	26.470	25.874	28.614

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Dengan adanya APM SD/MI yang sudah berada di angka cukup mendekati 100, artinya kondisi ini sudah cukup ideal, adanya sedikit kekurangan APM ini dari titik ideal diasumsikan minimnya angka putus sekolah di tingkat SD/MI.

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

Tabel 2-27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	persen	67,95	85,67	87,72	93,13	93,75
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/sederajat	orang	7488	9797	12323	10.116	12.210
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	orang	11020	11436	14048	10.862	13.024

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Dibandingkan dengan APM SD/MI, maka capaian APM SMP/MTs jauh lebih rendah. Selain disebabkan oleh faktor ketepatan usia sekolah yang masih belum optimal yang juga terlihat pada APK SMP/MTs yang belum mencapai angka 100, salah satu penyebabnya adalah adanya lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP/MTs di luar Kabupaten Dharmasraya.

f. Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Tabel 2-28 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	91,97	70,59	93,13	71,15	45,43
Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	Orang	10.667	9.056	11.704	8.942	12.210
Jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	11.598	12.829	12.567	12.567	26.871

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dari tahun 2017 s.d. 2021 terlihat berfluktuasi. Dimana Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama juga berfluktuasi.

g. Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD

Tabel 2-29 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	65,55	70,76	73,08	77,67	88,04
Jumlah anak usia 5 s.d 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	8.228	7.904	8.187	8.614	7.588
Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	12.552	11.170	11.203	11.090	8.619

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

h. Persentase guru dan tenaga kependidikan professional

Tabel 2-30 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	persen	63,93	62,03	63,25	60,54	53,45
Jumlah guru dan tenaga kependidikan professional	Orang	1.285	1.309	1.420	1.623	1.813
Jumlah guru dan tenaga kependidikan seluruhnya	Orang	2.010	2.110	2.245	2.681	3.392

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa adanya tren penurunan persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional memiliki tren kenaikan setiap tahun. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah guru yang tersedia juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional, sehingga secara persentase cakupan guru dan tenaga kependidikan profesional terlihat menurun, padahal telah terjadi kenaikan dari tahun 2017 s.d. 2021.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

a. **Angka kematian bayi (AKB)**

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan..

Tabel 2-31 Angka kematian bayi (AKB)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	15,78	10,91	11,00	9,41	8,98
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	orang	64	49	54	52	50
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	orang	4.056	4.491	4.911	5.527	5.565

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi. Pada tahun 2018 Angka Kematian Bayi meningkat, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya ibu sudah menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan sampai bayi lahir dengan mengikuti setiap tahapan imunisasi. Dan juga disertai dengan kehadiran tenaga kesehatan maupun bidan yang terlatih di setiap daerah.

b. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya.

AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah.

Tabel 2-32 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	217,92	102	156	77	109,35
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	8	4	6	3	4
Jumlah kelahiran hidup	orang	3.671	3.911	3.854	3.895	3658

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021, jumlah kelahiran hidup atau surviving infantdi Kabupaten Dharmasraya adalah 5.435 jiwa, pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah kematian ibu cukup siknifikan, dimana jumlah kematian Ibu sebanyak 14 orang dengan Angka Kematian Ibu 257,59 per 100.000 Kelahiran Hidup.

c. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)1 . Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK

Tabel 2-33 Prevalensi Stunting

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Stunting	indeks	1,5	1,3	14,6	12,4	11
Stunting	balita					**11**
Balita di timbang	balita					1558

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

d. **Prevalensi Malnutrisi**

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Tabel 2-34 Prevalensi Malnutrisi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Malnutrisi	indeks	25,9	25,7	25,5	25,3	
Wasting	Kasus	4.5	5.3	8.7	12.5	0,4
Stunting	kasus	21.4	20.4	16.8	12.8	11

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Dalam hal kasus wasting dengan kata lain kurus atau sangat kurus ditemukan sebanyak 0.4% dan stunting ditemukan sebanyak 11%. Sehingga pada tahun 2021 indeks prevalensi malnutrisi sebanyak 3,98%.

e. **Persentase Rumah Tangga PHBS**

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Tabel 2-35 Persentase Rumah Tangga PHBS

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Tangga PHBS	persen	-	-	-	-	60
Jumlah Rumah Tangga yang dipantau	Rt	-	-	-	-	32.778
Jumlah Rumah Tangga	Rt	-	-	-	-	54.739

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pelaksanaan PHBS merupakan pemantauan Rumah Tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS, yaitu : 1) Persalinan Nakes, 2) Asi Eklusif, 3) Timbang Bayi, 4) Air Bersih, 5) Jamban Sehat, 6) CPTS, 7) Bebas Jentik, 8) Makan buah dan sayur, 9) Aktifitas Fisik, 10) Tidak Merokok.

Pada tahun 2021, dari 54.739 rumah tangga yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang dipantau melaksanakan PHBS berjumlah 32.778 rumah tangga atau sebesar 60%.

f. **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pelaksanaan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 3) Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga, 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga. Tujuan dari program STBM adalah untuk merubah perilaku masyarakat dengan pendekatan pemicuan Community Leat Total Sanitasion (CLTS).

Tabel 2-36 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	**Persen**	19,23	30,77	34,62	40,38	51,92
Jumlah Nagari Stop PHBS (Nagari ODF)	**nagari**	10	16	18	21	27
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada saat ini kegiatan percepatan Universal Akses terhadap jamban sehat baru difokuskan pada pilar pertama, dalam rangka pencapaian status Oven Defication Free (ODF). Di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sudah ada 27 nagari dengan status ODF atau 51,92% dari 52 nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

g. **Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam**

KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadia luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah – langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor – faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah. Penanganan KLB dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu ditangani segera atau kurang dari 24 jam

Tabel 2-37 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	**Persen**	100	100	100	100	100
Jumlah KLB yang ditangani ≤24 jam	Kasus	4	3	1	1	1
Jumlah kejadian Luar Biasa	kasus	4	3	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021, terjadi 1 kasus kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu covid 19 dengan 2197 kasus positif di Kabupaten Dharmasraya. Dari 2197 kasus positif, 100% tertangani sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

h. **Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular**

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit.

Tabel 2-38 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	**Persen**	100	100	100	100	100
Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Kasus	108	133	283	233	393
Penemuan Kasus TB Paru BTA Positif Baru (Case Detecsion Rate)	persen	51	49,52	87,42	83,33	35,78
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	11	19	23	37	4479
Jumlah orang dengan DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	60	39	27	107	5

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya, yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2021, estimasi orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

berjumlah 3,049 orang, jumlah orang terduga tuberculosis yang terdeteksi sebesar 2,560 orang atau 89,96% dari orang terduga tuberculosis yang terdeteksi diberikan pelayanan sesuai dengan standar sebanyak 100%.

Angka penemuan kasus atau CDR (Case Detection Rate) adalah proporsi jumlah pasien baru TB BTA positif yang diperkirakan dalam satu wilayah tersebut. Penemuan kasus TB atau CDR marupakan cara yang digunakan untuk penilaian kemajuan penanggulangan TB dengan target nasional minimal 70%. Pada tahun 2021, perkiraan insiden berjumlah 763 kasus, kasus TB BTA positif yang ditemukan berjumlah 273 kasus atau sebesar 35,8%. Tidak tercapai 100% karena perkiraan insiden kasus yang ditetapkan terlalu tinggi dari kasus yang ditemukan di Kabupaten Dharmasraya.

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2021, estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV berjumlah 4.804 orang, jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang terdeteksi sebesar 4,677 orang atau 97,36% dari orang dengan risiko terinfeksi HIV yang terdeteksi diberikan pelayanan sesuai dengan standar sebanyak 100%.

Demam berdarah dengue (DBD) atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever (DHF) adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Pada tahun 2021 kasus DBD yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 5 kasus atau 100%.

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehayan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.

Tabel 2-39 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	80	84	100	100
Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Penderita	10.502	29.333	11.239	23.014
Jumlah orang penderita diabetes mellitus	Penderita	4.096	3.758	1.783	2.066

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 milimeter merkuri (mmHG). Angka 140 mmHG merujuk pada bacaan sistolik, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, angka 90 mmHG mengacu pada bacaan diastolik, ketika jantung dalam keadaan rileks sembari mengisi ulang bilik-biliknya dengan darah.

Pada tahun 2021, jumlah estimasi penderita dengan hipertensi berusia >15 tahun adalah 44,692 orang, jumlah penderita hipertensi yang terdeteksi sebesar 26,217 orang atau 58,66% dari semua kasus yang terdeteksi sudah tertangani 100% sesuai dengan standar.

Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ

tubuh.Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita.

Pada tahun 2021 jumlah sasaran penderita diabetes melitus 2.312 orang, yang terdeteksi dan tertangani sesuai standar sebanyak 2.066 orang, atau 89,36% dari semua kasus yang terdeteksi sudah tertangani 100% sesuai dengan standar.

j. Visite Rate

Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti amanat undang-undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandatakan akses masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat.

Tabel 2-40 Visite Rate

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Visite Rate	persen	7,1	14,2	21,4	21,4	4
Jumlah kunjungan (Baru, lama, sehat, sakit, luar dan dalam gedung)	Pddk					10.634
Jumlah Penduduk	Pddk					265.841

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021, dari 14 Puskesmas yang ada kunjungan ke puskesmas berjumlah 10.634 orang sedangkan penduduk yang ada berdasarkan estimasi berjumlah 265.841. sehingga visit rate pada tahun 2021 sebanyak 4%.

k. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Akreditasi Puskesmas tebagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;

1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Tabel 2-41 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	persen	3	3,2	3,4	3,8	21,4
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama						3
Jumlah Puskesmas						14

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 14 unit, dan jumlah puskesmas yang akan penilaian pasca akreditasi sebanyak 10 puskesmas, yaitu, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Sialang, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Tiumang, Puskesmas Silago, Puskesmas Timpeh, Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Sungai Rumbai.

Karena adanya pandemi covid-19 di seluruh Indonesia maka penilaian akreditasi tahun 2021 dibatalkan oleh kementerian kesehatan, akibatnya sepuluh puskesmas yang sudah dipersiapkan tidak dapat dilaksanakan penilaian akreditasi.

Tahun 2021, jumlah puskesmas terakreditasi sama dengan tahun 2020 dan tahun 2019, dengan jumlah puskesmas terakreditasi utama sebanyak 3 Puskesmas atau 21.4%, yaitu Puskesmas Sitiung I, Puskesmas Gunung Medann dan Puskesmas Sungai Dareh.

I. Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai.

RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi pada tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan pada tahun 2020, UPT RSUD Sungai Rumbai dapat terakreditasi.

Tabel 2-42 Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	50	50	100	50
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	1	1	2	1
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021 Rumah Sakit di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 2 unit, jumlah Rumah Sakit yang akan dinilai akreditasi yaitu Rumah Sakit Sungai Rumbai. Karena adanya

pandemi covid-19 di seluruh Indonesia maka penilaian akreditasi tahun 2021 dibatalkan oleh kementerian kesehatan, akibatnya Rumah Sakit Sungai Rumbai yang sudah dipersiapkan tidak dapat dilaksanakan penilaian akreditasi.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. **Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan dimana berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jalan diketahui bahwa total panjang jalan Kabupaten Dharmasraya adalah 1.042,87 km.

Mengingat jalan sebagai infrastruktur dasar, maka perlu diketahui kondisi kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya. Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021 berdasarkan pada data capaian proporsi Panjang matan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 dilakukan penyesuaian data sehingga terjadi penyesuaian data Panjang jalan yang mempengaruhi data jalan dengan kondisi baik. Secara umum pemerintah derah terus melakukan penyesuaian data dan definisi operasional terhadap pengertian jalan dengan kondisi baik.

Proporsi jalan mantap menurun menjadi 50,19% dari tahun ke tahun terus ditingkatkan baik dalam melalui peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan periodic maupun berkala terhadap jaringan jalan yang ada. Pada tahun 2021 terjadi penurunan proporsi jalan mantap mengingat rata-rata disebabkan oleh pengalihan alokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan Pandemi Covid-19.

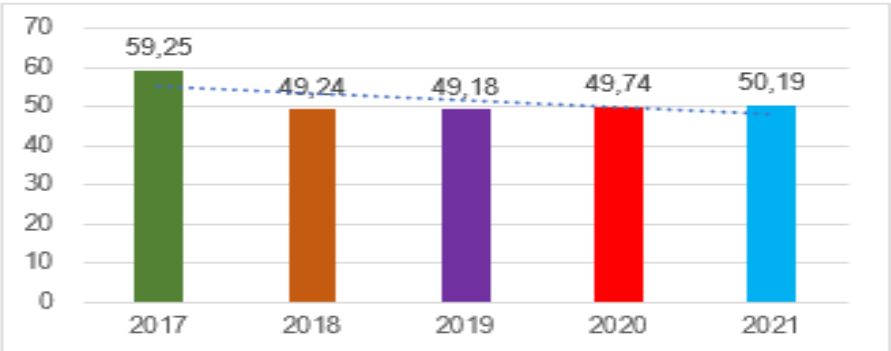
Untuk lebih jelasnya proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-43 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	59.25	49.24	49.19	49.75	49.71
Panjang jalan kondisi baik	Km	613,67	513,56	517.99	523.89	523,49
Panjang Jalan (Km)	km	1035,72	1042,87	1053,13	1053.13	1053.13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Gambar 2-30Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yaitu sepanjang 1.053,13 Km, dimana panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 523,49 Km atau ketercapaian panjang jaringan jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 49,71% dari total panjang jalan kewenangan kabupaten.

Terjadinya penurunan fluktuasi proporsi jalan mantap di kabupaten Dharmasraya disebabkan beberapa hal :

1. Terjadi perubahan panjang jalan kabupaten karena perbedaan pemahaman terhadap kondisi jalan mantap, dimana pada tahun 2017 jalan kerikil yang rata dianggap jalan mantap tetapi saat ini jalan kerikil dianggap tidak termasuk jalan mantap
2. beban yang melewatinya terus menerus melampaui batas maksimum. Kendaraan-kendaraan yang lewat, sering kali beratnya melampaui batas (over load).
3. pemahaman dalam penanganan jalan hanya membangun dan membangun tetapi fokus pada pemeliharaan.
4. Kondisi covid-19 yang menyebabkan pengalihan alokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemic pada tahun 2020 dan 2021.

b. **Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan data 5 tahun terkahir bahwa jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 188 unit jembatan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jembatan di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah jembatan tersebut, jembatan dalam kondisi baik sebanyak 128 unit atau 68,09% dari jumlah jembatan secara keseluruhan.

Tabel 2.3. *Persentase jembatan dalam Kondisi Baik*

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase jembatan dalam Kondisi Baik	persen	64.89	65.96	65.96	68.09	68.09	
Jumlah jembatan dalam Kondisi Baik	unit	122	124	124	128	128	
Jumlah Jembatan seluruhnya	unit	188	188	188	188	188	

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2022

Berdasarkan data, capaian persentase jembatan dalam kondisi baik yang tertera pada tabel di atas mengalami peningkatan dari tahun 2.017-2021. Pada tahun 2017 persentase jembatan dalam Kondisi Baik adalah sebesar 64,89% dan tahun 2021 adalah sebesar 68,09%. Rata-rata dalam kurun 5 tahun tidak ada penambahan jembatan baru penekanan lebih ditekankan pada pemeliharaan jembatan.

c. **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**

Irigasi merupakan salah satu prasarana wilayah yang dapat mendukung peerkonomian. Pembangunan jaringan irigasi sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan

nasional. Pemanfaatan air untuk irigasi persawahan merupakan salah satu upaya mendukung ketahanan pangan mengingat lapangan usaha dominan berada pada sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Artinya terdapat keterkaitan antara dampak pembangunan daerah irigasi terhadap produksi padi, menunjukkan bahwa jika luas fungsional daerah irigasi mengalami peningkatan maka produksi padi pun meningkat.

Berdasarkan data, Luas Potensial Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi 2.783 Ha, dengan luas fungsional mencapai 1710,94 ha yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berikut merupakan tabel presentase luas daerah irugasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik.

Tabel 2-44 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	58,84	60,46	58,62	59,86	79,76

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 58,84% di tahun 2017 meningkat menjadi 79,76% tahun 2021. Jika dilihat dari data per tahun, persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 1,84%.

d. **Persentase penduduk yang terlayani jaringan air minum**

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air)

Tabel 2.4. Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	19,86	22,00	19,63	21,67	26,17
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	40,962	45,914	42,072	46853	59,217
Jumlah penduduk	Jiwa	206.285	208.681	214.292	216.202	226.265

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2022

Pencapaian terkait cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukan kecenderungan meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah. Berdasarkan data lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 19,86% meningkat pada tahun 2021 menjadi 26.17%. Dilihat berdasarkan data tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 2,37%, hal ini merupakan dapak dari terjadinya kerusakan pada unit produksi Sungai Rumbai dan Koto Baru, sehingga pelayanan menjadi menurun.

Sedangkan pada tahun 2019-2021, persentase jumlah penduduk yang terlayani jaringan pipa aitr minum meningkat sebesar 6,54%. Meningkatnya persentase pelayanan disebabkan karena banyaknya program air minum melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah air minum yang masuk ke Kabupaten Dharmasraya dan keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik dan dukungan dari layanan masyarakat.

e. Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, rumah susun dan asrama. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berikut persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2021.

Tabel 2-45 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	persen	77,75	86,51	86,88	87,25	91,73
Jumlah penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Jiwa	16,039	18,053	18,618	18,864	20,755
Jumlah penduduk	Jiwa	206.285	208.681	214.292	216.202	226.265

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2022

f. Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Gedung perangkat daerah idealnya sesuai dengan jumlah perangkat daerah yang ada. Jumlah perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 38 OPD.

Saat ini belum semua perangkat daerah memiliki kantor sendiri. Dari 38 OPD baru 17 OPD yang memiliki gedung kantor dalam kondisi baik yang terdiri dari 11 kecamatan dan 6 kantor OPD. Selain itu masih ada OPD di Kabupaten Dharmasraya yang belum memiliki kantor sendiri dalam hal ini masih menyewa dan menumpang pada bangunan lain.

Untuk lebih jelasnya Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-46 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73
Jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	unit	17	17	17	17	17
Jumlah Perangkat Daerah		38	38	38	38	38

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik sebesar 44,73%. Dari tahun 2017-2021 jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik masih 17 OPD yang terdiri dari 11 gedung kantor kecamatan dan 6 kantor OPD (sekretariat daerah, bapppeda, BKD, inspektorat, dinas PUPR dan sekretariat DPRD

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

a. **Cakupan permukiman layak huni**

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut

Tabel 2-47 Cakupan permukiman layak huni

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan permukiman layak huni	Persen	82,50	83,54	83,88	83,88	83,99
Luas Permukiman layak huni (Ha)	Ha	2.035	2.061	2.068	2.068	2.072
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Ha	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2021 mengalami peningkatan tiap tahun. Tahun 2017 cakupan pelayanan permukiman layak huni sebesar 82,50% dan tahun 2021 meningkat menjadi 83,99%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari program-program penangan kawasan permukiman layak huni yang dilaksanakan setiap tahunnya.

b. **Cakupan ketersediaan rumah layak huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-48 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	87,88	90,05	91,98	90,61	90,68
Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	39.957	40.944	41.942	53.029	53.074
Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	45.467	45.467	45.601	58.526	58.526

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berdasarkan data capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yaitu dari 87,88% tahun 2017 menjadi 91,98% tahun 2019. Sementara jika dilihat kondisi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,37%. Penurunan ini salah satunya sebagai akibat dari alokasi anggaran untuk kegiatan permukiman dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2021 meningkat menjadi 90,68%.

c. **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana**

Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2019-2021 tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. Lebih jelasnya perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.5. Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%	n/a	n/a	100	100	100
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	n/a	n/a	0	0	0
Jumlah total rencana ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	n/a	n/a	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2019-2021 tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. Lebih jelasnya perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat tabel berikut.

d. **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah**

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah tahun 2019-2021 yaitu tidak ada rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah dilihat tabel berikut.

Tabel 2-49 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	%	100	100	100	100	100
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	0	0
Jumlah rumah masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

e. **Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani**

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang di tangani di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 hanya sebesar 0,56%. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kawasan kumuh yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani adalah sebagai berikut:

Tabel 2-50 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani

Indikator	Satuan	2020	2021
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	0	0,56
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Ha	0	0,61
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar	Ha	107,98	107,98

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

f. **Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu

kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU merupakan perbandingan antara Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha) dengan Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha). Adapun capaian Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-51 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	59,98	56,78	53,39	51,68	50,36
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	75,6	80,66	88,54	95,96	103,38
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	126,05	142,05	165,84	185,67	205,29

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya mengalami penurunan. Artinya setiap tahun cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU semakin berkurang. Pada tahun 2017 cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebanyak 59,89% dan pada tahun 2021 menjadi 50,36.

g. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Cakupan rumah layak huni yang terjangkau merupakan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data terlihat bahwa cakupan pelayanan dari tahun 2017-2021 cukup rendah yaitu dibawah 2%%.

Tabel 2-52 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	8,02	20,54	22,53	11,21	1,14
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	414	988	1.005	500	45
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	5.160	4.810	4.460	4.460	3.960

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

a. **Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2-53 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	88	100	91	90
Jumlah Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	40	10	45	10	10
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	40	10	45	11	9

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 terealisasi sebesar 90 persen, yakni sebanyak 9 penyelesaian dari 10 kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun satu kasus yang belum diselesaikan pada tahun 2021, sudah dalam tahap penyelesaian di tahun 2022. Artinya pemerintah terus mengupayakan untuk mengantisipasi dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik.

b. **Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi**

Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi.

Tabel 2-54 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian persentase penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

c. **Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran**

Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase respontime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar 15 menit.

Tabel 2-55 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

Berdasarkan tingkat capaian persentase respontime pada lokasi kebakaran pada tahun 2021 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah daerah telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri.

d. **Jumlah Nagari Tangguh Bencana**

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sampai saat ini di Kabupaten Dharmasraya tidak ada nagari tangguh.

e. **Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi**

Evakuasi merupakan tindakan untuk membuat orang orang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sangat berbahaya ke tempat yang lebih aman Ada banyak kondisi ekstrim yang berpotensi mengancam keselamatan manusia sehingga perlu dilakukan evakuasi. Berdasarkan data tahun2021, korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2021 tertangani seluruhnya.

f. **Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**

Tabel 2-56 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	prsen					100

Sumber : Badan penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2022

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

a. **Persentase PPKS yang tertangani**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tabel 2-57 Persentase PPKS yang tertangani

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
persentase PPKS yang tertangani	Persen	66,26	99,86	88,62	90	75	96
Jumlah PPKS yg diberikan bantuan	Orang	9.566	93.146	56.018	65.106		
Jumlah PPKS yg seharusnya	orang	14.437	93.275	63.211	72.340		

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

PPKS yang diberi bantuan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 93.146 orang, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 56.018 orang. PPKS yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase PPKS yang tertangani menjadi 75 % akibat merebaknya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan beberapa kegiatan. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 96% karena sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dan kegiatan pananganan PPKS dapat dilaksanakan

b. **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti, paling lama 7 (tujuh) hari, meliputi permakanan; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat; fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak; akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga, serta reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial

Tabel 2-58 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	70	55	69	33	136
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Orang	70	55	69	33	136

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti paling banyak terdapat pada tahun 2021, sebanyak 136 orang. Jumlah ini meningkat 412% dari tahun 2020, namun secara keseluruhan, dari tahun 2017 s.d. 2021 dapat ditangani dengan baik, dengan capaian 100%.

c. **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota**

Tanggap Darurat Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tabel 2-59 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Orang	3.245	3.260	3.069	17.024	7.754
Jumlah korban bencana alam dan social	Orang	3.245	3.260	3.069	17.024	7.754

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Selama tahun 2017 s.d. 2019 kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan capaian 100%. Korban bencana alam dan sosial terbanyak terdapat pada tahun 2020, karena pada tahun tersebut terjadi banjir di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung, serta adanya bencana lainnya.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tinglat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya digambarkan melalui tabel 2.7. berikut.

Tabel 2-60Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	64,53	68,37	70,17	72,72	73,04
Jumlah angkatan kerja	Orang	107.013	116.445	128.266	136.507	141.468
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Orang	165.837	170.321	182.793	187.711	193.674

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya selalu meningkat dari tahun 2017 – 2021. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun

2018 yaitu sebanyak 68,37%, angka ini 3,84% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2021, yang meningkat 0,32% dari tahun 2020.

b. Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan

Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang terampil mendorong para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka. Dalam rangka peningkatan keterampilan dimaksud, pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Dareh. Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-61 Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	90,1	92,85	90,20	80,14	93.86
Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	1406	1597	1740	1025	4449
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1560	1720	1929	1279	4740

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan pelatihan tertinggi terdapat pada tahun 2019, sebanyak 1.216 orang. Hal ini terjadi karena paket pelatihan dari pemerintah pusat bertambah menjadi 76 paket pelatihan. Selain itu terdapat juga 59 orang angkatan kerja yang megikuti pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja yang langsung ditempatkan.

c. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dengan jumlah tenaga kerja pada suatu daerah. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-62 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	90,1	92,85	90,20	80,14	93.86
Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	1.406	1.597	1.740	1.025	4.449
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.560	1.720	1.929	1.279	4.740

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja yang ditempatkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,06%, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,72%.

d. Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan

Tabel 2-63 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Kasus	7	7	16	1430	4
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan	Kasus	7	7	16	1430	4

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, tahun 2022

Kasus ketenagakerjaan paling banyak terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.430 kasus. Hal ini terjadi karena adanya masalah di perusahaan, yang berkaitan dengan masalah hak-hak tenaga kerja yang tidak terpenuhi sesuai aturan, karena perusahaan belum memiliki dokumen kepatuhan ketenagakerjaan.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui kesetaraan gender pada seluruh pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

a. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Focalpoint perangkat daerah merupakan aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah telah mempunyai focalpoint aktif.

Tabel 2-64 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Indikator	satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	44,11	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

b. persentase Organisasi perempuan yang aktif

Tabel 2.6. persentase Organisasi perempuan yang aktif

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	85,71	90,48	100	100
Jumlah Organisasi perempuan yang aktif	Organisasi	18	19	19	17
Jumlah Organisasi perempuan seluruhnya	Organisasi	21	21	19	17

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Jumlah Organisasi perempuan yang mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini terjadi karena adanya organisasi yang vakum dan akhirnya dibubarkan. Untuk organisasi yang aktif, seluruhnya dibina oleh pemerintah daerah.

c. Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)

APE (Anugrah Parahita Ekapraya) merupakan penghargaan atas upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Penilaian APE dilasanakan 2 (dua) tahun sekali, dan Kabupaten Dharmasraya baru mengikuti penilaian pada tahun 2020, dengan mendapatkan APE kategori Pratama.

Tabel 2-65 Tingkat kategori capaian APE

Indikator	Satuan	2020	2021
Tingkat kategori capaian APE	kategori	pratama	pratama

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

d. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya perlu dikawal. Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya berupa penghargaan kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kategori. Penghargaan KLA untuk Kabupaten Dharmasraya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan pada Tahun 2021 berhasil memperoleh peghargaan KLA kategori Madya.

Tabel 2-66 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Status	Inisiator	pratama	pratama	madya

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

e. rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

Tabel 2-67 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 terjadi pada 18 orag, pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing 1 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 3 orang. Seluruh kasus yang terjadi pada setiap tahun telah difasilitasi dan diselesaikan dengan capaiam masing-masing 100%.

f. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, jumlah ini menurun pada tahun berikutnya, yang pada tahun 2018 s.d. 2021 masing-masing terdapat 1 kasus. Selanjutnya Rasio kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2-68 Rasio kekerasan dalam rumah tangga

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Rasio kekerasan dalam rumah tangga	rasio	0,01	0,002	0,002	0,002

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

a. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat

Tabel 2-69 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	persen	15	15	18	27,872	27,872

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2022

Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah di Kabupaten Dharmasraya semenjak tahun 2017 sebesar 15% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 27,87%. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.Cadangan pangan daerah merupakan upaya untuk mengatasi gejolak harga pangan, bencana alam serta antisipasi masa paceklik.Cadangan pangan daerah di Kabupaten Dharmasraya dikelola pada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 6 LPM dan BULOG. Total cadangan pangan yang tersedia pada tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya sebesar 27,775 Ton dari 99,626 Ton berdasarkan perhitungan Permentan No. 11 Tahun 2018. Sehingga persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021 sebesar 27,872%.

b. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Tabel 2-70 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Kalori	K.Kal/Kap/hr	2.520	2.789	2.548	2.540	2.550
Ketersediaan Protein	Gram/Kap/hr	70,27	83,20	95,11	91,51	85,95*

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2022

Ketersediaan Kalori dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2020, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Secara keseluruhan ketersediaan kalori di Kabupaten Dharmasraya sepanjang

tahun 2017 hingga 2021 telah melebihi angka kecukupan gizi yang direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012 dimana AKG tingkat ketersediaan untuk kalori yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Adapun yang menyebabkan fluktuasi ketersediaan kalori tersebut terkait dengan produksi beras yang dipengaruhi ketersediaan suplay air. Aktivitas normalisasi irigasi salah satunya yang menyebabkan sawah irigasi teknis tidak mendapatkan suplay air sesuai kebutuhan.

Sedang ketersediaan protein pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan. Terjadinya penurunan ketersediaan protein tersebut sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Namun angka ketersediaan protein Kabupaten Dharmasraya tersebut telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan berdasarkan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012 (protein 63 gram/kapita/hari).

c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu gizi dari keragaman konsumsi pangan (9 kelompok pangan) berdasarkan kontribusi asupan energi terhadap AKE. Skor PPH berkisar antara 0-100. Susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan yang semakin baik.

Tabel 2-71 Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Skor Pola Pangan Harapan	skor	80,6	83	89,4	85,6	91

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2022

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 sebesar 80,6% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan Skor PPH sebesar 94%. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Pengaplikasian pola pangan harapan (PPH) memiliki kegunaan untuk menilai situasi tingkat konsumsi pangan masyarakat yang dinyatakan dalam skor pola pangan harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH yang didapatkan berarti semakin beragam dan bergizi seimbang makanan yang dikonsumsi dengan skor 100 sebagai skor maksimal yang paling ideal (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015).

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

a. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat

Pada bidang pertanahan indikator Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat merupakan indikator yang dapat menunjukan kondisi pertanahan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Pada Tahun 2017 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat sebesar 39,82% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 70,15%. Untuk data tahun 2021 belum tersedia.. Adapun

perkembangan persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-72 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat	Persen	39,82	42,94	54,56	70,15	-
Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)	Ha	255,43	275,43	350	450	
Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha)	Ha	641,46	641,46	641,46	1.600	

Sumber : BPS Dharmasraya

b. Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan

Kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2020 setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah sebanyak 33,33%, tahun 2018 sebanyak 40% dari kasus yang ada, tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing 50% dan 66,67%. Untuk data tahun 2021 belum tersedia.

Tabel 2-73 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah	Persen	33,33	40,00	50,00	66,67	
Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan	kasus	1	2	5	10	
Jumlah Kasus yang terdaftar	kasus	3	5	10	15	

Sumber : BPS Dharmasraya

:

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

a. indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi.

Tabel 2-74 Indeks Kualitas Air

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	indeks					52,82
Sumatera Barat	indeks	75,69	77,29	77,67	75	79,00
Dharmasraya	indeks	63,58	65,84	60,00	70,00	52,73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Kualitas air sungai di Kabupaten Dharmasraya akan menggambarkan keadaan kualitas air Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air didefinisikan memenuhi baku mutu jika IKA≥70, didefinisikan tercemar ringan pada IKA≥50, tercemar sedang pada IKA≥30, tercemar berat jika IKA≥10. Pada rentang waktu lima tahun, indeks kualitas air Kabupaten Dharmasraya berada pada status tercemar ringan dengan nilai IKA berada pada rentang 50 hingga 53,64.

Kondisi yang menyebabkan IKA masih dalam kondisi tercemar riangan meliputi:

1. Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke Badan Air. Alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya air karena hutan adalah daerah tangkapan air akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air di daerah sekitarnya. Sensitifitas ekosisten hutan terletak pada tutupan lahannya, semakin baik tutupan lahannya semakin bagus fungsi tanggapan air nya.
2. Penambangan emas skala kecil (PESK) yang masih menggunakan merkuri Proses penambangan emas yang dilakukan secara tradisional dengan penarikan biji emas dengan menggunakan Hg menghasilkan limbah (taiing) pada proses pencucian, yang umumnya masih mengandung merkuri namun dibuang begitu saja langsung ke badan air atau ke permukaan tanah tanpa perlakuan yang menyebabkan air dan tanah tercemar merkuri, akibatnya terjadi akumulasi mercuri pada tanah dan tanaman pangan maupun biota air.
3. Masih terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan air limbah domestik, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan
4. Masih Kurangnya Fasilitas Buang Air Besar pada Kawasan Pemukiman Masyarakat.
5. Masih adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair. Dari hasil pengawasan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan, 9 (sembilan) usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 60% telah taat terhadap ketentuan pengelolaan limbah cair, 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan atau 33% kurang taat serta 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan atau 7% tidak taat terhadap ketentuan. Ketidak taatan umumnya terdapat pada aspek pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dan kepemilikan izin air pembuangan air limbah.
6. Prilaku Kehidupan Sosial Masyarakat terhadap Lingkungan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Tabel 2-75 Indeks Kualitas Udara

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	indeks					87,36
Sumatera Barat	indeks	82,9	89,87	88,37	90,39	90,22
Dharmasraya	Indeks	63,58	84,28	86,00	86,11	84,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Indeks Kualitas Udara/IKU adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Metode perhitungan dan analisa data yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas udara adalah model EU/Indeks annual Model EU-LEU. Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah parameter SO2 dan NO2.

Pada rentang waktu lima tahun terakhir, konsentrasi parameter NO2 rata-rata dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan konsentrasi parameter SO2 dimana terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan konsentrasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, konsentrasi pencemar SO2 dan NO2 tidak pernah melebihi baku mutu. Kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang ditandai dengan kenaikan nilai IKU, pada tahun 2021 terjadi penurunan.Nilai IKU Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 memperoleh status sangat baik, yaitu sebesar 91,90, setelah empat tahun sebelumnya berturut-turut berstatus baik.

c. indeks kualitas tutupan lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tabel 2-76 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator	**Satuan**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	2021
Nasional						60,72
Sumatera Barat		67,5	67,5	64,33	64,13	66,24
Dharmasraya	persen	63,58	43,73	42,92	40,95	42,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Dharmasraya mengalami penuruanan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Perhitungan IKTL ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan luas hutan sebesar 62.696,27 Ha, luas belukar dalam kawasan sebesar 5.641,62 Ha serta luas belukar pada fungsi lingdung sebesar 687,28 Ha dari total luas Kabupaten Dharmasraya.

d. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Tabel 2-77 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	**2021**
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1	1	4,8	6	2,1

Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2021

Pada tahun 2021 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungai sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 235 batang tanaman seperti Durian, Sukun, Nangka serta Mangga deserahkan ke 12 wilayah Nagari yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperkirakan penanaman bibit tersebut dapat melindungi sumber daya alam sekitar 2,1 Ha.

e. Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis

Tabel 2-78 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	**2021**
Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis	Ha	5	3,8	4,8	6	2,1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Pada tahun 2021 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungai sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 235 batang tanaman seperti Durian, Sukun, Nangka serta Mangga deserahkan ke 12 wilayah Nagari yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperkirakan penanaman bibit tersebut dapat melindungi sumber daya alam sekitar 2,1 Ha.

Pengelolaan terhadap lahan kritis telah dilakukan dengan pengelolaan berupa pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Nagari Sungai Duo seluas 0,22 Ha. Selanjutnya dengan penanaman sebanyak 235 batang bibit buah yang tersebar 12 Nagari dikabupaten Dharmasraya juga telah mampu meningkatkan luas tutupan lahan sekitar 1,88 Ha. Sehingga pada tahun 2021 dinyatakan terjadi peningkatan luas tutupan lahan sebesar 2,1 Ha.

f. Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)
6.

Tabel 2-79 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	Persen	n/a	6,32	8,31	8,92	11,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstrada sebagaimana PERMEN LHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan target 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup maka kegiatan pengurangan sampah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan hingga 11,34%. Namun masih perlu adanya upaya lebih karena masih kurang dari target Jakstrada pengurangan sampah sebesar 30%.

a. Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)

Tabel 2-80 Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	n/a	5,80	56,01	61,75	78,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup pada kegiatan penanganan sampah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 juga terus mengalami peningkatan hingga 78,71%. Capaian tersebut telah melebihi target Jakstrada yang ditetapkan oleh KLHK sebesar 70% hingga tahun 2025.

b. Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Tabel 2-81 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	**2021**
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/ kegiatan	0	22	25	29	71,42
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan limbah B3	usaha					10
Jumlah usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan limbah B3	usaha					14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah sebanyak 14 usaha/kegiatan. Meliputi Perusahaan yang bergerak pada kegiatan industri Kelapa serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Dimana 10 kegiatan sudah mentatati regulasi terkait pengelolaan limbah B3 sementara masih ada 4 kegiatan dengan status kurang taat. Sehingga cakupan ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 pada tahun 2021 sebesar 71,42%.

7. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a. Persentase kepemilikan KTP-el

Tabel 2-82 Persentase kepemilikan KTP-elektronik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kepemilikan KTP-elektronik	persen	94,23	98	99,23	97,74	99,91
Kepemilikan KTP-el	orang	131.011	140.801	147.757	149.352	156.636
Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas)	orang	139.033	143.675	148.739	152.911	156.770

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

b. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel 2-83 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	2,4	27,40	35,55	54,72
Jumlah anak memiliki KIA		1.496	18.255	25.026	38.460
Jumlah Anak Usia 0-17 tahun		62.340	66.610	69.398	70.282

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Tabel 2-84 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	persen	76,3	80,12	85,73	87,17	91,57
Jumlah Anak yang memiliki akta	Orang	48.413	55.264	61.103	65.506	68.803
Jumlah Anak Usia 0-18 tahun	orang	63.451	68.976	71.274	75.062	75.135

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

d. Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Tabel 2-85 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	persen	90,67	95,23	100	100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan		564	603	2.867	3.803
Jumlah Kematian yang dilaporkan		622	655	2867	3.803

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

e. Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Tabel 2-86 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	Orang	-	-	-	-	276
Jumlah Akta Perkawinan yang dilaporkan	Orang	-	-	-	-	276

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

f. Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Tabel 2-87 Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	0	0	0	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

g. Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Tabel 2-88 Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	0	0	0	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya

8. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

a. Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM

Tabel 2-89 Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021
Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	19,23
Jumlah nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Jumlah	10
Jumlah nagari	Jumlah	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nagari yang telah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM baru sebanyak 10 Nagari dari 52 Nagari se kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut dikarenakan penyusunan RPJM/RKP Nagari berbasis IDM baru dimulai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 penyusunan RPJM/RKP Nagari berbasis IDM akan diterapkan pada 52 Nagari se Kabupaten Dharmasraya.

b. Persentase APB nagari berbasis IDM

Tabel 2-90 Persentase APB nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021
Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	7,69
Jumlah APB nagari berbasis IDM	Jumlah	4
Jumlah nagari	jumlah	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nagari yang telah menyusun APB Nagari berbasis IDM baru sebanyak 4 Nagari dari 52 Nagari se kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut dikarenakan penyusunan APB Nagari berbasis IDM baru dimulai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 penyusunan RPJM/RKP Nagari berbasis IDM akan diterapkan pada 52 Nagari se Kabupaten Dharmasraya.

c. Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online

Keuangan Nagari berbasis Siskeudes Online baru akan diterapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2021 masih pada tahap sosialisasi dan percobaan.Kedepan diharapkan seluruh nagari sudah menerapkan Sistem keuangan nagari berbasis Siskeudes Online.

d. Persentase nagari memiliki bumnag berkembang

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. BUMNag berkembang merupakan tingkat klasifikasi bagi BUMNag yang telah melewati tahap tumbuh.

Tabel 2-91 Persentase nagari memiliki bumnag berkembang

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase nagari memiliki BUMNAG berkembang	Persen	11,53	19,23	21,15	26,92
Jumlah nagari memiliki BUMNAG berkembang	bumnag	6	10	11	14
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Terdapat peningkatan jumlah BUMNag berkembang sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 yang berjumlah 14 BUMNag dari 52 BUMNag se Kabupaten Dharmasraya. Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh BUMNag untuk menjadi BUMNag berkembang, yaitu: Kelembagaan, Aturan, Usaha, pelaporan, permodalan dan dampak terhadap masyarakat. Semakin tinggi nilai dari indikator tersebut maka semakin meningkat klasifikasi BUMNag tersebut.

e. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Tabel 2-92 Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Indikator	Satuan	2020	2021
Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	persen	84	86
Jumlah Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Lembaga	311	320
Jumlah LKN	lembaga	370	370

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) pada tahun 2021 yang berperan aktif dalam pembangunan sebesar 320 orang atau

86%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari peran aktif LKN dalam pembangunan nagari. Kondisi ini akan terus ditingkatkan agar pembangunan di nagari dapat berjalan sesuai harapan.

f. Jumlah Bumnag Bersama

Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNag Bersama) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

Tabel 2-93 Jumlah Bumnag Bersama

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Bumnag Bersama	jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Sampai tahun 2021 belum ada BUMNag bersama yang terbentuk di Kabupaten Dharmasraya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengamanatkan pengalihan status UPK eks-PNPM menjadi BUMNag Bersama, maka hal tersebut menjadi angin segar bagi daerah mengenai status kewenangan UPK-eks-PNPM yang tidak jelas sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014. Diharapkan pada tahun 2022 seluruh UPK-eks PNPM yang berjumlah 11 se Kabupaten Dharmasraya akan menjadi BUMNag Bersama.

g. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Kerjasama antar nagari dimaksudkan untuk kepentingan nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar nagari, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kerjasama nagari juga dapat dilakukan dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut kepentingan nagari dan bermanfaat bagi nagari.

Tabel 2-94 Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	jumlah	1	2	2	3	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

Pada tahun 2017 s.d. 2021 terdapat kenaikan jumlah kerjasama nagari hingga terdapat 4 kerjasama nagari dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan oleh nagari dengan empat Universitas yang ada di Sumatera Barat dalam program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa maupun Pengabdian Masyarakat.

Dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Antara lain:

- Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM. Hal tersebut terjadi karena penyusunan berbasis IDM merupakan hal yang baru dan belum semua nagari memahami pelaksanaannya.
- Belum optimalnya pengelolaan BUMNag sehingga sulit berkembang untuk bersaing dalam pasar kompetitif.

9. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

a. Angka kelahiran total

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi).

Tabel 2-95 Angka kelahiran total

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62	2,6

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2-96 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,1	81,15	81,2	81,25	81,3	83,43

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) dari tahun 2017 s.d. 2021 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2021, sebanyak 2,13% dari tahun 2020.

c. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Tabel 2-97 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,27	10,25	10,23	10,21	8,17

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

Unmet need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Tingginya angka unmet need berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dari tabel di atas, persentase Unmeet-Need mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal itu berarti kebutuhan KB yang belum terpenuhi semakin menurun.

d. persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

Tabel 2-98 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

e. persentase kelompok tribina yang aktif

Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga.

Tabel 2-99 persentase kelompok tribina yang aktif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2022

10. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

a. jumlah penambahan trayek angkutan umum

Trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Dharmasraya hanya trayek angkutan umum Damri pada jalur Pasar Ampalu -Pulau Punjung dan Sungai Rumbai – Pulau Punjung. Sejak tahun 2019-2021 tidak ada penambahan trayek angkutan umum.

Tabel 2-100 Jumlah penambahan trayek angkutan umum

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penambahan trayek angkutan umum	izin	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2022

b. persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Berdasarkan data Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dari tahun 2017-2021 menunjukan angka berfluaktif. Pada tahun 2017, persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR mencapai 78,76% dan pada tahun 2021 sebanyak 65,50%. Lebih jelasnya persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-101 Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	persen	102	94	72	102	65,50

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2022

c. akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Berdasarkan data akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2018-2019 adalah C artinya masih kurangnya sarana dan prasarana Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada tahun 2020-2021 meningkat menjadi akreditasi B. Hal ini dikarenakan adanya penambahan alat untuk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

ATabel 2-102 kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Nilai	N/A	C	C	B	B

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2022

11. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

a. Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi

Telekomunikasi terintegrasi adalah sistem transmisi informasi dari point-to-point atau point-to-multipoint melalui jarak. Aspek kunci yang membedakan sistem telekomunikasi terintegrasi dari sistem lain adalah konsep penggunaan berbagai format. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah diperlukan sarana telekomunikasi terintegrasi. Sasaran dari telekomunikasi terintegaris ini uaitu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk lebih jelasnya persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-103 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	54,05	78,95	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan data, persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2021 dari terus meningkat. Tahun 2017 hanya 54,05% OPD yang sudah memiliki jaringan terintegrasi, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 78,95%. Kondisi ini terus meningkat dari tahun 2019-2021 sudah seluruh OPD sudah memiliki jaringan terintegrasi. Meskipun sudah memiliki jaringan terintegrasi y ini, namun jaringan pada beberapa OPD tidak aktif karena prasarana Terminal Gunung Medan mengalami kerusakan dan kekuatan jaringan yang diberikan kepada OPD masih lemah karena memakai sistem radio dan tidak memakai sitem fiber optik.

b. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya mulai dari OPD sampai ke nagari. Model aplikasi yang dikembangkan baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan baik yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilayani mandiri oleh OPD.

Lebih jelasnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-104 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	32,43	50	94,74	100	100
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	15,30	100	100	100	100
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	11,53	21	21	21	21

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan data capaian persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sudah 32,43% OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dan tahun 2021 sudah seluruh OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan. Begitu juga di tingkat nagari, persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali

sebulan meningkat. Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan tahun 2017 hanya 15,30% dan tahun 2018-2021 sudah 100%. Dilihat berdasarkan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari tahun 2017 hanya 11,53% dan tahun 2018-2021 meningkat menjadi 21%. Permasalahan yang dihadapi dengan sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu sistem aplikasi yang dibuat mandiri oleh OPD tidak terintegrasi.

c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2-105 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Satuan	2020	2021
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	70.73	68,78
Jumlah Sasaran	Orang	152.911	152.911
Jumlah Penduduk	Orang	216.202	226.265

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan data terlihat bahwa persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020 sebanyak 70,73% dan menurun pada tahun 2021 sebanyak 68,78%. Berdasarkan data terjadi penurunan akibat dari penggunaan data jumlah penduduk sasaran tahun 2020 dan tahun 2021 sama sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan.

12. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
    a. persentase Koperasi Sehat

Tabel 2-106 Jumlah Koperasi Sehat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	6	13	25	30	

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2022

Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terdapat 6 Koperasi yang dinyatakan sehat yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku Terakhir. Data Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 58 Koperasi sehat pada tahun 2021. Penilaian kesehatan Koperasi wajib dilakukan setelah Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jati diri Koperasi.

b. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Tabel 2-107 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	unit	20	25	34	22	

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana usaha yang termasuk skala mikro adalah usaha dengan kriteria kekayaan bersih/Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) yakni batas maksimal sebesar Rp. 50 Juta dan Hasil Perjualan/Omset maksimal Rp. 300 juta. Sementara untuk naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil jika ttelah berda pada kriteria kekayaan bersih/Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) yakni besar dari Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta dan Hasil Perjualan/Omset besar dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 Milyar. Pada tahun 2017 jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil sebanyak 20 usaha. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas mengalami penurunan sampai tahun 2021. Penurunan tersebut salah satunya sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi juga melemah.

13. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

a. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Tabel 2-108 Nilai realisasi Investasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai realisasi Investasi	rupiah	291.101.280	3.557.285.000	160.860.163.587	148.462.000.000	196.395.700.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2022

Realisasi Investasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun terkait dengan permasalahan Pandemi Covid-19 maka investasi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai investasi kembali meningkat dengan nilai investasi sebesar Rp. 196.395.700.000,-.

b. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Tabel 2-109 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	persen	11,22	44,22	0,07	0,32	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2022

Pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2017 sebesar 11,22%, mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Namun pertumbuhan investasi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 dan sedikit meningkat pada tahun 2020, namun data 2019 dan 2020 masih jauh dari data tahun 2018. Kondisi tersebut juga terkait dengan Pandemi Covid-19.

14. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

a. Jumlah cabang olahraga yang aktif

Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa cabang olahraga yang aktif seperti paralayang, karate, volly dan beberapa cabor lainnya secara umum sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya ke luar daerah.

Tabel 2-110 Jumlah cabang olahraga yang aktif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cabang olahraga yang aktif	Kelp	29	30	32	33	33

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa pada tahun 2017 s.d. 2021 jumlah cabang olahraga yang aktif terus meningkat. Dari 29 buah pada tahun 2017 sampai menajdi 33 buah pada tahun 2021.

b. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu mendukung pencapaian prestasi olahraga di tingkat provinsi. Dukungan tersebut berupa pengiriman atlet-atlet terbaik untuk mengikuti pertandingan olahraga tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2-111 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabang	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

Pada tahun 2017 s.d. 2021 tidak ada prestasi yang didapat dari cabang olahraga tingkat Provinsi yang diikuti. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya membina atlet-atlet daerah untuk dapat bersaing ke depannya di tingkat provinsi.

c. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Tabel 2-112 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabang	-	2	-	-	3

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

d. Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Tabel 2-113 Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	5	5	5	6	8

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

e. Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Tabel 2-114 Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	orang			112	-	18

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

f. Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Tabel 2-115 Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pramuka yang aktif	organisasi	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022:

g. Jumlah pelatih bersertifikat

Tabel 2-116 Jumlah pelatih bersertifikat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelatih bersertifikat	orang	15	16	18	18	15

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2022

15. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

a. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Perkembangan dari indikator urusan pemerintahan bidang statistic berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Dharmasraya Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya dari tahun 2016-2021.

Perkembangan Buku Sumbar Dalam Angka dan Buku PDRB masih dilaksanakan oleh BPS, karena sesuai dengan Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri nomor 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada dua Peraturan itu dinyatakan kalau OPD yang menangani Statistik sektoral sebagai wali data. Selain itu, berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Secara umum dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya persentase ketersediaan data statistik sektoral dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-117 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	75	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase ketersediaan data Statistik sektoral dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 75% menjadi 100%.

b. Jumlah Nagari Statistik

Nagari statistik yaitu nagari yang mengembangkan basis data secara statistik. Launching Nagari Statistik pertama di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada tahun 2018 di Nagari Sungai Duo dan tahun 2020 mulai dikembangkan ke Nagari Gunung Medan, Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur.

Tabel 2-118 Jumlah Nagari Statistik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Nagari Statistik			1	4	4	4

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dengan adanya nagari statistik yaitu masih terbatasnya kemampuan sumberdaya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal dan Level pengambil kebijakan nagari yg dipilih tidak mengerti sementara kegiatan ini meruipakan pilot projec nasional. Selain itu meskipun sebagai pilot projec nasional tetapi tindak ada aprisiasi dari pemerintah pusat untuk tindak lanjut dari kegiatan ini.

c. Jumlah Kecamatan Statistik

Kecamatan statistik yaitu kecamatan yang mengembangkan basis data secara statistik. Pengembangan Kecamatan Statistik dimulai tahun 2020 di Kecamatan Sitiung, namun belum dilakukan launching sampai saat ini.

Tabel 2-119 Jumlah Kecamatan Statistik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kecamatan Statistik						1

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Jumlah kecamatan statistik sampai saat ini baru 1 kecamatan yaitu Kecamatan Sitiung. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih terbatasnya kemampuan sumberdaya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal.

16. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

a. Aplikasi yang dilakukan asesment

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Tabel 2-120 Aplikasi yang dilakukan asesment

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Aplikasi yang dilakukan asesment	Unit	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Aplikasi yang dilakukan asesment di Kabupaten Dharamsraya baru sebanyak 4 unit. Assesment dilakukan dengan Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2017 yaitu website utama dan seluruh website OPD, Website server, Aplikasi LPSE dan Aplikasi PPID, tahun 2018 sampai 2021 belum dilakukan penambahan assessment. Permasalahan saat ini yaitu masih menimnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.

b. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Tabel 2-121Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	persen	%	0	0	5,26	5,26
Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	OPD	OPD	-	-	2	2
Jumlah Perangkat Daerah	OPD	OPD	38	38	38	38

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa persentase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital tahun 2017 sebanyak 75% dan miningkat dari tahun 2018-2021 menjadi 100%. Artinya seluruh perangkat daerah sudah diambil data sertifikat digital seluruhnya, namun belum diaplikasikan, yang sudah diaplikasikan dalam pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana dokumen kemasyarakatan seperti akta kelahiran telah menggunakan barcode, surat izin usaha menggunakan barcode.

17. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

a. Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Tabel 2-122 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	25	30	30	30

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2022

Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 25 group pada tahun 2018 menjadi 30 group pada tahun 2021.

b. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Tabel 2-123 Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2021
Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	jenis	30

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2022

c. Persentase lembaga adat yang aktif

Tabel 2-124 Persentase lembaga adat yang aktif

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	85	90	100	100

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2022

Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2021.

d. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Tabel 2-125 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	11	26	21

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2022

Selanjutnya jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan terus bertambah dari 11 cagar budaya pada tahun 2019 dan 21 cagar budaya pada tahun 2021.

e. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Tabel 2-126 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	jenis	`	37	56

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan terus meningkat dari tahun 2019 sebanyak 10 unit dan sampai tahun 2021 berjumlah 56 unit

18. **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat. Selain kunjungan ke perpustakaan daerah, juga dilakukan layanan kunjungan pustaka keliling ke sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 – 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Jumlah pemustaka mengalami peningkatan cukup tinggi karena pada tahun 2018 kunjungan Pustaka Keliling sudah sampai ke sekolah-sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Tabel 2-127 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	22.447	127.084	157.579	67.742	202.273

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2022

b. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Tabel 2-128 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	2,94	7,72	8,09	6,25	9,19
Jumlah perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Perpustakaan	8	21	22	17	25
Jumlah perpustakaan seluruhnya	Perpustakaan	272	272	272	272	272

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2022

19. **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat dan erah dan nagari sejak tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel 2.17 dan 2.18 berikut:

a. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-129 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	PD	3	3	3	3	3
Jumlah perangkat daerah	PD	38	38	38	38	38

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2022

b. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2-130 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	1,92	3,85	5,77	5,77	5,77
Jumlah Nagari yang mengelola arsip secara baku	Nagari	1	2	3	3	3
Jumlah Nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2022

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan.

Tabel 2-131 Produksi Perikanan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan	Ton	15.562	17.042	19.597	22.185	27.182

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2022

Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebanyak 27.182,2 Ton. Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya yang terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan insfrastruktur pendukung perikanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga perikanan di daerah dapat berkembang dengan baik.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Jumlah kunjungan wisatawan

Tabel 2-132 Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan wisatawan	orang	31.034	35.423	37.830	6.164	101.394

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2022

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 31.034 orang dan mengalami peningkatan terus hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6.164 orang akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan kunjungan wisatawan sejumlah 101.394 orang.

b. Tingkat hunian akomodasi

Tingkat hunian akomodasi atau disebut juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia

Tabel 2-133Tingkat hunian akomodasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat hunian akomodasi				23,69	9,95	22,05
Jumlah Malam Kamar yang Dihuni				19697	9282	22.210
Jumlah Malam Kamar yang Tersedia				83.160	93.240	100.740

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2022

Tingkat hunian akomodasi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 tingkat hunian sebesar 23,69% dengan jumlah malam kamar yang dihuni sebanyak 19.697 menjadi 9,95% pada tahun 2020 dengan 9.282 kamar yang dihuni. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat hunian akomodasi menjadi 22,05% dengan 22.210 kamar yang dihuni dari 100.740 jumlah kamar. Penurunan tingkat hunian akomodasi pada tahun 2020 sebagai akibat dari PandemiCovid-19.

c. Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Tabel 2-134 Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	unit	650	700	750	32	75

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2022

Jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2017 sebanyak 650 unit, terus mengalami pertumbuhan hingga 2019 sebanyak 750 unit. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 32 unit akibat pandemi Covid-19. Lalu pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan jumlah ekonomi kreatif menjadi 75 unit.

d. Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Tabel 2-135 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga			7	12	16

Sumber :bidang pertanian

Jumlah lembaga pada daya tarik pariwisata yang dibina mengalami peningkatan dari 7 lembaga pada tahun 2019 menjadi 16 lembaga pada tahun 2021.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2-136 Produksi Sektor Pertanian

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Padi	ton	58.259	72.208	67.850	68.652	40.797
	Produktivitas	ton/ha	4,60	4,52	4,59	4,64	4,46
	Luas panen	ha	12.658	15.963	14.774	14.783	9.149
2	Produksi jagung	ton	24.470	85.471	104.626	4.069	12.125
	Produktivitas	ton/ha	6,11	6,11	6,23	5,79	4,79
	Luas panen	ha	3.823	2.498	843	698	2.093
3	Produksi kelapa sawit	ton	108.593	85.471	104.626	104.992	103.279,18
	Produktivitas	ton/ha	3.91	3.83	4.68	4.98	4,60
	Luas panen	ha	27.822,85	22.196,10	22.361,85	22.441,85	32.743,64
4	Produksi karet	ton	29.019	29.832	29.615,41	29.689	2.366,76
	Produktivitas	ton/ha	0.85	0.99	0.87	0.78	0,88
	Luas panen	ha	34.155,58	34.226,08	34.188,00	34.278,00	3.758,90
5	Produksi Daging	Ton	1.254	4.617	4.187	6.340	1.558,80
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	46.045	46.993	48.062	49.043	51.380

Sumber : Dinas Pertanian, tahun 2022

Produksi Padi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2020 produksi padi kembali mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2021. Sementara untuk produksi jagung dari tahun 2017 mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 104.626 ton, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 4.069 ton dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan nilai produksi jagung sebesar 12.125 ton. Terjadinya fluktuasi produksi padi dan jagung tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti penggunaan bibit yang tidak unggul, pemupukan yang tidak teratur dan serangan penyakit. Untuk tahun 2021 permasalahan yang menonjol adalah akibat dilakukannya perbaikan saluran irigasi, sehingga sawah tidak bisa dialiri. Makanya petani yang tadinya menanam padi beralih menanam jagung. Jadi pada tahun 2021 produksi padi menurun dan terjadi peningkatan produksi jagung.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Tabel 2-137 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	18,91	32,42	43,23	48,63	48,63

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2022

Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi sebesar 18,91% mencapai 48,63% pada tahun 2021. Pada tahun 2017 jumlah pasar yang direvitalisasi sebanyak 7 pasar dari total 37 pasar. Pada tahun 2021 jumlah pasar yang direvitalisasi sebanyak 18 pasar dari 37 pasar rakyat.

b. Alat UTTP yang Beratanda tera sah

UTTP merupakan singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengakapnnya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. Pelaksanaan tera ulang UTTP adalah dalam rangka perlindungan konsumen atas pembelian barang.

Tabel 2-138 Alat UTTP yang Beratanda tera sah

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	200	750	772	480	815

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2022

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

a. Persentase peningkatan omzet IKM

Tabel 2-139 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	-	7,78	6,62	6,50	9,26
Omzet IKM tahun n	Rupiah	85.758.123	92.999.751	96.836.486	103.170.000	160.793.698
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah		85.758.123	92.999.751	96.836.486	147.170.356

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2022

Persentase IKM dengan peningkatan Omzet pada tahun 2018 sebesar 7,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2021 kondisi IKM dengan peningkatan Omzet kembali meningkat hingga 9,29%. Untuk omzet IKM dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan.

b. Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar

Tabel 2-140 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	%	-	1,76	4,3	9,6	12,5
Jumlah IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Unit	-	12	32	76	111
Jumlah IKM seluruhnya	Unit	640	681	737	789	888

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2022

Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dari 1,76% menjadi 12,5%. Hal ini disukung oleh peningkatan jumlah IKM yang memiliki legalitas sesuai standar dari tahun ketahun hingga tahun 2021.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Untuk menentukan bobot penilaian/skor capaian kinerja masing-masing indikator pada LPPD dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), dengan sasaran penilaian sebagai berikut :

1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2) Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD;
3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD;
4) Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan;

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 s.d. 2021 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 2-141 Nilai LPPD

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rangking	Rngking	120	37	-	-	
Skor	indeks	3,1226	3,1551	3,5138	-	
status	Tinggi/ sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	-	

Sumber : Sekretariat Daerah

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2020, masih menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri dan untuk LPPD Tahun 2021 masih dalam proses evaluasi.

Perkembangan realisasi indikator LPPD dari tahun 2017 s.d. 2020 sangat memuaskan, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Adanya komitmen dari pimpinan kepada seluruh kepala OPD terkait data LPPD yang berkualitas sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, kinerja yang maksimal dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data.
2. Verifikasi data capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja, meliputi validasi capaian kinerja dan verifikasi elemen data yang dilakukan secara mandiri (Self Assesment-Evaluasi Mandiri).

3. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi capaian kinerja melalui pembandingan dengan data-data tahun sebelumnya, baik data-data yang disampaikan oleh perangkat daerah provinsi maupun data agregasi dari kabupaten kota.

b. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai alat pengukur sejauh mana penerapan SAKIP di suatu daerah, ditetapkan 5 komponen penilaian SAKIP, Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.

Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya 20.

Untuk melihat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2021dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-142 Nilai SAKIP

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai hasil evaluasi	AA/A/ BB/B/CC	B	B	B	B	B
Tingkat akuntabikitas kinerja	indeks	60,46	62,12	62,58	63,44	63,98
Perencanaan Kinerja	bobot	20,81	21,08	18.43	19,35	19,42
Pengukuran Kinerja	bobot	13,02	13,96	16,22	16,48	16,48
Pelaporan Kinerja	bobot	10,14	10,16	10,92	10,58	10,61
Evaluasi internal	bobot	5,72	5,8	5,91	6,47	6,37
Capaian kinerja	bobot	10,77	11,13	11,1	10,56	11,1

Sumber : Sekretaiat Daerah, Tahun 2022

Selama 5 tahun terakhir, nilai SAKIP di Kabupaten Dharmasraya telah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum signifikan, dapat dilihat dari tabel diatas, dalam jangka waktu 2017-2021, Kabupaten Dharmasraya hanya mampu menaikkan nilai kurang dari 5 poin. Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, kelemahan dalam penerapan SAKIP di Kabupaten Dharmasraya adalah penerapan sakip belum sampai di tahap implementasi, hanya sebatas pemenuhan dokumen.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat, nilai komponen perencanaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, dan komponen pengukuran kinerja yang mendapatkan peningkatan nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir.

c. Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan; penataan perundang-undnagan; penataan penguatan organisasi; penguatan tata laksana; penataan SDM aparatur; penguatan akuntabilitas kinerja; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu birokrasi yg bersih dan akuntabel; birokrasi yg efektif dan efisien; serta birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan perUUan
3. Penataan penguatan Organisasi
4. Penguatan Tata laksana
5. Penataan SDM aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu :

1. Birokrasi yg bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yg efektif dan efisien
3. Birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi suatu daerah dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi daerah tersebut. Pencapaian pelaksanaan RB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-143 Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)	nilai	n/a	n/a	n/a	44,7	46,58

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2022

Kabupaten Dharmasraya melaksanakan penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pertama pada Tahun 2020, dan mendapatkan nilai RB 44,7 dengan Kategori C, di Tahun 2021 indeks RB mengalami peningkatan sebanyak 2 poin menjadi 46,58 namun belum meningkatkan kategori menjadi CC, Laporan Hasil Evaluasi RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB menyatakan kelemahan pelaksanaan RB diKabupaten Dharmasraya adalah terkait dengan reform atau implementasi RB.

2. **Sekretariat DPRD**

a. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya. Sebagai unsur dari penyelenggaran pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut trdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2-144 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100
Jumlah agenda DPRD yang difasilitasi	agenda	188	137	104	125	147
Jumlah agenda DPRD seluruhnya	agenda	188	137	104	125	147

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 s.d. 2021 agenda DPRD yang dilaksanakan, seluruhnya difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Dengan demikian persentase agenda DPRD yang difalititasi setiap tahunnya adalah 100%.

3. **Keuangan**

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2-145 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

b. Rata-rata ketergantungan dana transfer

Tabel 2-146 Rata-rata ketergantungan dana transfer

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	86,94	90,89	92,36	91,63	85,73

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

c. Persentase SILPA terhadap APBD

Tabel 2-147Persentase SILPA terhadap APBD

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,38	2,99	0,38	0,85	7,66
Jumlah SILPA terhadap APBD	Juta Rp	31.647,42	28.855,80	3.893,45	8.337,43	70.209,49
Jumlah belanja APBD	Juta Rp	935.591,36	964.654,49	103.6553,41	985.747,17	917.045,66

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

4. **Kepegawaian**

a. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN pada dasarnya merupakan respon proaktif dan sekaligus mandat yang dilakukan oleh BKN untuk menjawab kebutuhan tingkat profesionalitas ASN melalui standariusasi pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan pokok dari program ini untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan serangkaian langkah kegiatan identifikasi dan pemetaan terhadap hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kreteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN.

Tabel 2-148 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68	45,46	68	58,04	62,87
Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi	Nilai	0,47	12,32	12	12,53	13,39
Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi	Nilai	0	12,82	24	15,49	20,57
Indeks Profesionalisme dimensi kinerja	Nilai	82,69	15,32	27	24,8	23,92
Indeks Profesionalisme dimensi disiplin	Nilai	0,46	5	5	5	5

Sumber : BKPSDM, Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Profesionalitas ASN berfluktuasi. Hal tersebut terjadi karena sistem penilaian pada tahun 2017 berbeda dengan tahun setelahnya. Pada tahun 2017 yang diukur indeks profesionalitasnya hanya pejabat struktural, dengan melihat penilaian gap antara profil PNS dengan jabatan yang didudukinya. Melihat dari data pada tabel di atas terjadinya fluktuatif hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN terjadi karena adanya mutasi ASN, adanya pegawai yang pensiun dan adanya penerimaan CPNS.

b. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana tahunan instansi yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Tabel 2-149 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	100	100	100	99,35	14,39
Jumlah ASN yang menyusun SKP	Jumlah	3607	3489	3632	3533	506
Jumlah pegawai	Jumlah	3607	3489	3632	3556	3516

Sumber : BKPSDM, Tahun 2022

Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu pada tahun 2017 s.d. tahun 2020 bisa dikatakan 100%. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan. Jumlah ASN yang menyusun SKP tepat waktu tahun 2021 sebanyak 506 orang, dari jumlah ASN sebanyak 3516 atau sebesar 14,39 %. Adapun penyebab tidak maksimalnya capaian kinerja pada penyusunan SKP ini antara lain masih banyak ASN yang belum memahami cara penyusunan SKP yang benar disebabkan adanya perubahan tata cara penyusunan SKP dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 ke Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021. Selain itu juga sering berubahnya regulasi tentang penailaian kinerja ASN, sehingga pemahaman ASN terhadap regulasi yang baru masih kurang. Disamping itu, masih rendahnya kepedulian ASN dalam menyusun SKP.

c. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Tabel 2-150 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	32,23	33,39	35,03	41,25	79,04
Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah	156	173	179	205	215
Jumlah pegawai	Jumlah	484	518	511	497	272

Sumber : BKPSDM, Tahun 2022

Dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penempatan ASN sesuai kompetensi yaitu dari 32,23% pada tahun 2017 menjadi 79,04% pada tahun 2021. BKPSDM sebagai instansi pembina kepegawaian terus berupaya menempatkan ASN sesuai kompetensinya dengan mengacu pada hasil dari analis jabatan, demi mencapai hasil yang maksimal dalam organisasi.

d. Persentase kasus ASN yang tertangani

Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati.

Tabel 2-151 Persentase kasus ASN yang tertangani

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah kasus yang diterima	Jumlah	12	8	6	5	83
Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah	12	8	6	5	83

Sumber : BKPSDM, Tahun 2022

Pada tahun 2021 terjadi lonjakan pada pelanggaran disiplin ASN, dimana berjumlah 83 kasus. Hal ini disebabkan keluarnya peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS sebagai pengganti peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Selain itu BKN juga mengeluarkan sebuah aplikasi IDIS (integrated discipline) sebagai bentuk upaya early warning terhadap pelanggaran disiplin PNS yang terintegrasi kepada SAPK.

5. **Pendidikan dan Pelatihan**

a. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

Tabel 2-152 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	Persen	16,22	22,99	30,59	33,63	33,52
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah	585	802	1111	1196	285
Jumlah pegawai	Jumlah	3607	3489	3632	3556	3516

Sumber : BKPSDM, Tahun 2022

ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2021 di lingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya berjumlah sebanyak 285 orang. Terdiri dari ujian dinas sebanyak 18 orang dan penyesuaian ijazah sebanyak 14 orang. Peserta diklat sebanyak 11 orang, izin belajar sebanyak 55 orang. Serta peserta diklat prajabatan sebanyak 187 orang.

6. **Penelitian dan Pengembangan**

a. Indeks inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah untuk Peningkatan Pelayanan Publik;Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah.

Tabel 2-153 Indeks inovasi daerah

Indikator	Satuan	2020	2021
Jumlah skor	indeks	3	48,07
kategori	-	Kurang inovatif	inovatif

Sumber : Bapppeda, Tahun 2022

E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. **Inspektorat Daerah**
2.

a. Tingkat Kapabilitas APIP

Penilaian kapabiltas APIP dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (initial), level 2 (insfrastruktucture), Level 3 (integrated), Level 4 (managed) dan Level 5 (optimizing).

Tabel 2-154 Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kapabilitas APIP	level	3DC	3DC	3DC	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2022.

Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2017 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada akhir 2017 dilakukan penilaian lagi untuk menuju level 3 sehingga Inspektorat memperoleh nilai pada evel 3 DC yang artinya ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi sehingga menjadi level 3 dengan catatan. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian, pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bisa mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 dan 2021 sudah dilakukan penilaian dengan memperoleh level 3.

b. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengandalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefenisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2-155 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	1	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2022.

Penialian mauritas SPIP baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2018 dilakukan penialian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3,01 sehingga berada pada level 3. Pada tahun 2018 tidak dilakukan, pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi dokumen untuk penilaian dengan system e-SPIP namun belum dinilai karena BPKP mengutamakan daerah yang belum level.

F. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persentase Pembinaan Partai Politik

Tabel 2-156 Persentase Pembinaan Partai Politik

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	30	68,7	125	62,5

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2022.

Dari tabel di atas tergambar bahwa pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kenaikan signifikan dari persentase pembinaan partai politik, dan kembali menurun pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 s.d. 2020 intensif dilakukan pembinaan kepada partai politik untuk menyonsong Pemilu serentak pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan legislatif pada tahun 2020.

b. Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 2-157 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	30	55	20,2	10,14

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2022.

Dari tabel di atas terlihat kenaikan persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena imbas pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak awal tahun 2020.

c. Persentase Pembinaan LSM

Tabel 2-158 Persentase Pembinaan LSM

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pembinaan LSM	Persen	30	30	63,6	33,3	

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2022.

Begitu Dari tabel di atas terlihat kenaikan persentase pembinaan LSM pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena imbas pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak awal tahun 2020.

d. Jumlah Konflik Sosial

Tabel 2-159 Jumlah Konflik Sosial

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konflik Sosial	Kasus	5	5	5	3	5

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2022.

Jumlah konflik sosial yang terjadi di daerah pada tahun 2017 s.d. 2021 adalah 5 kasus, kecuali tahun 2020 hanya sebanyak 3 kasus.

e. Jumlah Penyakit Masyarakat

Tabel 2-160 Jumlah Penyakit Masyarakat

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	3	3	2	3	2

Sumber : Kantor Kesbangpol, Tahun 2022.

Jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2017, 2018 dan 2020 sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 terdapat 2 kasus penyakit masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021

Matrik terlampir ....

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

Tabel 2-161 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

No	Misi/ Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**					
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-		
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	49,71	93,792
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	85,61	143,017
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	91,73	101,922
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	87.02.00	76.30.00	2.38.24	3,451
	Rasio pemukiman layak huni	persen	85	85,85	-	
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,2	79,76	116,950
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26		
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,66	72.29.00	4,215
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,53	100,028
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,55	100,825
	Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	100,000
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	88,32	99,426
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**					
	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	2,5	3,42	136,800
	Gini rasio	indeks			0,268	99,259
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	46,52	108,620
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	13,59	431,429
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5,88	5	85,034
	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,67	91,368
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**					
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	60	46,58	77,633
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3,066		
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	B	
	Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,6		
	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9			
	Indeks SPBE	indeks	1,35	1,625	1,09	67,077
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	62,87	101,403
	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	80	81,831	102,289
	Persentase nagari mandiri	persen	0,3396	11,53	9,61	83,348

No	Misi/ Indikator	Satuan	Kondisi awal 2020	Target	Realisasi	Capaian
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,828	101,111
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7086	101,431
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,6038	102,495
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**					
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks	-	68,78		
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	80	87,27	109,088
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	64,4	63,38	98,416
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**					
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1		
	Persentase peningkatan zakat	persen	2	2		-30,000
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	100	129,870

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2021

Tabel 2-162 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan tahun 2021

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	67,99	97,45
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94	106,49	100,52
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3	96,75	92,76
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	103,3	Persen	99,39	98,4	99,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	93,13	Persen	94,13	93,75	99,60
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	468	Orang	428	45,43	10,61
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	7614	orang	7758	88,04	1,13
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	95	53,45	56,26
01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					
1	Angka kematian bayi (AKB)	9	per 1.000 kelahiran hidup	19,5	8,98	46,05
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	3	per 100,000 kelahiran hidup	112	109,35	97,63
4	Prevalensi Stunting	12,8	indeks	12,42	11	77,13
3	Prevalensi Malnutrisi	25,3	Persen	25		0,00
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	27,5	Persen	29	60	206,90
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	39	Persen	41	51,92	126,63
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100	Persen	100	100	100,00
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100	Persen	100	100	100,00
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	Persen	100	100	100,00
9	Visite Rate	3,8	/ Jumlah Penduduk	4	4	100,00
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	21,4	Persen	35,7	21,4	59,94

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	50	Persen	100	50	50,00
01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**					
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	50,19	94,70
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40	70,4	176,00
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	60	79,76	132,93
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	26,17	43,72
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	91,73	101,92
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35		0,00
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	44,73	81,33
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	5		0,00
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	Persen	5		0,00
01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	85,85	83,99	97,83
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,73	Persen	88	90,68	103,05
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	Persen	100	100	100,00
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	100	100,00
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	87.02.00	Persen	76.30.00	0,56	17,57
6	Cakupan lingkungan	95,96	Persen	55,74	50,36	90,35

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU					
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	8,52	Persen	0	1,14	100,00
01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	91	Persen	100	90	90,00
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	1	Persen	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	0	0	0,00
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	9	Persen	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	0	0,00
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	-	Persen	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	100	133,33
01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					
1	Persentase PPKS yang tertangani	75	Persen	78	75	96,15
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Persen	100	100	100,00
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	Persen	100	100	100,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
02.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					
1	Tingkat Partisipasi	72,72	Persen	75,62	73,04	96,59

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Angkatan Kerja					
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	Persen	26,32	93,86	356,61
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	41,36	Persen	42,56	120	281,95
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	Persen	100	100	100,00
02.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	Persen	100	100	100,00
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	95,23	Persen	95,23	100	105,01
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	Predikat/ Nilai	-	pratama	100,00
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	melebihi
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	Persen	100	100	100,00
6	Rasio KDRT	0,002	Persen	0,002	0,002	100,00
02.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	27,75	Persen	33	27,872	84,46
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2.540	K.Kal/kap/hr	2.550	2.550	100,00
3	Skor Pola Pangan Harapan	85,6	indeks	87	91	104,60
02.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	23.52	Persen	28.52.00	-	0,00
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	100.00.00	Persen	100		0,00
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	Persil	5		0,00
02.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola	-	dokumen	2		0,00

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	lingkungan hidup					
2	indeks kualitas air	70	indeks	56,1	52,73	93,99
3	indeks kualitas udara	86,11	indeks	83,65	84,49	101,00
4	indeks kualitas tutupan lahan	40,95	indeks	43,03	42,7	99,23
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	6 Ha	Ha/Kawasan	3	2,1	70,00
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	6	Ha	5	2,1	42,00
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	8,92%	persen	10,00	11,34	113,40
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	6,72%	persen	9,00	78,71	874,56
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	29	usaha/kegiatan	5	71,42	1428,40
02.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**					
1	Persentase kepemilikan KTP-el	97,74	Persen	100	99,91	99,91
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35,55	Persen	70	54,72	78,17
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	87,17	Persen	92	91,57	99,53
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	Persen	100	100	100,00
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	Persen	85	100	117,65

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	-	Persen	85	0	0,00
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	4	40,00
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	4	40,00
02.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**					
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	0	Persen	0	19,23	100,00
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	0	Persen	0	7,69	100,00
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online		Persen	50	0	0,00
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	21,15	Persen	23,08	26,92	116,64
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	Persen	86	86	100,00
6	Jumlah Bumnag Bersama	0	unit	0	0	0,00
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	nagari	0	4	100,00
02.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**					
1	Angka kelahiran total	2,71	Persen	2,69	2,62	97,40
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81,1	Persen	81,15	81,3	100,18
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,29	Persen	10,27	8,17	79,55
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	100	Persen	100	100	100,00

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	persentase kelompok tribina yang aktif	100	Persen	100	100	100,00
02.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	-	Persen	60	0	0,00
2	V/C (volume capaciti Ratio)	-	indeks	0,2	0	0,00
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	trayek	0	1	100,00
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	80	Persen	85	65,5	77,06
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	-	bobot	B	B	100,00
02.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**					
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD		38 OPD	100	100,00
		1 Nagari		1 Nagari		0,00
						0,00
						0,00
		1 Puskesmas		1 Puskesmas		0,00
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	aplikasi	43	43	100,00
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	aplikasi	11	68,78	625,27
02.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**					
1	persentase Koperasi Sehat	25	Koperasi	30		0,00
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	Usaha mikro	30		0,00
02.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	130.026	miliar rupiah	148	196,40	132,29
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	3	Persen	3	0	0,00

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
02.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**					
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	33	cabor	15	33	220,00
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	-	cabor	19	0	0,00
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	-	cabor	3	3	100,00
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	unit	7	8	114,29
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	-	Orang	1	18	1800,00
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	-	unit	15	30	200,00
7	Jumlah pelatih bersertifikat	-	Orang	-	15	100,00
02.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	Persen	55	100	181,82
2	Jumlah Nagari Statistik	1	Nagari	1	4	400,00
3	Jumlah Kecamatan Statistik	-	kecamatan		1	100,00
02.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	web, aplikasi	4	4	100,00
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	Persen	2	5,26	263,00
02.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	30	Grup	30	30	100,00
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	Jenis	12	30	250,00
3	Persentase lembaga adat yang aktif	100	Persen	75	100	133,33
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	26	unit	25	21	84,00
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	Unit	10	56	560,00
02.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67.742	orang	63.000	202.273	321,07

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6,25%	Persen	32,39	9,19	28,37
02.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	39,47	Persen	47,37	7,89	16,66
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	17,31	Persen	23,08	5,77	25,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
03.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**					
1	Produksi Perikanan	22.185	Ton	25.509	27.182	106,56
03.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					
1	Jumlah kunjungan wisatawan	6.164	Orang	9164	101.394	1106,44
2	Tingkat hunian akomodasi	-	Persen	6,548	22,05	336,74
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	800	Unit	32	75	234,38
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina		lembaga	13	16	123,08
03.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					
1	Produksi Padi	66.664	ton	67.000	40.797	60,89
2	Produksi Jagung	4.069	ton	4.000	12.125	303,13
3	Produksi Kelapa sawit	104.992	ton	100.000	#########	103,28
4	Produksi karet	29.689	ton	30.500	1.558,80	5,11
5	Produksi Daging	6.340	ton	1.200	1.558,80	129,90
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	49.043	ekor	42.000	51.380	122,33
						0,00
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	%	35	48,63	138,94
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	25,13	Unit	30	815	2716,67
03.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					
1	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	Persen	8	9,26	115,75
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	7,05	Persen	40	12,5	31,25
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
04.01	**Sekretariat Daerah**					
1	Nilai LPPD	3,51	bobot	3,6		0,00

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai SAKIP	63,44	bobot	65,5	63,98	97,68
3	Nilai RB	44,7	bobot	59,9	46,58	77,76
04.02	**Sekretariat DPRD**					
	Kinerja DPRD					
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	30	Persen	75	100	133,33
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
05.01	**Perencanaan**					
1	Capaian sasaran RPJMD	-	Persen	90		
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD		Persen	90		
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan		persen	90		
05.02	**Keuangan**					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	persen	WTP	WTP	100
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	90	persen	90	85,73	95,26
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0,3	persen	0,3	7,66	50,07
05.03	**Kepegawaian**					
1	Indeks Profesionalitas ASN		Persen	62	62,87	101,40
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99,35	persen	94	14,39	15,31
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41,25	persen	42	79,04	188,19
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	100	Persen	100	100	100,00
05.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**					
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	33,63	persen	11	33,52	304,73
05.05	**Penelitian Dan Pengembangan**					
1	Indeks inovasi daerah	3	indeks	48,07	48,07	100
05.06	**Pengelolaan Perbatasan**					
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
06.01	**Inspektorat Daerah**					0
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Bobot	2	3	150

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	Bobot	-	3	100
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
07.01	**Kecamatan**					
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80		
2	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	persen	60		
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	-	Kasus	2		
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
08.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**					
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	-	Persen	30	62,5	208,33
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	Persen	30	10,14	33,80
3	Persentase Pembinaan LSM	-	Persen	30		0,00
4	Jumlah Konflik Sosial	-	Kejadian	5	5	100,00
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	2	100,00

2.2.4. Evaluasi pelaksanaan SPM sampai tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dimana SPM ini terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintahan Daerah.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam SPM terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, SPM untuk urusan pemerintahan ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan :

a. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
b. Sub urusan kebakaran,
c. Sub urusan bencana.

6. Urusan pemerintahan bidang sosial.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu penerapan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan SPM. Untuk penerapan SPM ada 4 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. **Pengumpulan data**, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, pengumpulan data tersebut diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2. **Penghitungan kebutuhan pemenuhanPelayanan Dasar**, tahapan ini dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

3. **Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar**,penyusunan rencana ditujukan agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan, perencanaan SPM menjadi muatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah.

4. **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**, tahapan ini dilakukan oleh perangkat Daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar didasari melalui penetapan target pencapaian program dan kegiatan yang didasari oleh data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Adapun evaluasi pelaksanaan SPM di tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.4.1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Tabel 2-163 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang kesehatan

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	95,83
	Jumlah anak usia 5 s.d 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini	*orang*	38.651
	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	*orang*	40.332
a	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	persen	98,40
	Jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar	*orang*	26.441

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
	Jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun pada Kabupaten /Kota yang bersangkutan	*orang*	26.871
b	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	persen	90,71
	Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	*orang*	12.210
	Jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	*orang*	13.461
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	98,40
	Jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar	*orang*	26.441
	Jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun pada Kabupaten /Kota yang bersangkutan	*orang*	26.871
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	88,04
	Jumlah anak usia 5 s.d 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini	*orang*	7.588
	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	*orang*	8.619

2.2.4.2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Tabel 2-164 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang kesehatan

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	82,84
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	*orang*	3.505
	Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	*orang*	4.231
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	97,17
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	3.638
	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	3.744
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	99,23
	Jumlah bayi baru lahir usia 0−28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	3.608
	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	3.636
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	67,70

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
	Jumlah balita usia 12−23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita usia 24−35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36−59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*orang*	18.239
	Jumlah balita usia 12−59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	26.942
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	66
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	*orang*	26.639
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	*orang*	40.332
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100
	Jumlah orang usia 15−59 tahun di Kabupaten/Kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	146.018
	Jumlah orang usia 15−59 tahun di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	146.018
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	95,04
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	18.344
	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	19.301
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	58,66
	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	26.217
	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	44.692
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	89,36
	Jumlah penderita diabates melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	2.066
	Jumlah estimasi penderita diabates melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	2.312
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	99,49
	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten /Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	393

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	395
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	83,96
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	2.560
	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	3.049
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	97,36
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	*orang*	4.677
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	*orang*	4.804

2.2.4.3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Tabel 2-165 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	85,43
	Jumlah rumah tangga terlayani kebutuhan pokok air minum sehari−hari	*orang*	50.031
	Jumlah rumah tangga di Kabupaten /Kota yang bersangkutan	*orang*	58.562
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	91,73
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik	*orang*	53.684
	Jumlah rumah tangga di Kabupaten / Kota yang bersangkutan	*orang*	58.526

2.2.4.4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Tabel 2-166 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100
	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun	*orang*	-
	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun	*orang*	-
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100
	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan / atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	*orang*	-
	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	*orang*	-

2.2.4.5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, SPM untuk urusan pemerintahan ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan :

A. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,

Tabel 2-167 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban umum

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi di Kabupaten/Kota pada tahun X	*orang*	1
	Jumlah penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota pada Tahun X	*orang*	1

B. Sub urusan kebakaran

Tabel 2-168 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Sub Bidang Kebakaran

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100
	Jumlah layanan pemadaman, penyelematan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam waktu tanggap ($response\ time$) oleh Dinas Pemadam Kebakaran/Perangkat Daerah	*orang*	39
	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X	*orang*	39

C. Sub urusan bencana.

Tabel 2-169 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Sub Bidang bencana

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100
	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	*orang*	6.503
	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana	*orang*	6.503
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	*orang*	6.503
	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	*orang*	6.503
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100
	Jumlah korban bencana yang berhasil ditolong dan dievakuasi	*orang*	4.530
	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	*orang*	4.530

2.2.4.6. Urusan pemerintahan bidang sosial.

Tabel 2-170 Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Bidang Sosial

No	Indikator Pencapaian	satuan	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100
	Jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	*orang*	31
	Populasi penyandang disabilitas di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	*orang*	31
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100
	Jumlah anak telantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	*orang*	38
	Populasi anak telantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	*orang*	38
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100
	Jumlah lansia telantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	*orang*	46
	Populasi lansia telantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	*orang*	46
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	*orang*	21
	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	*orang*	21
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100
	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/ Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	*orang*	7.754
	Populasi korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/ Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	*orang*	7.754

2.2.5. Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Per Urusan Tahun 2021

Tabel 2-171 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Per Urusan Tahun 2021

A	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2021
	PENDIDIKAN	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88,04
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,40
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	90,71
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
	KESEHATAN	
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,89
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82,84
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,17
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,23
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,07
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66,05
12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,04
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58,66
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,36
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,49
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	83,96
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	97,36
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70,39
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	85,49
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,73
24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	48,11
26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	79,33
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
	PERUMAHAN	
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	81,11
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,32
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100
	TRANTIBUMLINMAS	
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100

A	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2021
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6503
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6503
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4530
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15
	SOSIAL	
40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
B	**INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	
	KETENAGAKERJAAN	
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100
43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80,18
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86344,31
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	73,33
46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	93,86
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	86,35
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,01
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,68
	PANGAN	
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	27,99
	PERTANAHAN	
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100
52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	94,31021
53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100
56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100
	LINGKUNGAN HIDUP	
57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	19,95
58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	78,71
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
60	Perekaman KTP Elektronik	99,91
61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	54,72
62	Kepemilikan akta kelahiran	91,57
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10,53
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
64	Persentase pengentasan desa tertinggal	25
65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	17,86
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
66	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,6

A	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2021
67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	83,43
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0
	PERHUBUNGAN	
69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	100
70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,21
	KOMINFO	
71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100
	KOPERASI DAN UKM	
74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	56,45
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4,45
	PENANAMAN MODAL	
76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1,61
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	21,82
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,23
79	Peningkatan Prestasi Olahraga	3
	STATISTIK	
80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
	PERSANDIAN	
82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0
	BUDAYA	
83	Terlestarikannya Cagar Budaya	100
	PERPUSTAKAAN	
84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,32
85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00270
	KEARSIPAN	
86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	87,11
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50,5
C	**INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	228,2
	PARIWISATA	
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-20,66
91	Tingkat Hunian Akomodasi	100
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	20,62
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,08
	PERTANIAN	
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,90
95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	50,94

A	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	2021
	ESDM	
96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	100
	PERDAGANGAN	
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,03
99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	50,31
	PERINDUSTRIAN	
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	12,55
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100
105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95
D	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	
	PENUNJANG	
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7,94
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,77
3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	tdi
6	Opini Laporan Keuangan	6
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100
8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	20,87
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	26,86
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,66
11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,69
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,99
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,93
14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,98
15	Assets Management	4
16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,07
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	88,36
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100

2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.1. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pelaksanaan urusan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
   - Masih rendahnya APK PAUD
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE), ruang kelas dan UKS
   - belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD
   - rendahnya kesejahteraan PTT di tingkat lembaga PAUD
   - belum optimalnya pelaksanaan pendidikan ke-orangtuaan (Parenting) dan peran orang tua di sekolah
   - Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi rusak
   - Masih kurangnya tenaga pendidik pada sekolah dasar
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah serta pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SD dan SLTP
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
   - Masih tingginya angka kematian ibu 109,35 dibandingkan dengan standar SDG's 70 per-10000 kelahiran hidup
   - Angka kematian bayi 29 per-1000 angka ini masih tergolong rendah
   - prevalensi stunting tahun 2021 yakni 11, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi yakni 15,1
   - Adanya kasus Kajadian Luar Biasa (KLB) setiap tahunnya sehingga masih perlunya upaya prepentif dan kuratif
   - Masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap kesehatan lingkungan/ Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat
   - Menurunnya visite rate pada fasilita skesehatan akibat dampak dari covid-19
   - belum seluruhnya Rumah Tangga yang memenuhi indikator PHBS
   - masih adanya kasus perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open Defecation Free)
   - Masih adanya kasus penderita penyakit menular
   - Belum seluruh Puskesmas Terakreditasi Utama (21,4%)
   - Masih kurangnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak
   - Perlu peningkatan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas di Puskesmas
   - Belum seluruhnya pelayanan kesehatan pada RSUD terpusat pada gedung baru
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya (49,71%),
   - Pembangunan jalan tidak diiringi dengan pembangunan drainase jalan kabupaten terutama pada daerah rawan genangan
   - Belum adanya updating data base jalan di Kabupaten Dharmasraya
   - Sebagian besar kondisi jembatan tidak baik
   - Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
   - Masih kurangnya dinding pengamanan sungai terutama pada kawasan perumahan dan permukiman

- Masih rendahnya pelayanan air minum perpipaan (26.17%)
- Belum adanya dokumen kebijakan terkait air minum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem pengelolaan air minum
- Kelembagaan pengelolaan air minum masih berupa UPT Air Minum
- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman;
- Sekitar 91,73% rumah masyarakat sudah memiliki tangki septik tetapi belum semuanya memenuhi ketentuan teknis.
- Terbatasnya pelayanan sedot tinja
- Kurangnya sarana dan prasarana IPLT
- Belum semua PD memiliki gedung miulik sendiri dan yang representatif
- Minimnya regulasi terkait bangunan gedung
- Belum adanya rencana rinci/RDTR yang ditetapkan sebagai rujukan bagi perizinan yang berskala besar, sementara saat ini yang tersedia baru berupa Perda RTRW yang skalanya 1:50.000, dimana RTRW merupakan rencana umum sehingga ketentuan-ketentuan rinci tidak dapat ditampilkan secara spesifik
- Belum optimalnya peran kelembagaan penataan ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Masih terdapat rumah tidak layak huni;
   - Masih belum terpenuhinya kecukupan prasarana dan sarana umum (PSU) permukiman.
   - Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
   - Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   - Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak tertangani
   - Masih adanya gangguan trantibum
   - Masih kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang trantibum
   - Wilayah kerja pemadan kebakaran belum sesuai dengan standar pelayanan.
   - Belum adanya pembentukan nagari tangguh bencana
   - Masih kurangnya SDM yang terlatih dalam menanggulangi kebencanaan
   - Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
   - Belum semua PD memiliki akses kaum disabilitas
   - Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
   - Belum semua peserta lulusan pelatihan ditempatkan pada dunia kerja
   - Masih adanya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
   - Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
   - Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
   - Keragaman konsumsi pangan masih rendah

- Kebiasaan/pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- Pemanfaatan pangan lokal non beras sebagai sumber energi belum maksimal

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
    - Belum seluruhnya tanah milik pemerintah bersertifikat
    - Belum semua sekolah dan instansi pemerintah memiliki sertifikat
    - Masih adanya konflik pertanahan di masyarakat
    - Masih belum adanya pemetaan tanah milik ulayat
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    - Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
    - Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan sampah di TPA
    - Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di TPA
    - Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Belum optimalnya capaian penerbitan kartu identitas anak
    - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan kematian
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM..
    - Belum berkembangnya skala usaha BUMNag
    - Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Nagari
    - Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
    - Belum adanya pembangunan nagari berbasis kawasan
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Masih ada pasangan usaha subur yang belum berKB
    - Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    . Masih kurangnya rambu-rambu atau perangkat jalan sehingga sering terjadi kecelakaan
    a. Belum adanya dokumen kebijakan terkait lalu lintas atau master plan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
    b. Belum adanya terminal angkutan orang
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
    . Masih terbatasnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (keterbukaan informasi publik)
    a. Belum seluruhnya sistem informasi berjalan secara terintegrasi
    b. Belum seluruh nagari memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM)
    c. Belum kurang updatenya perangkat daerah memberikan informasi publik
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    . Belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang pembubaran koperasi yang tidak aktif
    a. Masih rendahnya komitmen pengurus koperasi dalam peningkatan kinerja dan volume usaha
    b. Belum seluruhnya UMKM dapat meningkatkan akses terhadap pasar offline dan online
    c. Masih terbatasnya akses UMKM dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    . Masih adanya regulasi yang belum mendukung dalam peningkatan investasi daerah
    a. Masih terdapatnya sistem data base perizinan secara manual
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    . Masih kurangnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
    a. Masih kurangnya pembinaan cabang olahraga prestasi
    b. Belum optimalnya pemanfaatan GOR
    c. Masih terdapatnya beberapa cabang olahraga yang belum memiliki pelatih bersertifikat
    d. Masih kurangnya pemuda berprestasi
    e. Belum optimalnya jumlah organisasi pramuka yang aktif
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
    . Masih kirangnya ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral
    a. Belum handalnya pencatatan data sektoral di SKPD
    b. Belum seluruh nagari dan kecamatan terbentuk sebagai nagari statistik dan kecamatan statistik
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
    . Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
    a. Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
    b. Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
    . Masih kurangnya group kesenian yang dapat dibina
    a. Masih kurangnya kesenian daerah yang dilestarikan.
    b. Belum optimalnya peran serta lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan
    c. Sedikitnya Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan
    d. Masih belum optimalnya inventarisasi dan observasi benda dan tak benda cagar budaya yang ditetapkan
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    . Belum adanya gedung layanan perpustakaan
    a. Masih rendahnya minat baca
    b. Masih rendahnya layanan kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
    c. Masih belum optimalnya manajemen perpustakaan (daerah, sekolah dan TBM)
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
    . Belum semua OPD dan nagari mengelola arsip secara baku
    a. Belum adanya penerapan arsip digital

2.3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi perikanan
    - Relatif rendahnya produktifitas perikanan budidaya
    - Menurunnya kualitas air mengakibatkan produksi dan keanekaragaman perikanan tangkap menurun
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    - Belom optimalnya inventarisasi dan pengelolaan destinasi
    - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
    - Belum adanya even tahunan

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    - adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
    - Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat,
    - Penurunan produktivitas perkebunanan kelapa sawit dan karet
    - Pengelolaan limbah pertanian dan limbah ternak yang belum terkelola
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    - Secara umum pasar yang ada tidak representatif
    - Pengelolaan sampah pasar yang belum optimal
    - Masih adanya alat-alat metrologi yang belum terstandar
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
    - Masih rendahnya daya saing produk IKM
    - Belum optimalnya pemanfaatan IKM Logam

2.3.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

30. Perencanaan
    - Masih kurangnya ketersediaan dan keakuratan data
    - Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi
    - Pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
    - Masih kurangnya integrasi dokumen perencanaan dengan dokumen tata ruang (RTRW)
31. Keuangan
    . Masih tingginya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah terhadap dana tranfer
32. Kepegawaian
    - Rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS
    - terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansi
    - Tidak adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan
33. Pendidikan dan Pelatihan
    . Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya aparatur
34. Penelitian dan Pengembangan
    - Masih kurangnya lembaga untuk melakukan kerjasama penelitian
    - Masih kurangnya inovasi yang diciptakan OPD dalam pelaksanaan urusan

2.3.1.5. Unsur Pemerintahan Umum

35. Kesatuan Bangsa dan Politik
    - Belum optimalnya penanganan masalah kasus penyakit masyarakat dan Konflik Sosial
    - Belum optimalnya forum-forum Strategis Kesbangpol yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
    - Lemahnya system pelaporan dari nagari dan kecamatan mengenai situasi dan kondisi daerah.
    - maraknya penyalahgunaan kasus narkoba dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Tokoh masyarakat adat setempat.

- permasalahan mengenai Konflik yang terjadi mengenai batas tanah ulayat telah di adakan koordinasi dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara perusahan dengan warga masyarakat dengan melibatkan pemda dan Aparat yang berwajib.

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2017 hingga sampai dengan 2021 serta proyeksi untuk tahun 2022 dan tahun 2023 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Secara umum kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) selama tahun 2020 hingga tahun 2021 sehingga kebijakan perekonomian lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan antisipasi dampak sosial. Untuk itu akan dijelaskan masing-masing kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Nasional Tahun 2023

Didasarkan pada perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US$4.349,5 tahun 2021.

Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemiTerdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif,

elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diprakirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat. Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

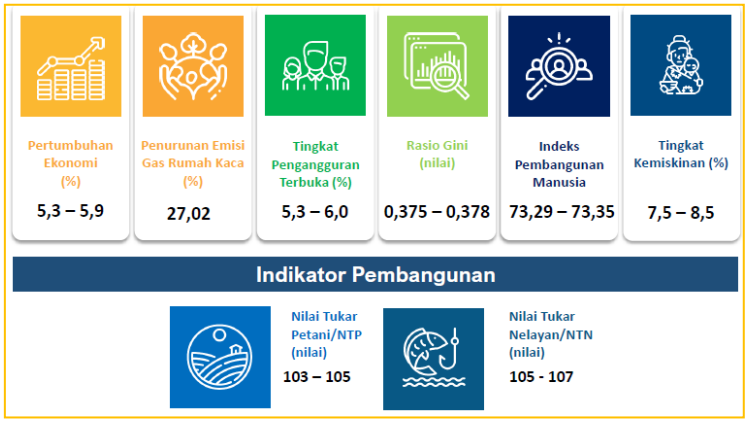
Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries

Dengan berpijak pada kebijakan fiskal diatas sebagaimana disampaikan pada arahan presiden terkait APBN 2022 maka pertimbuhan ekonomi 2022 diprkirakan 5,0-5,5 dengan tetap memperhatika perkembnagan Covid-19 masih dinamis, dimana aspek pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk tetap diprioritaskan. Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107

Gambar 3-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2023



Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	57.269.800	62.236.440	-	US$4.720–4.840
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,19	9,71	8,5-9,0	7,5-8,5
3	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2,07	3,69	5,0-5,5	5,3-5,9
4	Gini Rasio	0,385	0,381	0,376-0,378	0,375-0,378
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	7,07	6,49	5,5-6,3	5,3-6,0
6	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,94	72,29	72,67-72,69	73,31-73,49
7	Inflasi (persen)	1,68	1,87	3,00	3±1
8	Keuangan negara				
	penerimaan perpajakan (% PDB)		9,10	8,40	10,2-10,6
	keseimbangan primer (% PDB)		-2,60	-2,60	(0,7)-(0,5)
	surplus/ defisit APBN (% PDB)		-4,60	-4,90	(2,9)-(2,8)
	stok utang pemerintah (% PDB)		40,70	43,80	41,7-42,4
9	penuruman emisi gas rumah kaca (GRK)		23,55	26,87	27,02
10	Nilai Tukar Petani	101,69	104,64	103-105	103-105
11	Nilai Tukar Nelayan		104,69	104-106	106-107

Sumber : * Statistik Indonesia Tahun 2022
** Narasi rancangan RKP 2023, Bappenas, Tahun 2022

3.1.1.1. PDRB Perkapita ADHB

Berdasarkan target RPJM Nasional Tahun 2020-2024, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

3.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,5–8,5 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pada tahun 2023, strategi penurunan tingkat kemiskinan diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mencakup

i. perluasan Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan di 400 kab/kota untuk memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem;
ii. modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif;
iii. penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui 1) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), 2) perluasan penyaluran bantuan sosial secara digital, 3) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik), 4) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh program bantuan sosial;
iv. penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di lapangan;

v. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi;
vi. penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (vii) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan

3.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,9 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,7 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.250–1.400 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (1) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (2) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (3) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) di daerah.

3.1.1.4. Gini Rasio

Target rasio gini tahun 2023 berada pada range 0,375–0,378. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai target RPJMN mencakup kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang meliputi pengembangan registrasi sosial-ekonomi; peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; dan pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

3.1.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

Gambaran positif prakiraan pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan ekonomi diprakirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2023 diprakirakan akan berada di kisaran 5,3–6,0 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6–5,3 persen, Jawa-Bali 6,0–6,7 persen, Nusa Tenggara 2,7–3,1 persen, Kalimantan 4,5–5,2 persen, Sulawesi 4,2–4,8 persen, Maluku 5,4–5,9 persen, dan Papua 3,4–3,8 persen.

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

3.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 72,29 (2021). Walaupun meningkat, IPM hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 juga akan bergantung pada penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31–73,49, melalui:

i. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;
ii. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan

perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan

iii. Upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat

3.1.1.7. Inflasi

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar 3,0±1 persen (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru

Memasuki triwulan I 2022, inflasi tahunan (yoy) Januari–Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (yoy) pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

3.1.1.8. Keuangan Negara (Kebijakan Fiskal)

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan recovery dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

A. Penerimaan negara

- Penerimaan perpajakan dimana kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup 1) penyelesaian core tax administration system; 2) penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; 3) pemanfaatan basis data hasil program pengungkapan sukarela (PPS); 4) perluasan basis perpajakan, termasuk

memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan; 5) peningkatan tarif dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau; dan 6) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.

- Kebijakan PNBP diarahkan pada optimalisasi PNBP yang mencakup
  1) optimalisasi PNBP SDA antara lain melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan kebijakan, dan mendukung hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  2) penyediaan layanan yang berkualitas dan sustainable;
  3) pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang optimal a.l. melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan perluasan penerapan *Highest and Best Use* (HBU) termasuk mendukung pendanaan/pembiayaan IKN;
  4) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi BUMN; dan
  5) penguatan tata kelola PNBP antara lain perluasan teknologi informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan kapasitas prasarana dan kualitas SDM

B. Belanja negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 15,0–15,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5–10,7 persen PDB dan TKDD sebesar 4,6–4,8 persen PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5–4,7 persen PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0–1,0 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan pada merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui:

i. penerapan *zero based budgeting* melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil *(result based)*;
ii. penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
iii. percepatan pelaksanaan transformasi subsidi energi (*Liquefied Petroleum Gas*/LPG dan listrik) menjadi subsidi berbasis penerima manfaat;
iv. penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah);
v. strategi mitigasi risiko yang lebih solid (automatic stabilizer); serta
vi. penguatan peran belanja non-KL untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:

(i) pengendalian utang yang lebih solid;
(ii) inovasi pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV); serta

(iii) pengelolaan SAL yang efisien dan andal.

Selanjutnya kebijakan pembiayaan diarahkan juga pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makroekonomi, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan

Meskipun target pembangunan nasional tahun 2023 tidak seoptimis target pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJM Nasional, sehingga koreksi target pembangunan ini masih dipengaruhi oleh pengaruh covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dengan adanya realisasi pertumbuhan ekonomi yang semoat bernilai negtif di tahun 2020 akan menjadi titik awal agar ke depan diperlukannya kebijakan yang lebih kuat dalam penanganan pandemi atau kejadian yang mampu mengganggu perkembangan ekonomi nasional

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.

3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

3.1.2.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2021

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Willliamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah

kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4% di Tahun 2021 lalu.

Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi COVID-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Laporan PBB bertajuk World Economic Situation and Prospects menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. Outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan bounceback dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Pemerintah daerah juga telah mencanangkan Visit Beautiful West Sumatra 2023 yang akan mendorong pertumbuhan ekondomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga

diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan eknomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	Tingkat pengangguran Terbuka/ TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang

ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2021 dan proyeksi tahun 2022 hingga tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90** 4,15***	4,20** 4,77***
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000** 47.500.000***	44.790.000** 49.000.000***
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06	5,72
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265	0,260
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68** 4,94***	5,49** 4,68***
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95	72,34

Sumber : * BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022
** Target RPJMD Tahun 2021-2026, Bapppeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022
*** koreksi target pembangunan Tahun 2023, hasil analisa Bapppeda, Tahun 2022

Sejalan dengan telah membaiknya kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka juga berdampak pada membaiknya kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya. sehingga perlu adanya perubahan target pembangunan pada indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan Tingkat pengangguran Terbuka .

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3(tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dan apabila perbaikan ini dilakukan secara terus menerus maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

Terkait dengan kebijakan keuangan daerah, maka pembahasan berbagai kebijakan keuangan yangterkait dengan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dimana hak dan kewajiban tersebut digambarkan ke dalam 3(tiga) struktur keuangan daerah, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dilihat dari perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021 maka realisasi pendapatan daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi covid-19 yang mencapai Rp 1.019,35 milyar, dimana penurunan pendapatan terbesar berasal dari realisasi Dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Dharmasraya di tahun 2020 dari Rp 524,8 milyar menjadi Rp 478,35 milyar, atau turun sebesar 46,5 milyar rupiah, dan di tahun 2021 Dana DAU yang diterima oleh Kabupaten Dharmasraya juga masih mengalami penurunan dibanding tahun 2020 menjadi 472,4 milyar, atau turun sebesar 5,93 milyar. Sumber pendapatan lain yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan sebesar 680,66 juta rupiah serta. Selain itu dana bagi hasil yang berasal dari provinsi juga mengalami penurunan dari Rp 47,59 milyar menjadi Rp 41,1 milyar rupiah atau turun sebesar 6,49 milyar rupiah.

Meskipun pendapatan transfer yang berasal dari pusat dan provinsi mengalami penurunan, namun Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 masih tetap menunjukkan peningkatan dari Rp 78,88 milyar menjadi 82,87 milyar di tahun 2020, dan di tahun 2021 masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2020.

Dengan melihat pada perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga tahun 2021, maka target pendapatan tahun 2022 (tahun benjalan) ditetapkan sebesar 874,93 milyar juga masih berada di bawah realisasi tahun 2021.

Tabel 3-4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**990.191.146.482**	**978.920.717.102**	**874.930.212.063**	**635.758.520.652**	**636.736.112.252**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**82.877.841.653**	**82.829.461.521**	**92.537.611.707**	**94.494.163.296**	**94.971.754.896**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**17.751.808.580**	**20.536.818.148**	**26.381.633.896**	**22.343.633.896**	**22.343.633.896**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.861.712.711**	**2.411.365.382**	**3.271.408.400**	**3.272.408.400**	**3.750.000.000**
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**4.063.752.034**	**3.524.570.411**	**3.524.570.411**	**4.318.122.000**	**4.318.122.000**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**59.200.568.328**	**56.356.707.580**	**59.359.999.000**	**64.559.999.000**	**64.559.999.000**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**872.426.151.108**	**838.657.002.069**	**781.892.600.356**	**540.264.357.356**	**540.264.357.356**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**831.325.120.225**	**787.384.510.329**	**734.685.921.999**	**493.057.678.999**	**493.057.678.999**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**731.498.444.225**	**713.844.105.329**	**680.402.244.999**	**493.057.678.999**	**493.057.678.999**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.147.513.248	33.662.555.569	20.451.510.999	20.451.510.999	20.451.510.999
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.355.774.000	472.416.143.000	472.606.168.000	472.606.168.000	472.606.168.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	68.322.925.000		-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	119.021.641.000		-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**46.554.026.000**	**17.000.339.000**	**6.527.889.000**		**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**53.272.650.000**	**56.540.066.000**	**47.755.788.000**		**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**41.101.030.883**	**51.272.491.740**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**41.101.030.883**	**51.272.491.740**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**		**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34.887.153.721**	**57.434.253.512**	**500.000.000**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**2.466.323.721**	**26.548.313.512**	**500.000.000**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**
4.3.02	**Dana Darurat**	**-**	**-**		**-**	**-**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**32.420.830.000**	**30.885.940.000**		**-**	**-**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

A. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antar lain :

1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;

C. Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:

1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa

Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

2. Pendapatan transfer

Dana perimbangan terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, untuk pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat diasumsikan bahwa Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi umum masih sama dengan alokasi tahun 2022, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa masih belum diproyeksikan dan menunggu besaran alokasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan

   Khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) maka alokasi yang akan diterima sesuai dengan alokasi yang akan diterima daerah berdasarkan bidang/ sub bidang yang telah ditentukan dan diusulkan melalui aplkasi Krisna untuk

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan bagi hasil, dimana alokasi yang akan diterima oleh Kabupaten Dharmasraya diasumsikan sama dengan alokasi yang diterima di tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga diasumsikan naik menjadi Rp 1.000.000.000,- yang berasal dari pendapatan hibah, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 500.000.000,-

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah,

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2023 tidak dialokasikan.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2023 tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

D. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2024

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
5	**BELANJA DAERAH**	**985.747.172.889**	**917.045.656.326**	**933.924.423.063**	**624.978.785.984**	**627.456.377.584**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**659.026.846.283**	**638.704.424.536**	**694.745.829.998**	**532.001.380.784**	**528.659.355.228**
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	342.208.448.945	350.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.610.492.141	295.109.366.279	183.902.931.839	172.769.355.228
5.1.03	Belanja Bunga	-	-		-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-		-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	5.890.000.000	5.890.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-		-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**194.525.452.178**	**166.252.751.216**	**124.714.278.430**	**37.616.506.665**	**43.436.123.821**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	10.456.000.000	10.485.490.490
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	10.532.992.000	13.166.240.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	13.677.514.665	17.096.893.331
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	2.650.000.000	2.312.500.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	300.000.000	375.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**24.924.272.319**	**164.439.330**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**107.270.602.109**	**111.924.041.243**	**109.464.314.635**	**50.360.898.535**	**50.360.898.535**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	110.062.863.000	106.409.184.000	49.305.767.900	49.305.767.900

Sumber :Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2020-2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3-6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 –2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**	**231.767,14**	**236.402,48**	**240.875,70**	**240.875,70**	**240.875,70**
2	**Belanja Penerimaan Aggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH**	**4.332,38**	**12.444,498**	**12.444,498**	**12.444,498**	**12.444,498**
3	**Belanja Bunga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Belanja bagi Hasil (Transfer ke Desa)**	**105.472,65**	**110.062,86**	**109.464,31**	**104.892,26**	**104.892,26**
5	**BELANJA UNTUK GURU DAN SEKOLAH**	**125.764,72**	**102.247,90**	**102.247,90**	**102.247,90**	**102.247,90**
A	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru	-	-	-		-
B	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	16.033,43	12.275,55	12.275,55	12.275,55	12.275,55
C	Tambahan Penghasilan Tunjangan profesi guru	71.207,27	55.703.86	55.703.86	55.703.86	55.703.86
D	Tambahan penghasilan guru	453,75	552,75	552,75	552,75	552,75
E	Tambahan Tunjangan khusus Guru	3.621,24	2.304,38	2.304,38	2.304,38	2.304,38
F	Tunjangan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja	-	-	-	-	-
G	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-			
H	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.276,13	25.409,01	28.329,60	28.329,60	28.329,60
I	Belanja Modal Dana BOS	10.172,90	5.962,35	7.082,40	7.082,40	7.082,40
6	**BELANJA TENAGA MEDIS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A	Belanja honorarium PNS khusus untuk tenaga medis	-	-	-	-	-
B	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	-	-	-	-	-
C	Pendapatan Rumah sakit	55.407,43	40.378,48	45.900,00	45.900,00	45.900,00
D	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
E	Belanja Barang dan Jasa Kantor	61.054,62	98.084,31	98.084,31	98.084,31	98.084,31
F	Belanja sewa Gedung kantor	2.217,29	2.509,97	2.509,97	2.509,97	2.509,97
G	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	**-**	**-**	**-**	**10,800,00**	**10,800,00**
1	Pembentukan Dana cadangan	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500,00	1.500,00
3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	9.300,00	9.300,00
	TOTAL	**538.255,24**				

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain pengalokasian belanja yang bersifat tetap berupa belanja pegawai, penyedian belanja tidak terduga untuk penyediaan penanggulangan Covid-19, apabila belum selesai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenan.
2. Belanja pegawai pada belanja wajib mengalami kenaikan yang merupakan penggabungan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
4. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun
5. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
7. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dari total belanja.
8. Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
   - Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
   - Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa,
   - Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
   - kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasildan DAK;
9. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.
11. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.

Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.893.451.613**	**8.334.425.206**	**58.994.211.000**	**-10.779.734.668**	**-9.279.734.668**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**3.893.451.613**	**8.334.425.206**	**58.994.211.000**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**		**10.779.734.668**	**9.279.734.668**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-		1.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-		9.279.734.668	9.279.734.668
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	-
6.3	**SILPA**	**8.337.425.206**	**70.209.485.982**	**-**	**-**	**0**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Tabel 3-8 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**990.191.146.482**	**978.920.717.102**	**874.930.212.063**	**635.758.520.652**	**636.736.112.252**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**82.877.841.653**	**82.829.461.521**	**92.537.611.707**	**94.494.163.296**	**94.971.754.896**
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.536.818.148	26.381.633.896	22.343.633.896	22.343.633.896
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	3.271.408.400	3.272.408.400	3.750.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	3.524.570.411	4.318.122.000	4.318.122.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.356.707.580	59.359.999.000	64.559.999.000	64.559.999.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**872.426.151.108**	**838.657.002.069**	**781.892.600.356**	**540.264.357.356**	**540.264.357.356**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**831.325.120.225**	**787.384.510.329**	**734.685.921.999**	**493.057.678.999**	**493.057.678.999**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**731.498.444.225**	**713.844.105.329**	**680.402.244.999**	**493.057.678.999**	**493.057.678.999**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.147.513.248	33.662.555.569	20.451.510.999	20.451.510.999	20.451.510.999
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.355.774.000	472.416.143.000	472.606.168.000	472.606.168.000	472.606.168.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	68.322.925.000		-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	119.021.641.000		-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**46.554.026.000**	**17.000.339.000**	**6.527.889.000**		**-**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**53.272.650.000**	**56.540.066.000**	**47.755.788.000**		**-**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**41.101.030.883**	**51.272.491.740**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**41.101.030.883**	**51.272.491.740**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**	**47.206.678.357**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**		**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34.887.153.721**	**57.434.253.512**	**500.000.000**	**1.000.000.000**	**1.500.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-		-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000		-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**985.747.172.889**	**917.045.656.326**	**933.924.423.063**	**624.978.785.984**	**627.456.377.584**
5.1	**BELANJA OPERASI**		**638.704.424.536**		**532.001.380.784**	**528.659.355.228**

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
		659.026.846.283		**694.745.829.998**		
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	342.208.448.945	350.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.610.492.141	295.109.366.279	183.902.931.839	172.769.355.228
5.1.03	Belanja Bunga	-	-		-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-		-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	5.890.000.000	5.890.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-		-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**194.525.452.178**	**166.252.751.216**	**124.714.278.430**	**37.616.506.665**	**43.436.123.821**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	10.456.000.000	10.485.490.490
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	10.532.992.000	13.166.240.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	13.677.514.665	17.096.893.331
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	2.650.000.000	2.312.500.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	300.000.000	375.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**24.924.272.319**	**164.439.330**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**107.270.602.109**	**111.924.041.243**	**109.464.314.635**	**50.360.898.535**	**50.360.898.535**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	110.062.863.000	106.409.184.000	49.305.767.900	49.305.767.900
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.893.451.613**	**8.334.425.206**	**58.994.211.000**	**-10.779.734.668**	**-9.279.734.668**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**3.893.451.613**	**8.334.425.206**	**58.994.211.000**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	58.994.211.000	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-		-	-

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**		**10.779.734.668**	**9.279.734.668**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-		1.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-		9.279.734.668	9.279.734.668
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	-
6.3	**SILPA**	**8.337.425.206**	**70.209.485.982**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2022.

Berdasarkan data perkembangan APBD Kabupaten Dharmasraya sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan tahun 2022-2023, disajikan sebagai berikut.

Tabel 3-9 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	231.767.140.000	236.402.480.000	255.443.449.545	269.572.800.545	273.616.392.553,
2	Belanja Penerimaan Aggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.332.380.000	12.444.498.000	12.880.971.000	12.880.971.000	12.880.971.000
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi Hasil (Transfer ke desa)	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
5	Belanja bantuan keuangan kepada desa	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880	798.390.880	798.390.880	798.390.880	798.390.880
7	Pengeluaran pembiayaan				10.779.734.668	9.279.734.668
	Total Pengeluaran wajib dan mengikat	**238.763.948.990**	**253.367.725.366**	**275.233.072.695**	**296.142.158.363**	**298.685.750.371**

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

Tabel 3-10 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
1	Pendapatan	990.191.146.482	978.920.717.102	874.930.212.063	634.190.469.063	636.614.357.356
2	Pecairan Dana Candangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan					
	Total Penerimaan	990.191.146.482	978.920.717.102	874.930.212.063	634.190.469.063	636.614.357.356
	dikurangi					
4	Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	238.763.948.990	253.367.725.366	275.233.072.695	296.142.158.363	298.685.750.371
5	Kapasitas Riil Kemampuan keuangan	751.427.197.492	725.552.991.736	599.697.139.368	338.048.310.700	337.928.606.985

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi indikatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah kedalam berbagai urusan, kewenangan, organisasi (SKPD) dan program sesuai prioritas pembangunan. Guna memudahkan dalam membreak-down alokasi anggaran, maka dikelompokan prioritas

(Kelompok Prioritas) terkait dengan alokasi anggaran menjadi 3 kelompok, yaitu: Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Secara sederhana alokasi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada Kelompok Prioritas I sebelum Kelompok Prioritas II, dan Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I merupakan belanja untuk memenuhi belanja wajib, mengikat serta prioritas utama yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah. Prioritas II dialokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan Prioritas III dialokasikan untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan belanja lainnya untuk mendukung program prioritas lainnya.

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan periode ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmsraya periode tahun 2021-2026. Dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025);
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
3. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
4. Mempedomani RKP Tahun 2023;
5. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023;
6. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
8. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

(1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM),

(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;

(3) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA".**

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Maju : Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri : Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya : Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Untuk mencapai visi di atas, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka identifikasi awal terhadap isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah :

1. Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi,
2. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
3. Kualitas SDM
4. Peningkatan pelayanan publik
5. Pengentasan kemiskinan kaum rentan dan disabilitas
6. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
7. Pembenahan dan peningkatan akses, pelayanan dan infrastruktur kesehatan
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
9. Peningkatan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pengajaran daring dan optimalisasi TIK
10. Penciptaan Milineal interpreneur dan women enterpreneur
11. Kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pada dasarnya tujuan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah

sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*** Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
b) Memajukan kebudayaan;
c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
e) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk
b) mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
c) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
d) pembangunan;
e) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
f) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
g) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
c) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun strategi yang ditetapkan dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :

a) Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
b) Peningkatan Produktifitas SDM.
c) Pembangunan Karakter.

2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:

a) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
b) Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
c) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
d) Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
e) Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni :

a) Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan UndangUndang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.
b) Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
   a) Penyederhanaan Prosedur
   b) Penyelenggaraan e-Government
   c) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
   a) Industrialisasi
   b) Pengembangan Destinasi Unggulan
   c) Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Adapun sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) mencapai 5,3 – 5,9
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 (%)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3 – 6,0 (%)
4. Rasio Gini (nilai) 0,375 – 0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan 7,5 – 8,5 (%)

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Perwujudan Visi melalui 7 (tujuh) Misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing

Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah

Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Sesuai dengan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Ketujuh misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 26 sasaran pembangunan daerah. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4-1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing**	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 2: **Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**	Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat
Misi 3: **Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan
		Meningkatnya Produktifitas Peternakan
		Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: **Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital**	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan
		Meningkatnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera
		Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5: **Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan**	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Sumatera Barat sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing
		Sumatera Barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif

VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 6: **Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan**	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatknya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kinerja birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, keterkaitan antara tujuan dan sasaran masing-masing misi dengan isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran **Misi Pertama**, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran **Misi Kedua**, "Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat" terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran **Misi Ketiga**, "Mewujudkan Kesejahteraan Petani" terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran **Misi Keempat**, "Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran **Misi Kelima**, "Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat" terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran **Misi Keenam**, "Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata" terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar

kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran **Misi Ketujuh**, "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami konstraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahanan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu : **"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI"**

Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi dan makan minum dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Tahun 2023	
	RPJMD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65
PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33,58
PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	48,86
TPT (%)	6,45	5,72
IPM	73,23	73,46
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	69,97
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,43
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,25
- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	10.997
Kemiskinan (%)	6,16	5,37
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	306,71
Gini Rasio	0,296	0,296
Indeks Williamson	0,309	0,213

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah diitetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2021, perkiraan capaian tahun 2022, perkembangan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2023.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi bupati dan wakil bupati terpilih pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4-3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dan responsif gender dalam pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
	Pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Delapan belas sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan secara berkesinambungan selama periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 6 (enam) sasaran dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 26 sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2021
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
3. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2021-2026.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutkan didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tema RKP Tahun 2023 : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia betkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan penanggulangan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukamham dan transpormasi pelayanan publik.

4.2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2023

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, juga ditetapkan beberapa arah kebijakan yang disertai sasaran dan indikator terkait untuk masing-masing fokus RKP 2023, sebagaimana uraian berikut ini :

1. **Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.**

   Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan, dengan indikator terkait yaitu :

   • Penghapusan kemiskinan ekstrem : 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024)
   • Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91%
   • Nilai Tukar Petani /Nelayan : 103-105/105-107

2. **Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.**

   Sasaran pada fokus ini adalah terkait sistem kesehatan, dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), dengan indikator terkait yaitu:

   - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024)
   - Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
   - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
   - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
   - Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%
   - Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
   - Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen

3. **Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.**

   Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan lapangan usaha, dengan indikator terkait yaitu :

   - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
   - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
   - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang
   - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%

4. **Mendorong pemulihan dunia usaha.**

   Sasaran pada fokus ini adalah revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan indikator terkait yaitu :

   - Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
   - Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
   - Nilai Devisa Pariwisata US$ 1,76-6,08 Miliar
   - Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
   - Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun

5. **Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.**

   Sasaran pada fokus ini adalah industrialisasi dan riset dan inovasi, dengan indikator terkait yaitu :

- Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %
- Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
- Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
- Peringkat Global Innovation Index 75-80
- Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%
- Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80 %

6. **Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).**

   Sasaran pada fokus ini adalah ekonomi rendah karbon dan transisi energi, dengan indikator terkait yaitu :

   - Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
   - Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
   - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
   - Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.

7. **Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.**

   Sasaran pada fokus ini adalah penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital serta infrastruktul konektivitas, dengan indikator terkait yaitu :

   - Volume tampungan air per kapita 54,50 m3/det
   - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
   - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
   - Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
   - Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%

8. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara.**

   Sasaran pada fokus ini adalah fasilitas dasar di IKN, dengan indikator terkait yaitu:

   - Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
   - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

4.2.1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah

Pada RKP Tahun 2023, pada Prioritas Pembangunan Wilayah, Pengembangan Wilayah Sumatera termasuk Prioritas Nasional 2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi caracara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan
- Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah,
- Mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
- Mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Adapun Strategi Pengembangan Wilayah yaitu

- Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi, serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara;
- Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Sasaran Pengembangan Wilayah

- Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
- Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
- Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Prioritas Pengembangan Wilayah terdiri dari :

a. Investasi, Industri Pengolahan dan Pariwisata
   - Percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastuktur.
   - Penyiapan peta potensi investasi daerah
   - Fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri
   - Penuntasan penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko
   - Deregulasi dan integrasi perijinan investasi
   - Re-skilling dan up-skilling industri pengolahan
   - Pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal
   - Substituti impor dan TKDN
   - Peningkatan ekspor hasil industri
   - Percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK
   - Inovasi dan adaptasi teknologi
   - Reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara
   - Reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal
   - Penerapan standar kebersihan dan keselamatan
   - Re-skilling dan up-skilling pariwisata

4.2.1.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2023

1. Memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata pasca pandemi COVID- 19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional
3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T
4. Mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional
5. Mempercepat pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan

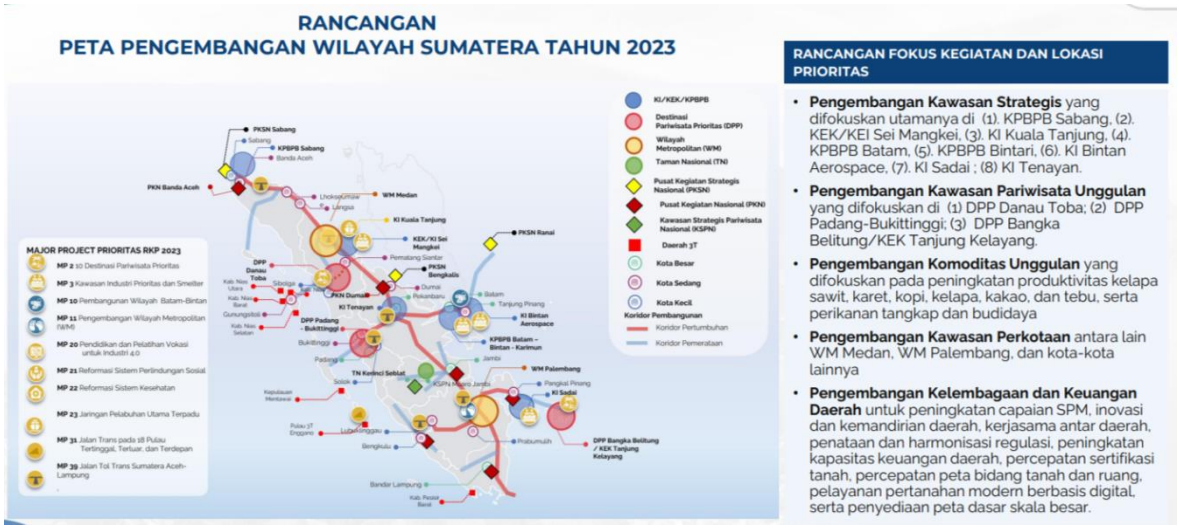
4.2.1.4. Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2023:

A. Strategi Pertumbuhan

1. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan
2. Mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu
3. Memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis.
4. Merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakya
5. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta kelayakhunian
6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama dalam upaya peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
7. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah
8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
9. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

B. Strategi Pemerataan

1. Memastikan akses dan mutu terhadap layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/ vokasional, dan tinggi) dan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat).
2. Meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Sosial, serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil
3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat.
4. Mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur.
5. Memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis ekosistem pariwisata.
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan dan keuangan) penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera, Penguatan fungsi dan peran GWPP dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh dan mempersiapan exit strategy yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan provinsi bagi peningkatan kesejahteraaan rakyat



4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2020 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya. Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

<u>Prioritas Pembangunan 1:</u>

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan
2. Pemenuhan terhadap pencapaian Imunisasi Dasar dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada keluarga kelompok sasaran.
3. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur
4. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
5. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
6. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
7. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
8. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
9. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
10. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah

Prioritas Pembangunan 2:

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Arah kebijakan pembangunan :

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
5. Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melbatkan seluh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
6. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
7. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
8. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama

9. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua

Prioritas Pembangunan 3:

Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
10. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing

Prioritas Pembangunan 4:

Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam pendapatkan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya .
4. Pemberian isentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
5. Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
6. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.

7. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
8. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
9. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
10. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Prioritas 5:

Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
6. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besarbesaran untuk membangun awareness masyarakat
9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya

Prioritas 6:

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Membangun jalan Provinsi baru menuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
5. Membangun jalan Provinsi baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
6. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistic
7. Mendukung akses pada destinasi wisata guna peningkatan daya saing Kawasan wisata
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana

9. Meningkatkan indeks ketahanan daerah
10. Meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi pendukung sector pertanian guna meningkatkan produksi pertanian
11. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi
12. Mengurangi luasan Kawasan kumuh
13. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu
14. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar
15. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat

Prioritas 7:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusunan dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerinta Provinsi Sumatera Barat
5. Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknoloogi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
8. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
10. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
11. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
12. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

4.2.2.1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2023

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni : 1. Bidang Pendidikan dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Bidang Pendidikan

a. Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
b. Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
c. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
d. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekola Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus.
f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
   - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
   - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memilik ijazah SMA/sederajat.
g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
   - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
- Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
   - Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik
   - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
   - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

2. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darutat dengan melakukan :
   - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
   - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
c. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
   - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
   - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
   - melakukukan penyuluhan
   - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
   - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
   - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
   - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :
   - pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering
   - Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
b. Pemenuhan terhhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
d. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
   - pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
   - Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

6. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidupsehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan

akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.2.2. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026. Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 yakni :

1. Sumbar Sehat Dan Cerdas

a. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
b. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru
c. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru
d. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
e. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
f. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan

g. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri
h. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan

2. Sumbar Religius Dan Berbudaya

a. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi
b. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan
c. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)
d. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

3. Sumbar Sejahtera

a. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
c. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
d. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif
e. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula
f. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
g. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
h. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional

4. Sumbar Berkeadilan

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
b. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang
c. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas
d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy)
e. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government)

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 dan merupakan

implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023, mengusung tema **"Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat".**

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu;dan
3. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut di atas, penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi Pembanganan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026,
2. Isu Strategis, dan
3. Prioritas program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2023 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

Tabel 4-4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

BBV	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Memajukan pendidikan yang berkarakter
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Membangkitkan identitas daerah
8	Membangun berbasis nagari	Membangun berbasis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian 2022

4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah yang dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah serta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil reses yang dilakukan 3 kali dalam satu tahun.

1. Reses periode Januari – April 2022
2. Reses periode Mei – minggu ke-2 bulan Agustus 2022
3. Reses periode minggu ke-3 bulan Agustus – Desember 2022

Berdasarkan hasil reses tersebut diperoleh daftar usulan reses yang disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.

Memahami dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka dilakukan pemilahan dan pemilihan hasil reses tersebut yang disesuaikan dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga diperoleh usulan pokir yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan saran dan masukan serta pertimbangan di atas, diambil kebijakan sebagai berikut :

1. Hasil Musrenbang diakomodir 1 usulan per nagari.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diakomodir berdasarkan usulan dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran.

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2023 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4-5 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”	“Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”	“Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat”.

Tabel 4-6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2023	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5		
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 7
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8

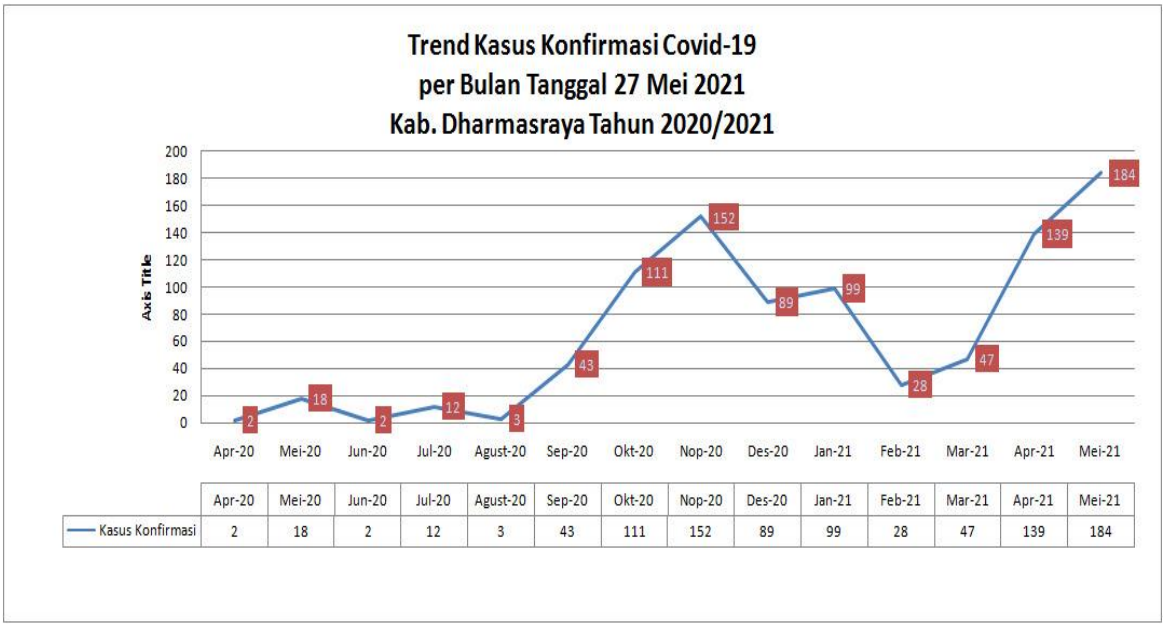
Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Hasil Kajian 2022

Keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

4.2.6. Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19

Dampak pandemi-19 terjadi sejak Maret 2020 dan masih berlanjut hingga 2021. Dilihat dari perkembangan hingga Bulan Mei 2021, maka kasus covid-19 masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Dan ini berdampak pada kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah .

Gambar 4-1 Trend Kasus Konfirmasi Covid-19 Kabupaten Dharmasraya per 27 mai 2021



Sejak ditetapkannya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, kasus pertama di Kabupaten Dharmasraya terjadi pada bulan April 2020, kasus Covid-19 ini relatif melandai hingga bulan Agustus 2020 dan meningkat mulai bulan September 2020 hingga bulan November 2020. Selanjutnya pandemi ini masih terus terjadi hingga semester pertama tahun 2021. Lonjakan kasus kedua terjadi lagi pada bulan April 2021 menembus angka 184 kasus, diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga tahun 2022 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Secara makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada ekonomi Kabupaten Dharmasraya seperti industri pengolahan, dan perdagangan. Pandemi ini juga berdampak pada terhambatnya investasi di Kabupaten Dharmasraya yang juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat. Pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia dan Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya diprioritaskan pada 3 sektor yaitu

a. sektor kesehatan
   1. Pemberlakuan PSBB dan PPKM
   2. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19
   3. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai
   4. Peningkatan pelayanan kesehatan
b. Sektor Ekonomi
   1. Pengalokasian anggaran terkait pemulihan ekonomi
   2. Mencetak Milenal enterpreneur dan women enterpreneur
   3. Fasilitasi perbankan terkait keringanan pembayaran kredit
   4. Penerapan keringanan pajak daerah
c. Sektor sosial
   1. Pemberian BLT dan BST
   2. Pelaksanaan bazar pasar murah terkait sembako

.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan urusan sebagai berikut :

4.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
   - Pembangunan dan rehab ruang kelas PAUD, SD dan SMP (melalui perdanaan DAK)
   - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah (Toilet, Ruang Guru, Labor dan Perpustakaan Sekolah)
   - Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
   - Peningkatan kualitas pelayanan Poned Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
   - Bantuan makanan tambahan terhadap balita dan balita stunting
   - Pengadaan alat kesehatan
   - peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
   - Rehab rumah dinas tenaga kesehatan dan pembangunan rumah dinas baru
   - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik kualitas maupun kuantitas
   - Penambahan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan prioritas pada ruas jalan kabupaten dan jembatan dengan kondisi rusak dan rusak berat
   - Updating data kondisi jalan dan jembatan
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, irigasi rawa dan bendung irigasi
   - Pemeliharaan rutin jaringan irigasi

- Pembangunan bangunan perkuatan tebing
- Penyusunan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh
- peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
- Peningkatan fungsi kelembagaan pengelolaan air minum perpipaan
- pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
- Pengelolaan Penerangan jalan Umum (PJU) Pintar melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan sistem *unsolicited*
- Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan baik pengum[pulan, pengangkutan maupun pemrosesan di TPA
- Peningkatan sarana dan prasarana IPLT
- Penyusunan Ranperda Retribusi Sedot Tinja
- Pembangunan gedung kantor PD yang representatif
- Rehabilitasi gedung kantor
- Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung
- Penyusunan regulasi perencanaan dan penataan ruang yang lebih rinci berupa Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pengelolaan penerangan jalan umum melalui skema Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dimulai tahun 2023
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pembangunan rumah layak huni.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
- Penyusunan dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Sosialisasi penegakan peraturan perundang-undangan terkait transtibun kepada masyarakat
- Pembentukan nagari tangguh bencana pada daerah rawan bencana
- optimalisasi dan pemeliharaan sarana damkar
- Pelatihan bagi SDM kebencanaan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Penyediaan sarana prasarana disabilitas pada perangkat daerah
- Pendataan bidang sosial secara terpadu.
- Pembinaan secara berkala terhadap PSM dan TKSK
- Pembekalan TKSK dan PSM terkait pelaksanaan urusan sosial di kecamatan
- Mengalokasikan anggaran yang sesuai kebutuhan bagi PSM dan TKSK.

4.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
   - Kerjasama dengan dunia usaha dalam penempatan ketenagakerjaan
   - Fasilitasi dalam Penyelesaian kasus ketenagakerjaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Melakukan peningkatan kapasitas organisasi perempuan sehingga lebih berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlndungan anak;
   - Sosialisasi dan pelatihan tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
   - Melibatkan perempuan dan anak dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang, baik tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten)
   - Melakukan sosialisasi dan memotivasi agar seluruh sekolah dan Puskesmas menjadi ramah anak.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
   - Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan cadangan pangan pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk masayarkat miskin, gizi buruk dan masyarakt korban bencana
   - Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan masyarakat dalam konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
   - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan rumah tangga
   - Peningkatan Pengolahan Pangan lokal sebagai sumber energi
   - Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
    - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
    - Penyusunan Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sosialisasi pentingnya sertifikat tanah sekolah dan instansi pemerintah
    - Koordinasi terkait perubahan status lahan di lokasi TORA
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    - Pemantauan kualitas air dan kualitas udara dan pemulihan lahan bekas tambah
    - Penyusunan dan penetapan regulasi terkait pengelolaan sampah
    - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, khusus sampah organik dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah organik menggunakan maggot.
    - Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
    - Peningkatan penghijauan pada lokasi sumber daya alam yang dilindungi
    - Optimalisasi pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Sosialisasi terkait pencatatan pentingnya dokumen administrasi kependudukan

- Peningkatan layanan dukcapil keliling

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Sosialisasi penyusunan APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM
    - Pembinaan BUMnag lintas sektor
    - Memberikan pelatihan bagi pengurus dan Komisaris BUMNag dalam upaya peningkatan SDM agar dapat menjalankan BUMNag secara optimal.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Optimalisasi dan sosialisasi pentingnya KB pada PUS
    - Mengoptimalkan peran tenaga PKB/PLKB yang ada, sebanyak 21 orang untuk 52 nagari;
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    - Penyediaan perlengkapan jalan
    - Pengadaan ponton
    - Penyusunan Masterplan Lalu Lintas Angkutan Jalan
    - Pembangunan terminal type C
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
    - Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD
    - Peningkatan kualitas jaringan pada PD, UPT, dan Nagari
    - Peningkatan pelayanan berbasisn *e-government*
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    - Pendataan dan kelengkapan administrasi koperasi yang tidak aktif
    - Pembinaan koperasi secara komprehensif
    - Pelatihan pengurus koperasi
    - Pelatihan pemasaran produk UMKM *offline* dan *online*
    - Menyatukan UMKM dalam wadah Koperasi.
    - Sosialisasi pelatihan UMKM
    - Pembinaan dan fasilitasi UMKM
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    - Sosialisasi serta pemberian insentif dalam kemudahan berusaha
    - Promosi investasi
    - Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan elektronik
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Pembinaan olah raga sejak usia dini
    - Pembangunan sarana dan prasarana olah raga pada cabang olah raga (GOR)
    - Sertifikasi pelatih olahraga
    - Peningkatan kapasitas pemuda pelopor
    - Seleksi dan pelatihan anggota Paskibraka
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
    - Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
    - Sosialisasi Peningkatan pencatatan data statistik sektoral
    - Pembentukan nagari statistik dan kecamatan statistik
    - Pencatatan statistik sektoral secara elektronik

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Pengamana jarinagn sistem informasi pemerintah daerah
- Implementasi tanda tangan digital

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Pembinaan group kesenian daerah berbasis kearifan lokal
- Pembekalan pemangku adat
- Inventarisasi warisan budaya dan sejarah
- Pelestarian nilai khasanah budaya

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Pembangunan gedung layanan perpustakaan (DAK Fisik)
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan yang representatif
- Pembinaan perpustakaan sekolah dan TBM menuju manajemen perpustakaan yang baik

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Pembinaan pengelolaan arsip digital secara berkala
- Penerapan arsip digital secara bertahap

4.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Revitalisasi kolam budidaya yang tidak termanfaatkan
- Pengembangan teknologi budidaya perikanan
- Fasilitasi pemasaran hasil produksi perikanan (ikan segar dan olahan)
- Peningkatan kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan
- Pengolahan ikan untuk peningkatan nilai tambah

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Iventarisasi potensi wisata
- Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
- Penyelenggaraan even pariwisata
- Promosi wisata

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Sosialisasi lahan sawah dilindungi
- Peremajaan/replenting perkebunan masyarakat
- Peningkatan Prasarana dan Sarana Teknologi Pertanian
- Fasilitasi pertanian yang mengarah pada pengelolaan tanah menggunakan pupuk organik

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Revitalisasi pasar-pasar nagari
- Peningkatan sistem pengelolaan sampah pasar
- Peningkatan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang bersubsidi
- Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Rekomendasi perizinan IKM

- Pembinaan dan pelatihan IKM

4.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

30. Perencanaan
    - Pencanangan pengelolaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai sumber data perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
    - Memfungsikan pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan berbasis prioritas dan kewilayahan
    - Integrasi pembangunan antara RPJMD/RKPD dengan RTRW
31. Keuangan
    - Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
32. Kepegawaian
    - Fasilitasi ASN untuk mengikuti diklat kompetensi sesuai bidangnya
    - Penerapan sangsi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan kepegawaian
33. Pendidikan dan Pelatihan

    Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Strukturan dan Fungsional
34. Penelitian dan Pengembangan
    - Membuat MoU dengan lembaga penelitian
    - Fasilitasi dan sosialisasi penciptaan inovasi dalam mendukung kinerja

4.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

35. Inspektorat Daerah
    - Peningkatan kapasitas pemeriksaan internal
    - Peningkatan kualitas APIP

4.3.6. Unsur Pemerintahan Umum

36. Kesatuan Bangsa dan Politik
    - Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik bagi pimpinan partai politik, organiasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda.
    - Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM serta Partai Politik.
    - Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
    - memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif dengan menggunakan nomenklatur sesuai pemutakhiran terhadap Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**164,213,141,910**								**206,718,944,384**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**161,899,646,910**						100 persen	**172,571,290,936**	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**152,931,322,500**						5 Dokumen	**160,500,000,000**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1898 Bulan 0 Orang/bulan	152,931,322,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1898 Bulan 0 Orang/bulan	160,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**483,003,750**						5 Dokumen	**461,950,000**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan 0 Paket	8,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	185,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8 Paket	199,650,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	0 Paket 12 Bulan	16,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Paket	33,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan 0 Paket	44,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,003,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	160,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**8,422,770,660**						4 Dokumen	**11,540,590,936**	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	4,400,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan 0 Laporan	155,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	12 Bulan 0 Laporan	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 bulan	8,253,770,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	0 Laporan 12 bulan	11,366,190,936	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**62,550,000**						1 Dokumen	**13,750,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 1 Paket	62,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	0 Unit 1 Paket	13,750,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase terpenuhinya pengelolaan pendidikan	persen		persen	100 persen	**2,203,815,000**						100 persen	**33,894,790,068**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**405,090,000**						5 Dokumen	**21,852,463,858**	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				0 Satuan Pendidikan 1 Paket	62,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terlaksananya Kegiatan OSN, FLS2N, O2SN dan Jambore SD dan SMP				0 Peserta Didik 1 Paket	61,504,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Peserta Didik 1 Paket	65,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				279 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	279 Orang	13,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Terlaksananya KKG dan MGMP, diklat calon kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional dan sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SD,				0 Orang 1 Paket	158,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Orang 1 Paket	155,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)				0 Satuan Pendidikan 900 Kunjungan	92,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Satuan Pendidikan 900 Kunjungan	55,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**1,385,942,000**						5 Dokumen	**8,226,213,067**	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang akan ditambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Pembangunan Gedung SMPN 04 Koto Besar				2 Unit 0 Ruang 432 Meter	588,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	2 Unit 0 Ruang 432 Meter	163,047,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Pembuatan Lapangan Basket SMPN 1 Sitiung				10 Unit 0 Unit 1 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	10 Unit 0 Unit 1 Unit	66,451,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik	43,582,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Peserta Didik	93,170,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	61,768,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	1000 Peserta Didik	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				165 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	165 Orang	8,415,792	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Terlaksanya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK				0 Orang 1 Kegiatan	119,742,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Orang 1 Kegiatan	505,074,570	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				4 Satuan Pendidikan	42,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	4 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**315,053,000**						5 Dokumen	**3,189,239,592**	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik 16 Orang	60,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Peserta Didik 16 Orang	1,897,407,050	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				484 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	484 Orang	8,415,792	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Perlombaan				0 Orang 1 Kegiatan	150,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Orang 1 Kegiatan	27,951,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan 120 Unit	74,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Satuan Pendidikan 120 Unit	11,646,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**97,730,000**						5 Dokumen	**626,873,551**	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				177 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	177 Orang	15,148,426	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 25 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Orang 25 Orang	16,537,675	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan 15 Lembaga	27,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	0 Satuan Pendidikan 15 Lembaga	11,646,250	Dinas Pendidikan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase tercapainya pengembangan kurikulum	persen		persen	100 persen	**34,680,000**						100 persen	**72,719,185**	
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**34,680,000**						1 Dokumen	**46,585,000**	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen 60 Orang	34,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Mengembangkan Pembelajaran dalam mencapai Pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan dicapai.	0 Dokumen 60 Orang	46,585,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase terpenuhinya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persen		persen	100 persen	**75,000,000**						100 persen	**180,144,195**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	penyusunan Renja, Lap Keuangan, Monev, dan dok lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**75,000,000**						1 Dokumen	**180,144,195**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen 1 Kegiatan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0 Dokumen 1 Kegiatan	180,144,195	Dinas Pendidikan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**106,894,674,480**							**203,580,062,674**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**61,505,300,212**						100 Persen 100 Persen	**59,115,232,198**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**129,400,000**						100 Persen	**161,900,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	17,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja/realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	5 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	76,900,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh			4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Laporan	76,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**56,568,262,862**						100 Persen	**56,630,212,103**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				559 Orang/bulan	56,148,420,450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	559 Orang/bulan	56,148,420,450	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan				302 orang	30,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	302 orang	33,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Tahun	288,541,440	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	317,395,584	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan / semester SKPD				286 laporan	30,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	286 laporan	33,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Paket	70,800,972	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	77,881,069	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**60,500,000**						100 Persen	**89,842,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD				31 Persen	24,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	31 Persen	26,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan dan Pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah SKPD				1 Paket	12,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	24,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	26,620,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**321,660,000**						100 Persen	**820,957,446**	
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Evaluasi kinerja pegawai Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin pegawai				1 paket 1 paket 1 paket	95,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 paket 1 paket 1 paket	407,016,446	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				605 dokumen	7,260,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	605 dokumen	7,986,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				0 Dokumen 1 paket	12,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Dokumen 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				0 Dokumen 1 paket	12,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Dokumen 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0 Orang 20 orang	121,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Orang 20 orang	133,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sosialisasi peraturan perundang undangan				0 Orang 1 paket	12,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Orang 1 paket	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 paket 0 Orang	62,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 paket 0 Orang	13,310,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**243,000,000**						100 Persen	**564,677,591**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor				0 Paket 10 jenis	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 10 jenis	10,626,704	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 50 jenis	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 50 jenis	79,859,643	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 20 jenis	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 20 jenis	11,979,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan bahan Logistik kantor				0 Paket 1000 orang	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 1000 orang	19,959,676	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 3 paket	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Paket 3 paket	66,549,734	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 1 paket	110,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 1 paket	176,319,034	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**3,942,700,000**						100 Persen	**167,173,600**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa surat menyurat				0 Laporan 600 buah	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 600 buah	7,453,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik				0 Laporan 12 bulan	110,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	146,410,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 bulan	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	6,655,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 12 bulan	3,813,700,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	6,655,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	**187,277,350**						100 Persen	**680,468,958**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan				0 Unit 10 unit	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Unit 10 unit	53,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan				0 Unit 10 unit	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Unit 10 unit	191,664,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya				0 Unit 1 unit	42,350,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Unit 1 unit	133,100,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 1 paket	92,427,350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Unit 1 paket	290,485,958	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	**52,500,000**						100 Persen	**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan				0 Unit Kerja 1 tahun	52,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	0 Unit Kerja 1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah RS Terakreditasi	unit Jenis Peserta Unit unit		unit Jenis Peserta Unit unit	0 unit 12 Jenis 25480 Peserta 6 Unit 0 unit	**44,466,584,300**						0 unit 12 Jenis 25480 Peserta 6 Unit 0 unit	**141,120,084,300**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	5.4 Persen 63.35 Persen 44 Persen 38 Persen 15 Persen 100 Persen 70 Persen 3 Persen	**23,902,250,000**						5.4 Persen 63.35 Persen 44 Persen 38 Persen 15 Persen 100 Persen 70 Persen 3 Persen	**90,165,000,000**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Persentase pembangunan Rumah Sakit Pratama				0 Unit 1 unit	7,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 1 unit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Relokasi Pustu				0 Unit 1 unit	250,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 1 unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 puskesmas 0 Unit	1,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	4 puskesmas 0 Unit	2,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Labkesda				0 Unit 37 persen	250,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 37 persen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Sungai Rumbai				0 Unit 1 tahun	280,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 1 tahun	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas				0 Unit 3 puskesmas	840,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 3 puskesmas	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi Pustu dan IGFK				0 Unit 5 pustu	525,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 5 pustu	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				0 Unit 3 unit	210,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 3 unit	600,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase Sarana RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 42 persen	5,250,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 42 persen	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai (Pengadaan AC Rawat Inap, Pembangunan Jalan, Pembangunan Pagar)				0 Unit 0.8 persen 58 persen	3,673,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 0.8 persen 58 persen	9,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 38 persen	2,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 38 persen	15,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Persentase alkes Puskesmas terkalibrasi Persentase alkes RSUD Sungai Sungai Rumbai terkalibrasi				0 Unit 60 persen 100 persen	206,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 60 persen 100 persen	615,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Persentase Bahan habis pakai Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Rumbai				0 Paket 80 persen 40 persen	1,225,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Paket 80 persen 40 persen	5,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Pemeliharaan rutin dan berkala alkes Puskesmas Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Rumbai				0 Unit 1 Tahun 1 Tahun	192,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 1 Tahun 1 Tahun	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi	Persen Persen Persen Persen Persen daerah kelompok kelompok nagari nagari IKS Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen klinik Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen Persen daerah kelompok kelompok nagari nagari IKS Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen klinik Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4 daerah 25 kelompok 8 kelompok 35 nagari 31 nagari 0.3 IKS 75 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 45 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 12 Persen 100 Persen 100 Persen 4 klinik 100 Persen 53 Persen 100 Persen	**20,169,334,300**						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4 daerah 25 kelompok 8 kelompok 35 nagari 31 nagari 0.3 IKS 75 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 45 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 12 Persen 100 Persen 100 Persen 4 klinik 100 Persen 53 Persen 100 Persen	**49,500,084,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar												

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada calon pengantin (Catin) Pengadaan Buku KIA, Kohor Ibu dan Media KIE pelayanan ibu hamil Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K1 Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K4 Persentase ibu hamil Resiko tinggi / Komplikasi yang mendapatkan pelayanan Persentase Kasus Kematian Maternal yang terlacak dan di audit				0 Orang 10 nagari 15 puskesmas 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	182,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 10 nagari 15 puskesmas 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	590,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan Kohor bayi Persentase cakupan KN 1 Persentase cakupan KN 3/Lengkap Persentase penanganan neo natal dengan komplikasi				0 Orang 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen	280,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 1 paket 100 persen 100 persen 100 persen	310,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah kelas ibu balita yang aktif Pengadaan Kohor anak Persentase MTBS/MTBM Persentase skirining Balita melalui SDIDTK				0 Orang 18 kelas 1 paket 100 persen 100 persen	230,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 18 kelas 1 paket 100 persen 100 persen	250,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Petugas Kesehatan dan Guru yang di Latih Program UKS Pengadaan Raport kesehatan Persentase pemeriksaan/penjaringan pada usia pendidikan dasar Persentase pemeriksaan rutin pada usia pendidikan dasar				0 Orang 154 petugas 1 paket 100 persen 100 persen	330,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 154 petugas 1 paket 100 persen 100 persen	370,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKRE) terpadu Persentase pelayanan KB Aktif Persentase pelayanan KB pasca salin Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak persentase skrining (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar				0 Orang 6 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	415,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 6 puskesmas 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	460,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan Kohor Lansia dan Buku Geriatri				50 kelompok 0 Orang 50 kohor	155,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	50 kelompok 0 Orang 50 kohor	190,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun Jumlah Kader posbindu yang dilatih Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen 40 kader 0 Orang	82,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 40 kader 0 Orang	240,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak kerisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				0 Dokumen 100 persen	200,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 100 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi penderita Kekurangan Energi Protein (KEP)				0.13 persen	59,999,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0.13 persen	59,999,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas				0 Dokumen 100 persen	75,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 100 persen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) aktif Jumlah Puskesmas yang Memiliki layanan Kesehatan Tradisional (HATRA) Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih ASMAN Terlaksananya Pertemuan, Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional tingkat puskesmas				30 kelompok 5 puskesmas 30 nakes 15 persen	90,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	30 kelompok 5 puskesmas 30 nakes 15 persen	95,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penemuan Kasus AFP PER 100.000 Penduduk Penemuan Kasus Suspek Campak Per 100.000 Penduduk Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB				0 Dokumen 2 kasus 3 kasus 100 persen	175,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 2 kasus 3 kasus 100 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persentase kasus jiwa yang tertangani				60 persen 0 Orang 100 persen	94,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	60 persen 0 Orang 100 persen	280,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji				0 Dokumen 0.3 persen 100 persen 100 persen 100 persen	70,084,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 0.3 persen 100 persen 100 persen 100 persen	70,084,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari Universal Child Imunization (UCI) Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar Cakupan penanganan kasus gigitan HPR sesuai standar Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar Cakupan penemuan kasus Kusta Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah kader jumantik yang dilatih Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi Persentase bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Persentase WUS dengan status T2+ Terlaksananya Sosisialisasi Vakisnasi Covid-19				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 30 persen 0 Dokumen 140 kader 100 persen 100 persen 100 persen 65 persen 52 persen	2,955,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 50 persen 30 persen 0 Dokumen 140 kader 100 persen 100 persen 100 persen 65 persen 52 persen	2,980,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan				0 Dokumen 100 persen	9,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 100 persen	9,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah penderita NAPZA yang terjaring oleh puskesmas IPwL				0 Orang 35 penderita	10,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Orang 35 penderita	35,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Persentase Spesimen penyakit Potensi KLB				0 Paket 100 persen	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Paket 100 persen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) / Forum Kecamatan Sehat Aktif				0 Dokumen 8 Kab/kota	170,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 8 Kab/kota	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas				0 Dokumen 42 persen	500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 42 persen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas				0 Dokumen 42 Persen	1,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 42 Persen	1,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Labkesda dan RSUD Pratama) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PPI Persentase Puskesmas yang Menerapkan Manajemen Mutu terlaksananya akreditasi/reakreditasi RSUD Sungai Rumbai				17 persen 0 Unit 100 persen 100 persen 0 persen	3,075,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	17 persen 0 Unit 100 persen 100 persen 0 persen	3,275,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	**220,000,000**						100 Persen	**350,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi				0 Dokumen 70 persen	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 70 persen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase Nagari yang melaksanakan STBM				60 persen	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	60 persen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**175,000,000**						100 Persen 100 Persen	**1,105,000,000**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Persentase International Stardard Organization (ISO) FKTP, FKTL dan Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas berprestasi				0 Unit 21 persen 40 persen	175,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Unit 21 persen 40 persen	725,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90 Persen 100 Persen 100 Persen	**416,000,000**						90 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,018,400,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	Persen		Persen	100 Persen	**91,500,000**						100 Persen	**180,000,000**	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin				0 Dokumen 100 persen	31,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	108,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan				0 Dokumen 100 persen	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	72,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen	**132,000,000**						100 Persen 85 Persen 100 Persen	**158,400,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar				0 Dokumen 100 persen	36,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	43,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar				70 persen	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	70 persen	72,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan				100 persen	36,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	100 persen	43,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	25 Persen 10 Persen 30 Persen	**192,500,000**						25 Persen 10 Persen 30 Persen	**680,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan RSUD Sungai Rumbai Persentase Tenaga Kesehatan berprestasi				0 Orang 35 persen 20 persen 100 persen	192,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Orang 35 persen 20 persen 100 persen	680,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes Persentase sarana yang tersertifikasi	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	15 Persen 100 Persen 100 Persen	**242,889,968**						15 Persen 100 Persen 100 Persen	**1,495,346,176**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Pembinaan dan pengawasan Toko Obat, Apotek dan UMOT Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 30 Persen	**139,405,440**						100 Persen 100 Persen 30 Persen	**460,129,792**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) (sarana) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penggunaan obat rasional (POR)				0 Dokumen 100 persen 100 persen 100 persen	139,405,440	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen 100 persen 100 persen	162,286,528	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	P-IRT		P-IRT	160 P-IRT	**63,234,528**						160 P-IRT	**216,804,096**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan				0 Dokumen 100 persen	63,234,528	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 100 persen	216,804,096	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	DAM TPU/TPM		DAM TPU/TPM	50 DAM 343 TPU/TPM	**40,250,000**						50 DAM 343 TPU/TPM	**120,000,000**	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memePersentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar nuhi syarat sesuai standar				0 Dokumen 50 persen 35 persen	40,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen 50 persen 35 persen	120,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif Persentase peningkatan PHBS Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	40 Persen 40 Persen 100 Persen	**263,900,000**						40 Persen 40 Persen 100 Persen	**831,000,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**48,650,000**						100 Persen 100 Persen	**146,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kader posyandu yang terlatih Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				0 Dokumen 150 Kader 2 RS	48,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 150 Kader 2 RS	146,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat	KK		KK	20542 KK	**80,500,000**						20542 KK	**260,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Persentase anak usia sekolah yang diberikan penyuluhan kesehatan Persentase Nagari yang melaksanakan Germas Aktif Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR,Minimal 50 % sekolah Persentase rumah tangga yang ber-PHBS				0 Dokumen 100 Persen 35 Persen 100 Persen 35 Persen	80,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 100 Persen 35 Persen 100 Persen 35 Persen	260,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Nagari Siaga Aktif Jumlah Nagari yang melaksanakan Germas Aktif Jumlah Posyandu Strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja	Nagari Nagari Posyandu Posyandu		Nagari Nagari Posyandu Posyandu	30 Nagari 45 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	**134,750,000**						30 Nagari 45 Nagari 35 Posyandu 14 Posyandu	**425,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Kelompok TOGA yang dibina Jumlah poskesri dan poskestren yang dibina Jumlah posyandu strata mandiri Kelompok Saka Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina Nagari siaga aktif				0 Dokumen 42 kelompk 150 poskesri 210 posyandu 15 kelompok 35 Nagari	134,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen 42 kelompk 150 poskesri 210 posyandu 15 kelompok 35 Nagari	425,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8,202,866,800**							**7,607,762,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,804,362,000**							**5,212,762,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4,081,962,000**							**4,081,962,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	4,081,962,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		42 Orang/bulan	4,081,962,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**74,998,900**							**74,998,900**	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	74,998,900	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Laporan	74,998,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**847,401,100**							**255,801,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						255,801,100							255,801,100	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	591,600,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai			4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		9 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**800,000,000**							**800,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	800,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit Kerja	800,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,398,504,800**							**2,395,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**2,395,000,000**							**2,395,000,000**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2,395,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit	2,395,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**3,504,800**							**0**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	3,504,800	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**865,947,000**							**865,947,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**865,947,000**						100 persen	**865,947,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**865,947,000**						100 persen	**865,947,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	865,947,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	865,947,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**713,375,000**							**713,375,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**713,375,000**						100 persen	**713,375,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**713,375,000**						100 persen	**713,375,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	713,375,000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	713,375,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**569,740,000**							**569,740,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**569,740,000**						100 persen	**569,740,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**569,740,000**						100 persen	**569,740,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	569,740,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	569,740,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,435,445,000**							**1,435,445,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,435,445,000**						100 persen	**1,435,445,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**1,435,445,000**						100 persen	**1,435,445,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,435,445,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	1,435,445,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**338,528,800**							**338,528,800**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**338,528,800**						100 persen	**338,528,800**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**338,528,800**						100 persen	**338,528,800**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	338,528,800	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Ampang Kuranji Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	338,528,800	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**447,000,000**							**447,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**447,000,000**						100 persen	**447,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**447,000,000**						100 persen	**447,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	447,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	447,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**697,520,500**							**697,520,500**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	697,520,500	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	697,520,500	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**577,240,000**							**577,240,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**577,240,000**						100 Persen	**577,240,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	**577,240,000**						100 Persen	**577,240,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	577,240,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	577,240,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**642,000,000**							**642,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**642,000,000**						100 persen	**642,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**642,000,000**						100 persen	**642,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	642,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	642,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**697,520,500**							**697,520,500**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**697,520,500**						100 persen	**697,520,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	697,520,500	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	697,520,500	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**218,725,000**							**218,725,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**218,725,000**						100 Persen	**218,725,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	**218,725,000**						100 Persen	**218,725,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	218,725,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	218,725,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**763,027,400**							**763,027,400**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**763,027,400**						100 persen	**763,027,400**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**763,027,400**						100 persen	**763,027,400**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	763,027,400	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	763,027,400	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,343,734,000**							**1,343,734,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,343,734,000**						100 persen	**1,343,734,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**1,343,734,000**						100 persen	**1,343,734,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,343,734,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	1,343,734,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**422,409,000**							**422,409,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**422,409,000**						100 persen	**422,409,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Peningkatan Pelayanan BLUD	persen		persen	100 persen	**422,409,000**						100 persen	**422,409,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	422,409,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	1 Unit Kerja	422,409,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**81,751,149,100**							**99,010,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org		org	270 org	**26,741,149,100**						270 org	**28,150,000,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	org/bln		org/bln	270 org/bln	**26,741,149,100**						270 org/bln	**28,150,000,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				270 Orang/bulan	26,741,149,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	270 Orang/bulan	28,150,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Akreditasi Rumah Sakit AVLOS BOR BTO GDR NDR TOI	Bintang hari persen kali persen persen hari		Bintang hari persen kali persen persen hari	5 Bintang 6 hari 61 persen 43 kali 35 persen 20 persen 1,5 hari	**55,010,000,000**						5 Bintang 6 hari 61 persen 43 kali 35 persen 20 persen 1,5 hari	**70,510,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pembangunan Rumah Sakit yang memenuhi tempat tidur	persen		persen	100 persen	**10,000,000,000**						100 persen	**16,100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 tersedia ruangan operasi kardiovaskular, ruangan ST Scan, ruangan cathlab, gedung rawat inap, gedung gizi dan gedung loundry				0 Unit 6 Unit	10,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	0 Unit 6 Unit	10,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	persen		persen	100 persen	**45,010,000,000**						100 persen	**52,010,000,000**	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5 Dokumen	45,010,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	5 Dokumen	45,010,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**191,030,133,154**							**189,877,333,154**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**10,531,996,154**						100 %	**10,550,346,154**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**64,934,000**						7 Dokumen	**66,434,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan				7 Dokumen 7 Dokumen	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	7 Dokumen 7 Dokumen	16,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	24,934,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	3 Laporan	24,934,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terealisasinya pembayaran Gaji PNS DPUPR	Bulan		Bulan	14 Bulan	**4,776,000,900**						14 Bulan	**4,776,000,900**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji ASN Jumlah Bulan Pembayaran TPP ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 12 bulan 48 Orang/bulan	4,721,000,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	14 Bulan 12 bulan 48 Orang/bulan	4,721,000,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	600 Dokumen	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**60,000,000**							**60,000,000**	
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		1 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Aparatur yang dilatih Aparatur yang dilatih Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang Orang		Orang Orang	10 Orang 10 Orang	**50,000,000**						10 Orang 10 Orang	**55,000,000**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang 0 Orang 10 Orang	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	10 Orang 0 Orang 10 Orang	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**556,512,350**						12 Bulan	**558,112,350**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor				1 Bulan 12 Bulan	5,007,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Bulan 12 Bulan	5,007,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Split cctv Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Komputer PC Kursi Pejabat Kursi Rapat Kursi Tunggu Besi Lemari Arsip Partisi Meja Rapat Kepala Dinas Mesin Scan Mesin sinsaw Pengadaan Laptop Printer				5 unit 2 unit 12 unit/set 5 unit 1 set 2 set 1 set 1 set 1 set 3 unit 2 unit 2 unit 5 unit	243,660,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	5 unit 2 unit 12 unit/set 5 unit 1 set 2 set 1 set 1 set 1 set 3 unit 2 unit 2 unit 5 unit	243,660,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Kebutuhan Peralatan Rumah Tanggayang tersedia				1 paket 12 Bulan	15,957,350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 paket 12 Bulan	15,957,350	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kebutuhan makan minum yang tersedia				1 paket 12 Bulan	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 paket 12 Bulan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia				1 Paket 12 bulan	41,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Paket 12 bulan	41,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang tersdia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 paket 0 Dokumen 12 Dokumen	16,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 paket 0 Dokumen 12 Dokumen	17,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	204,638,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Laporan	204,638,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Unit		Unit	2 Unit	**389,896,704**						2 Unit	**398,896,704**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	2 Unit	44,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	0 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	299,896,704	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	10 Unit	299,896,704	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**3,615,152,200**						12 Bulan	**3,615,152,200**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Laporan	5,100,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	670,300,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	670,300,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	2,939,752,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,939,752,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Unit		Unit	33 Unit	**1,019,500,000**						33 Unit	**1,020,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	1 Unit	13,750,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	993,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	12 Bulan	993,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 unit	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	45 unit	14,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Kapasitas sumber air baku yang tersedia	%		%	100 %	**16,069,000,000**						100 %	**10,301,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen rencana teknis, dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,094,000,000**						1 Tahun	**3,601,000,000**	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Unit	77,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				73.42 KM	3,524,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Muaro Sopan Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Sopan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	73.42 KM	3,524,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Perencanaan dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,975,000,000**						1 Tahun	**6,700,000,000**	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	3,250,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung Batang Pangian				1 Bendung 300 Meter	5,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Bendung 300 Meter	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi Rehabilitasi saluran irigasi Sungai dareh				0.2 KM 0.2 KM	200,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	0.2 KM 0.2 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM 1 KM	525,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	1 KM 1 KM	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	%		%	100 %	**4,164,937,000**						100 %	**4,574,937,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan Teknis SPAM	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,164,937,000**						1 Tahun	**4,574,937,000**	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah optimalisasi SPAM IKK optimalisasi SPAM IKK Pulau Punjung optimalisasi SPAM IKK Sungai Rumbai				2 paket 1 paket 1 paket	2,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	2 paket 1 paket 1 paket	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				12 SR	674,937,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	12 SR	674,937,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	pembangunan bak penampung air				1 unit	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	1 unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan jaringan perpipaan				0 500 SR	1,350,000,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	0 500 SR	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pembedayaan dalam rangka penyediaa TPA/TPS-3R	%		%	100 %	**315,000,000**						100 %	**900,000,000**	
1	**03**	**04**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah TPA yang dibangun	Tahun		Tahun	1 Tahun	**315,000,000**						1 Tahun	**900,000,000**	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				100 Rumah Tangga	280,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	100 Rumah Tangga	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan				100 Orang	17,500,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	100 Orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				1 Kelompok	17,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Sampah	1 Kelompok	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%		%	100 %	**2,765,000,000**						100 %	**3,028,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedia Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,765,000,000**						1 Tahun	**3,028,000,000**	
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	0 Rumah Tangga	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				200 Rumah Tangga	2,625,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Kurnia Koto Salak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	200 Rumah Tangga	2,862,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	100 Rumah Tangga	77,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi				12 M^3/Hari	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	12 M^3/Hari	38,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	%		%	100 %	**571,200,000**						100 %	**624,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Tahun		Tahun	1 Tahun	**571,200,000**						1 Tahun	**624,000,000**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Drainase belakang Kantor Pos Ke Mushallah akilkhlas - nagari ampek koto Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				100 meter 0 M 100 M	28,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya wilayah genangan	100 meter 0 M 100 M	30,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	- Drainase Bofer Denai Sampai Sawah - nagari ampek koto pulau punjung Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				70 meter 70 M	543,200,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya wilayah genangan	70 meter 70 M	593,200,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	%		%	100 %	**15,025,500,000**						100 %	**16,528,050,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit		Unit	1 Unit	**15,025,500,000**						1 Unit	**16,528,050,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				60 Dokumen	500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	60 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	87,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	1 Dokumen	96,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Lanjutan Kantor wali nagari sungai rumbai Lanjutan pembangunan mesjid agung dharmasraya Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai Pembangunan Pagar Balitan Gunung Medan				0 Unit 5 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 100 meter	14,438,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Situng, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	0 Unit 5 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 100 meter	15,881,800,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	DED Pembangunan rumah gadang	%		%	100 %	**1,000,000,000**						100 %	**1,100,000,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**1,000,000,000**						1 Dokumen	**1,100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	DED Pembangunan rumah gadang Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	% %		% %	100 % 100 %	**127,787,500,000**						100 % 100 %	**129,121,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Panjang Jalan Mantap Panjang jembatan yang dibangun	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**127,787,500,000**						1 Tahun 1 Tahun	**129,121,000,000**	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Aspal Hotmix Ampang Kuranji - Siraho Aspal Hotmix Aur Jaya - Bukit Gading Aspal Hotmix Blok A Sit.III - Kodrat Kurnia Aspal Hotmix Blok C Sit.IV - Batas Sangir Aspal Hotmix Jalan Lingkar Kurnia Aspal Hotmix Jalan Simpang DPRD - Lawai Aspal Hotmix Kampung Surau - PT.Bina Aspal Hotmix Koto Besar - Sungai Rumbai Aspal Hotmix Kurnia Selatan Aspal Hotmix Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan Aspal Hotmix Sinamar - Sungai Limau Aspal Hotmix Sit.IV - Blok D Aspal Hotmix Tanjung Alam - Sungai Limau				4.5 km 3 km 1.2 km 3 km 4 km 2 km 8.7 km 2.5 km 2 km 7.35 km 4.8 km 4.5 km 0.5 km 2.6 km 10.6 km 1 dokumen 1 dokumen 0 KM 98.05 KM 1.7 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.7 KM	114,452,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	4.5 km 3 km 1.2 km 3 km 4 km 2 km 8.7 km 2.5 km 2 km 7.35 km 4.8 km 4.5 km 0.5 km 2.6 km 10.6 km 1 dokumen 1 dokumen 0 KM 98.05 KM 1.7 KM 1.8 KM 1.6 KM 1.6 KM 1.7 KM	114,452,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
						1.7 KM							1.7 KM		
						1.8 KM							1.8 KM		
						1.7 KM							1.7 KM		
						1.6 KM							1.6 KM		
						1.6 KM							1.6 KM		
						1.8 KM							1.8 KM		
						1.6 KM							1.6 KM		
		Aspal Jalan Kampung Baru Sungai Sakai - Blok A (Kurnia Koto Salak)				1.8 KM							1.8 KM		
		Aspal Jalan Lingkar Batu Kangkung - Lubuk Besar				1.8 KM							1.8 KM		
		DED Jalan Lingkar Candi pulau sawah				1.6 KM							1.6 KM		
		DED Jalan Masuk utama Candi pulau sawah				2.2 km							2.2 km		
		Panjang Jalan yang Dibangun				7 km							7 km		
		Panjang Jalan yang Dibangun				1 km							1 km		
		Pembukaan Jalan ADP Nagari Abai Siat													
		Pembukaan Jalan Baru Jorong Gansima Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung													
		Pembukaan Jalan Baru Nagari Timpeh Kampun Kecamatan Timpeh													
		Pembukaan Jalan baru Sungai Pasir Kecamatan Koto Salak													
		Pembukaan Jalan dekat Pos 5 Kec. Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Jorong Sungai Rumbai Nagari Padukuan													
		Pembukaan Jalan kobun godang nagari Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Koto Dibawah Nagari Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Koto Salak													
		Pembukaan Jalan Manunggal Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Simpang Kelompok													
		Pembukaan Jalan Simpang Peset bedeng panjang nagari Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Sungai Betung Nagari Koto Besar													
		Pembukaan Jalan Sungai Karak Kecamatan Koto Salak													
		Pembukaan Jalan Sungai Pudang Nagari Padukuan													

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pengaspalan Jalan Koto Ranah Peningkatan jalan aur jaya ampang kuranji Peningkatan jalan nagari taratak tinggi														
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Perbaikan jalan Koto Beringin Rehab Jalan Aspal Hotmix Koto Tinggi ke Koto Besar Rehab Jalan Aspal Nagari Ranah Palabi				8 KM 2 km 5 km 1 km	6,510,000,000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Ranah Palabi Kab. Dharmasraya, Tiumang, Koto Beringin Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	8 KM 2 km 5 km 1 km	7,161,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Lanjutan jembatan ampalu padukuan (jorong sungai rumbai) Panjang Jembatan yang Dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun Pembangunan Jembatan Muaro Siraho Pembangunan Jembatan Padukuan Pembangunan Jembatan Siguntur Pembangunan Jembatan Sungai nili Peningkatan jalan Pendekat jembatan (6 lokasi)				12 Meter 0 M 479 Meter 20 Meter 100 Meter 35 Meter 12 Meter 300 Meter	6,300,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih Kab. Dharmasraya, Sitiung, Siguntur Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Ampalu Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	12 Meter 0 M 479 Meter 20 Meter 100 Meter 35 Meter 12 Meter 300 Meter	6,930,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Perbaikan Jembatan antar RT dikarenakan kondisi jembatan yang tidak layak untuk dilewati Nagari Sipangkur Rehab / Perbaikan jembatan Nagari Koto Beringin				0 M 2 unit 1 unit 1 unit	525,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Koto Beringin Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sipangkur	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	0 M 2 unit 1 unit 1 unit	577,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Jumlah pelaku jasa kontruksi yang terlatih	%		%	100 %	**300,000,000**						100 %	**300,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang		Orang	200 Orang	**300,000,000**						200 Orang	**300,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan pelaku jasa kontruksi yang terlatih Pengeluaran tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemamfaatan jasa konstruksi				2 paket 100 orang 10 Dokumen	300,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan layanan jasa konstruksi	2 paket 100 orang 10 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**12,500,000,000**							**12,850,000,000**	
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**3,000,000,000**							**3,350,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Pembayaran tagihan dan operasional PJU				0 Dokumen 1 tahun	3,000,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemerataan pembangunan infrastruktur		0 Dokumen 1 tahun	3,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan pulau punjung Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan sungai rumba	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**9,500,000,000**						1 Dokumen	**9,500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan pulau punjung Penyusanan RDTR Kawasan perkotaan sungai rumbai				4 Dokumen 12 Sistem Jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,500,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen 12 Sistem Jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**4,934,575,100**							**6,682,368,236**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	gaji	asn		asn	16 asn	**2,997,825,100**						16 asn	**3,143,993,236**	
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	gaji jumlah gaji dan tunjangan asn	asn asn		asn asn	16 asn 16 asn	**1,775,485,100**						16 asn 16 asn	**1,806,688,236**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,775,485,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	asn	16 Orang/bulan	1,806,688,236	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah bahan logistik kantor jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah belanja air jumlah belanja listrik jumlah belanja telpon, jumlah belanja telpon,listrik dan air jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	jenis lembar bulan bulan bulan bulan unit kali		jenis lembar bulan bulan bulan bulan unit kali	20 jenis 6000 lembar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 unit 120 kali	**182,000,000**						20 jenis 6000 lembar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 unit 120 kali	**200,155,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	9,855,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 unit	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	10 unit	8,800,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Paket	16,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60000 lembar	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	60000 lembar	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	120 Laporan	99,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah kendaraan roda 4 jumlah mebel kantor	unit unit		unit unit	1 unit 12 unit	**470,000,000**						1 unit 12 unit	**517,000,000**	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan roda 2 Jumlah Unit Kendaraan roda 4				0 Unit 2 Unit 1 Unit	440,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 2 Unit 1 Unit	484,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	30,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22 Unit	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor Jumlah Jasa Komunikasi SDA dan Listrik Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis jenis bulan		jenis jenis bulan	42 jenis 12 jenis 12 bulan	**527,840,000**						42 jenis 12 jenis 12 bulan	**573,400,000**	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				42 laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa	42 laporan	4,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa	12 Laporan	44,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	483,840,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	jasa	12 Laporan	525,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor pajak kendaraan dinas	unit unit unit		unit unit unit	9 unit 38 unit 9 unit	**42,500,000**						9 unit 38 unit 9 unit	**46,750,000**	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	12,500,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	13,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	33,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	% % %		% % %	92.80 % 100 % 100 %	**151,750,000**						92.80 % 100 % 100 %	**328,875,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Tersusunnya dokumen data rumah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**41,250,000**						1 Dokumen	**45,375,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	41,250,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Koto Nan Empat Dibawuh Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	1 Dokumen	45,375,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Tersosialisasinya petunjuk teknik dan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**5,500,000**						1 kegiatan	**6,500,000**	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				10 Orang	5,500,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rumah yang terkena korban bencana dan relokasi program pemerintah	10 Orang	6,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	terbangun / terehabnya rumah yang terkena dampak bencana dan rrelokasi program pemerintah	rumah		rumah	3 rumah	**35,000,000**						3 rumah	**38,500,000**	
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rumah yang terkena dampak bencana dan rrelokasi program pemerintah	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**70,000,000**						1 kegiatan	**138,500,000**	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemohon pembangunan perumahan	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 dokumen 0 Laporan	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemohon pembangunan perumahan	1 dokumen 0 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan permukiman layak huni	%		%	91,45 %	**210,000,000**						91,45 %	**1,477,000,000**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	tersusunnya legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**70,000,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen 0 Laporan	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat pelaku pembangunan di kabupaten	1 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Berkurangnya kawasan kumuh	ha		ha	3 ha	**105,000,000**						3 ha	**1,138,500,000**	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Pengadaan GPS Pengadaan Hardisk Pengadaan Laptop				1 Dokumen 1 Unit 1 Unit 1 Unit	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	1 Dokumen 1 Unit 1 Unit 1 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				1 Laporan	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	1 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	1 Laporan	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	ha		ha	4 ha	**35,000,000**						4 ha	**38,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat yang berada di kawasan kumuh	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan lingkungan Perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU Cakupan permukiman layak huni	% %		% %	65,57 % 91,45 %	**400,000,000**						65,57 % 91,45 %	**440,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	berkurangnya luas kawasan kumuh meningkatnya permukiman yang layak huni	ha ha		ha ha	3 ha 3 ha	**400,000,000**						3 ha 3 ha	**440,000,000**	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	350,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Lubuk Besar Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Tanjung Alam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 ha dan diluar kawasan kumuh	10 Unit Rumah	385,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kawasan kumuh dibawah 10 ha dan diluar kawasan kumuh	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang dilengkapi dengan PSU	%		%	65,57 %	**1,120,000,000**						65,57 %	**1,232,000,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	PSU Perumahan dan permukiman	ha		ha	3 ha	**1,120,000,000**						3 ha	**1,232,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan: Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan: Sumber Dana	Prioritas: Nasional	Prioritas: Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU Panjang Rigit beton dan drainase yang menunjang fungsi hunian Pengadaan Mata Coring Beton Pengadaan Meteran Dorong/walking measure				0 Lokasi 2 Lokasi 5400 m 1 Unit 1 Unit	1,120,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Sialang Gaung Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Ampalu Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Perumahan dan permukiman	0 Lokasi 2 Lokasi 5400 m 1 Unit 1 Unit	1,232,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
												Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Laweh							
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang dilengkapi dengan PSU	%		%	65,57 %	**55,000,000**						65,57 %	**60,500,000**	
1	**04**	**06**	2.01		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**55,000,000**						1 kegiatan	**60,500,000**	
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	55,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	pemohon pengembang perumahan	1 Laporan	60,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1,252,500,000**							**1,377,750,000**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi	hektar persen		hektar persen	5000 hektar 100 persen	**35,000,000**						5000 hektar 100 persen	**38,500,000**	
2	**10**	**02**	2.01		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	hektar		hektar	5000 hektar	**35,000,000**						5000 hektar	**38,500,000**	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi				0 5000 hektar	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pengelolaan izin lokasi	0 5000 hektar	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/ diselesaikan Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan Persentase sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diselesaikan	persen persen persen		persen persen persen	4,166,667 persen 100 persen 100 persen	**35,000,000**						4,166,667 persen 100 persen 100 persen	**38,500,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan laporan hasil penyelesaian tanah sengketa Persentase sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diselesaikan	persen laporan persen		persen laporan persen	100 persen 2 laporan 100 persen	**35,000,000**						100 persen 2 laporan 100 persen	**38,500,000**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	35,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	2 dokumen	38,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	persen		persen	4,166,667 persen	**175,000,000**						4,166,667 persen	**192,500,000**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah jumlah penyelesaian kasus tanah	bidang kasus		bidang kasus	1 bidang 30 kasus	**175,000,000**						1 bidang 30 kasus	**192,500,000**	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	jumlah kasus pertanahan milik pemda dan masyarakat yang terfasilitasi /diselesaikan	1 Dokumen	192,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	bidang bidang bidang		bidang bidang bidang	1 bidang 1 bidang 1 bidang	**500,000,000**						1 bidang 1 bidang 1 bidang	**550,000,000**	
2	**10**	**06**	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	bidang bidang bidang bidang		bidang bidang bidang bidang	1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang	**500,000,000**						1 bidang 1 bidang 1 bidang 1 bidang	**550,000,000**	
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				300 bidang	500,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	300 bidang	550,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Jumlah luas tanah yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jumlah tanah ulayat yang disurvey di petakan dan ditetapkan batas batasnya pesentase tanah ulayat yang telah di kukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	ulayat ulayat ulayat		ulayat ulayat ulayat	5 ulayat 5 ulayat 5 ulayat	**87,500,000**						5 ulayat 5 ulayat 5 ulayat	**96,250,000**	
2	**10**	**07**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah luas tanah yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jumlah tanah ulayat yang disurvey di petakan dan ditetapkan batas batasnya	ulayat ulayat		ulayat ulayat	5 ulayat 5 ulayat	**87,500,000**						5 ulayat 5 ulayat	**96,250,000**	
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 tanah ulayat	87,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tanah ulayat	5 tanah ulayat	96,250,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase tersedianya tanah kosong untuk pembangunan fasilitas umum	0		0	0 0	**210,000,000**						0 0	**231,000,000**	
2	**10**	**08**	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Persentase tersedianya tanah kosong untuk pembangunan fasilitas umum	0		0	0 0	**210,000,000**						0 0	**231,000,000**	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Dokumen	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tanah kosong	1 Dokumen	231,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat persentase tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat	bidang persen		bidang persen	100 bidang 100 persen	**210,000,000**						100 bidang 100 persen	**231,000,000**	
2	**10**	**09**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat persentase tanah pemerintah daerah yang telah bersertifikat	bidang persen		bidang persen	100 bidang 100 persen	**210,000,000**						100 bidang 100 persen	**231,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				100 Bidang	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	izin membuka tanah	100 Bidang	231,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8,104,453,590**							**10,836,000,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**7,809,453,590**						100 %	**8,431,000,000**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**2,741,774,550**						12 bulan	**2,800,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2,741,774,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Satpol PP dan Damkar	0 Orang/bulan	2,800,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**189,000,000**						100 %	**242,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	4,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	1 Paket	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	2 Paket	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	2 Paket	14,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	0 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	%		%	100 %	**4,661,179,040**						100 %	**5,059,000,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	34,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	12 Laporan	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4,618,179,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Surat menyurat, Komunikasi dan Listrik	0 Laporan	5,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%		%	100 %	**217,500,000**						100 %	**218,000,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	10 Unit	13,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	0 Unit	185,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Peralatan Kantor	0 Unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum	% persen		% persen	90 % 100 persen	**174,881,250**						90 % 100 persen	**2,093,000,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		%	90 %	**133,536,250**						90 %	**1,680,000,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120 Kasus	104,536,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	120 Kasus	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	50 Orang	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	0 Laporan	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Perkada	%		%	90 %	**41,345,000**						90 %	**263,000,000**	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				1 Laporan	41,345,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Operasi Penertiban Perda dan Perkada	1 Laporan	208,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	%		%	100 %	**120,118,750**						100 %	**312,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanggulangann Kebakaran	%		%	100 %	**73,917,250**						100 %	**250,000,000**	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	73,917,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	kali		kali	12 kali	**11,665,000**						12 kali	**15,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	11,665,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Instansi Pemerintah dan Tempat Pelayanan Publik	4 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,930,000**						1 Tahun	**17,000,000**	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				48 Dokumen	7,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Investigasi Kejadian Kebakaran	48 Dokumen	17,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase Penanggulangann Kebakaran	%		%	100 %	**26,606,500**						100 %	**30,000,000**	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				52 Desa/Kelurahan	26,606,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	52 Desa/Kelurahan	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2,797,900,662**							**3,703,356,100**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daera	Persen		Persen	100 Persen	**1,987,932,662**						100 Persen	**2,018,356,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	**854,356,100**						8 Orang/Bulan	**854,356,100**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	854,356,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	854,356,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**233,782,442**						100 Persen	**334,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,124,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	4,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	52,054,842	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,073,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Paket	4,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	86,780,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan operasional kantor BPBD Kab. Dharmasraya	1 Laporan	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**734,399,120**						100 Persen	**730,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Rekening Listrik				12 Bulan	18,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Bulan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (AC 4 unit, Komputer 4 unit, Laptop 4 unit)				12 Unit	7,320,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah bulan pembayaran HonorariumTenaga administrasi, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir (bln)				12 Bln	709,079,120	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pelaksanaan jasa penunjang PD	12 Bln	685,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	**165,395,000**						100 Persen	**100,000,000**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9 unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boat 4 unit, perahu karet 2 unit)				25 Unit	105,395,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah	25 Unit	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pembayaran Sewa gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bln 0 Unit	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah	12 Bln 0 Unit	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang	6500 Orang 6500 Orang 650 Orang	**809,968,000**						6500 Orang 6500 Orang 650 Orang	**1,685,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	Orang		Orang	6500 Orang	**59,643,000**						6500 Orang	**100,000,000**	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				6500 Orang	59,643,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana	6500 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		Orang	6500 Orang	**504,529,000**						6500 Orang	**755,000,000**	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	40,242,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	J Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				100 Orang	33,797,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	100 Orang	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	148,564,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				50 Unit	31,960,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	50 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)				0 6 dokumen	34,732,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	0 6 dokumen	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	199,974,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				500 Orang	15,260,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang berada dikawasan rawan bencana	500 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		Orang	650 Orang	**181,732,000**						650 Orang	**465,000,000**	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	29,692,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang menjadi korban bencana	1 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	51,680,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang menjadi korban bencana	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				650 Orang	44,810,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang menjadi korban bencana	650 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				650 Orang	41,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang menjadi korban bencana	650 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	14,300,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Warga yang menjadi korban bencana	1 Laporan	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**64,064,000**						2 Kegiatan	**365,000,000**	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	39,918,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	24,146,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6,811,786,350**							**561,750,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**4,530,607,350**						100 persen	**0**	
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	**2,899,632,900**						14 bulan	**0**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 orang	2,899,632,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN DINSOSP3APPKB	28 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**249,232,950**						100 persen	**0**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	3 Paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44,676,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	1 Paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,001,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	1 Paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	120 Paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	1 Paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				0 Laporan 1 tahun	110,055,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	0 Laporan 1 tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase ketersediaan barang milik daerah tersedianya barang milik daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**36,050,000**						100 persen 100 persen	**0**	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Laptop (3 unit), printer (1 unit), AC (1 unit)				0 Unit 5 unit	36,050,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	0 Unit 5 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**1,157,631,500**						100 persen	**0**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya materai kantor				0 Laporan 1200 lembar/buah	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APPKB	0 Laporan 1200 lembar/buah	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayaran rekening telpn, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB				0 Laporan 1 tahun	64,071,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	0 Laporan 1 tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	12 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir				0 Laporan 1 tahun	1,082,560,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	0 Laporan 1 tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	persen		persen	100 persen	**188,060,000**						100 persen	**0**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	54,550,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	2 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	126,800,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	42 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	6,710,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSP3APP KB	33 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase masyarakat miskin	persen		persen	75 persen	**650,039,500**						75 persen	**455,000,000**	
1	**06**	**02**	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase KAT yang terlatih	persen		persen	87 persen	**157,500,000**						87 persen	**157,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga 0 Keluarga	87,500,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Suku anak dalam, tokoh masyarakat, dan masyarakt skitar SAD	25 Keluarga 0 Keluarga	87,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Keluarga 0 Keluarga	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Suku anak dalam, tokoh masyarakat, dan masyarakt skitar SAD	25 Keluarga 0 Keluarga	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PSKS yang aktif	persen		persen	90 persen	**492,539,500**						90 persen	**297,500,000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PSM yang terlatih				0 Orang 52 orang	70,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	0 Orang 52 orang	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	154,548,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	11 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PSKS aktif dan terlatih Jumlah SDM Puskesos yang meningkat Kapasitasnya dalam penanganan kemiskinan				0 Keluarga 50 PSKS 3 Puskessos	166,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	0 Keluarga 50 PSKS 3 Puskessos	166,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	40,491,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	12 Lembaga	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang 0 Sertifikat	61,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TKSK, PSM, KARANG TARUNA, PSKS LAINNYA	30 Orang 0 Sertifikat	61,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen		persen	100 persen	**650,034,500**						100 persen	**106,750,000**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen		persen	100 persen	**143,284,500**						100 persen	**0**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	25,955,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	50 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				10 Orang	10,550,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				30 Orang	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	15,246,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				600 Orang	22,680,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	600 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				5 Orang	3,627,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	20,760,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki (SPM)				1 unit	500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				40 Orang	10,620,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				15 Orang	14,260,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	15 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				25 Orang	7,086,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	25 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	persen		persen	10 persen	**506,750,000**						10 persen	**106,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	19,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	38,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	38,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	19,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Nagari	315,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	21 Nagari	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	7,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	30 Orang	7,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	19,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	25 Orang	19,250,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2 Dokumen	3,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	persen		persen	82 persen	**822,995,000**						82 persen	**0**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	persen		persen	80 persen	**822,995,000**						80 persen	**0**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				132519 Orang	400,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, Mayarakat miskin	132519 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				43176 Keluarga	400,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, Mayarakat miskin	43176 Keluarga	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6973 KPM	22,995,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, stake holder terkait, KPM PKH, Mayarakat miskin	6973 KPM	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	persen		persen	100 persen	**158,110,000**						100 persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota (SPM)	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**53,110,000**						100 persen 100 persen	**0**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				1000 Orang	33,850,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	1000 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				10 Orang	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	10 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				12 Unit	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	12 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				100 Orang	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	100 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (SPM)				100 Orang	5,760,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (SPM)	100 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	persen		persen	100 persen	**105,000,000**						100 persen	**0**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	105,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	TAGANA	21 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2,398,513,900**							**0**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen		persen	88,31 persen	**446,703,900**						88,31 persen	**0**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	keaktifan focal point perangkat daerah	PD		PD	38 PD	**46,708,900**						38 PD	**0**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Focal Point Perangkat Daerah yang diberikan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				38 OPD	46,708,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	FOCAL POINT PUG	38 OPD	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	organisasi		organisasi	17 organisasi	**399,995,000**						17 organisasi	**0**	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah organisasi perempuan yang Mendapat pembinaan dan Pendampingan				0 Lembaga 17 organisasi	399,995,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	organisasi perempuan	0 Lembaga 17 organisasi	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen		persen	100 persen	**923,500,000**						100 persen	**0**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	kegiatan persen		kegiatan persen	5 kegiatan 100 persen	**540,000,000**						5 kegiatan 100 persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan				100 persen	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	100 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan pelatihan				10 lembaga	525,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	10 lembaga	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar	persen		persen	100 persen	**131,500,000**						100 persen	**0**	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				8 orang	31,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	perempuan korban kekerasan	8 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi				8 layanan	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	perempuan korban kekerasan	8 layanan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang sesuai standar	persen		persen	80 persen	**252,000,000**						80 persen	**0**	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas				30 orang	126,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SDM lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	30 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				8 orang	126,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SDM lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	8 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	persen		persen	63 persen	**52,500,000**						63 persen	**0**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	ketersediaan Kelompok data gender dan anak	Pokja		Pokja	1 Pokja	**52,500,000**						1 Pokja	**0**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Gender dan Anak				2 buku	52,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	POKJA DATA OPD	2 buku	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Predikat/Nilai		Predikat/Nilai	Madya Predikat/Nilai	**262,500,000**						Madya Predikat/Nilai	**0**	
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase lembaga peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen		persen	80 persen	**262,500,000**						80 persen	**0**	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak				5 kegiatan	262,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	5 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen		persen	100 persen	**713,310,000**						100 persen	**0**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	**193,000,000**						5 kegiatan	**0**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				5 kegiatan	63,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, anak sekolah	5 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				5 kegiatan	130,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, anak sekolah	5 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	persen		persen	100 persen	**442,500,000**						100 persen	**0**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 orang	210,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	anak yang memerlukan perlindungan khusus	10 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus				10 layanan	180,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	anak yang memerlukan perlindungan khusus	10 layanan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	52,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	anak yang memerlukan perlindungan khusus	5 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	persen		persen	75 persen	**77,810,000**						75 persen	**0**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang mendapatkan pelatihan				40 orang	77,810,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SDM lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak	40 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6,928,943,750**							**0**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	persentase data kependudukan	persen		persen	85 persen	**741,400,000**						85 persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	persen		persen	70 persen	**621,400,000**						70 persen	**0**	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))				4 Dokumen	73,200,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	4 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				11 Dokumen	120,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	11 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				11 Dokumen	155,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	11 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	3 Satuan Pendidikan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	53,200,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder	12 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya data dan informasi keluarga	persen		persen	75 persen	**120,000,000**						75 persen	**0**	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				27 Dokumen	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, Kader	27 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				11 Laporan	115,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	operator data, Kader	11 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	persen		persen	85 persen	**4,084,540,000**						85 persen	**0**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	persen		persen	80 persen	**955,200,000**						80 persen	**0**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	3 Organisasi	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				3 kegiatan	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	3 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				25 Dokumen	80,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	25 Dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				132 Laporan	210,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				132 Laporan	520,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				132 Laporan	106,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	masyarakat, stakeholder, PLKB/PKB, mitra kerja, Kader IMP	132 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangga Kencana	Penyuluh KB & Kader		Penyuluh KB & Kader	958 Penyuluh KB & Kader	**342,850,000**						958 Penyuluh KB & Kader	**0**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program Bangga Kencana				80 persen	63,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kader IMP	80 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				932 Orang	279,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kader IMP	932 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	paket Faskes		paket Faskes	1 paket 20 Faskes	**2,220,740,000**						1 paket 20 Faskes	**0**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya terlaksananya pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi di semua faskes				12 Laporan 20 faskes	33,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	12 Laporan 20 faskes	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah petugas pengelola & petugas logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB				4 orang	6,050,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	4 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1000 Orang	645,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	1000 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	1 paket	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				32 Unit	1,451,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	32 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	fasilitasi dan koordinasi pasca pelayanan bagi peserta KB Jumlah Akseptor yang habis melahirkan yang mendapatkan Pelayanan Alat Konstrasepsi				1000 orang 1000 orang	61,050,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	1000 orang 1000 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				20 faskes	9,640,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Faskes, Stakeholder, Akseptor	20 faskes	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	Kampung KB		Kampung KB	27 Kampung KB	**565,750,000**						27 Kampung KB	**0**	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				27 kampung KB	565,750,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kampung KB	27 kampung KB	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	persentase kelompok tribina yang aktif	persen		persen	80 persen	**2,103,003,750**						80 persen	**0**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	meningkatkan pengetahuan keluarga	persen		persen	80 persen	**1,976,003,750**						80 persen	**0**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (APBD) Jumlah pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik-KB)				11 Unit 15 Unit	423,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	11 Unit 15 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Jumlah kelompok yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Kelompok	45,003,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	6 Kelompok	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya operasional kader Tim Pendamping Keluarga				145 Tim	1,320,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	145 Tim	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan sosialisasi oleh Duta Genre Telaksananya pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana)				3 kegiatan 1 kegiatan	188,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelompok BKB, Kader Tribina	3 kegiatan 1 kegiatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persen		persen	70 persen	**127,000,000**						70 persen	**0**	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				8 Organisasi	56,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Stakeholder, Mitra Kerja	8 Organisasi	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	71,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Stakeholder, Mitra Kerja	12 Laporan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**4,452,610,760**							**4,623,127,500**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Urusan	Persen		Persen	100 Persen	**4,094,674,110**						100 Persen	**4,295,980,000**	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	28 Orang	**2,978,406,450**						28 Orang	**3,000,000,000**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 27 Orang	2,978,406,450	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Orang/bulan 27 Orang	3,000,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur yang melakukan pelatihan Teknis	Orang		Orang	10 Orang	**4,500,000**						10 Orang	**4,500,000**	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelatihan Teknis Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang 0 Orang	4,500,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	10 Orang 0 Orang	4,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket Tahun Jenis Jenis Jenis Tahun		Paket Tahun Jenis Jenis Jenis Tahun	700 Paket 1 Tahun 4 Jenis 25 Jenis 5 Jenis 1 Tahun	**198,382,900**						700 Paket 1 Tahun 4 Jenis 25 Jenis 5 Jenis 1 Tahun	**245,800,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Bola Lampu, Terminal, Fitting, Stok Kontak, Kabel yang diperlukan untuk Penerangan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	3,642,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis 0 Paket	3,300,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Printer, Laptop dan AC yang diperlukan untuk Pelaksanaan Tupoksi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Jenis 0 Paket	43,716,600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	4 Jenis 0 Paket	80,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan serta Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 25 Jenis	12,000,800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Paket 25 Jenis	5,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu				0 Paket 700 Paket	24,620,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Paket 700 Paket	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy Dokumen, Jilid Dokumen, Pembuatan Liflet, Spanduk dan DOkumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket	24,620,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun 0 Paket	12,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah				0 Laporan 1 Tahun	89,783,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Laporan 1 Tahun	120,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Kebutuhan Materai 10000	Unit Tahun Buah		Unit Tahun Buah	4 Unit 1 Tahun 200 Buah	**858,077,260**						4 Unit 1 Tahun 200 Buah	**912,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10.000				0 Laporan 200 Buah	2,525,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Laporan 200 Buah	2,300,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Kantor dan Telepon Kantor				0 Laporan 4 Unit	45,065,020	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Laporan 4 Unit	60,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran Honor PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan THL (48 Orang)				0 Laporan 1 Tahun	810,487,240	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Laporan 1 Tahun	850,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	24 Unit 1 Unit 6 Unit	**55,307,500**						24 Unit 1 Unit 6 Unit	**133,380,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Dinas)				0 Unit 1 Unit	12,147,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Unit 1 Unit	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara (Roda 2, Roda 4 /Unit) dan Alat Berat				0 Unit 24 Unit	36,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Unit 24 Unit	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perawatan dan Perbaikan Ac, Laptop dan Printer				0 Unit 6 Unit	7,160,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	ASN Dinas Pangan dan Perikanan	0 Unit 6 Unit	8,380,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	Persen		Persen	80 Persen	**175,152,000**						80 Persen	**168,907,750**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Dokumen Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Pelaksanaan Distribusi (Bazar) Pangan Pokok	Dokumen Lembaga Dokumen Kali		Dokumen Lembaga Dokumen Kali	2 Dokumen 1 Lembaga 1 Dokumen 4 Kali	**61,248,000**						2 Dokumen 1 Lembaga 1 Dokumen 4 Kali	**61,248,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan				0 Laporan 10 dokumen	25,485,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat dan Kelompok Tani Kabupaten Dharmasraya	0 Laporan 10 dokumen	25,485,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan dan Pasokan Pangan Daerah dalam satu tahun berjalan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen 0 Dokumen	35,763,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat dan Kelompok Tani Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen 0 Dokumen	35,763,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun Jumlah Promosi Pangan Lokal	Kelompok Dokumen Kali		Kelompok Dokumen Kali	10 Kelompok 1 Dokumen 4 Kali	**113,904,000**						10 Kelompok 1 Dokumen 4 Kali	**107,659,750**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen 0 Dokumen	16,744,250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	kELMOPK wANITA tANI	1 Dokumen 0 Dokumen	10,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti				10 Kelompok 0 Laporan 4 Kali	97,159,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	kELMOPK wANITA tANI	10 Kelompok 0 Laporan 4 Kali	97,159,750	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	Persen		Persen	40 Persen	**147,739,750**						40 Persen	**147,739,750**	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Kali Paket		Kali Paket	12 Kali 200 Paket	**147,739,750**						12 Kali 200 Paket	**147,739,750**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pangan pada Nagari Rawan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200 Paket 0 Dokumen	147,739,750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Masyarakat Kabupaten Dharmasraya	200 Paket 0 Dokumen	147,739,750	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Aman yang Beredar di Masyarakat	Persen		Persen	80 Persen	**35,044,900**						80 Persen	**10,500,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar	Jenis Jenis		Jenis Jenis	5 Jenis 5 Jenis	**35,044,900**						5 Jenis 5 Jenis	**10,500,000**	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Pangan Segar yang dikeluarkan				0 Dokumen 1 Dokumen	35,044,900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pedagang Pangan Segar di Seluruh Kecamatan	0 Dokumen 1 Dokumen	10,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**441,094,900**							**222,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Usaha Perikanan yang Berkembang	Persen		Persen	35 Persen	**356,729,400**						35 Persen	**192,500,000**	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Jumlah Penjaminan Sarana Produksi Budidaya Ikan (Benih) Jumlah Penjaminan Sarana Produksi Budidaya Ikan (Pakan) Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Dokumen Ekor Ton Unit		Dokumen Ekor Ton Unit	1 Dokumen 500000 Ekor 50 Ton 8 Unit	**356,729,400**						1 Dokumen 500000 Ekor 50 Ton 8 Unit	**192,500,000**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pokdakan yang Tersedia-Rehabilitasi Kolam Jumlah Sarana dan Prasarana Pokdakan yang Tersedia-Cetak Kolam				0 Unit 6 Unit 2 Unit	107,004,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Pembudidaya Ikan	0 Unit 6 Unit 2 Unit	52,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Produksi Budidaya Ikan yang Tersedia untuk Usaha Budidaya Ikan-Benih (Ekor) Jumlah Sarana Produksi Budidaya Ikan yang Tersedia untuk Usaha Budidaya Ikan-Pakan (Ton)				0 Unit 500000 Ekor 50 Ton	249,725,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Pembudidaya Ikan	0 Unit 500000 Ekor 50 Ton	140,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	Persen		Persen	20 Persen	**27,065,500**						20 Persen	**12,250,000**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Kawasan Kawasan		Kawasan Kawasan	6 Kawasan 3 Kawasan	**27,065,500**						6 Kawasan 3 Kawasan	**12,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi				0 Dokumen 1 Dokumen 3 Kawasan	27,065,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kawasan Perairan Tangkap	0 Dokumen 1 Dokumen 3 Kawasan	12,250,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Yang Berdaya Saing	Persen		Persen	10 Persen	**57,300,000**						10 Persen	**17,500,000**	
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bantuan Peralatan Usaha Jumlah Ketersediaan Ikan dan Usaha Pengolahan Ikan Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha	Unit Usaha Unit Jenis		Unit Usaha Unit Jenis	5 Unit Usaha 2 Unit 2 Jenis	**57,300,000**						5 Unit Usaha 2 Unit 2 Jenis	**17,500,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Perikanan yang Berkembang				0 Ton 2 Unit	57,300,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Pembudidaya Ikan	0 Ton 2 Unit	17,500,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**5,286,814,280**							**5,918,940,632**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Poin %		Poin %	73.648 Poin 100 %	**3,449,127,910**						73.648 Poin 100 %	**3,980,274,812**	
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	**2,095,000,000**						14 Bulan	**2,300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,095,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN	21 Orang/bulan	2,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyediaan urusan perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DLH	Jenis		Jenis	6 Jenis	**217,791,390**						6 Jenis	**270,018,750**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	2,779,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	9 Paket	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berupa Laptop, PC Komputer, Printer, Sound Sistem, CCTV				0 Paket 5 Paket	74,682,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	0 Paket 5 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	9,434,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	12 Paket	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	19,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	18 Paket	31,518,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	9 Paket	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	90,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capain nilai AKIP OPD	33 Laporan	102,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,057,911,520**						12 Bulan	**1,330,256,062**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	12 Laporan	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	24 Laporan	52,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	11 Laporan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang yang menerima honorarium Non ASN Jumlah orang yang menerima Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0 Laporan 48 orang 12 orang	990,411,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Capaian Nilai AKIP OPD	0 Laporan 48 orang 12 orang	1,259,756,062	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**78,425,000**						12 Bulan	**80,000,000**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	58,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase pemenuhan perencanaan lingkungan hidup	%		%	100 %	**40,014,500**						100 %	**50,000,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten yang disusun dan ditetapkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	**40,014,500**						1 dokumen	**50,000,000**	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terkendalinya Pelaksanaan RPPLH				2 Dokumen	40,014,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Dharmasraya	indeks		indeks	65.47 indeks	**146,661,750**						65.47 indeks	**174,392,500**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan	indeks indeks indeks		indeks indeks indeks	56.3 indeks 83.85 indeks 47.2 indeks	**112,556,250**						56.3 indeks 83.85 indeks 47.2 indeks	**124,337,500**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut jumlah titik pantau air sungai Jumlah titik pantau lahan jumlah titik pantau udara ambient				0 Dokumen 22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	71,837,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya IKLH Kab. Dharmasraya	0 Dokumen 22 titik pantau 6 titik pantau 11 titik pantau	71,837,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah kampung iklim yang ditetapkan				0 Dokumen 5 Jorong	40,718,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya IKLH Kab. Dharmasraya	0 Dokumen 5 Jorong	52,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan pencemaran yang ditanggulangi/dihentikan	kawasan		kawasan	2 kawasan	**34,105,500**						2 kawasan	**50,055,000**	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	34,105,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kab. dharmasraya	3 Titik	50,055,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase kawasan RTH yang terkelola dengan baik	%		%	100 %	**31,000,000**						100 %	**31,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Jumlah ruang terbuka hijau yang terkelola	kawasan		kawasan	7 kawasan	**31,000,000**						7 kawasan	**31,000,000**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kawasan RTH yang terkelola				8 Kawasan	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya Pengelolaan Ruang terbuka HIjau	8 Kawasan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	%		%	100 %	**18,020,750**						100 %	**30,020,750**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	**18,020,750**						20 usaha/kegiatan	**30,020,750**	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	18,020,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 Dokumen	30,020,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	%		%	100 %	**50,100,000**						100 %	**71,615,450**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	laporan		laporan	30 laporan	**50,100,000**						30 laporan	**71,615,450**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah				10 Usaha/Kegiatan	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	10 Usaha/Kegiatan	30,709,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya				15 Laporan	26,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	15 Laporan	40,906,250	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	MHA		MHA	1 MHA	**14,280,500**						1 MHA	**17,280,500**	
2	**11**	**07**	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Jumlah kelompok MHA yang diberdayakan/didamping	MHA		MHA	1 MHA	**14,280,500**						1 MHA	**17,280,500**	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				3 Dokumen	14,280,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya pemberdayaan /pendampingan MHA di kabupaten Dharmasraya	3 Dokumen	17,280,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase sekolah yang mengikuti kegiatan Adiwiyata Persentase sekolah yang mengikuti kegiatan Adiwiyata	% %		% %	1,9 % 1.9 %	**7,252,250**						1,9 % 1.9 %	**17,500,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sekolah yang Terlaksana Penilaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	sekolah		sekolah	5 sekolah	**7,252,250**						5 sekolah	**17,500,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah sekolah yang Terlaksana Penilaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)				0 Entitas 3 Sekolah	7,252,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan Sekolah Adiwiyata di sekolah-sekolah di kab. Dharmasraya	0 Entitas 3 Sekolah	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani	%		%	100 %	**13,500,000**						100 %	**30,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	kasus		kasus	4 kasus	**13,500,000**						4 kasus	**30,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil ditindaklanjuti				2 Kasus	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Masyarakat	2 Kasus	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan sampah Pesentase timbulan sampah yang tertangani	% %		% %	27 % 72 %	**1,516,856,620**						27 % 72 %	**1,516,856,620**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah timbulan sampah yang tertangani	ton		ton	38 ton	**1,516,856,620**						38 ton	**1,516,856,620**	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah				72 Persen	1,444,311,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya penanganan timbulan sampah	72 Persen	1,444,311,870	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	72,544,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya penanganan timbulan sampah	10 Kelompok	72,544,750	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4,589,511,628**							**5,197,296,500**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	program		program	1 program	**4,439,193,628**						1 program	**4,759,814,000**	
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**2,785,512,400**						1 Kegiatan	**2,839,314,000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,785,512,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai dan Instansi Kabupaten Dharmasraya	30 Orang/bulan	2,839,314,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**614,339,988**						1 Kegiatan	**738,500,000**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5,054,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Paket	4,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	405,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Paket	450,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	18,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 Paket	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	21,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Paket	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	163,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**125,175,000**						1 Kegiatan	**170,000,000**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	28,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	96,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**587,926,240**						1 Kegiatan	**587,000,000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	126,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	457,326,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Laporan	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**326,240,000**						1 Kegiatan	**310,000,000**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	69,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	40,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	189,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Jumlah	program		program	1 program	**76,492,000**						1 program	**171,727,500**	
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**76,492,000**						1 Kegiatan	**34,877,500**	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	16,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20 Laporan	15,977,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				20000 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20000 Dokumen	8,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Jumlah	program		program	1 program	**25,242,000**						1 program	**130,077,500**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**8,750,000**						1 Kegiatan	**69,650,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	8,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	12 Layanan	8,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**16,492,000**						1 Kegiatan	**18,550,000**	
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	16,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	2 Laporan	5,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah	program		program	1 program	**48,584,000**						1 program	**118,177,500**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**5,000,000**						1 Kegiatan	**23,450,000**	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	10 Dokumen	8,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**23,492,000**						1 Kegiatan	**50,977,500**	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20 Laporan	16,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	20 Laporan	15,977,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	12 Laporan	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**20,092,000**						1 Kegiatan	**22,750,000**	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				10 Laporan	20,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	10 Laporan	5,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5,442,700,430**							**6,241,369,032**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**3,825,967,030**						100 Persen	**4,410,324,032**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**15,000,000**						2 Laporan	**25,000,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	25 Orang	**2,811,869,450**						25 Orang	**2,979,324,032**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,811,869,450	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Orang/bulan	2,979,324,032	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	Orang		Orang	5 Orang	**15,040,000**						5 Orang	**15,000,000**	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15,040,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	5 Orang	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**269,062,540**						100 Persen	**389,000,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	4,000,400	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	5 Jenis 0 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Jenis 0 Paket	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	25 Jenis 0 Paket	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	15,062,140	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	15 Jenis 0 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Jenis 0 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	12 Jenis 0 Paket	32,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	3 Jenis 0 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 100 Kali	140,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum	0 Laporan 100 Kali	210,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**67,675,000**						100 Persen	**240,000,000**	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Jenis 0 Unit	45,200,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Jenis 0 Unit	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	22,475,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik Daerah	8 Unit	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**511,050,040**						100 Persen	**520,750,000**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang Disediakan				0 Laporan 40000 Lembar	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 40000 Lembar	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening yang dibayar				0 Laporan 2 Rekening	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 2 Rekening	57,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	12 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	457,050,040	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jasa Penunjang	0 Laporan 12 Bulan	440,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**136,270,000**						100 Persen	**241,250,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang	1 Unit	32,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	80,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang	10 Unit	168,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	13,770,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang	25 Unit	10,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang	1 Unit	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Fasilitasi Penataan Desa/Nagari	Persen		Persen	100 Persen	**131,250,000**						100 Persen	**131,250,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Kali		Kali	1 Kali	**131,250,000**						1 Kali	**131,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Nagari 0 Unit	131,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penataan Desa	1 Nagari 0 Unit	131,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	Persen		Persen	100 Persen	**44,707,500**						100 Persen	**45,045,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	Persen		Persen	100 Persen	**44,707,500**						100 Persen	**45,045,000**	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	19,886,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kerjasama Antar Desa	5 Dokumen	11,550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	24,821,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kerjasama Antar Desa	2 Dokumen	33,495,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**423,819,600**						100 Persen	**390,250,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Nagari		Nagari	52 Nagari	**423,819,600**						52 Nagari	**390,250,000**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	124,600,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	124,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	11,550,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11,550,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				104 Orang	53,900,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	104 Orang	53,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Lembaga BUMNag yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan				0 Dokumen 52 Lembaga	79,087,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen 52 Lembaga	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen 0 Dokumen	43,732,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen 0 Dokumen	54,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	29,750,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	29,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				104 Orang	19,250,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	104 Orang	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	61,950,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	61,950,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen		Persen	90 Persen	**1,016,956,300**						90 Persen	**1,264,500,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen		Persen	90 Persen	**1,016,956,300**						90 Persen	**1,264,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	900,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				370 Lembaga	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga Kemasyarakatan	370 Lembaga	56,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	26,694,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	26,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	20,554,300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	54,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	19,708,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**11,793,788,156**							**17,675,288,156**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0 0 0 0 0 PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UNIT UNIT BULAN DOKUMEN PAKET LAPORAN UNIT		UNIT UNIT BULAN DOKUMEN PAKET LAPORAN UNIT	115 UNIT 115 UNIT 14 BULAN 3066 DOKUMEN 437 PAKET 480 LAPORAN 115 UNIT	**7,299,354,046**						115 UNIT 115 UNIT 14 BULAN 3066 DOKUMEN 437 PAKET 480 LAPORAN 115 UNIT	**13,175,354,046**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase capaian penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	22 dokumen	**10,000,000**						22 dokumen	**10,000,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Bulan Laporan		Bulan Laporan	14 Bulan 65 Laporan	**2,936,050,326**						14 Bulan 65 Laporan	**2,991,050,326**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,936,050,326		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	14 Orang/bulan	2,936,050,326	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang Dokumen Paket		Orang Dokumen Paket	63 Orang 4 Dokumen 125 Paket	**12,953,000**						63 Orang 4 Dokumen 125 Paket	**432,953,000**	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	12,953,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	50 Orang	12,953,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Paket		Laporan Paket	105 Laporan 307 Paket	**228,962,900**						105 Laporan 307 Paket	**251,462,900**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	8 Paket	3,977,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	75 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14,984,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	14 Paket	14,984,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	200 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	59,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	9 Paket	59,999,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	90,002,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Administrasi Umum	100 Laporan	90,002,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pembangunan Pagar Kantor	unit		unit	44 unit	**620,356,000**						44 unit	**5,853,356,000**	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	36,956,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	36,956,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				350 m	583,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengadaan Barang Milik Daerah	350 m	583,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Bulan		Laporan Bulan	342 Laporan 12 Bulan	**3,214,480,320**						342 Laporan 12 Bulan	**3,214,480,320**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jasa Penunjang	300 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jasa Penunjang	12 Laporan	112,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Laporan	14,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jasa Penunjang	30 Laporan	14,710,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,083,770,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jasa Penunjang	12 Laporan	3,083,770,320	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	71 Unit	**276,551,500**						71 Unit	**422,051,500**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Barang	1 Unit	12,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	142,051,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Barang	8 Unit	142,051,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Barang	15 Unit	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	112,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemeliharaan Barang	2 Unit	112,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	- - - - Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahun Orang Unit Laporan Dokumen		Tahun Orang Unit Laporan Dokumen	1 Tahun 10 Orang 1031 Unit 32 Laporan 2007 Dokumen	**4,494,434,110**						1 Tahun 10 Orang 1031 Unit 32 Laporan 2007 Dokumen	**4,499,934,110**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	**129,800,300**						1 Laporan 2 Dokumen	**129,800,300**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	129,800,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	129,800,300	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		Unit		Unit	1010 Unit	**3,930,758,908**						1010 Unit	**3,930,758,908**	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				453 Unit	668,459,158		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	453 Unit	668,459,158	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				294 Unit	3,129,744,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	294 Unit	3,129,744,250	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	111,320,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	7 Unit	111,320,500	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				261 Unit	21,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Jalan Kabupaten	261 Unit	21,235,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Bukti Lulus Uji Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Persentase Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Daya Manusia Penguji Tarif Retribusi Pengujian	Dokumen Dokumen Unit Unit Orang Laporan		Dokumen Dokumen Unit Unit Orang Laporan	2000 Dokumen 2000 Dokumen 9 Unit 7 Unit 4 Orang 11 Laporan	**260,356,000**						2000 Dokumen 2000 Dokumen 9 Unit 7 Unit 4 Orang 11 Laporan	**260,356,000**	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	51,300,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan bermotor	2 Orang	51,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	209,056,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan bermotor	9 Unit	209,056,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Unit Laporan		Dokumen Unit Laporan	1 Dokumen 1 Unit 14 Laporan	**51,764,602**						1 Dokumen 1 Unit 14 Laporan	**51,764,602**	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	25,937,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan yang lewat jalan lalu lintas Kabupaten	1 Laporan	25,937,300	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	25,827,302		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Kendaraan yang lewat jalan lalu lintas Kabupaten	12 Laporan	25,827,302	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Orang		Laporan Orang	3 Laporan 2 Orang	**121,754,300**						3 Laporan 2 Orang	**121,754,300**	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	121,754,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	1 Laporan	121,754,300	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5,165,355,980**							**5,165,367,980**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	meningkatnya pelayanan harian kantor	%		%	83 %	**3,577,074,180**						83 %	**3,577,086,180**	
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN meningkatnya ketepatan pencairan keuangan OPD	bulan %		bulan %	12 bulan 82 %	**2,350,518,000**						12 bulan 82 %	**2,350,518,000**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,350,518,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	23 Orang/bulan	2,350,518,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	meningkatnya kecepatan pelayanan publik Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	% persen		% persen	82 % 100 persen	**192,697,700**						82 % 100 persen	**192,709,700**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 jenis 0 Paket	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 jenis 0 Paket	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	30,003,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 jenis 0 Paket	30,003,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 jenis 0 Paket	8,577,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 jenis 0 Paket	8,577,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Jenis 0 Paket	29,940,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	30 Jenis 0 Paket	29,940,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotokopi, Jilid dan Cetak) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	29,988,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Orang Pelaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 49 Orang	90,189,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	0 Laporan 49 Orang	90,189,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	meningkatnya ketersediaan penunjang pelayanan publik	%		%	82 %	**971,358,480**						82 %	**971,358,480**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Surat Keluar Jumlah Materai Kegiatan Kantor				0 Laporan 40 Surat 500 Lembar	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	0 Laporan 40 Surat 500 Lembar	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Listrik dan Internet)				0 Laporan 2 Laporan	500,560,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	0 Laporan 2 Laporan	500,560,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Laporan	10,950,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	5 Jenis 0 Laporan	10,950,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan THL 22 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 2 Orang, Penjaga Kantor 1 orang				12 Laporan 1 Tahun	455,848,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	12 Laporan 1 Tahun	455,848,480	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	meningkatnya ketepatan umur layak pakai pemanfaatan barang milik daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	% persen		% persen	85 % 100 persen	**62,500,000**						85 % 100 persen	**62,500,000**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	62,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	dinas komunikasi dan informatika	1 Unit	62,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	jumlah informasi pembangunan yang diberikan ke pada masyarakat Persentase informasi pembangunan yang diberikan kepada masyarakat	% persen		% persen	80 % 80 persen	**1,538,281,800**						80 % 80 persen	**1,538,281,800**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah informasi yang diberikan kepada masyarakat	tahun		tahun	1 tahun	**1,538,281,800**						1 tahun	**1,538,281,800**	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Majalah, Kalender, Baliho, Spanduk)				0 Dokumen 4 Jenis	278,160,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	0 Dokumen 4 Jenis	278,160,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (PPID)				0 Dokumen 4 Dokumen	67,607,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	0 Dokumen 4 Dokumen	67,607,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media (Media Elektronik Lokal, Media Cetak Lokal dan Media Nasional)				0 Layanan 3 Layanan	768,673,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	0 Layanan 3 Layanan	768,673,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				130 Dokumen	49,999,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	130 Dokumen	49,999,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	88,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	5 Orang	88,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8 Puskesmas 20 Nagari 20 SD 20 SMP 0 Unit	285,042,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	8 Puskesmas 20 Nagari 20 SD 20 SMP 0 Unit	285,042,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi		aplikasi	15 aplikasi	**50,000,000**						15 aplikasi	**50,000,000**	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	kawasan digital	tahun		tahun	1 tahun	**50,000,000**						1 tahun	**50,000,000**	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah sosialisasi Aplikasi baru				0 Unit 5 aplikasi	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	publik	0 Unit 5 aplikasi	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**169,936,000**							**169,936,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral Persentase ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral	% persen		% persen	50 % 50 persen	**169,936,000**						50 % 50 persen	**169,936,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah data staistik sektoral	tahun		tahun	1 tahun	**169,936,000**						1 tahun	**169,936,000**	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				5 dokumen 0 Dokumen	49,995,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemerintah daerah	5 dokumen 0 Dokumen	49,995,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah Nagari Statistik Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				2 kecamatann 22 Nagari 0 Orang	119,941,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pemerintah daerah	2 kecamatann 22 Nagari 0 Orang	119,941,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**50,064,000**							**50,064,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	%		%	80 %	**50,064,000**						80 %	**50,064,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	kerjasama tingkat kemanan dan asessment dengan BSSN	tahun		tahun	1 tahun	**50,064,000**						1 tahun	**50,064,000**	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 aplikasi 0 Perangkat Daerah	50,064,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemerintah daerah	10 aplikasi 0 Perangkat Daerah	50,064,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5,207,461,250**							**92,000,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**4,257,461,250**						1 tahun	**0**	
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 21 orang	bulan		bulan	14 bulan	**2,278,661,250**						14 bulan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,278,661,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makan minum rapat dan tamu Tersedianya peralatan rumah tangga	bulan bulan jenis bulan kegiatan jenis bulan jenis		bulan bulan jenis bulan kegiatan jenis bulan jenis	12 bulan 12 bulan 60 jenis 12 bulan 1 kegiatan 12 jenis 12 bulan 22 jenis	**211,000,000**						12 bulan 12 bulan 60 jenis 12 bulan 1 kegiatan 12 jenis 12 bulan 22 jenis	**0**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Mebel Tersedianya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit paket unit paket unit unit		unit paket unit paket unit unit	15 unit 1 paket 6 unit 1 paket 2 unit 6 unit	**200,000,000**						15 unit 1 paket 6 unit 1 paket 2 unit 6 unit	**0**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor" Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa surat menyurat	bulan bulan jenis bulan		bulan bulan jenis bulan	12 bulan 12 bulan 8 jenis 12 bulan	**1,242,800,000**						12 bulan 12 bulan 8 jenis 12 bulan	**0**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	240,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	8 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	983,800,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	pemeliharaan mobil jabatan (kepala dinas) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Pemeliharaan Mebel	unit paket paket paket unit jenis jenis unit paket paket jenis		unit paket paket paket unit jenis jenis unit paket paket jenis	1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 13 unit 4 jenis 10 jenis 45 unit 1 paket 2 paket 5 jenis	**325,000,000**						1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 13 unit 4 jenis 10 jenis 45 unit 1 paket 2 paket 5 jenis	**0**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	1 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	13 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	45 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh	1 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya.	persen		persen	40 persen	**100,000,000**						40 persen	**22,750,000**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya.	persen		persen	40 persen	**100,000,000**						40 persen	**22,750,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	22,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	persen		persen	60 persen	**50,000,000**						60 persen	**52,500,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	persen		persen	60 persen	**50,000,000**						60 persen	**52,500,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	150 Orang	52,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan	dokumen		dokumen	90 dokumen	**800,000,000**						90 dokumen	**1,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Pelaku UMKM yang bermitra dengan Pihak III Jumlah Pelaku UMKM yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha Tersedia data pelaku UMKM per sektor/ bidang usaha	dokumen dokemeb dokumen		dokumen dokemeb dokumen	90 dokumen 90 dokemeb 1 dokumen	**800,000,000**						90 dokumen 90 dokemeb 1 dokumen	**1,750,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	90 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	500,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	90 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**350,000,000**							**4,067,000,000**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persen		persen	39 persen	**100,000,000**						39 persen	**3,843,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Pembangunan Pasar dan Pujasera/Rest Area (Wisata Kuliner) Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	paket persen		paket persen	15 paket 100 persen	**100,000,000**						15 paket 100 persen	**3,801,000,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				15 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	3,780,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Terkendalinya Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	bulan		bulan	12 bulan	**50,000,000**						12 bulan	**133,000,000**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	**50,000,000**						12 bulan 12 bulan	**80,500,000**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	12 Laporan	28,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	istributor	persen		persen	40 persen	**200,000,000**						40 persen	**91,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah Alat UTTP yang ditera ulang dan Bertanda tera sah Jumlah Kegiatan Pengawasan Kemetrologian	persen persen		persen persen	800 persen 100 persen	**200,000,000**						800 persen 100 persen	**91,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200 Unit	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				0 Orang	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0 Orang	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**600,000,000**							**325,500,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Terlaksananya Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM		IKM	217 IKM	**500,000,000**						217 IKM	**280,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengetahuan IKM dalam Peningkatan Kualitas dan Mutu Produk Terlaksananya kegiatan Promosi dan Penyediaan Cendramata Daerah	IKM IKM		IKM IKM	30 IKM 60 IKM	**500,000,000**						30 IKM 60 IKM	**280,000,000**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				30 Dokumen	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30 Dokumen	140,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				60 Dokumen	400,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60 Dokumen	140,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	bertambahnya IKM yang memiliki izin usaha sesuai standar	IKM		IKM	60 IKM	**100,000,000**						60 IKM	**45,500,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Terpenuhinya Komitmen Pelaku IKM dalam Pengurusan Izin	persen IKM		persen IKM	100 persen 60 IKM	**100,000,000**						100 persen 60 IKM	**45,500,000**	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				60 Dokumen	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Dokumen	28,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4,101,421,950**							**3,769,443,444**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**3,158,967,900**						100 persen	**3,209,541,449**	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	PEMBAYARAN GAJI ASN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	**2,058,637,150**						1 TAHUN	**1,920,687,300**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - pembayaran gaji ASN - pembayaran TPP				0 Orang/bulan 20 Orang/bulan 14 bulan 12 bulan	2,058,637,150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran gaji ASN	0 Orang/bulan 20 Orang/bulan 14 bulan 12 bulan	1,920,687,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	pembayaran administrasi umum perkantoran	tahun		tahun	1 tahun	**230,005,750**						1 tahun	**391,383,685**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,004,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	3,300,110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	33,002,090	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	8,800,550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	13,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	1 Paket	1,650,110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	101,001,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	pembayaran administrasi umum perkantoran	12 Laporan	331,430,825	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	persen		persen	100 persen	**192,035,000**						100 persen	**151,000,000**	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	192,035,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	10 Unit	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	persen		persen	100 persen	**623,240,000**						100 persen	**664,263,864**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	2,420,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	519,240,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	12 Laporan	524,343,864	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**55,050,000**						100 persen	**76,156,600**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	20,075,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	25,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	13,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	22,965,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**696,261,000**						4 Kegiatan	**250,600,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**696,261,000**						4 Kegiatan	**250,600,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota jumlah kegiatan promosi penanaman modal				0 Dokumen 1 kegiatan	696,261,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	0 Dokumen 1 kegiatan	227,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	persen		persen	100 persen	**102,185,450**						100 persen	**59,680,728**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen		persen	100 persen	**102,185,450**						100 persen	**59,680,728**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2000 izin 0 Pelaku Usaha	60,118,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2000 izin 0 Pelaku Usaha	22,697,185	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				30 Orang	14,342,450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	30 Orang	4,958,543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				24 Kegiatan Usaha	27,725,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	24 Kegiatan Usaha	17,325,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan		Perusahaan	130 Perusahaan	**126,075,600**						130 Perusahaan	**126,075,600**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	perusahaan		perusahaan	130 perusahaan	**126,075,600**						130 perusahaan	**126,075,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaanyang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha. 60 perusahaan	18,595,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	0 Kegiatan Usaha. 60 perusahaan	18,595,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bintek terhadap pelaku usaha,jumlah pelaku usaha yang dipantau,jumlah pelaku usaha yang diawasi (DAK non fisik),jumlah pelaku usaha yang dibina Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 perusahaan 0 Pelaku Usaha	70,289,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	40 perusahaan 0 Pelaku Usaha	70,289,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pelaku usaha yang diawasi (DAK non fisik)				0 Kegiatan Usaha 30 perusahaan	37,191,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	0 Kegiatan Usaha 30 perusahaan	37,191,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Tersedianya data dan sistem informasi Perizinan dan non perizinan pada Penanman Modal	4 Sistem		4 Sistem	4 Sistem 4 Sistem	**17,932,000**						4 Sistem 4 Sistem	**6,293,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	sistem		sistem	4 sistem	**17,932,000**						4 sistem	**6,293,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 sistem	17,932,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedianya Sistem Aplikasi yang dikembangkan dengan perangkat lunak	4 sistem	6,293,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2,385,961,250**							**2,385,961,250**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	organisasi		organisasi	236 organisasi	**752,835,500**						236 organisasi	**752,835,500**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi jumlah pemuda yang mendapakan pelatihan kewirausahaan	organisasi orang orang		organisasi orang orang	236 organisasi 30 orang 32 orang	**752,835,500**						236 organisasi 30 orang 32 orang	**752,835,500**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah persentase peningkatan pemberdayaan pemuda				80 persen	137,293,500	Semua Kab/Kota, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	80 persen	137,293,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terpilihnya anggota paskibraka kab. Dharmasraya				1 Kegiatan	615,542,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	1 Kegiatan	615,542,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	cabor		cabor	28 cabor	**1,238,381,550**						28 cabor	**1,238,381,550**	
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapaii	cabor		cabor	25 cabor	**673,923,900**						25 cabor	**673,923,900**	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	terlaksanya penyelenggaraan kejuaraan				1 Kegiatan	673,923,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	1 Kegiatan	673,923,900	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	pembinaan olahraga dan rekreasi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**564,457,650**						1 kegiatan	**564,457,650**	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga rekreasi				5 Unit	564,457,650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	5 Unit	564,457,650	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah pemuda/kepemudaan yang berprestasi	organisasi		organisasi	236 organisasi	**394,744,200**						236 organisasi	**394,744,200**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	organisasi		organisasi	210 organisasi	**394,744,200**						210 organisasi	**394,744,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Kegiatan	176,189,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	1 Kegiatan	176,189,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	terfasilitasinya kegiatan kepramukaan				4 Kegiatan	218,554,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	4 Kegiatan	218,554,700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7,572,096,740**							**7,581,410,240**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	terlaksananya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	**3,836,391,496**						4 dokumen	**3,845,704,996**	
2	**22**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**32,540,000**						71.384 nilai 29.5 nilai	**32,540,000**	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kerja Tahun 2024				1 Dokumen	32,540,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	32,540,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**2,475,411,756**						71.384 nilai 29.5 nilai	**2,475,411,756**	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji Tahun 2023				23 Orang	2,475,411,756	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23 Orang	2,475,411,756	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**22**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**352,684,900**						71.384 nilai 29.5 nilai	**355,658,400**	
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu pengadaan cok/kontak pengadaan Kebel Perbaikan Instalasi				30 unit 50 unit 100 meter 1 unit	5,001,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	30 unit 50 unit 100 meter 1 unit	5,001,400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Unit 2 PK amplop cetak dinas amplop cetak kecil amplop plastik amplop putih anak pisau cutter besar balangko cetak lembar disposisi balangko cetak logo garuda binder klip besar binder klip kecil box arsip buku faktur cartridge printer hitam cartridge printer warna CCTV 6 Kamera double tape Dry box (cabinet) Kamera flash disk gunting besar gunting sedang hard disk HVS 1000 60 gr isi staples isolasi kertas A4 80 gr Kumputer PC Laptop Mesin Pompa Air Sumur Dalam Mesin Ptong Rumput Taman ordner folio				3 Unit 4 pak 8 pak 5 pak 5 pak 15 kotak 60 buku 1 rim 51 kotak 50 kotak 70 pcs 20 buah 10 buah 10 buah 1 Unit 18 rol 1 unit 3 Unit 6 buah 8 buah 1 Unit 100 rim 30 buah 40 rol 50 rim 5 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 70 pcs 3 buah 7 buah 10 kotak 7 kotak	172,678,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Unit 4 pak 8 pak 5 pak 5 pak 15 kotak 60 buku 1 rim 51 kotak 50 kotak 70 pcs 20 buah 10 buah 10 buah 1 Unit 18 rol 1 unit 3 Unit 6 buah 8 buah 1 Unit 100 rim 30 buah 40 rol 50 rim 5 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 70 pcs 3 buah 7 buah 10 kotak 7 kotak	172,678,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						pelobang kertas besar				15 buah							15 buah		
						pelobang kertas kecil				1 Unit							1 Unit		
						pena biasa				3 unit							3 unit		
						pena gel				30 unit							30 unit		
						pena tanda tangan				4 unit							4 unit		
						pengadaan Keyboar set				10 Unit							10 Unit		
						Penghapus pensil besar				300 buah							300 buah		
						penghapus pensil kecil				2 unit							2 unit		
						Printer A4				50 kotak							50 kotak		
						stabilo				25 kotak							25 kotak		
						staples besar				15 botol							15 botol		
						staples kecil				12 botol							12 botol		
						Televisi				12 botol							12 botol		
						Tersedianya Filing				5 botol							5 botol		
						tersedianya kursih fatura				1 Unit							1 Unit		
						tersedianya kursih pejabat eselon III				30 pak							30 pak		
						tersedianya kursi kerja pejabat eselon IV				40 pak							40 pak		
						tersedianya kursi rapapat				15 buah							15 buah		
						tersedianya rak besi arsip biasa													
						tinta pena biasa (isi ulang)													
						tinta pena tanda tangan (isi ulang)													
						tinta printer 100 ml													
						tinta printer hitam													
						tinta printer warna													
						tinta stempel													
						Traktor Potong Rumput													
						trigonal besar													
						trigonal kecil													
						type x													
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	11,973,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
						tersedianya air minum isi ulang				500 galon							500 galon		
						tersedianya Cangkul				3 Unit							3 Unit		
						tersedianya Pacul				3 Unit							3 Unit		
						tersedianya Sabit				3 buah							3 buah		
						tersedianya sapu dan sikat				15 buah							15 buah		
						tersedianya sapu lidi				40 Tabung							40 Tabung		
						tersedianya tabung gas isi ulang				80 koak							80 koak		
						tersedianya tissu													

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air Galon Air Kemasan JuMakan dan Minum Penunjang Kegiatan Prasmanan : Kopimlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Nasi Permen Sembako Gula snack				20 bungkus 268 galon 30 dus 26 bungkus 0 Paket 210 bungkus 20 bungkus 20 bungkus 200 kotak	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20 bungkus 268 galon 30 dus 26 bungkus 0 Paket 210 bungkus 20 bungkus 20 bungkus 200 kotak	27,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan 0 Paket	38,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				12 bulan	100,005,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan	100,005,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**919,754,840**						71.384 nilai 29.5 nilai	**934,194,840**	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayaran tagihan listrik terlaksananya pembayaran tagihan telepon				0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	140,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	154,440,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC Alat Music Tradisional Camera elektronik Camera Flem Genset Komputer PC Laptop Mesin Potong Rumput sewa karang bunga tersedianya jasa Drone				6 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 14 Unit 9 Unit 1 Unit 10 bh 2 Unit	15,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 14 Unit 9 Unit 1 Unit 10 bh 2 Unit	15,100,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL				12 Bulan	764,654,840	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	764,654,840	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP Dinas Budparpora oleh Inspektorat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Budparpora	nilai nilai		nilai nilai	71.384 nilai 29.5 nilai	**56,000,000**						71.384 nilai 29.5 nilai	**47,900,000**	
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit 1 Unit	16,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit 1 Unit	16,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor				0 Unit 2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	31,900,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	jumlah nagari pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan	Nagari		Nagari	2 Nagari	**3,514,882,444**						2 Nagari	**3,514,882,444**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase		Persentase	85 Persentase	**3,384,000,000**						85 Persentase	**3,384,000,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Gapura Makam Kerajaan Nagari Koto Besar Pengadaan Alat Tenun Songket Motif Dharmasraya dan Pelatihannya terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan terhadap 10 Objek Kebudayaan (Tradisi Lisan, Munaskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, permainan Rakyat dan Olahraga Tradisonal)				1 Paket 1 Paket 10 objek	3,384,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	1 Paket 1 Paket 10 objek	3,384,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase		Persentase	85 Persentase	**130,882,444**						85 Persentase	**130,882,444**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	jumlah lembaga ada yang dikembangkan jumlah lembaga ada yang dilindungi jumlah lembaga ada yang dimanfaatkan Pembelian Baju Basiba				4 organisasi 4 organisasi 4 organisasi 10 Nagari	130,882,444	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	4 organisasi 4 organisasi 4 organisasi 10 Nagari	130,882,444	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	jumlah nagari pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan	nagari		nagari	2 nagari	**110,520,000**						2 nagari	**110,520,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah group kesenian daerah yang dibina Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	group jenis		group jenis	40 group 16 jenis	**110,520,000**						40 group 16 jenis	**110,520,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK pengembangan kesenian tradisional				100 orang	110,520,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya pelestarian seni daerah	100 orang	110,520,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	jumlah nagari pelestarian adat dan pemajuan kebudayaan	nagari		nagari	2 nagari	**110,302,800**						2 nagari	**110,302,800**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	unit		unit	15 unit	**110,302,800**						15 unit	**110,302,800**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan				10 objek	110,302,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	10 objek	110,302,800	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**373,778,500**							**373,778,500**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	unit		unit	2 unit	**120,167,000**						2 unit	**120,167,000**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina Tingkat hunian akomodasi	orang lembaga orang		orang lembaga orang	37567 orang 29 lembaga 20493 orang	**120,167,000**						37567 orang 29 lembaga 20493 orang	**120,167,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Maket dokumen Rest Area Jembatan Sungai Dareh, River View Sungai Batang Hari, Pemandian Para Raja Rambahan, Candi Pulau Sawah, Kerajaan Siguntur				5 Dokumen	120,167,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	5 Dokumen	120,167,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Tahun		Tahun	1 Tahun	**192,987,250**						1 Tahun	**192,987,250**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina Tingkat hunian akomodasi	orang lembaga orang		orang lembaga orang	37567 orang 29 lembaga 20493 orang	**192,987,250**						37567 orang 29 lembaga 20493 orang	**192,987,250**	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemilihan Uda-Uni Kabupaten Dharmasraya terlaksananya promosi pariwisata kab. Dharmasraya				1 Kegiatan 15 Even	192,987,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	1 Kegiatan 15 Even	192,987,250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang		orang	40 orang	**60,624,250**						40 orang	**60,624,250**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha		usaha	40 usaha	**60,624,250**						40 usaha	**60,624,250**	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata				100 orang	60,624,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	100 orang	60,624,250	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3,984,117,650**							**4,162,950,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**3,809,117,950**						100 persen	**3,886,700,000**	
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terkelolanya administrasi keuangan PD	persen		persen	100 persen	**2,614,470,050**						100 persen	**2,850,000,000**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 orang				25 Orang/bulan	2,614,470,050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	ASN	25 Orang/bulan	2,850,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**168,532,900**						100 Persen	**274,000,000**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,929,800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,520,600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	16,348,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	1 paket	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	1 Paket	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	90,734,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	170,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit/set		unit/set	20 unit/set	**411,250,000**						20 unit/set	**80,000,000**	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kursi putar/ pelayanan 13 bh, Partisi ruangan 1 bh , meje resepsionist 1 unit, meja kerja pustaka 2 bh, meja rapat 1 bh				9 Unit	23,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (AC sprit 2 unit, CCTV 2 unit, spekear 1 unit, Laptop 2 unit)				11 Unit	87,750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Pengadaan Barang Milik Daerah	11 Unit	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Lanjutan gedung layanan perpustakaan))				1 paket	300,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**410,755,000**						12 Bulan	**457,700,000**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional DPK	12 Laporan	2,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,400,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional DPK	12 Laporan	15,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	386,155,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Operasional DPK	12 Laporan	440,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit/set		unit/set	40 unit/set	**204,110,000**						40 unit/set	**225,000,000**	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,180,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang Milik Daerah	1 Unit	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	85,100,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang Milik Daerah	7 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 unit	16,430,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang Milik Daerah	30 unit	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Sewa gedung kantor)				1 Unit 1 Unit	72,400,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Barang Milik Daerah	1 Unit 1 Unit	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen		Persen	6.31 Persen	**174,999,700**						6.31 Persen	**270,125,000**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan		Perpustakaan	20 Perpustakaan	**117,239,700**						20 Perpustakaan	**185,125,000**	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	11,199,700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Perpustakaan	5 Perpustakaan	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				85 Layanan	106,040,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Perpustakaan	85 Layanan	85,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	orang		orang	300 orang	**57,760,000**						300 orang	**85,000,000**	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 orang	45,965,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	orang	6 orang	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 orang 2 Perpustakaan	11,795,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	orang	100 orang 2 Perpustakaan	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**174,999,900**							**286,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen		Persen	100 Persen	**174,999,900**						100 Persen	**226,750,000**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah arsip yang dikelola	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**135,680,900**						1 Dokumen	**83,000,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan				4 OPD 47 orang	58,931,400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	4 OPD 47 orang	28,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				4 daftar arsip	30,340,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	4 daftar arsip	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	46,409,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Arsip	38 Laporan	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	Layanan		Layanan	1 Layanan	**39,319,000**						1 Layanan	**117,500,000**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 pengguna	39,319,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	OPD	1 pengguna	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**19,621,110,824**							**20,671,447,264**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**15,679,320,974**						100 Persen	**16,636,154,114**	
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dok		Dok	2 Dok	**13,050,774,994**						2 Dok	**13,703,313,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 orang 0 Orang/bulan	13,050,774,994		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	133 orang 0 Orang/bulan	13,703,313,744	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	**345,234,860**						12 bulan	**353,799,250**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Bola Lampu, Terminal, Fitting, Stok Kontak, Kabel yang diperlukan untuk penerangan kantor				12 Jenis	8,407,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Jenis	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk pelaksanaan tupoksi				44 Jenis	85,217,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	44 Jenis	90,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor				18 Jenis	16,981,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	18 Jenis	17,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Minum Kantor				2 Jenis	34,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	2 Jenis	35,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan cetak dan penggandaan				4 Jenis	33,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	4 Jenis	35,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti				0 Laporan 1 Tahun	165,799,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	0 Laporan 1 Tahun	166,799,250	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan BMD	jenis		jenis	18 jenis	**43,400,000**						18 jenis	**53,400,000**	
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	43,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Pengadaan BMD	3 Jenis	53,400,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum	bulan		bulan	12 bulan	**1,916,731,120**						12 bulan	**2,101,641,120**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai				400 buah	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum	400 buah	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik				12 Bulan	67,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum	12 Bulan	150,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor				3 Jenis	18,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum	3 Jenis	20,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor				3 Jenis	1,826,641,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum	3 Jenis	1,926,641,120	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD yang terpelihara	unit		unit	171 unit	**323,180,000**						171 unit	**424,000,000**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara				1 Unit	23,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah BMD yang terpelihara	1 Unit	24,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara				144 unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Jumlah BMD yang terpelihara	144 unit	400,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian tepat guna	Persen		Persen	25 Persen	**2,020,291,750**						25 Persen	**2,050,517,450**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat bantuan Sarana pendukung pertanian	Kelompok Tani		Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	**68,579,000**						10 Kelompok Tani	**70,000,000**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian				40 Kali	68,579,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok Tani Yang mendapat bantuan Sarana pendukung pertanian	40 Kali	70,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	produksi bawang merah produksi cabe produksi jeruk produksi manggis produktivitas jagung produktivitas karet produktivitas padi Produktivitas sawit	ton ton ton ton ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha		ton ton ton ton ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha	92 ton 390 ton 232 ton 64 ton 5.8 ton/ha 0.8 ton/ha 4.4 ton/ha 4.6 ton/ha	**528,195,300**						92 ton 390 ton 232 ton 64 ton 5.8 ton/ha 0.8 ton/ha 4.4 ton/ha 4.6 ton/ha	**555,000,000**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengembangan Tanaman Padi M7OD pada DemFarm Jumlah Pengembangan Tanaman Porang pada Demplot porang				5 Ha 5000 Batang	133,605,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	5 Ha 5000 Batang	150,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit sawit unggul siap salur Yang diberikan Terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit				11 Kecamatan 15 Ha	244,490,050	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	11 Kecamatan 15 Ha	250,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Cabe Rawit/Cabe Merah dan Bibit Terong yang diberikan Jumlah Bibit Nanas, Lengkeng, Jambu Kristal yang diberikan Jumlah Bibit Pepaya yang diberikan				2650 polybag 1100 Batang 70 Bungkus	150,099,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kelompok tani	2650 polybag 1100 Batang 70 Bungkus	155,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT)	persen		persen	30 persen	**423,517,450**						30 persen	**425,517,450**	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya kontes ternak dan Livestock Expo Tersedianya bibit ayam kampung (DOC) Tersedianya bibit hijauan Pakan Ternak Unggul Tersedianya bibit kambing PE terseleksi Tersedianya bibit sapi bali terseleksi				1 Kali/Tahun 1000 Ekor/Tahun 5 Jenis 8 Ekor/Tahun 2 Ekor/Tahun	423,517,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT)	1 Kali/Tahun 1000 Ekor/Tahun 5 Jenis 8 Ekor/Tahun 2 Ekor/Tahun	425,517,450	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah penyediaan benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	ekor		ekor	115 ekor	**1,000,000,000**						115 ekor	**1,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit ayam petelur Jumlah Kandang ayam petelur tipe baterai yang terbangun Jumlah Pakan ayam petelur yang diberikan				5000 ekor 1 Unit 1 Paket	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	penyediaan benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	5000 ekor 1 Unit 1 Paket	1,000,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana pertanian yang terpelihara/terbangun	Persen		Persen	76 Persen	**836,010,500**						76 Persen	**856,572,500**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	Dok		Dok	1 Dok	**150,250,000**						1 Dok	**160,250,000**	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen revisi Peta LP2B				1 Dokumen	150,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Dokumen	160,250,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	Dok unit		Dok unit	1 Dok 26 unit	**685,760,500**						1 Dok 26 unit	**696,322,500**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi tersier yang terbangun dan terpelihara				1 Paket	10,438,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	1 Paket	20,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Produksi yang Terbangun dan Terpelihara				3 Paket	675,322,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	3 Paket	676,322,500	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan Angka Kelahiran Ternak	Persen		Persen	5 Persen	**206,794,700**						5 Persen	**207,794,700**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	persen		persen	100 persen	**206,794,700**						100 persen	**207,794,700**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terpenuhinya operasional puskeswan Terpenuhinya operasional UPT Pasar Tenak				6 Unit 1 Unit	206,794,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Penanganan kasus penyakit hewan	6 Unit 1 Unit	207,794,700	Dinas Pertanian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Persen		Persen	100 Persen	**25,375,000**						100 Persen	**26,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	luas areal Bencana Pertanian yang ditangani	ha		ha	98 ha	**25,375,000**						98 ha	**26,000,000**	
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas Areal Asuransi Usaha Tani (AUTP)				500 Ha	25,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	areal Bencana Pertanian yang ditangani	500 Ha	26,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas	Kelompok		Kelompok	60 Kelompok	**853,317,900**						60 Kelompok	**894,408,500**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Petani/Kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	kelompok		kelompok	11 kelompok	**853,317,900**						11 kelompok	**894,408,500**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Partisipasi PENAS XVI Petani Nelayan Sumatera Barat				72 Orang 1 Kegiatan	393,408,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Petani/Kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	72 Orang 1 Kegiatan	394,408,500	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Operasional BPP yang Terfasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Promosi Produk Pertanian an				11 BPP 0 Unit 1 Kegiatan	459,909,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Petani/Kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	11 BPP 0 Unit 1 Kegiatan	500,000,000	Dinas Pertanian
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**543,664,700**							**2,860,000,000**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke perencanaan tenaga kerja (RTKD)	Persen		Persen	100 Persen	**71,921,200**						100 Persen	**0**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Dokumen RTK yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**71,921,200**						1 Dokumen	**0**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	71,921,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Angkatan Kerja dan Pencari Kerja	1 Dokumen	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	persen		persen	100 persen	**75,000,000**						100 persen	**2,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih	Orang		Orang	16 Orang	**75,000,000**						16 Orang	**2,000,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Penganggur yang dilatih				16 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	masyarakat di atas umur 15 tahun	16 Orang	2,000,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja /Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Persen		Persen	100 Persen	**314,316,500**						100 Persen	**600,000,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD,AKAN) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Orang		Orang	100 Orang	**240,860,500**						100 Orang	**440,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (AKL,AKAD) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota				100 orang	40,860,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	100 orang	140,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Tenaga Kerja/Pencari Kerja	80 Orang	300,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online atau SISNAKER	Orang		Orang	50 Orang	**73,456,000**						50 Orang	**160,000,000**	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online atau SISNAKER				100 Orang	73,456,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pencari Kerja	100 Orang	160,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan (PP/PKB)	Persen		Persen	100 Persen	**82,427,000**						100 Persen	**260,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Laporan	20 Laporan	**23,318,000**						20 Laporan	**90,000,000**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan)				20 Laporan	23,318,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Perusahaan	20 Laporan	90,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dicegah/terselesaikan	Kasus		Kasus	15 Kasus	**59,109,000**						15 Kasus	**170,000,000**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dicegah/terselesaikan				15 kasus	27,341,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	kasus kasus	15 kasus	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit				2 rekomendasi	31,768,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	kasus kasus	2 rekomendasi	120,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**4,049,040,410**							**4,630,250,000**	
3	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	**4,049,040,410**						100 Persen	**4,630,250,000**	
3	**32**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan yang dihasilkan	Dokumen dokumen		Dokumen dokumen	10 Dokumen 10 dokumen	**17,400,000**						10 Dokumen 10 dokumen	**60,000,000**	
3	32	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	17,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	10 Dokumen	60,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**32**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang		Orang	30 Orang	**2,862,162,050**						30 Orang	**2,900,000,000**	
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya				30 Orang	2,862,162,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30 Orang	2,900,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dan Jenis Logistik yang tersedia dikantor Jumlah dan Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Jenis		Jenis Jenis	5 Jenis 10 Jenis	**207,751,600**						5 Jenis 10 Jenis	**560,250,000**	
3	32	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia				10 Jenis	6,017,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	10 Jenis	8,250,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				5 Jenis	45,363,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	5 Jenis	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang tersedia				5 Jenis	25,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	5 Jenis	40,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8 Jenis	16,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	8 Jenis	42,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	114,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Administrasi Sekretariat Dinas	12 Bulan	420,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia	unit		unit	3 unit	**72,664,800**						3 unit	**100,000,000**	
3	32	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang tersedia				8 unit	72,664,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Perlengkapan Penunjang Sarana Prasarana Kantor	8 unit	100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**32**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Administrasi, Jasa Kebersihan, Petugas Keamanan,Sopir Pembayaran Langganan Listrik, Telepon atau Internet	jenis Bulan Bulan		jenis Bulan Bulan	2 jenis 12 Bulan 12 Bulan	**630,711,960**						2 jenis 12 Bulan 12 Bulan	**735,000,000**	
3	32	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	135,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	573,711,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	600,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit		unit	5 unit	**258,350,000**						5 unit	**275,000,000**	
3	32	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan				5 unit	3,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	5 unit	10,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara				5 unit	44,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	5 unit	50,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara				18 unit	10,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	18 unit	15,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang terpeliharanya				1 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Kendaraan Dinas Penunjang Kegiatan	1 Paket	200,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**33,283,383,772**							**33,283,383,772**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**24,449,111,872**						100 Persen	**24,449,111,872**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**						1 Dokumen	**10,000,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah RKA yang disusun				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**6,092,100,300**						1 Tahun	**6,092,100,300**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran gaji Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (71 org) pembayaran TPP				0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 14 orang/bulan 71 org 12 orang/bulan	6,092,100,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN	0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 14 orang/bulan 71 org 12 orang/bulan	6,092,100,300	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Asuransi barang Milik Daerah	Unit		Unit	67 Unit	**280,000,000**						67 Unit	**280,000,000**	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara lengkap				67 unit 0 Dokumen 12 bln	280,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN	67 unit 0 Dokumen 12 bln	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**3,842,705,000**						12 Bulan	**3,842,705,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				0 Paket 1 thn	112,381,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	112,381,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 1 thn	276,159,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	276,159,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya peratalan rumah tangga				0 Paket 1 thn	20,450,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	20,450,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya kebutuhan logistik kantor				0 Paket 1 thn	1,968,140,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	1,968,140,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetak dan penggandaan				0 Paket 1 thn	42,900,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Paket 1 thn	42,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi				0 Laporan 1 thn	1,422,675,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Setda	0 Laporan 1 thn	1,422,675,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Telaksananya pengadaan barang milik daerah	Paket, Unit		Paket, Unit	107 Paket, Unit	**735,700,000**						107 Paket, Unit	**735,700,000**	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cofee Break Auditorium				2 Bh	428,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	2 Bh	428,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Ruang rapat PBJ				0 Unit 1 thn	307,700,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Unit 1 thn	307,700,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa guna menunjang urusan pemerintahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**8,008,635,150**						12 Bulan	**8,008,635,150**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat-surat kedinasan				0 Laporan 1 thn	50,400,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 1 thn	50,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran rekening listrik, air dan telepon				0 Laporan 1 thn	1,554,840,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 1 thn	1,554,840,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 1 thn	1,478,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 1 thn	1,478,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran honorarium PTT, THL dan petugas kebersihan (174 org)				0 Laporan 12 bln	4,925,395,150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 12 bln	4,925,395,150	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit/Tahun		Unit/Tahun	91 Unit/Tahun	**1,678,300,000**						91 Unit/Tahun	**1,678,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan				0 Unit 4 Unit	246,050,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Unit 4 Unit	246,050,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4				0 Unit 37 unit 69 unit	978,050,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Unit 37 unit 69 unit	978,050,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Komputer PC Laptop Sound system Televisi				112 unit 0 Unit 52 unit 65 unit 4 paket 20 unit	114,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	112 unit 0 Unit 52 unit 65 unit 4 paket 20 unit	114,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tertata dan terpeliharanya gedung kantor				0 Unit 3 unit	340,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Unit 3 unit	340,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terselenggaranya administrasi keuangan KDH dan WKDH	Bulan		Bulan	12 Bulan	**995,913,000**						12 Bulan	**995,913,000**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembayaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH				0 Orang/Bulan 14 bln	180,783,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH dan WKDH	0 Orang/Bulan 14 bln	180,783,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap KDH dan WKDH				0 Paket 1 thn	315,130,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH dan WKDH	0 Paket 1 thn	315,130,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpeliharanya kesehatan KDH dan WKDH				0 Orang 1 thn	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH dan WKDH	0 Orang 1 thn	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembayaran Dana Operasional KDH dan WKDH				0 Orang/Bulan 1 thn	400,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH dan WKDH	0 Orang/Bulan 1 thn	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH dan SEKDA	Tahun		Tahun	1 Tahun	**55,764,000**						1 Tahun	**55,764,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bed cover Gorden Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Kursi tamu Meja makan				3 Set 1 paket 0 Paket 1 Set 2 Set	35,740,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH, WKDH dan SEKDA	3 Set 1 paket 0 Paket 1 Set 2 Set	35,740,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah				0 Paket 1 thn	20,024,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	KDH, WKDH dan SEKDA	0 Paket 1 thn	20,024,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Nilai SAKIP	Baik		Baik	70 Baik	**250,000,922**						70 Baik	**250,000,922**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tersusunnya Analis Beban Kerja Jabatan Pelaksanaan Perangkat daerah Tersusunnya Analis Beban Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Ptratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Perangkat Daerah Tersusunnya Analisis Jabatan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen SOTK Perangkat daerah Tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan Perangkat Daerah				0 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen	84,850,922	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen	84,850,922	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tersusunnya dokumen standar pelayanan Tersusunnya dokumen standar pelayanan, inovasi perangkat daerah, survey kepuasan masyarakat dan Peta Proses Bisnis Kabupaten Tersusunnya Inovasi Perangkat Daerah Tersusunnya Peta Proses Bisnis Kabupaten Tersusunnya survey kepuasan masyarakat Kabupaten				0 Laporan 10 Dokumen 15 dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	76,867,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 10 Dokumen 15 dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	76,867,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cashcading Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tersusunya dokumen lakip Tersusunya dokumen lakip, perjanjian kinerja perangkat daerah, tersusunnya road map reformasi birokrasi kabupaten dan cashcading				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen	88,283,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen	88,283,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan	Indeks		Indeks	8 Indeks	**2,499,993,500**						8 Indeks	**2,499,993,500**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dikelola dengan aplikasi Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah sarana dan prasarana keprotokolan				1 laporan 1 laporan 0 Laporan 1 laporan	2,399,993,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 laporan 1 laporan 0 Laporan 1 laporan	2,399,993,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan protokoler				0 Laporan 40 Orang	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 40 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**7,404,617,300**						100 Persen 100 Persen	**7,404,617,300**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	penyusunan LPPD, SPM, LKPJ, penilaian EPPD	Sedang		Sedang	3 Sedang	**1,809,540,800**						3 Sedang	**1,809,540,800**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Kompetensi Camat berprestasi Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (HUT RI/HUT KAB) Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan Terlaksananya Rapat Koordinasi pemerintah daerah/provinsi				11 kecamatan 0 Dokumen 11 kecamatan 2 kegiatan 11 kecamatan 8 kali	510,420,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	11 kecamatan 0 Dokumen 11 kecamatan 2 kegiatan 11 kecamatan 8 kali	510,420,800	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Batas kecamatan yang difasilitasi Jumlah batas Nagari yang di Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah fasilitasi dan sosialisasi batas wilayah dan batas nagari Terfasilitasi TOPONIMI dan Pemetaan Wilayah Terlaksananya Penamaan Rupabumi				7 batas 30 Nagari 0 Dokumen 10 dokumen 7 batas 4 dokumen	749,120,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	7 batas 30 Nagari 0 Dokumen 10 dokumen 7 batas 4 dokumen	749,120,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengankatan dan pemberhentian KDH/WKDH Fasilitasi Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah rapat koordinasi otonomi derah yang diselenggarakan Pelaksanaan EPPD Tingkat Provinsi dan Nasional Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tepat waktu Penyusunan Laporan SPM tepat waktu Penyusunan LPPD tepat waktu				1 kegiatan 2 dokumen 0 Dokumen 12 kali 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	550,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 kegiatan 2 dokumen 0 Dokumen 12 kali 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	Indeks		Indeks	8 Indeks	**5,120,000,000**						8 Indeks	**5,120,000,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah event keagamaan yang difasilitasi Jumlah lembaga dan ormas keagamaan yang dibina Jumlah mubaligh, imam, khatib, bilal, garin, guru mengaji, pengurus mesjid yang dibina Jumlah pondok pesantren, rumah tahfiz dan TPQ yang dibina Jumlah rumah ibadan yang dikelola dan difasilitasi				0 Dokumen 10 Kegiatan 5 lembaga 1444 Orang 447 Tempat 12 keg	4,945,008,800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 10 Kegiatan 5 lembaga 1444 Orang 447 Tempat 12 keg	4,945,008,800	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Kesehatan, sosial dan program perlindungan anak				0 Dokumen 12 keg	93,171,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 12 keg	93,171,200	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah fasilitasi dan Koordinasi pendidikan, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga				0 Dokumen 12 keg	81,820,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 12 keg	81,820,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	jumlah Peraturan Daerah difasilitasi	Persen		Persen	81 Persen	**175,076,500**						81 Persen	**175,076,500**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah produk hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi				0 Dokumen 460 dokumen	58,590,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	produk hukum daerah	0 Dokumen 460 dokumen	58,590,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Jumlah bantuan hukum yang diberikan Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum - Jumlah rekomendasi bantuan hukum yang diberikan				5 dokumen 0 Kasus 5 dokumen	58,287,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	produk hukum daerah	5 dokumen 0 Kasus 5 dokumen	58,287,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	JDIH Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah produk hukum yang didokumentasikan Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan				1 aplikasi 0 Dokumen 1 dokumen 8 kegiatan	58,199,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	produk hukum daerah	1 aplikasi 0 Dokumen 1 dokumen 8 kegiatan	58,199,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**300,000,000**						6 Dokumen	**300,000,000**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah MOU yang ditanda tangani Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama				0 Dokumen 10 dokumen 1 kegiatan	300,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 10 dokumen 1 kegiatan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Persen		Persen	100 Persen	**1,429,654,600**						100 Persen	**1,429,654,600**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah BUMD yang didirikan (sesuai Perda) Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Jumlah rapat koordinasi, pengawasan yang dilakukan	Badan Usaha Laporan Laporan Laporan		Badan Usaha Laporan Laporan Laporan	1 Badan Usaha 48 Laporan 24 Laporan 0 Laporan	**131,601,000**						1 Badan Usaha 48 Laporan 24 Laporan 0 Laporan	**131,601,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 dokumen 5 dokumen 0 Dokumen 12 dokumen	26,115,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 dokumen 5 dokumen 0 Dokumen 12 dokumen	26,115,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				22 Laporan	46,190,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	22 Laporan	46,190,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				29 dokumen	59,296,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung			5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	29 dokumen	59,296,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Fasilitasi Pengendalian Pembangunan	Dokumen		Dokumen	27 Dokumen	**825,000,000**						27 Dokumen	**825,000,000**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Regulasi (Renstra, Renja, Lakip dan Peraturan lainnya)				0 Dokumen 100 % 5 Regulasi 100 %	275,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 100 % 5 Regulasi 100 %	275,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah laporan yang dikelola dan dievaluasi Jumlah pembinaan Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan				0 Laporan 5 Dokumen 12 Kali	225,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Laporan 5 Dokumen 12 Kali	225,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Integrasi data RFK Kabupaten dengan RFK Propinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah program pembangunan yang dikendalikan dan evaluasi				1 Paket 0 Laporan 5 Dokumen	325,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	1 Paket 0 Laporan 5 Dokumen	325,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik	Paket/Keg		Paket/Keg	301 Paket/Keg	**411,440,600**						301 Paket/Keg	**411,440,600**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah tender, seleksi, penunjukan langsung dan atau pengadaan langsung yang dilaksanakan				0 Dokumen 100 pkt	172,029,300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 100 pkt	172,029,300	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah pelayanan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik termasuk SIRUP, e-catalog, e-monef dan SIKAP				0 Dokumen 150 pkt	145,302,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0 Dokumen 150 pkt	145,302,400	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/ konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan / konsultasi Regulasi terkait pengadaan barang / jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 keg 50 keg 0 Orang	94,108,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	50 keg 50 keg 0 Orang	94,108,900	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait energi dan air Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup Jumlah rapat koordinasi, dan monitoring lapangan terkait kebijakan pertanian dan kehutanan	Laporan 4 lingkup koordinasi Laporan		Laporan 4 lingkup koordinasi Laporan	0 Laporan 4 4 lingkup koordinasi 0 Laporan	**61,613,000**							0 Laporan 4 4 lingkup koordinasi 0 Laporan	**61,613,000**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				22 Dokumen	30,898,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	22 Dokumen	30,898,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				15 Dokumen	30,715,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	15 Dokumen	30,715,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**51,131,881,621**							**52,586,299,182**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan adminstrasi keuangan daerah	persen		persen	100 persen	**24,579,710,621**						100 persen	**25,047,539,182**	
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta terikutin Bimtek oleh ASN	tahun		tahun	1 tahun	**3,153,480,700**						1 tahun	**3,450,000,000**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tesedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan 14 Bulan	3,153,480,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	20 Orang/bulan 14 Bulan	3,450,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta Bimtek oleh ASN	tahun		tahun	1 tahun	**499,052,000**						1 tahun	**510,000,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian dinas yang diadakan				0 Paket 1 Paket	226,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 1 Paket	230,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek				50 Orang 5 Kali	272,552,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	50 Orang 5 Kali	280,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	tahun persen		tahun persen	1 tahun 100 persen	**1,114,668,219**						1 tahun 100 persen	**1,206,292,000**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instansi Listrik penerangan kantor				1 Paket 12 Bulan	28,630,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	1 Paket 12 Bulan	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	210,220,544	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya jasa dan perlengkapan rumah tangga				12 Bulan	219,075,675	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	220,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman tamu				12 Bulan	206,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetak dan pengandaan				0 Paket 12 Bulan	156,292,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Paket 12 Bulan	156,292,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	293,950,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	300,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**2,670,000,000**						100 persen	**2,670,000,000**	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional yang diadakan				6 unit	2,670,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seskretariat DPRD	6 unit	2,670,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**2,087,509,470**						4 jenis	**2,138,996,950**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Distrubusi Surat menyurat				12 Bulan	19,996,950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	19,996,950	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik				12 Bulan	369,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	369,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 Bulan	145,650,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Laporan 12 Bulan	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor				12 Bulan	1,552,862,520	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	1,600,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**586,750,000**						100 persen	**595,000,000**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/Jabatan				0 Unit 4 Unit	244,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	0 Unit 4 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional				16 Unit	87,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	16 Unit	90,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin perlengkapan gedung kantor				1 Unit	255,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah	1 Unit	255,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah orang yang dibayarkan	orang		orang	30 orang	**14,227,250,232**						30 orang	**14,227,250,232**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Tenaga Administrasi DPRD				30 Orang/Bulan 12 Bulan	14,227,250,232	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan serta dukungan dan tugas fungsi dprd	30 Orang/Bulan 12 Bulan	14,227,250,232	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Meningkatnya kualitas terhadap pimpinan dan anggota DPRD	bulan		bulan	12 bulan	**241,000,000**						12 bulan	**250,000,000**	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terlaksanya rapat-rapat DPRD				0 Laporan 12 Bulan	241,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas terhadap pimpinan dan anggota DPRD	0 Laporan 12 Bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase jumlah urusan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	persen		persen	100 persen	**26,552,171,000**						100 persen	**27,538,760,000**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**4,617,235,000**						12 bulan	**4,617,235,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tersusunnya Program perda				0 Dokumen 1 Dokumen	4,110,235,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	0 Dokumen 1 Dokumen	4,110,235,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tersusunnya naska akademik				6 Dokumen	507,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	507,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Ditetapkannya APBD sesuai Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**3,056,210,500**						12 bulan	**3,132,000,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah orang Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS				17 orang 1 kali	644,337,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	17 orang 1 kali	650,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						660,139,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD		700,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD				3 orang 1 Dokumen	576,711,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	3 orang 1 Dokumen	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD				30 orang 1 Dokumen	587,511,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 1 Dokumen	592,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah orang JumTerlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD				30 orang 1 kali	587,511,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 1 kali	590,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Pelaksanaan kegiatan sesuai agenda	persen		persen	100 persen	**3,431,965,000**						100 persen	**3,437,515,000**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman tugas DPRD				6 Dokumen	2,080,515,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	6 Dokumen	2,080,515,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	994,450,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	1 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Tersedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0 Orang 14 Orang	357,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretriat DPRD	0 Orang 14 Orang	357,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase jumlah aspirasi yang dihimpun	persen		persen	100 persen	**13,268,306,750**						100 persen	**14,102,010,000**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah				30 orang 16 kali	12,177,233,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 16 kali	13,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				30 Dokumen	339,063,750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 Dokumen	350,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah anggota yang berangkat Terlaksananya Reses anggota DPRD				30 orang 3 Kali	752,010,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	30 orang 3 Kali	752,010,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Jumlah publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang terlaksana	persen		persen	100 persen	**242,819,000**						100 persen	**250,000,000**	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	242,819,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**						**1,935,634,750**							**2,000,000,000**	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				9 Dokumen	1,935,634,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		9 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**						**5,419,857,247**							**5,621,958,200**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**3,875,419,100**						100 persen	**4,180,350,200**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	terlaksananya Perencanaan dan pengendalian perangkat daerah	tahun		tahun	1 tahun	**50,000,000**						1 tahun	**55,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah laporan LPPD OPD Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Penyusunan Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja 2023				0 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**2,690,739,100**						12 bulan	**2,760,000,000**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang	2,690,739,100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Bapppeda	22 Orang	2,760,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	100 dokumen	**461,000,000**						100 dokumen	**527,100,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, kabel) Pengadaan Bola Lampu Perbaikan Instalasi listrik				0 Paket 2 jenis 30 Buah 1 unit	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Paket 2 jenis 30 Buah 1 unit	6,600,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pengadaan laptop pengadaan printer pengadaan scanner TV LED jumbo				0 Paket 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit	180,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Paket 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit	196,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Air Minum Isi ulang Penyediaan Tabung Gas isi ulang				0 Paket 500 Galon 40 Tabung	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Paket 500 Galon 40 Tabung	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (teh, kopi, gula, dan lainnya) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 jenis 0 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5 jenis 0 Paket	33,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi				0 Paket 5 jenis	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Paket 5 jenis	44,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 22 laporan	180,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Laporan 22 laporan	220,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100		100	100 100	**27,000,000**							100 100	**32,000,000**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan AC ruangan				0 Unit 3 unit	27,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Unit 3 unit	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	100 jenis	**554,180,000**							100 jenis	**700,250,200**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang dibayarkan				0 Laporan 550 buah	5,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Laporan 550 buah	6,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Tahun	133,100,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis 0 Laporan	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 jenis 0 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pembayaran honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara, THL yang tersedia				0 Laporan 19 orang	423,680,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Laporan 19 orang	533,150,200	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100		100	100 100	**92,500,000**						100 100	**106,000,000**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 mobil jabatan 0 Unit	17,500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 mobil jabatan 0 Unit	18,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 mobil 9 motor 0 Unit	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 mobil 9 motor 0 Unit	27,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 unit	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Persentase pencapaian hasil RPJMD	0 0 0		0 0 0	90 0 90 0 90 0	**848,941,250**						90 0 90 0 90 0	**954,750,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Rancangan RPJPD Teknokratik Jumlah Dokumen RKPD disusun (RKPD 203 Perubahan dan RKPD 2024) Jumlah Dokumen Satu dATA iNDOENSIA	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	**698,941,250**						1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	**799,750,000**	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksanany Konsultasi Publik Penyusunan RKPD dan Rancangan Teknokrat RPJPD				2 kegiatan	25,191,250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 kegiatan	16,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya				1 kegiatan	148,750,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1 kegiatan	158,750,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 Koordinasi Penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2024 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD				1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	525,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	625,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	tersedian data perencanaan pembangunan	100		100	100 100	**100,000,000**						100 100	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	penyelenggaraan Satu data Indonesia				1 dokumen	100,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Perangkat Daerah	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100		100	100 100	**50,000,000**						100 100	**55,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100		100	100 100	**695,496,897**						100 100	**486,858,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100		100	100 100	**168,836,655**						100 100	**176,358,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14 urusan	33,880,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	14 urusan	11,858,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				14 urusan	70,186,655	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	14 urusan	85,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				10 urusan	44,770,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	10 urusan	57,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaporan RAD PUG				10 urusan 1 Laporan	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	10 urusan 1 Laporan	22,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	100		100	100 100	**91,960,242**						100 100	**114,500,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup ekonomi				9 OPD 0 Dokumen 1 dokumen	36,300,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	9 OPD 0 Dokumen 1 dokumen	45,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang ekonomi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang ekonomi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi				9 OPD 0 Laporan 9 OPD 9 rumusan	31,460,242	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	9 OPD 0 Laporan 9 OPD 9 rumusan	37,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup bidang SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) penyusunan perencanaan lingkup SDA				1 rumusan 0 Dokumen 1 dokumen	24,200,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daer	1 rumusan 0 Dokumen 1 dokumen	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100		100	100 100	**434,700,000**							100 100	**196,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang urusan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan RKPD lingkup bidang infrastruktur Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Penyusunan Stratagi Sanitasi Kabupatn (SSK)				7 urusan 1 urusan 1 urusan	250,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7 urusan 1 urusan 1 urusan	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaporan RAD AMPL Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang infrastruktur Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur				7 OPD 0 Laporan 1 OPD 7 OPD 7 rumusan	30,250,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7 OPD 0 Laporan 1 OPD 7 OPD 7 rumusan	35,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) : penetapan RTRW, materi teknis, album peta				3 Dokumen	120,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Persentase sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				0 Laporan 1 dokumen	34,450,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	0 Laporan 1 dokumen	41,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**123,655,290**							**134,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks inovasi daerah	100		100	100 100	**123,655,290**						100 100	**134,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase peenelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	100		100	100 100	**95,040,000**						100 100	**102,000,000**	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru terhadap pelaksanaan peraturan				0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 rekomendasi	27,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 rekomendasi	30,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	fasilitasi Penyusunan indeks daya saing daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 dokumen 0 Laporan	68,040,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	1 dokumen 0 Laporan	72,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah inovasi PD yang dpublikasikan	100		100	100 100	**28,615,290**						100 100	**32,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi PD Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				60 rumusan 0 Dokumen	28,615,290	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	seluruh OPD	60 rumusan 0 Dokumen	32,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**120,154,691,300**							**155,171,860,159**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	**8,682,568,000**						100 persen	**43,482,075,043**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**6,000,000,000**						26.5 Nilai	**40,658,203,625**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang	6,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	44 Orang	40,658,203,625	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**743,588,500**						26.5 Nilai	**796,322,378**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	15,001,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Bulan	16,801,400	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	203,343,258	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	78,587,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Bulan	88,017,720	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	50,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	12 Paket	188,160,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	44 Laporan	250,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**522,500,000**						26.5 Nilai	**549,200,000**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Unit	56,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan kursi rapat jumlah pengadaan lemari arsip				30 buah 1 buah	22,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	30 buah 1 buah	25,200,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan ac jumlah pengadaan laptop jumlah pengadaan PC jumlah pengadaan pencacah kertas jumlah pengadaan printer jumlah pengadaan scanner Jumlah pengadaan tablet Jumlah pengadaan treadmill jumlah pengadaan TV Jumlah pengadaan UPS Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit	300,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Horden Jumlah pengadaan loker ruang BPK Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(tempat parkir dan rooftop garden)				1 Paket 1 Paket 2 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Paket 1 Paket 2 Paket	168,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**1,202,299,500**						26.5 Nilai	**1,238,467,440**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai Jumlah pengiriman paket surat				1200 buah 40 kilogram	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1200 buah 40 kilogram	14,560,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pengadaan langganan internet Jumlah pengadaan tagihan listrik Jumlah pengadaan tagihan telepon				1 Paket 180000 Kwh 12000 Menit	192,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Paket 180000 Kwh 12000 Menit	215,712,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95,799,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	107,295,440	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	900,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	900,900,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**214,180,000**						26.5 Nilai	**239,881,600**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan				0 Unit 1 Kali	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	0 Unit 1 Kali	18,480,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	26,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	15 Unit	29,792,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	171,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Unit	191,609,600	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah	persen		persen	100 persen	**110,056,723,300**						100 persen	**110,274,385,116**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	persen		persen	100 persen	**1,850,703,800**						100 persen	**2,068,365,616**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	249,997,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	279,996,696	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	250,097,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	280,109,480	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	9,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	9,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	9,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	9,187,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	37 Dokumen	9,187,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	125,421,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	140,471,520	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	945,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	1,059,471,520	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	242,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	271,566,400	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penyerapan Anggaran	persen		persen	92 persen	**545,175,000**						92 persen	**545,175,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	3,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				114 Dokumen	18,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	114 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				69 Dokumen	14,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	69 Dokumen	14,700,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	18,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	78,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	78,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	3,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	18,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	18,375,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	390,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 Orang	390,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	persen		persen	100 persen	**775,637,500**						100 persen	**775,637,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	49,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	18 Laporan	49,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				54 dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	54 dokumen	250,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	313,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	313,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	40,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	40,425,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	40,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				108 Orang	55,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	108 Orang	55,125,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 unit	26,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	16 unit	26,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1,837,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	1,837,500	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	Nilai		Nilai	26.5 Nilai	**106,371,300,000**						26.5 Nilai	**106,371,300,000**	
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	5,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	19,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	19,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	5,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	11,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	11,550,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	104,330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	104,330,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 Laporan	2,000,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	persen		persen	100 persen	**513,907,000**						100 persen	**513,907,000**	
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	3,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Dokumen	3,675,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah pengadaan aplikasi virtual account Jumlah pengadaan server EBMD				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Unit 1 Unit	510,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Unit 1 Unit	510,232,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Daerah	persen		persen	100 persen	**533,000,000**						100 persen	**533,000,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	persen		persen	100 persen	**533,000,000**						100 persen	**533,000,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	43,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	43,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	60,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	60,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	59,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Laporan	59,300,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	38,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	38,700,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Lokasi	70,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Lokasi	70,600,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	71,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	71,800,000	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	39,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	38 Laporan	39,700,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	149,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	56 Orang	149,400,000	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	persen		persen	1.8 persen	**882,400,000**						1.8 persen	**882,400,000**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Pertumbuhan PAD	persen		persen	1.8 persen	**882,400,000**						1.8 persen	**882,400,000**	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	405,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	8 Dokumen	405,100,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				7 Laporan	63,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	7 Laporan	63,300,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				85000 Obyek Pajak	218,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	85000 Obyek Pajak	218,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	19 Laporan	120,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				19 Dokumen	75,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	19 Dokumen	75,500,000	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**5,621,279,015**							**6,374,688,468**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	96 persen	**4,370,920,830**						96 persen	**5,092,188,468**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah kebijakan tentang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	**15,000,000**						10 dokumen	**15,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah penyusunan laporan skpd penyusunan renja tahun 2024 dan renja perubahan tahun 2023				0 Dokumen 3 dokumen 2 dokumen	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Dokumen 3 dokumen 2 dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	pembayaran gaji gaji ASN pembayaran TPP ASN	bulan bulan		bulan bulan	14 bulan 12 bulan	**3,342,294,700**						14 bulan 12 bulan	**4,032,188,468**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3,342,294,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	gaji dan tunjangan asn BKPSDM	38 Orang/bulan	4,032,188,468	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	tahun		tahun	1 tahun	**354,387,250**						1 tahun	**383,000,000**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,002,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC ATK Bahan komputer Bracket TV Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kertas komputer laptop, tablet perabot kantor Printer TV				2 unit 1 tahun 1 paket 1 unit 0 Paket 10 Paket 1 tahun 26 unit 10 unit 1 paket 4 unit 1 unit	164,509,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 unit 1 tahun 1 paket 1 unit 0 Paket 10 Paket 1 tahun 26 unit 10 unit 1 paket 4 unit 1 unit	180,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14,865,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air galon air mineral botol Biskuit kaleng Gas 3 kg Gula pasir Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kopi 250 gram permen Teh Kotak				163 galon 10 dus 25 kaleng 48 tabung 80 kg 0 Paket 8 Paket 78 bungkus 30 bungkus 44 kotak	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	163 galon 10 dus 25 kaleng 48 tabung 80 kg 0 Paket 8 Paket 78 bungkus 30 bungkus 44 kotak	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Paket	41,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90,009,650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**50,000,000**						1 tahun	**50,000,000**	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Unit	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Unit	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	tahun		tahun	1 tahun	**393,662,880**						1 tahun	**390,000,000**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60,600,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	314,062,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Laporan	325,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	unit		unit	9 unit	**215,576,000**						9 unit	**222,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Unit	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya kendaraan roda 2 kendaraan roda 4				0 Unit 8 Unit 7 tahun 1 tahun	29,680,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Unit 8 Unit 7 tahun 1 tahun	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pemeliharaan AC pemeliharaan komputer pemeliharaan laptop penambahan daya listrik				0 Unit 42 Unit 10 unit 15 unit 16 unit 1 paket	9,880,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Unit 42 Unit 10 unit 15 unit 16 unit 1 paket	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Unit	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu persentase penanganan kasus yang terselesaikan persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen persen persen		persen persen persen	96 persen 100 persen 47 persen	**1,250,358,185**						96 persen 100 persen 47 persen	**1,282,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	orang		orang	336 orang	**315,010,400**						336 orang	**330,000,000**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	39,982,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	150,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	2 Dokumen	160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				120 Dokumen	35,012,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	120 Dokumen	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	50,019,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	12 Dokumen	52,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				200 Dokumen	39,996,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	200 Dokumen	42,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah dokumen ASN yang dimutasikan dan naik pangkat	dokumen		dokumen	1070 dokumen	**99,487,150**						1070 dokumen	**106,000,000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				270 Dokumen	45,021,650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	270 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	54,465,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	800 Dokumen	56,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang		orang	880 orang	**626,442,135**						880 orang	**633,500,000**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	35,015,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	100 Orang	37,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pelantikan Pejabat eselon dan Jabatan Fungsional Terlaksananya Pengambilan Sumpah /Janji PNS Terlaksananya Seleksi terbuka dan Job Fit Terseleksinya JPT Pratama				0 Dokumen 500 orang 50 orang 20 orang 30 orang	149,998,735	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	0 Dokumen 500 orang 50 orang 20 orang 30 orang	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Sertifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				100 orang 0 Dokumen	416,725,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	100 orang 0 Dokumen	420,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	24,702,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	80 Orang	26,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	orang		orang	366 orang	**209,418,500**						366 orang	**213,000,000**	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur				0 Dokumen 1 laporan	29,423,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	0 Dokumen 1 laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	149,990,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	250 Orang	151,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	30,005,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	20 Laporan	32,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1,168,309,500**							**1,202,000,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen		persen	33,52 persen	**1,168,309,500**						33,52 persen	**1,202,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	dokumen		dokumen	1 dokumen	**25,041,500**						1 dokumen	**27,000,000**	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	25,041,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	1 Dokumen	27,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN	orang		orang	105 orang	**1,143,268,000**						105 orang	**1,175,000,000**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan jumlah orang yang mengikuti diklat kepemimpinan dan latsar				0 Laporan 105 orang	1,143,268,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	0 Laporan 105 orang	1,175,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**8,997,316,250**							**8,997,316,250**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Perencanaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,217,886,250**						1 Tahun	**7,217,886,250**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Prencanaan Terlaksananya Perencanaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah	Dokumen Tahun		Dokumen Tahun	3 Dokumen 1 Tahun	**127,560,000**						3 Dokumen 1 Tahun	**127,560,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	127,560,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	3 Dokumen	127,560,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Orang		Orang Orang	33 Orang 33 Orang	**5,028,371,600**						33 Orang 33 Orang	**5,028,371,600**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	5,028,371,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai ASN Dilingkup Inspektorat	33 Orang/bulan	5,028,371,600	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Dan Perencanaan, Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang Orang		Orang Orang	20 Orang 33 Orang	**258,859,000**						20 Orang 33 Orang	**258,859,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33 Orang	258,859,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Lingkup Inspektorat	33 Orang	258,859,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**618,335,050**						100 Persen	**618,335,050**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia				12 Bulan	15,323,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	12 Bulan	15,323,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Jenis	225,354,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	26 Jenis	225,354,200	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35 Jenis	53,312,850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	35 Jenis	53,312,850	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	39,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	12 Bulan	39,900,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				12 Bulan	47,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	12 Bulan	47,750,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan yang tersedia				12 Bulan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	12 Bulan	1,500,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia				12 Bulan	235,195,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Dharmasraya	12 Bulan	235,195,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Jenis		Jenis	25 Jenis	**409,152,000**						25 Jenis	**409,152,000**	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	304,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Kendaraan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	2 Unit	304,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel (Meja dan kursi)				23 Unit	105,152,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Ketersediaan Kendaraan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	23 Unit	105,152,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis Jasa Kegiatan Penunjang Yang Dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**485,708,600**						4 Jenis	**485,708,600**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman surat				12 Bulan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	12 Bulan	4,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	108,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	12 Bulan	108,060,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	46,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	12 Bulan	46,810,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	326,838,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Lingkup Inspektorat Kabupaten Dhamasraya	12 Bulan	326,838,600	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	90 Persen	**289,900,000**						90 Persen	**289,900,000**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia				1 Unit 1 Unit	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	1 Unit 1 Unit	17,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia				9 Unit 9 Unit	74,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	9 Unit 9 Unit	74,500,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya gedung kantor				0 Unit 1 Unit	198,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Barang Milik Daerah Dilingkup Inspektorat	0 Unit 1 Unit	198,400,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Terlaksananya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh APIP	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	**1,059,065,000**						100 Dokumen	**1,059,065,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Terlaksananya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh APIP	Laporan		Laporan	100 Laporan	**983,865,000**						100 Laporan	**983,865,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	82,775,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan	82,775,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	173,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	30 Laporan	173,425,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12 Laporan	159,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	159,125,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	132,025,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	2 Laporan	132,025,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	90,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	30 Laporan	90,625,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah penilaian APIP				1 Dokumen	215,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	215,790,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Laporan	130,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	130,100,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Penangan kasus pengaduan masyarakat Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	**75,200,000**						12 Laporan 12 Laporan	**75,200,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	2,000,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	73,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	73,200,000	Inspektorat Kabupaten
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terlaksananya Perencanaan Yang Baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**720,365,000**						1 Dokumen	**720,365,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya Perencanaan Yang Baik	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**182,270,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**182,270,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah PKPT Tahun 2024 dan perubahan PKPT Tahun 2023				1 Dokumen	182,270,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	182,270,000	Inspektorat Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Terlaksananya Pendampingan SPIP, Evaluasi Penyelenggara SPIP, Terlaksananya PMPRB Dan Kegiatan Saber Pungli, UPG Dan MCP	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**538,095,000**						5 Dokumen	**538,095,000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan spi perangkat daerah dan evaluasi penyelenggaraan spi perangkat daerah				1 Dokumen	239,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	239,800,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perlaksananya PMPRB				1 Dokumen	124,610,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	124,610,000	Inspektorat Kabupaten
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya kegiatan saber pungli, UPG, mcp dan stranas				1 Dokumen	173,685,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	173,685,000	Inspektorat Kabupaten
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,321,287,050**							**2,559,350,630**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**2,286,287,050**						100 persen	**2,524,350,630**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,936,687,050**						12 bulan	**1,936,687,050**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,936,687,050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	18 Orang/bulan	1,936,687,050	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**107,000,000**						100 persen	**194,763,200**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	7 Paket	2,444,200	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 Paket	48,400,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Paket	5,445,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12 Paket	46,074,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	6 Paket	4,400,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	45,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0 Laporan	88,000,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**226,100,000**						4 jenis	**338,712,880**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	2,420,000	Kecamatan Pulau Punjung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	7,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	18,513,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	3,025,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	212,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	314,754,880	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**16,500,000**						100 persen	**54,187,500**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	44,870,500	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Unit	9,317,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	90 persen	**7,350,000**						90 persen	**7,350,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	**7,350,000**						12 jenis	**7,350,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	6,850,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Dokumen	6,850,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	500,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Laporan	500,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**12,080,000**						60 persen	**12,080,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	**12,080,000**						3 jenis	**12,080,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	12,080,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	12,080,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**3,300,000**						100 persen	**3,300,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**3,300,000**						3 kasus	**3,300,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	3,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	3,300,000	Kecamatan Pulau Punjung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**12,270,000**						100 persen	**12,270,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	**12,270,000**						7 jenis	**12,270,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	12,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamata	0 Dokumen	12,270,000	Kecamatan Pulau Punjung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,985,423,800**							**1,910,806,006**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,956,152,000**						100 persen	**1,881,534,206**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,674,532,000**						12 bulan	**1,531,301,200**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/bulan 16 Orang/Bulan	1,674,532,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Orang/bulan 16 Orang/Bulan	1,531,301,200	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**107,000,000**						100 persen	**145,777,458**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	2,054,665	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	20,861,695	Kecamatan Sitiung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	10,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	4,840,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	400 Paket	20,861,695	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	5,712,080	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	91,447,323	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**158,120,000**						4 Jenis	**175,028,348**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				220 Laporan	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	220 Laporan	2,420,000	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	15,972,000	Kecamatan Sitiung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	145,120,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	156,636,348	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**16,500,000**						100 persen	**29,427,200**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	14,907,200	Kecamatan Sitiung
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit	14,520,000	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**3,630,000**						100 persen	**3,630,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	**3,630,000**						12 Jenis	**3,630,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	2,420,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaran tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	30 Dokumen	2,420,000	Kecamatan Sitiung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	1,210,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,210,000	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**14,121,800**						60 persen	**14,121,800**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	**14,121,800**						3 Jenis	**14,121,800**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	14,121,800	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	14,121,800	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**3,520,000**						100 persen	**3,520,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**3,520,000**						3 kasus	**3,520,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3,520,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	3,520,000	Kecamatan Sitiung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**8,000,000**						100 persen	**8,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	7 Jenis	**8,000,000**						7 Jenis	**8,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sitiung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,219,207,460**							**2,325,392,602**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**2,187,207,460**						100 persen	**2,295,442,602**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,721,322,450**						12 bulan	**1,837,325,710**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,721,322,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17 Orang/bulan	1,837,325,710	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**106,862,000**						100 persen	**153,025,692**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1,992,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Paket	2,054,665	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	20,861,695	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	7,359,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	4,840,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	17,504,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	300 Paket	18,965,177	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	5,712,100	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	57,007,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	300 Laporan	100,592,055	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**341,023,010**						4 Jenis	**235,664,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	2,420,000	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,499,650	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	15,972,000	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,880,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	325,643,360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	217,272,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**18,000,000**						100 persen	**69,427,200**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	14,907,200	Kecamatan Koto Baru
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Unit	14,520,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**4,000,000**						100 persen	**3,630,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	**4,000,000**						12 Jenis	**3,630,000**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaran tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	1,210,000	Kecamatan Koto Baru

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**12,000,000**						60 persen	**14,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	**12,000,000**						3 Jenis	**14,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**4,000,000**						100 persen	**3,520,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**4,000,000**						3 kasus	**3,520,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	3,520,000	Kecamatan Koto Baru
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**12,000,000**						100 persen	**8,800,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	7 Jenis	**12,000,000**						7 Jenis	**8,800,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	12,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	4 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Koto Baru
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,709,496,370**							**2,432,276,786**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,687,020,370**						100 persen	**2,399,197,806**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,364,476,450**						12 bulan	**1,837,325,710**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,364,476,450	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Orang/bulan	1,837,325,710	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**114,907,000**						100 persen	**176,112,896**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1,842,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Paket	2,054,665	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15,677,800	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	20,861,695	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	5,309,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	11,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,270,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Paket	19,344,481	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6,952,200	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	15,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 bulan	64,855,500	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan	100,592,055	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**10,350,000**						100 persen	**55,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10,350,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	15,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**181,846,920**						4 jenis	**237,672,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,700,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	2,400,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	13,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	169,271,920	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	217,272,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**15,440,000**						100 persen	**61,627,200**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	14,907,200	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit	14,520,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	2,440,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Unit	8,000,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**5,236,000**						100 persen	**3,993,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	3 jenis	**5,236,000**						3 jenis	**3,993,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	3,300,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	30 Dokumen	2,662,000	Kecamatan Sungai Rumbai

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	1,936,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,331,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**10,790,000**						60 persen	**15,533,980**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	**10,790,000**						3 jenis	**15,533,980**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	10,790,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15,533,980	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**2,050,000**						100 persen	**3,872,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**2,050,000**						3 kasus	**3,872,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	2,050,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	3,872,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**4,400,000**						100 persen	**9,680,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	**4,400,000**						7 jenis	**9,680,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	4,400,000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	7 Dokumen	9,680,000	Kecamatan Sungai Rumbai
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,654,061,510**							**1,880,528,763**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,645,231,510**						100 persen	**1,870,815,763**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,318,262,350**						12 bulan	**1,516,001,703**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan asn				0 Orang/bulan 13 Orang/bulan 13 orang	1,318,262,350	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Orang/bulan 13 Orang/bulan 13 orang	1,516,001,703	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**107,272,000**						100 persen	**120,745,900**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 jenis 0 Paket 7 Paket	2,003,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 jenis 0 Paket 7 Paket	2,200,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor 1. ATK 2. kertas dan cover 3. bahan komputer 4. Bahan Cetak " Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis 0 Paket 4 Paket	24,241,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 jenis 0 Paket 4 Paket	26,665,100	Kecamatan Sembilan Koto

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket 12 Paket	15,180,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan 0 Paket 12 Paket	16,698,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	"Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Kwitansi dinas 2. Papan Data 3. Kendali Masuk/keluar 4. Foto copy dan jilid 5. Disposisi 6. Spanduk" Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	8,610,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 jenis 0 Paket	9,471,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				0 Laporan 12 bulan	57,238,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 bulan	62,961,800	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**12,650,000**						100 persen	**13,915,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	12,650,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	13,915,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**187,237,160**						4 jenis	**188,362,160**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang diadakan				0 Laporan 150 lembar	1,250,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 150 lembar	1,375,000	Kecamatan Sembilan Koto

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				0 Laporan 12 bulan	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 bulan	7,000,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Honorarium Non PNS 9 orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	179,987,160	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 bulan 0 Laporan	179,987,160	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**19,810,000**						100 persen	**21,791,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				0 Unit 8 unit	2,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 8 unit	2,970,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak				0 Unit 8 unit	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 8 unit	16,500,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				0 Unit 14 unit	2,110,000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit 14 unit	2,321,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**4,870,000**						60 persen	**5,357,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	**4,870,000**						3 jenis	**5,357,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten				0 Lembaga Kemasyarakatan 45 usulan	4,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 45 usulan	5,357,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**2,160,000**						100 persen	**2,376,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**2,160,000**						3 kasus	**2,376,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 kasus	2,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 kasus	2,376,000	Kecamatan Sembilan Koto
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**1,800,000**						100 persen	**1,980,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	**1,800,000**						7 jenis	**1,980,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah nagari yang dibina				0 Dokumen 4 Nagari	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Dokumen 4 Nagari	1,980,000	Kecamatan Sembilan Koto
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,665,137,350**							**1,152,637,350**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,607,937,350**						100 persen	**1,152,637,350**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,152,637,350**						12 bulan	**1,152,637,350**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1,152,637,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 Orang/bulan	1,152,637,350	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	orang		orang	3 orang	**44,000,000**						3 orang	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	27,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Orang	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**142,280,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 7 Paket	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket 7 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	3,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**66,000,000**						100 persen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**157,020,000**						4 jenis	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	146,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**46,000,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Unit	0	Kecamatan Timpeh
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Unit	0	Kecamatan Timpeh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**7,150,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	**7,150,000**						12 jenis	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	4,136,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Dokumen	0	Kecamatan Timpeh
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	3,014,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**26,950,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**26,950,000**						3 kasus	**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	26,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**6,600,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**6,600,000**						3 kasus	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	6,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Timpeh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**16,500,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	**16,500,000**						7 jenis	**0**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Dokumen	0	Kecamatan Timpeh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,626,477,940**							**1,914,115,750**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,608,257,940**						100 persen	**1,878,671,250**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,054,479,450**						12 bulan	**1,283,146,250**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,054,479,450	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Orang/bulan	1,283,146,250	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	Orang		Orang	4 Orang	**40,000,000**						4 Orang	**41,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	25,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	27 Paket	25,625,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Orang	15,375,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**115,005,450**						100 persen	**133,250,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Paket	4,100,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Paket	20,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	10,250,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Paket	15,375,000	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	15,375,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	3,075,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	7,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Laporan	3,075,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45,005,450	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**125,000,000**						100 persen	**133,250,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Unit	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	20,500,000	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	51,250,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**194,063,040**						4 Jenis	**200,900,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	250 Laporan	2,562,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8,410,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	8,712,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	5,125,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	178,653,040	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	184,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**79,710,000**						100 persen	**87,125,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,500,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	12,812,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	5,125,000	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	4,210,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Unit	7,687,500	Kecamatan Koto Salak
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	61,500,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**4,910,000**						100 persen	**2,132,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	**4,910,000**						12 Jenis	**2,132,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3,910,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Dokumen	1,107,000	Kecamatan Koto Salak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	1,025,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**6,850,000**						60 persen	**6,662,500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	**6,850,000**						3 Jenis	**6,662,500**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	6,850,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6,662,500	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**1,000,000**						100 persen	**1,025,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**1,000,000**						3 kasus	**1,025,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	1,000,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Laporan	1,025,000	Kecamatan Koto Salak
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**5,460,000**						100 persen	**25,625,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	7 Jenis	**5,460,000**						7 Jenis	**25,625,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5,460,000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	5 Dokumen	25,625,000	Kecamatan Koto Salak
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,310,623,210**							**1,458,850,370**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,281,778,210**						100 persen	**1,430,005,370**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**987,814,450**						12 bulan	**1,136,841,610**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	987,814,450	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Orang/bulan	1,136,841,610	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**112,102,100**						100 persen	**110,102,100**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket	0	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,076,750	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	20,076,750	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	7,275,700	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Paket	7,275,700	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,340,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Paket	15,340,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	9,696,500	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	9,696,500	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3,010,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	3,010,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	54,703,150	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	54,703,150	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**163,007,160**						4 Jenis	**164,207,160**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	2,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	151,007,160	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	151,007,160	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**18,854,500**						100 persen	**18,854,500**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12,504,500	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Unit	12,504,500	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	4,350,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Unit	4,350,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Unit	2,000,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**6,980,000**						100 persen	**6,980,000**	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	**1,500,000**						1 dokumen	**1,500,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	**5,480,000**						12 Jenis	**5,480,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2,280,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	12 Dokumen	2,280,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3,200,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan`	12 Laporan	3,200,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	100 persen	**10,115,000**						100 persen	**10,115,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	**10,115,000**						3 Jenis	**10,115,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	10,115,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10,115,000	Kecamatan Asam Jujuhan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**11,750,000**						100 persen	**11,750,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	5 Jenis	**11,750,000**						5 Jenis	**11,750,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	11,750,000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	12 Dokumen	11,750,000	Kecamatan Asam Jujuhan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,366,038,017**							**2,634,101,819**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**2,331,088,017**						100 persen	**2,595,656,819**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,720,811,000**						12 bulan	**1,892,892,100**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan 18 Orang/bulan	1,720,811,000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17 Orang/bulan 18 Orang/bulan	1,892,892,100	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**120,929,857**						100 persen	**133,022,843**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				7 Jenis	2,394,407		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Jenis	2,633,848	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, obat-obatan, "				4 Jenis	20,000,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Jenis	22,000,660	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan RT yang diadakan				0 Paket 5 Paket 5 Jenis	6,046,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Paket 5 Paket 5 Jenis	6,650,600	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)				12 Bulan	13,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	14,784,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor				6 Jenis	10,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Jenis	11,572,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)				12 Bulan	68,528,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	75,381,735	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**270,090,000**						100 persen	**297,099,000**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan				2 Unit	42,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit	46,464,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				175 Unit	125,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	175 Unit	137,830,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	102,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15 Unit	112,805,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**201,837,160**						4 jenis	**222,020,876**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 lembar	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	200 lembar	1,650,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	7,920,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	193,137,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan	212,450,876	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**17,420,000**						100 persen	**19,162,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	8,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	9,625,000	Kecamatan Koto Besar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Unit	4,092,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	4,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11 Unit	5,445,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**1,950,000**						100 persen	**2,145,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	12 jenis	**1,950,000**						12 jenis	**2,145,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	5 Dokumen	495,000	Kecamatan Koto Besar
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	500 Laporan	1,650,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**11,150,000**						60 persen	**12,265,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	**11,150,000**						3 jenis	**12,265,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	11,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12,265,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**5,770,000**						3 kasus	**6,347,000**	
7	**01**	**04**	7.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**5,770,000**						3 kasus	**6,347,000**	
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	5,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat dikecamatan	3 Laporan	6,347,000	Kecamatan Koto Besar
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**16,080,000**						100 persen	**17,688,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	jenis		jenis	7 jenis	**16,080,000**						7 jenis	**17,688,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	16,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	7 Dokumen	17,688,000	Kecamatan Koto Besar
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,211,510,890**							**1,535,020,162**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,190,810,890**						100 persen	**1,510,083,162**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**880,051,450**						12 bulan	**1,045,020,450**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	880,051,450	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11 Orang/bulan	1,045,020,450	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**117,020,500**						100 persen	**105,607,812**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1,545,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Paket	2,100,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	16,325,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	21,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5,576,500	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Paket	11,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan minum rapat kantor dan kegiatan PKK				20 Paket 20 Paket	22,860,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20 Paket 20 Paket	15,100,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Amplop dinas, cetak sertifikat,foto copy,spanduk Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket 6 Paket	7,010,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket 6 Paket	5,887,812	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat koordinasi Dalam kota dan Luar Daerah				0 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	63,703,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	46,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**30,350,000**						100 persen	**69,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Laptop, Sound System				2 Unit 2 Unit	30,350,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Unit 2 Unit	20,000,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**144,888,940**						4 Jenis	**199,757,700**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia				4 Laporan 4 Laporan	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Laporan 4 Laporan	1,500,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penerangan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan	1,667,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan 12 Laporan	3,194,400	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pelaksana administrasi keuangan 6 orang dan honorarium nan PNs 6 orang				12 Laporan 12 Laporan	141,221,440	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan 12 Laporan	192,063,300	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**18,500,000**						100 persen	**55,397,200**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	14,907,200	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Unit	10,890,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara komputer, laptop,mesin rumput,printer,genset				8 Unit 8 Unit	2,500,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Unit 8 Unit	5,400,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen		persen	100 persen	**4,200,000**						100 persen	**4,235,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jenis		Jenis	12 Jenis	**4,200,000**						12 Jenis	**4,235,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	2,700,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	6 Dokumen	2,420,000	Kecamatan Padang Laweh
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				285 Laporan	1,500,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	285 Laporan	1,815,000	Kecamatan Padang Laweh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**10,700,000**						60 persen	**13,200,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	Jenis		Jenis	3 Jenis	**10,700,000**						3 Jenis	**13,200,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	10,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	13,200,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**1,800,000**						100 persen	**2,662,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**1,800,000**						3 kasus	**2,662,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	1,800,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	3 Laporan	2,662,000	Kecamatan Padang Laweh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	persen		persen	100 persen	**4,000,000**						100 persen	**4,840,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**4,000,000**						4 Jenis	**4,840,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4,000,000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	4,840,000	Kecamatan Padang Laweh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,881,126,790**							**1,881,546,790**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,848,584,790**						100 persen	**1,849,004,790**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**1,387,168,000**						12 bulan	**1,387,168,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1,387,168,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19 Orang/bulan	1,387,168,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**147,199,150**						100 persen	**147,199,150**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2,075,500	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7 Paket	2,075,500	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	21,766,600	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Paket	21,766,600	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	10,154,050	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	10,154,050	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	22,970,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13 Paket	22,970,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	8,665,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Paket	8,665,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81,568,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 Laporan	81,568,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	**39,400,000**						100 persen	**39,400,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	39,400,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit	39,400,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	jenis		jenis	4 jenis	**249,937,640**						4 jenis	**250,357,640**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Laporan 3 Paket	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0 Laporan 3 Paket	2,420,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	10,150,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	237,787,640		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	237,787,640	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	**24,880,000**						100 persen	**24,880,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	14,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Unit	14,000,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6,000,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6 Unit	6,000,000	Kecamatan Tiumang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4,880,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8 Unit	4,880,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11,072,000**							**11,072,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**11,072,000**							**11,072,000**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	5,372,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		10 Dokumen	5,372,000	Kecamatan Tiumang
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5,700,000							5,700,000	Kecamatan Tiumang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		persen	60 persen	**11,270,000**						60 persen	**11,270,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	jenis		jenis	3 jenis	**11,270,000**						3 jenis	**11,270,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	11,270,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Dokumen	11,270,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	persen		persen	100 persen	**3,500,000**						100 persen	**3,500,000**	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	kasus		kasus	3 kasus	**3,500,000**						3 kasus	**3,500,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3,500,000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	1 Laporan	3,500,000	Kecamatan Tiumang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**6,700,000**						100 persen	**6,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jenis pembinaan yang dilakukan	kasus		kasus	7 kasus	**6,700,000**						7 kasus	**6,700,000**	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	6,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	4 Dokumen	6,700,000	Kecamatan Tiumang
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5,047,343,330**							**5,552,077,663**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	**1,414,228,650**						100 persen	**1,555,651,515**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Renja, LKjIP, LPPD, dan pelaporan lainnya	dokumen		dokumen	3 dokumen	**15,000,000**						3 dokumen	**16,500,000**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Dokumen	16,500,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	9 Orang	**974,108,450**						9 Orang	**1,071,519,295**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	974,108,450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	ASN	9 Orang/bulan	1,071,519,295	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase ketersedian Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Terpenuhinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Terpenuhinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Terpenuhinya Peket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket persen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket		Paket persen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	1 Paket 100 persen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**190,900,000**						1 Paket 100 persen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**209,990,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,072,400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	3,379,640	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,832,700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	28,415,970	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18,144,900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	19,959,390	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,850,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	37,235,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	33,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	88,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya Paket Mebel yang disediakan Terpenuhinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit Unit		Unit Unit	17 Unit 8 Unit	**14,650,000**						17 Unit 8 Unit	**16,115,000**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	14,650,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Membangkitkan identitas daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	8 Unit	16,115,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Laporan Laporan Laporan Laporan		Jenis Laporan Laporan Laporan Laporan	4 Jenis 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	**200,570,200**						4 Jenis 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	**220,627,220**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,200,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,004,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	15,404,400	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,350,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	4,785,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	180,216,200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	198,237,820	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik Terpenuhinya Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	persen Unit Unit Unit		persen Unit Unit Unit	100 persen 1 Unit 3 Unit 1 Unit	**19,000,000**						100 persen 1 Unit 3 Unit 1 Unit	**20,900,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur daerah	1 Unit	1,100,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	18,000,000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Membangkitkan identitas daerah	Persentase Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur daerah	3 Unit	19,800,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Terlaksananya Kordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	**45,149,500**						100 Persen	**49,664,450**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terlaksananaya Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Terlaksananya Monitoring di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Orang Kali		Orang Kali	355 Orang 6 Kali	**45,149,500**						355 Orang 6 Kali	**49,664,450**	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang Yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar, Mahasiswa dan ASN+ Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi FPK Bagi Generasi Muda+Jumlah Orang yang Mengikuti GNRM Bagi ASN Kab. Dharmasraya+ Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Bela Negara Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda				355 Orang 355 Orang	29,245,500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	355 Orang 355 Orang	32,170,050	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Rapat yang Terlaksana Bagi Pengurus FPK				0 Laporan 6 Kali	15,904,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa ,pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	0 Laporan 6 Kali	17,494,400	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	indikator program Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Terlaksanya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	partai Persen Persen		partai Persen Persen	1 partai 100 Persen 100 Persen	**3,389,913,880**						1 partai 100 Persen 100 Persen	**3,728,905,268**	
8	01	03	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	jumlah partai politik menerima bantuan hibah Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dalam bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	partai Orang		partai Orang	10 partai 300 Orang	**3,389,913,880**						10 partai 300 Orang	**3,728,905,268**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Pada Bimtek Pembinaan Administrasi Keuangan Partai Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Politik Jumlah Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan jumlah Rapat Yang terlaksana Oleh Tim Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik				0 Orang 30 Orang 100 oang 1 Kali 3 Kali Rapat	3,360,790,880	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan dan Monitoring di bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	0 Orang 30 Orang 100 oang 1 Kali 3 Kali Rapat	3,696,869,968	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Monitoring dan Pemantauan Situasi Politik				0 Laporan 10 Kali	29,123,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan dan Monitoring di bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	0 Laporan 10 Kali	32,035,300	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**45,047,200**						100 Persen 100 Persen	**49,551,920**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kali Kegiatan Kali		Kali Kegiatan Kali	2 Kali Kegiatan 6 Kali	**45,047,200**						2 Kali Kegiatan 6 Kali	**49,551,920**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Penyuluhan Narkoba Bagi Generasi Muda Jumlah Ranperda Tentang Narkoba yang di tetap Beserta Sosialisasinya				0 Orang 1 Kali 1 Kali	25,724,500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang 1 Kali 1 Kali	28,296,950	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Rapat Pengurus FKUB				0 Laporan 6 Kali	19,322,700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan 6 Kali	21,254,970	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Pelaksanaan Forum Kewasapadaan Dini MAsyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**153,004,100**						100 Persen	**168,304,510**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Pelaksanaan Forum Kewasapadaan Dini MAsyarakat Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing	Kali Kali		Kali Kali	18 Kali 12 Kali	**153,004,100**						18 Kali 12 Kali	**168,304,510**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				0 Orang 12 Kali 6 Kali	123,004,100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Pelaksanaan Forkopimda dan FKDM dan Jumlah Pemantauan Orang Asing	0 Orang 12 Kali 6 Kali	135,304,510	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing				0 Laporan 12 Kali	30,000,000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Membangkitkan identitas daerah	Jumlah Pelaksanaan Forkopimda dan FKDM dan Jumlah Pemantauan Orang Asing	0 Laporan 12 Kali	33,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
									TOTAL	**932,306,488,016**								**1,126,765,379,968**	

BAB 6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2020, 2021, dan proyeksi tahun 2022, maka proyeksi 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target RKPD 2022	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2024
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur							
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-	60,50	60,50	62.7	62.7
Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	49,71	57	57	60	60
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	85,61	65	87	70	90
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	91,73	92	92	95	95
Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	87,02	86,00	58,75	75,00	1,72	72,00
Rasio pemukiman layak huni	persen	85	-	88,65	88,65	91,45	91,45
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	79,76	69,1	69,1	69,75	69,75
Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-		28,54	28,54	28,83	28,83
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,36	71,82	71,95	72,34	72,55
Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,53	71,69	71,69	71,87	71,87
Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,55	8,48	8,48	8,49	8,49
Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,44	12,45	12,45
Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,32	89	89	89,17	89,17
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing							
Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	3,42	2,9	2,9	4,2	4,2
Gini rasio	indeks	0,275	0,268	0,265	0,265	0,260	0,260
PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	46,52	43,81	43,81	44,79	44,79
Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	13,59	3,25	3,25	3,4	3,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5	5,68	4,94	4,68	4,60
Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,67	6,08	6,06	5,72	5,7
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien							
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	46,58	65	65	70	70
Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96		3,194	3,194	3,322	3,322
Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B(63,44)	B	BB	BB	BB	BB
Nilai LPPD	Skor	3,5138		3,65		3,7	

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target RKPD 2022	Target RPJMD 2023	Target RKPD 2024
Indeks Kelembagaan	indeks	99,9					
Indeks SPBE	indeks	1,35	1,09	1,9	1,9	2,175	2,175
Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62,87	65	65	68	68
Publik service indeks	indeks	2,85		3,03	3,03	3,12	3,12
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	81,831	81	81	82	82
Persentase nagari mandiri	persen	0,3396	9,61	15,38	15,38	19,23	19,23
Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,828	0,8195	0,8195	0,8354	0,8354
Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,7086	0,7056	0,7056	0,7127	0,7127
Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,6038	0,595	0,595	0,601	0,601
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan							
Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks	-		70.21.00	70.21.00	73.68	73.68
Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	87,27	10	10	10	10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	63,38	64,93	64,93	65,47	65,47
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah							
Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-		3	3	6	6
Persentase peningkatan zakat	persen	2	-0,6	2	2	2	2
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	100	80	100	85	100

6.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditampilkan berdasarkan urusan pemerintah daerah, dimana proyeksi untuk tahun 2023 didasarkan pada realisasi tahun 2017 hingga tahun 2021, serta perkiraan capaian tahun 2022, serta rumusan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi maupun arah kebijakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga penetapan target kinerja/ proyeksi RKPD tahun 2023 di beberapa indikator berdasarkan urusan pemerintahan terdapat penyesuaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk target kinerja tahun 2023.

Adapun target kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 6-2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah Berdasarkan Urusan Tahun 2023

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	67,99	73	75,5
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94	106,49	106,94	107,94
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3	96,75	105,3	106,3
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	103,3	Persen	99,39	98,4	99,47	99,55
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	93,13	Persen	94,13	93,75	95,13	96,13
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	468	Orang	428	45,43	388	348
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	7614	orang	7758	88,04	7809	7828
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	95	53,45	96	97
01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka kematian bayi (AKB)	9	per 1.000 kelahiran hidup	19,5	8,98	18,6	17,6
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	3	per 100,000 kelahiran hidup	112	109,35	110	108
4	Prevalensi Stunting	12,8	indeks	12,42	11	12.03	11.65
3	Prevalensi Malnutrisi	25,3	Persen	25		22,15	19,65
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	27,5	Persen	29	60	31	33
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	39	Persen	41	51,92	45	50
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100	Persen	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100	Persen	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	Persen	100	100	100	100
9	Visite Rate	3,8	/ Jumlah Penduduk	4	4	4,5	5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	21,4	Persen	35,7	21,4	42,8	50
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	50	Persen	100	50	100	100
01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	50,19	57	60
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40	70,4	43	47
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	60	79,76	62	65
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	26,17	65	70
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	91,73	92	95
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35		5,56	5,77
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	44,73	60	65
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	5		10	10
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	Persen	5		5	10
01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
1	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	85,85	83,99	88,65	91,45
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,73	Persen	88	90,68	90,4	92,8
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	Persen	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	87.02.00	Persen	76.30.00	0,56	58.75	41.13.00
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95,96	Persen	55,74	50,36	60,66	65,57
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	8,52	Persen	0	1,14	10,01	11,12
01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	91	Persen	100	90	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	1	Persen	100	100	100	100

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	0	0	80	90
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	9	Persen	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	0	1	1
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	-	Persen	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	100	75	75
01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase PPKS yang tertangani	75	Persen	78	75	80	82
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Persen	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	Persen	100	100	100	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
02.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	Persen	75,62	73,04	77,84	78,92
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	Persen	26,32	93,86	27,56	29,32
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	41,36	Persen	42,56	120	43,19	44,36
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	Persen	100	100	100	100
02.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	Persen	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	95,23	Persen	95,23	100	96	98
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	Predikat/ Nilai	-	pratama	Pratama	-
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	Pratama	Pratama
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	Persen	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	0,002	Persen	0,002	0,002	0,002	0,001

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
02.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	27,75	Persen	33	27,872	43	53
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2.540	K.Kal/kap/hr	2.550	2.550	2.555	2.560
3	Skor Pola Pangan Harapan	85,6	indeks	87	91	87,5	88
02.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	23.52	Persen	28.52.00	-	32.93	37.34.00
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	100.00.00	Persen	100		100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	Persil	5		6	7
02.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
~~1~~	~~Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup~~	~~-~~	~~dokumen~~	~~2~~	-	~~2~~	~~2~~
2	indeks kualitas air	70	indeks	56,1	52,73	56,2	56,3
3	indeks kualitas udara	86,11	indeks	83,65	84,49	83,75	83,85
4	indeks kualitas tutupan lahan	40,95	indeks	43,03	42,7	45,12	47,2
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	6 Ha	Ha/Kawasan	3	2,1	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	6	Ha	5	2,1	5	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	8,92%	persen	10,00	11,34	12%	14
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	6,72%	persen	9,00	78,71	12%	15%
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	29	usaha/kegiatan	5	71,42	20	20
02.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase kepemilikan KTP-el	97,74	Persen	100	99,91	100	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35,55	Persen	70	54,72	80	90

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	87,17	Persen	92	91,57	95	97
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	Persen	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	Persen	85	100	87	90
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	-	Persen	85	0	87	90
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	4	12	15
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	4	12	15
02.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**						
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	0	Persen	0	19,23	11,59	17,31
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	0	Persen	0	7,69	0	11,58
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online		Persen	50	0	57,69	67,31
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	21,15	Persen	23,08	26,92	25	26,92
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	Persen	86	86	88	90
6	Jumlah Bumnag Bersama	0	unit	0	0	1	2
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	nagari	0	4	2	4
02.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
1	Angka kelahiran total	2,71	Persen	2,69	2,62	2,66	2,64
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81,1	Persen	81,15	81,3	81,2	81,25
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,29	Persen	10,27	8,17	10,25	10,23
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	100	Persen	100	100	100	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	100	Persen	100	100	100	100

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
02.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	-	Persen	60	0	61	62
2	V/C (volume capaciti Ratio)	-	indeks	0,2	0	0,2	0,2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	trayek	0	1	1	0
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	80	Persen	85	65,5	87	87
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	-	bobot	B	B	B	A
02.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**						
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD		38 OPD	100	38 OPD	38 OPD
		1 Nagari		1 Nagari		10 Nagari	20 Nagari
						10 SMP	20 SMP
						10 SD	20 SD
		1 Puskesmas		1 Puskesmas		5 Puskesmas	8 Puskesmas
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	aplikasi	43	43	10	15
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	aplikasi	11	68,78	65%	70%
02.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**						
1	persentase Koperasi Sehat	25	Koperasi	30		35	40
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	Usaha mikro	30		40	50
02.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	130.026	miliar rupiah	148	196,40	163.308	179.639
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	3	Persen	3	0	3,2	3,3
02.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**						
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	33	cabor	15	33	20	25
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	-	cabor	19	0	20	23

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	-	cabor	3	3	4	5
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	unit	7	8	8	9
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	-	Orang	1	18	2	3
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	-	unit	15	30	16	17
7	Jumlah pelatih bersertifikat	-	Orang	-	15	5	5
02.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	Persen	55	100	60	70
2	Jumlah Nagari Statistik	1	Nagari	1	4	20	30
3	Jumlah Kecamatan Statistik	-	kecamatan		1	2	4
02.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	web, aplikasi	4	4	5 Aplikasi	10 Aplikasi
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	Persen	2	5,26	40%	50%
02.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	30	Grup	30	30	60	90
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	Jenis	12	30	14	16
3	Persentase lembaga adat yang aktif	100	Persen	75	100	80	85
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	26	unit	25	21	25	23
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	Unit	10	56	65	100
02.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67.742	orang	63.000	202.273	73.500	84.000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6,25%	Persen	32,39	9,19	38,68	44,97
02.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	39,47	Persen	47,37	7,89	57,89	68,42
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	17,31	Persen	23,08	5,77	30,77	38,46
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
03.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**						

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Produksi Perikanan	22.185	Ton	25.509	27.182	26.784	28.123
03.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						
1	Jumlah kunjungan wisatawan	6.164	Orang	9164	101.394	36830	37567
2	Tingkat hunian akomodasi	-	Persen	6,548	22,05	20,091	20,493
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	800	Unit	32	75	36	40
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina		lembaga	13	16	21	29
03.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
1	Produksi Padi	66.664	ton	67.000	40.797	67.000	67.500
2	Produksi Jagung	4.069	ton	4.000	12.125	4.000	4.000
3	Produksi Kelapa sawit	104.992	ton	100.000	103.279	103.000	103.000
4	Produksi karet	29.689	ton	30.500	1.558,80	30.000	30.200
5	Produksi Daging	6.340	ton	1.200	1.558,80	1.200	1.200
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	49.043	ekor	42.000	51.380	42.025	42.100
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	%	35	48,63	37	39
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	25,13	Unit	30	815	35	40
03.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						
1	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	Persen	8	9,26	8,1	8,2
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	7,05	Persen	40	12,5	60	80
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
04.01	**Sekretariat Daerah**						
1	Nilai LPPD	3,51	bobot	3,6		3,65	3,7
2	Nilai SAKIP	63,44	bobot	65,5	63,98	70	72
3	Nilai RB	44,7	bobot	59,9	46,58	65	67,7
04.02	**Sekretariat DPRD**						
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)						
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	30	Persen	75	100	80	85

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
05.01	**Perencanaan**						
1	Capaian sasaran RPJMD	-	Persen	90		90	90
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD		Persen	90		90	90
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan		persen	90		90	90
05.02	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	persen	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	90	persen	90	85,73	90	90
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0,3	persen	0,3	7,66	0,275	0,25
05.03	**Kepegawaian**						
1	Indeks Profesionalitas ASN		Persen	62	62,87	65	68
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99,35	persen	94	14,39	95	96
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41,25	persen	42	79,04	45	47
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	100	Persen	100	100	100	100
05.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**						
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	33,63	persen	11	33,52	13	15
05.05	**Penelitian Dan Pengembangan**						
1	Indeks inovasi daerah	3	indeks	48,07	48,07	Sangat inovatif(65)	Sangat inovatif(70)
05.06	**Pengelolaan Perbatasan**						
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
06.01	**Inspektorat Daerah**						
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Bobot	2	3	3 DC	3 DC
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	Bobot	-	3	2	3
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
07.01	**Kecamatan**						
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80		80	90
2	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	persen	60		60	60

No.	Urusan/ Bidang/ Indikator	Realisasi 2020	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	-	Kasus	2		3	3
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
08.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**						
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	-	Persen	30	62,5	30	30
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	Persen	30	10,14	30	30
3	Persentase Pembinaan LSM	-	Persen	30		30	30
4	Jumlah Konflik Sosial	-	Kejadian	5	5	5	5
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	2	3	3

Tabel 6-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**		
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	62.7
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	70
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	41.13.00
	Rasio pemukiman layak huni	persen	91,45
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	69,75
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	28,83
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	71,98
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,87
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,49
	Harapan lama sekolah	tahun	12,45
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,17
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**		
	Pertumbuhan PDRB	persen	4,2
	Gini rasio	indeks	0,180
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	44,79
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,49
	Tingkat Kemiskinan	persen	6,02
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**		
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	70
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,322
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB
	Nilai LPPD	Skor	3,7
	Indeks Kelembagaan	indeks	
	Indeks SPBE	indeks	2,175
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	68
	Publik service indeks	indeks	3,12
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82
	Persentase nagari mandiri	persen	19,23
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8354
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7127
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,601
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**		
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks	73.68
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	10
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	65,47
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**		
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	6
	Persentase peningkatan zakat	persen	2
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	85

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa

jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 6-4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75,5
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107,94
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106,3
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	99,55
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	96,13
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	348
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	7828
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	97
01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**		
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	17,6
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	108
4	Prevalensi Stunting	indeks	11.65
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	19,65
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	33
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	50
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	5

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	50
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100
01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**		
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	60
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	47
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	65
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	70
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	95
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5,77
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	65
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	10
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	10
01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91,45
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92,8
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	41.13.00
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	65,57
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	11,12
01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	90
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	1
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	75
01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**		
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	82
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Persen	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
	tanggap darurat bencana daerah kota		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
02.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78,92
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	29,32
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	44,36
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100
02.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**		
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	98
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	Pratama
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100
6	Rasio KDRT	Persen	0,001
02.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**		
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	53
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2.560
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	88
02.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**		
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	37.34.00
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	7
02.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**		
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	2
2	indeks kualitas air	indeks	56,3
3	indeks kualitas udara	indeks	83,85
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	47,2
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	Kawasan Lahan: 1 Kawasan Air: 1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	14
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	15%
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	20
02.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**		
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	90
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	97
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian	Persen	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
	yang dilaporkan		
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	90
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	90
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	15
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	15
02.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**		
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	17,31
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	11,58
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	67,31
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	26,92
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90
6	Jumlah Bumnag Bersama	unit	2
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	4
02.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		
1	Angka kelahiran total	Persen	2,64
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,25
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,23
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	Persen	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100
02.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**		
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	62
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks	0,2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	87
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	A
02.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**		
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		38 OPD
			20 Nagari
			20 SMP
			20 SD
			8 Puskesmas
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	15
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	70%
02.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**		

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	40
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro	50
02.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**		
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	179.639
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	3,3
02.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**		
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	25
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	23
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	5
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	9
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	3
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	17
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	5
02.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**		
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	70
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	30
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	4
02.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**		
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	10 Aplikasi
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	50%
02.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**		
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	90
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	16
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	85
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	23
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	100
02.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**		
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	84.000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	44,97
02.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**		
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	68,42
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	38,46
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
03.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**		
1	Produksi Perikanan	Ton	28.123
03.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**		
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	37567
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	20,493
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	40
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	29
03.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**		
1	Produksi Padi	ton	67.500

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023
2	Produksi Jagung	ton	4.000
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103.000
4	Produksi karet	ton	30.200
5	Produksi Daging	ton	1.200
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	42.100
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**		
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	39
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	40
03.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**		
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8,2
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	80
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
04.01	**Sekretariat Daerah**		
	indikator terakhir :		
1	Nilai LPPD	bobot	3,7
2	Nilai SAKIP	bobot	72
3	Nilai RB	bobot	67,7
04.02	**Sekretariat DPRD**		
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)		
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen	85
2	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	Persen	100
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)		
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	90
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen	90
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
05.01	**Perencanaan**		
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	90
4	~~Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja~~	Bobot	23
5	~~Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja~~	Bobot	20
6	~~Nilai AKIP komponen capaian kinerja~~	Bobot	14
05.02	**Keuangan**		
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	90
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	0,25
05.03	**Kepegawaian**		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	68
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	96
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi		47
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100
05.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**		
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	15

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target 2023	
05.05	**Penelitian Dan Pengembangan**			
1	Indeks inovasi daerah	indeks	Sangat inovatif(70)	
05.06	**Pengelolaan Perbatasan**			
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
06.01	**Inspektorat Daerah**			
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3 DC	
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
07.01	**Kecamatan**			
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen	90	
2	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen	60	
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	Kasus	3	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			
08.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**			
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	30	
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	3	

BAB 7. PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan atas RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD Tahun 2023 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya, pembaharuan capaian kinerja pembangunan, dan saran/masukan yang diperoleh melalui fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023. Dokumen RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd

SUTAN RISKA